BANGKALAN
be part of the future

2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023

bappeda.bangkalankab.go.id bappeda_bangkalan Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Bangkalan Telp. 031-30632183

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

BANGKALAN
be part of the future

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023

bappeda.bangkalankab.go.id bappeda_bangkalan Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Bangkalan Telp. 031-30632183

BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak seara nasional pada Tahun 2024;

b. bahwa agar pembangunan di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, maka perlu menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah periode Tahun 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat Bupati untuk meneyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahu 2024-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomot 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2/D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor I E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor I/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Penjabat Bupati Bangkalan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah yang dipimpin oleh Camat.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
25. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

26. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) RPD bermaksud untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Kabupaten Bangkalan.
(3) Penyusunan RPD tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
a. penyelarasan target indikator makro dan Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
b. penggambaran sasaran pokok dan arah kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah Kabupaten Bangkalan sampai dengan Tahun 2025;

c. pedoman untuk Penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
e. sarana pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 4

(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN UMUM;
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS;
BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
BAB IX PENUTUP.
(2) Isi beserta uraian RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPD
Pasal 5

(1) Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD;
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. hasil rencana pembangunan daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPD
Pasal 6

(1) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Perubahan RPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman penyusunan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Penyusunan RKPD tetap berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 31 MAR 2023

Plt. BUPATI BANGKALAN,

MOHNI

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 31 MAR 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023
NOMOR 14 SERI E.

BANGKALAN
be part of the future

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023

bappeda.bangkalankab.go.id bappeda_bangkalan Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Bangkalan Telp. 031-30632183

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR GRAFIK xvi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen. I-12
1.3.1 Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. ..... I-12
1.3.2 Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur. I-14
1.3.3 Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan dengan RPJPD Kabupaten Bangkalan I-15
1.3.4 Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan dengan RKPD Kabupaten Bangkalan. I-16
1.3.5 Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan dengan Renstra Perangkat Daerah I-16
1.3.6 Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-17
1.4. Maksud dan Tujuan I-17
1.5. Sistematika Penulisan I-18

BAB II GAMBARAN UMUM II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah II-1
2.1.1.1 Luas Wilayah Dan Letak Geografis II-1
2.1.1.2 Topografi II-1
2.1.1.3 Geologi II-2

2.1.1.4 Hidrologi II-6
2.1.1.5 Penggunaan Lahan II-9
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-18
2.1.2.1 Kawasan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Baru II-18
2.1.2.2 Kawasan Agropolitan II-19
2.1.2.3 Kawasan Rawan Bencana II-20
2.1.3 Demografi II-21
2.1.3.1 Jumlah Penduduk II-21
2.1.3.2 Kepadatan Penduduk II-24
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-25
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi II-25
2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-25
2.2.1.2 Laju Inflasi II-32
2.2.1.3 Indeks Gini II-33
2.2.1.4 Kemiskinan II-34
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-35
2.2.2.1 Indikator Pendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) II-37
2.2.2.2 Indeks Kesalehan Sosial II-42
2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) II-44
2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) II-44
2.2.2.5 Stunting II-45
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-47
2.2.3.1 Seni Budaya II-47
2.2.3.2 Olahraga II-49
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-50
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar II-50
2.3.1.1 Pendidikan II-50
2.3.1.2 Kesehatan II-56
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-61

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman II-78
2.3.1.5 Pertanahan II-81
2.3.1.6 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-82
2.3.1.7 Sosial II-86
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar II-88
2.3.2.1 Tenaga Kerja II-88
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-90
2.3.2.3 Pangan II-92
2.3.2.4 Lingkungan Hidup II-95
2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-113
2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat Desa II-114
2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-116
2.3.2.8 Perhubungan II-118
2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika II-122
2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-124
2.3.2.11 Penanaman Modal II-128
2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga II-130
2.3.2.13 Statistik II-130
2.3.2.14 Kebudayaan II-131
2.3.2.15 Perpustakaan II-133
2.3.2.16 Kearsipan II-135
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-137
2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan II-137
2.3.3.2 Pariwisata II-140
2.3.3.3 Pertanian II-147
2.3.3.4 Energi dan Sumberdaya Mineral II-154
2.3.3.5 Perdagangan II-156
2.3.3.6 Perindustrian II-158
2.3.4 Fokus Layanan Urusan Pendukung II-160
2.3.4.1 Sekretariat DPRD II-160

2.3.4.2 Sekretariat Daerah II-160
2.3.5 Fokus Layanan Urusan Penunjang II-161
2.3.5.1 Perencanaan II-161
2.3.5.2 Keuangan II-162
2.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan II-162
2.3.5.4 Penelitian II-164
2.3.6 Fokus Layanan Urusan Pengawasan II-164
2.3.6.1 Inspektorat II-164
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-165
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-165
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-168
2.4.2.1 Jenis dan Fungsi Jalan II-168
2.4.2.2 Sarana Dan Prasarana Pendukung Transportasi II-168
2.4.2.3 Posisi Strategis II-168
2.4.2.4 Ketersediaan Air Bersih II-169
2.4.3 Fokus Iklim Investasi II-170
2.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban II-170
2.4.3.2 Pelayanan Perijinan II-172
2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia II-175
2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja II-175
2.4.4.2 Tingkat Ketergantungan II-176
2.5 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan II-177
2.5.1 BUMD PT Sumber Daya (Persero) II-178
2.5.2 BUMD Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan II-179
2.5.3 BUMD Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera II-180

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.1.1 Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah III-2
3.1.2 Neraca Daerah III-23

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-36
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-36
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....III-38
3.3 Kerangka Pendanaan III-43
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-43
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan III-61

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS..... IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan IV-2
4.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-4
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah IV-9
4.2. Isu–Isu Strategis Kabupaten Bangkalan IV-19

BAB V TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi Pembangunan Jangka Penjangan Daerah Kabupaten Bangkalan..... V-2
5.2 Misi Pembangunan Jangka Penjangan Daerah Kabupaten Bangkalan V-3
5.3 Tujuan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024- 2026..... V-8

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS... VI-1
6.1. Strategi.....VI-1
6.2. Arah Kebijakan VI-10
6.2.1 Kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 ..... VI-10
6.2.2 Kebijakan dalam RPJPD Tahun 2005-2025..... VI-36
6.2.3 Kebijakan dalam RPD Kabupaten BangkalanTahun 2024-2026... VI-48
6.3. Program Prioritas Daerah VI-72
6.3.1 Kebijakan dalam RPD Kabupaten BangkalanTahun 2024-2026... VI-72

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-2

7.2. Program Perangkat Daerah VII-3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1

8.1. Indikator Kinerja Utama VIII-2

8.2. Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah VIII-5

BAB IX PENUTUP..... IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Batuan Induk Kabupaten Bangkalan II-3
Tabel 2. 2 Kedalaman Spektip Tanah Kabupaten Bangkalan II-6
Tabel 2. 3 Tekstur Tanah Kabupaten Bangkalan II-6
Tabel 2. 4 Nama dan Panjang Sungai Kabupaten Bangkalan II-7
Tabel 2. 5 Kejadian Bencana di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 .....II-21
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022 .....II-22
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022 .....II-24
Tabel 2. 8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) II-26
Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) II-27
Tabel 2. 10 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 .....II-29
Tabel 2. 11 Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018-2022 .....II-31
Tabel 2. 12 Laju Implisit PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2022 .....II-32
Tabel 2. 13 Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 .....II-48
Tabel 2. 14 Data Seni dan Tradisi Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 .....II-48
Tabel 2. 15 Perkembangan Olahraga di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022.....II-50
Tabel 2. 16 Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2022 .....II-53
Tabel 2. 17 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Atas Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ....II-54

Tabel 2. 18 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar untuk Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2018 - 2022 ..... II-56
Tabel 2. 19 Perkembangan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-57
Tabel 2. 20 Indikator Kepuasan Masyarakat di RSUD Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-58
Tabel 2. 21 Perkembangan Tenaga Medis & Paramedis Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2018-2022 ..... II-58
Tabel 2. 22 Data AKB, AKI, dan Gizi Buruk di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-60
Tabel 2. 23 Jumlah Penderita Penyakit di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-61
Tabel 2. 24 Rata-Rata Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-61
Tabel 2. 25 Inventaris Daerah Irigasi Kabupaten Bangkalan II-62
Tabel 2. 26 Lokasi Sumber Mata Air Kabupaten Bangkalan (Debit Besar) II-63
Tabel 2. 27 Panjang Jalan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ..... II-65
Tabel 2. 28 Jaringan Drainase di Kabupaten Bangkalan II-66
Tabel 2. 29 Presentase Layanan Air Minum Tahun 2018-2022 ..... II-67
Tabel 2. 30 Presentase Layanan Sanitasi (Pengolahan air limbah domestik) Tahun 2018-2022 ..... II-69
Tabel 2. 31 Indikator dan Realisasi dan Target Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangkalan II-74
Tabel 2. 32 Rata-Rata Kualitas Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-77
Tabel 2. 33 Kondisi Perumahan dan Permukiman Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-77
Tabel 2. 34 Kondisi Pertanahan Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2019 ..... II-78
Tabel 2. 35 Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022 ..... II-79

Tabel 2. 36 Penanganan Bencana di Kabupaten Bangkalan 2018-2022 .....II-81
Tabel 2. 37 Kategori dan Jumlah PPKS Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022.....II-81
Tabel 2. 38 Situasi Umum Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 .....II-83
Tabel 2. 39 Data Kekerasan Anak dan Perempuan.....II-87
Tabel 2. 40 Skor Pola Pangan Harapan Berdasar Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 .....II-89
Tabel 2. 41 Kondisi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tingkat Kecamatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.....II-91
Tabel 2. 42 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Menjamin Kesimbangan Ekosistem dan Estetika Kota di Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 .....II-93
Tabel 2. 43 Jumlah Kepala Keluarga Terlayani Air Bersih dan Sanitasi Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.....II-94
Tabel 2. 44 Jumlah Timbulan Sampah Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2022.....II-98
Tabel 2. 45 Jumlah Sarana Prasarana Persampahan Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022.....II-102
Tabel 2. 46 Jumlah Limbah B3 Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2022 ...II-105
Tabel 2. 47 Keanekaragaman Hayati Di Kabupaten Bangkalan.....II-107
Tabel 2. 48 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum II-108
Tabel 2. 49 Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi Tahun 2018-2022.....II-109
Tabel 2. 50 Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) II-112
Tabel 2. 51 Rata-Rata Kualitas Infrastruktur Perhubungan II-117
Tabel 2. 52 Data Jalur Angkutan Umum Kabupaten Bangkalan.....II-117
Tabel 2. 53 Data Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Rambu-Rambu Keselamatan Jalan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 .....II-118

Tabel 2. 54 Jumlah Kendaraan Wajib Uji Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2016-2022.. ..... II-119
Tabel 2. 55 Kinerja Indeks SPBE Pemerintah Kabuaten Bangkalan Tahun 2019-2022 ..... II-121
Tabel 2. 56 Jumlah Sarana & Prasarana Komunikasi dan Informatika Di Kabuaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-122
Tabel 2. 57 Keragaman Koperasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 .... II-123
Tabel 2. 58 Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022..... II-124
Tabel 2. 59 Koperasi Aktif Menurut Jenisnya di Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2021..... II-124
Tabel 2. 60 Data Jumlah UMKM Tahun 2018-2022..... II-125
Tabel 2. 61 Organisasi Pemuda dan Olah Raga Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-126
Tabel 2. 62 Jumlah Elemen Data Statistik Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2022..... II-127
Tabel 2. 63 Data Kebudayaan Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022.. .. II-130
Tabel 2. 64 Perkembangan Kebudayaan Tahun 2018-2022 ..... .II-131
Tabel 2. 65 Perkembangan Perpustakaan Tahun 2018-2022 ..... .II-132
Tabel 2. 66 Perkembangan Jumlah Arsip yang Dikelola Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022..... .II-133
Tabel 2. 67 Perkembangan Produksi Perikanan Darat/Budidaya di Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2018 s/d 2021 (Ton) II-134
Tabel 2. 68 Perkembangan Produksi Perikanan Laut/Tangkap di Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2018 dan 2021 (Ton)..... II-136
Tabel 2. 69 Jumlah Objek Wisata Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2022..... II-138
Tabel 2. 70 Potensi Desa Wisata Kabupaten Bangkalan..... .II-139
Tabel 2. 71 Elemen Data Urusan Pariwisata di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 – 2021..... .II-142

Tabel 2. 72 Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2022.. ..... II-143
Tabel 2. 73 Tanaman Pangan Padi dan Jagung Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2022 ..... II-145
Tabel 2. 74 Tanaman Holtikultura Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-146
Tabel 2. 75 Tanaman Sayuran Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ... II-148
Tabel 2. 76 Produksi Perkebunan Kelapa dan Tebu Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 (Ton)..... II-149
Tabel 2. 77 Ternak Besar dan Unggas di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 (Ekor) II-150
Tabel 2. 78 Jumlah Prasarana dan Sarana Perdagangan Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-152
Tabel 2. 79 Jumlah Industri Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2022 ..... II-153
Tabel 2. 80 Capaian Indikator Sekretariat DPRD Kab Bangkalan Tahun 2018-2022..... II-158
Tabel 2. 81 Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kab Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-158
Tabel 2. 82 Capaian Indikator Perencanaan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022..... II-160
Tabel 2. 83 Capaian Indikator Keuangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022..... II-161
Tabel 2. 84 Capaian Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-161
Tabel 2. 85 Capaian Indikator Penelitian Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2022 ..... II-162
Tabel 2. 86 Capaian Indikator Inspektorat Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022..... II-163
Tabel 2. 87 Ketentraman, Ketertibab dan Kerukunan Hidup Bermasayarakat Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022..... II-164
Tabel 2. 88 Perkembangan Kinerja Bakesbangpol Tahun 2018-2022..... II-164

Tabel 2. 89 Jumlah Retribusi Perijinan Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2021 ..... II-171
Tabel 2. 90 Perkembangan KinerjaBakesbangpol tahun 2018-2022 ..... II-172
Tabel 2. 91 Jumlah Retribusi Perijinan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-174
Tabel 2. 92 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-176
Tabel 2. 93 Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangkalan 2018-2022 ..... II-178
Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... III-4
Tabel 3. 2 Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... III-5
Tabel 3. 3 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... III-7
Tabel 3. 4 Proporsi Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 s.d Tahun 2022 ..... III-9
Tabel 3. 5 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2022. ..... III-13
Tabel 3. 6 Perkembangan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2022. ..... III-16
Tabel 3. 7 Rata-Rata Pertumbuhan Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... III-17
Tabel 3. 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bangkalan III-24
Tabel 3. 9 Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022. ..... III-33
Tabel 3. 10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... III-37
Tabel 3.11 Defisit/Surplus Rill Anggaran Kabupaten Bangkalan III-39
Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Bangkalan III-42
Tabel 3.13 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ..... III-44

Tabel 3.14 Belanja Program Prioritas Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ..... III-53
Tabel 3.15 Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022..... III-57
Tabel 3.16 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ..... III-59
Tabel 3.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ..... III-62
Tabel 4. 1 Permasalahan Pembangunan.....IV-3
Tabel 5. 1 Keselarasan Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026 dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Tahap IV Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangkalan V-9
Tabel 5. 2 Keselarasan Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026 dengan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026..... V-12
Tabel 5. 3 Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 dan Targetnya V-19
Tabel 6.1 Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran VI-2
Tabel 6.2 Matrik Pembangunan Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur Dalam RPJMN 2020-2024 .....VI-11
Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Menurut RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2025.....VI-37
Tabel 6.4 Keselarasan Arah kebijakan 2024 -2026 dengan Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026 serta Arah Kebijakan dan Prioritas Tahap IV Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangkalan.....VI-51
Tabel 6.5 Program Prioritas Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.....VI-73
Tabel 6.6 Program Prioritas Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026..... VI-122

Tabel 6.7 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ..... VI-125
Tabel 6.8 Program Prioritas Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ..... VI-128
Tabel 6.9 Program Prioritas Peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ..... VI-132
Tabel 6.10 Program Prioritas Penurunan Angka Pengangguran di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ..... VI-135
Tabel 6.11 Program Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ..... VI-137
Tabel 7. 1 Gambaran Proyeksi APBD Kab. Bangkalan 2023 s/d 2026.....VII-3
Tabel 7. 2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 .....VII-4
Tabel 7. 3 Program Perangkat Daerah Disertai Pagu Indikatif.....VII-8
Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama VIII-4
Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan.....VII-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bangkalan II-4
Gambar 2.2 Jenis Tanah Kabupaten Bangkalan.....II-5
Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 .....II-20
Gambar 4.1 Konsideran Pembentuk Isu Strategis Kabupaten Bangkalan IV-1
Gambar 6.1 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan 2024 – 2026.....VI-48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Letak, Tinggi, dan Luas Kecamatan Kabupaten Bangkalan II-2
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-23
Grafik 2.3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2022 ..... II-23
Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-25
Grafik 2.5 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-29
Grafik 2.6 Rasio Gini Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2017-2022 ..... II-33
Grafik 2.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-35
Grafik 2.8 IPM Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ..... II-36
Grafik 2.9 Perbandingan IPM di Empat Kabupaten di Pulau Madura II-37
Grafik 2.10 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-38
Grafik 2.11 Perbandingan Indeks Kesehatan Kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur Tahun 2018-2021 ..... II-38
Grafik 2.12 Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur II-39
Grafik 2.13 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur Tahun 2018-2022 ..... II-40
Grafik 2.14 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022 ..... II-40
Grafik 2.15 Pengeluaran per Kapita Masyarakat Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur (Ribu Rupiah) Tahun 2018-2022 ..... II-41

Grafik 2.16 Indeks Pengeluaran Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 .....II-42
Grafik 2.17 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2022.....II-43
Grafik 2.18 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 .....II-44
Grafik 2.19 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022.....II-45
Grafik 2.20 Data Stunting di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022.....II-46
Grafik 2.21 Data Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2022 ....II-47
Grafik 2.22 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 ....II-52
Grafik 2.23 Indeks Ketahanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022 .....II-84
Grafik 2.24 Indek Resiko Bencana Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 .....II-85
Grafik 2.25 Persentase PPKS yang ditangani di Kabupaten Tahun 2018-2022 .....II-87
Grafik 2.26 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....II-88
Grafik 2.27 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2021.....II-94
Grafik 2.28 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2022.....II-95
Grafik 2.29 Indeks Kualitas Udara, Air, dan Tutupan Lahan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022.....II-96
Grafik 2.30 Distribusi Air Minum / Air Bersih Rumah Tangga Tahun 2021 (m3) II-112

Grafik 2.31 Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%) Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2021 .....II-114
Grafik 2.32 Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022.....II-115
Grafik 2.33 Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDN Di Kabupaten Bangkalan II-128
Grafik 2.34 Perkembangan Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2021 .....II-129
Grafik 2.35 Indeks Gemar Membaca Kabupaten Bangkalan 2019-2022 .....II-135
Grafik 2.36 Rasio Elektrifikasi Di Kabuaten Bangkalan Tahun 2017-2020 .....II-155
Grafik 2.37 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 .....II-157
Grafik 2.38 Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022 .....II-162
Grafik 2.39 Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan ADHB dan ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah) II-166
Grafik 2.40 NTP Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 dan 2017.....II-167
Grafik 2.41 NTP di Pulau Jawa Per April 2018.....II-167
Grafik 2.42 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 .....II-176

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah yang baik memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah karena akan akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk merencanakan pembangunannya.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dijelaskan bahwa dokumen rencana pembangunan daerah yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek daerah harus terkait/terhubung satu sama lain. Dokumen rencana suatu daerah juga harus mengacu pada rencana pembangunan daerah level atasnya maupun nasional sehingga pembangunan seluruh daerah terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada rencana pembangunan daerah jangka pendek (tahunan) harus disinkronkan dengan rencana anggaran (penganggaran), sehingga bisa dipastikan bahwa apa yang telah direncanakan dapat direaliasasikan karena didukung oleh anggaran yang sesuai. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut akan menjadi pedoman bagi para penyelenggara pembangunan, dunia usaha, masyarakat maupun *stakeholders* lainnya dalam melaksanakan aktifitasnya untuk mendukung pembangunan daerah menuju tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan akan berakhir pada Tahun 2023 ini. Demikian pula periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 akan berakhir di Tahun 2023. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada Tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Saat ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026. Begitupun dengan Kabupaten Bangkalan yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir di Tahun 2023 akan menyusun RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Selanjutnya dokumen RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ini bersifat *mandatory* yang harus dijadikan dasar oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 juga akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Kondisi tersebut terjadi dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanahkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Untuk itu di tahun 2023 hingga terpilihnya kepala daerah melalui pilkada serentak 2024 akan ada masa transisi di mana kepala daerah dijabat oleh pejabat kepala daerah (Penjabat (Pj.) Kepala Daerah) yang tidak memiliki visi-misi tersendiri. Walaupun demikian, untuk keberlanjutan pembangunan tetap dibutuhkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang bisa menjadi acuan perencanaan pembangunan tahun di periode transisi tersebut.

Namun demikian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 telah memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bangkalan sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Bangkalan, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahap kelima atau terakhir (periode 2005-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangka Daerah disamping memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Adapun tahapan dan tata cara penyusunan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketetapan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Bappeda menyusun Rancangan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan Rancangan Renstra PD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur yang berlaku;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan menyusun Rancangan Renstra PD Tahun 2024-2026 sesuai Rancangan RPD Kabupaten Bangkalan 2024-2026;
3. Bappeda melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD), yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
4. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan menjadi Rancangan Akhir RPD Kabupaten Bangkalan 2024-2026 dan Rancangan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
6. Fasilitasi review Rancangan Akhir RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang hasilnya berupa Surat Rekomendasi Gubernur;
7. Surat Rekomendasi menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPD Kabupaten Bangkalan sebelum ditetapkan;
8. Rancangan Akhir RPD Kabupaten Bangkalan yang telah disempurnakan, diajukan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
9. RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2024-2026;
10. Kepala Bappeda bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2024-2026;
11. Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
26. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E);
48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 55);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 65).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya tetap memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang masih terkait, baik dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah di daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan dokumen perencanaan pemerintah lainnya yang berada di level atasnya maupun dokumen perencanaan nasional. Misalnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Jawa Timur, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Induk pembangunan sektoral Kabupaten Bangkalan lainnya.

1.3.1. Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan melakukan penyelarasan terhadap kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional dan penelahaan terhadap isu –isu strategis nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Disamping itu, target-target nasional yang ditetapkan dalam arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Bangkalan juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026.

Visi-Misi Presiden yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia; dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita Kedua dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur;
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi;
   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi;
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi;

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Bberkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

1.3.2. Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Proses Penyusunan RPD Kabupaten Bangkalan juga berpedoman pada P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, kawasan strategis dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Visi Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah: " Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong" dengan 4 misi terdiri dari: 1). Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok,

antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah; 2). Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; 3). Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan; dan 4). Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

1.3.3. Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan dengan RPJPD Kabupaten Bangkalan

Dalam penyusunannya, RPD Tahun 2024-2026 telah menyesuaikan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 dengan visi "*Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, Dan Jasa Yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani*". Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu; 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 2) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan; 3) Membangun sarana prasarana wilayah penunjang yang berkelanjutan bagi terciptanya iklim investasi yang mendorong pembangunan daerah; dan 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait 4 Misi RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 sudah dijabarkan kedalam substansi RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 menjadi 4 Tujuan yaitu;

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Menurunkan angka kemiskinan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwwasan lingkungan; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari 4 tujuan RPD tersebut lebih rinci lagi dijabarkan menjadi 11 indikator tujuan, 23 sasaran serta 37 indikator sasaran yang dijadikan sebagai prioritas daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

1.3.4. Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan dengan RKPD Kabupaten Bangkalan

Setelah RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ditetapkan, maka selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Selain berpedoman pada dokumen RPD, penyusunan RKPD juga mengacu pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) setiap tahunnya.

RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah, dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan kepala daerah tentang RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

1.3.5. Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan dengan Renstra Perangkat Daerah

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.

Renstra PD sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sessuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Penyusunan Renstra PD dilakukan secara

parallel dengan proses penyusunan RPD Kabupaten. Namun, mengingat Renstra PD harus mengacu pada RPD, maka penetapan Renstra PD dilakukan paling lambat sebulan setelah RPD ditetapkan.

1.3.6. Hubungan Antara RPD Kabupaten Bangkalan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPD juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan multi sektor dan dari berbagai kesepakatan internasional antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDG's*), Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib terkait pelayanan dasar, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dan berbagai dokumen perencanaan lainnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 adalah memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh *stakeholders* dalam dalam merencanakan, membangun kesepamahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024 - 2026;
2. Sebagai bahan penyelarasan perencanaan dan keuangan dengan visi dan misi dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bangkalan;
3. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum Kabupaten Bangkalan, permasalahan dan isu strategis, serta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
4. Sebagai pedoman untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;

5. Sebagai bahan/rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD;
6. Sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, serta sebagai tolok ukur dalam mengukur kinerja tahunan Kabupaten Bangakalan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) terdiri dari 9 (sembilan) BAB yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran kondisi daerah pada aspek geografi dan demografi, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat pemetaan permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Bab V Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan mengenai tujuan, dan sasaran yang telah disepakati, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan pembangunan.

Bab VI Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat tentang kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang dirumuskan dalam Renstra PD dan menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan RPD, selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode RPD.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah periode RPD berakhir.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1 Luas Wilayah Dan Letak Geografi

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian utara dan merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura. Luas wilayah Kabupaten Bangkalan adalah 1.260,14 km², yang secara administratif Pemerintahan terbagi dalam 18 (delapan belas) Kecamatan, 8 (delapan) kelurahan, 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa dan 1 (satu) Pulau Karang Jamuang. Ditinjau dari letak geografis, dimana secara eksistensial, berada dikawasan Pulau Madura dengan titik koordinat berada pada posisi 112°40'06" - 113° 08' 04" Bujur Timur dan 6° 51' 39" - 7° 11' 39" Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Sampang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selat Madura;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selat Madura.

2.1.1.2 Topografi

A. Kemiringan Lahan

Kemampuan tanah di Kabupaten Bangkalan dilihat dari kemiringannya sebagian besar memiliki kemiringan 2-15° yaitu sekitar 50,45% atau 63.002 Ha. Dan kemiringan 0-2°sekitar 45,43% atau 56.738 Ha. Sedangkan, tekstur tanah sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 116.267 Ha

atau sekitar 93,10% dan untuk kedalaman spektip tanah di Kabupaten Bangkalan memiliki kedalaman >90 cm yaitu seluas 64.130/64.131 Ha atau 51,35%.

B. Ketinggian Lahan

Dilihat dari topografi, Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-100m di atas permukaan air laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai, seperti Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh mempunyai ketinggian antara 2-10m di atas permukaan air laut. Sedangkan, wilayah yang terletak pada bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19-100m di atas permukaan air laut. Lokasi tertinggi terletak di Kecamatan Geger dengan ketinggian 100m diatas permukaan laut.

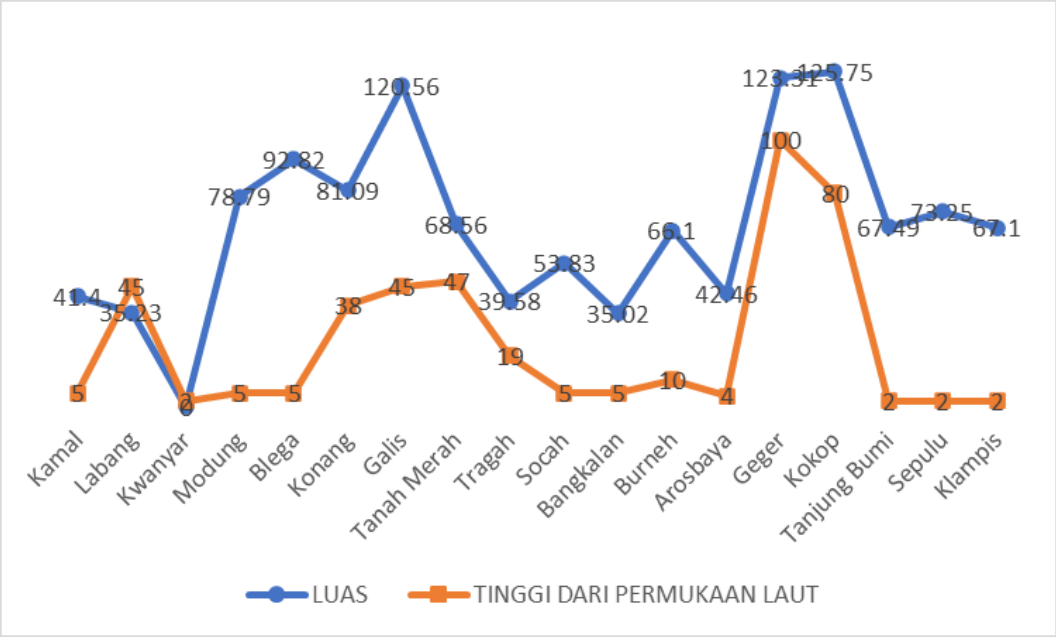

Grafik 2.1
Letak, Tinggi,dan Luas Kecamatan Kabupaten Bangkalan
Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

2.1.1.3 Geologi

A. Batuan

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan meliputi; Allufium seluas 24.400 Ha atau sekitar 19,54%; Elistosin, Fasies, Sedimen seluas

35.594 Ha sekitar 28,50%; Fliose, Fasies Batu Gamping seluas 47.294 Ha atau sekitar 37,87%; dan Miosen, Fasies Sedimen seluas 17.600 Ha atau 14,09%. Luas dan kondisi Geologi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Jenis Batuan Induk Kabupaten Bangkalan

NO.	URAIAN	LUAS (HA)	%
1	Allufium	24.400	19,54
2	Elistosin, Fasies, Sedimen	35.594	28,50
3	Fliose, Fasies Batu Gamping	47.294	37,87
4	Miosen, Fasies Sedimen	17.600	14,09
	Jumlah	124.888	100

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Bangkalan

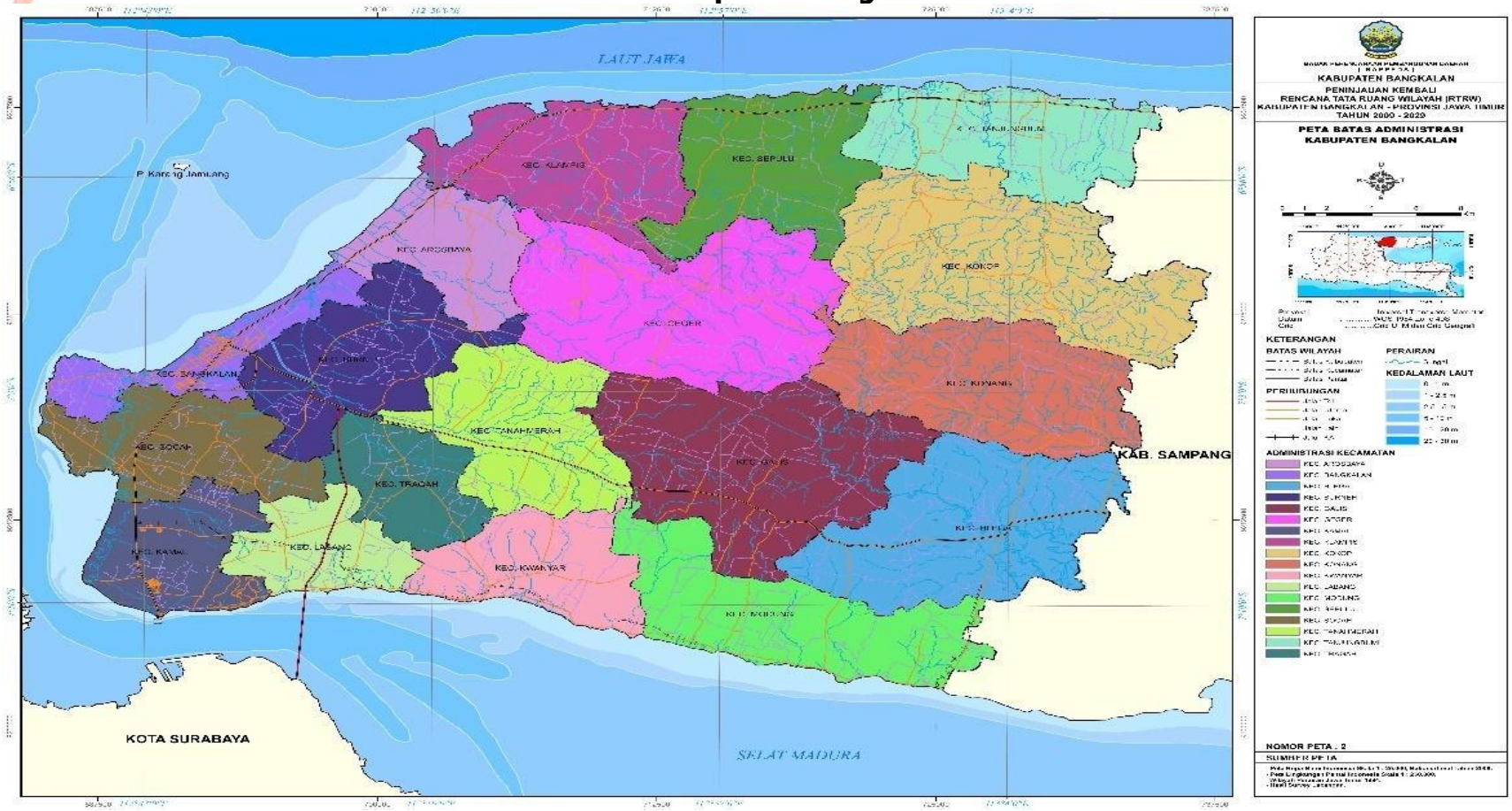

B. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bangkalan meliputi Alufial Hidromurf; Alufial Kelabu Kekuningan; Assosiasi Hidromurf; Litosal; Regusal Coklat Kekuningan; Komplek Graund Gorset Kelabu dan Lits; Grumosal Kelabu; Kpl. Grumosal Kelabu Litosal; Kpl. Mediteran Coklat dan Litosal; Kpl. Mediteran Merah dan Litosal; Kpl. Mediteran, Grumosal, Regusal Litosal. Gambaran dan luas selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini:

Gambar 2.2
Jenis Tanah Kabupaten Bangkalan

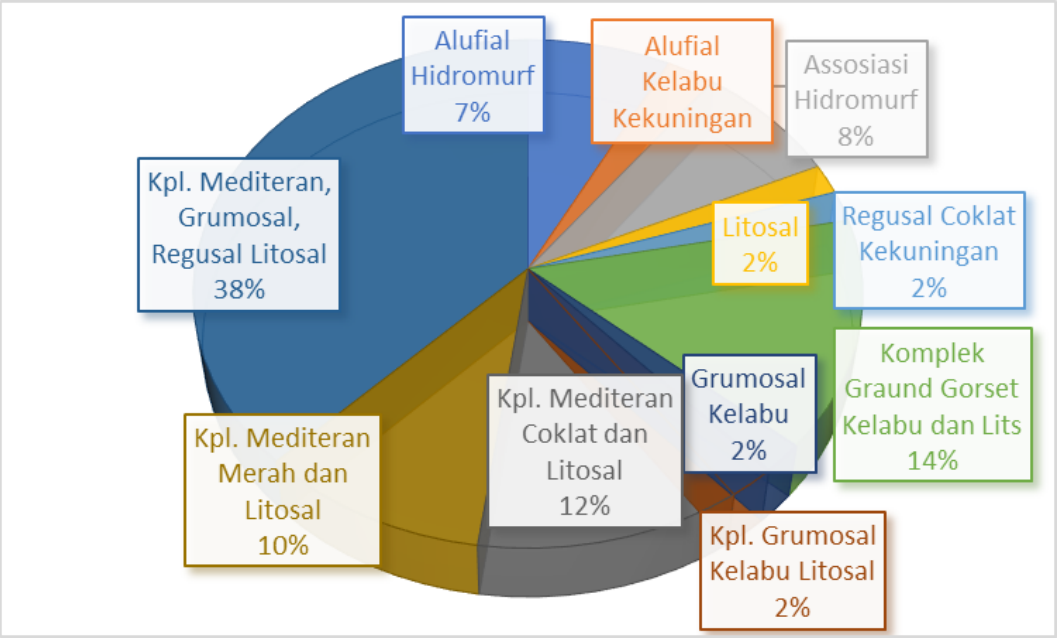

Sumber Data : BPS Kab Bangkalan Tahun 2021

Sedangkan, kedalaman spektip tanah menggambarkan ketebalan tanah dan sejauh mana akar tanaman dapat berkembang. Besarnya diukur dari permukaan tanah sampai dengan lapisan di mana akar tanama n tidak dapat lagi menembusnya. Lapisan tersebut biasanya berupa penghalang fisik yang berupa batuan atau lapisan kedap akar. Pada keadaan tertentu lapisan tersebut dapat berupa suatu lapisan yang secara kimia mengandung racun yang mematikan akar tanaman. Kedalaman efektif tanah yang tersebar di Kabupaten Bangkalan terletak pada kedalaman 0->90 cm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Kedalaman Spektip Tanah di Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

NO.	URAIAN	LUAS (HA)	%
1	0 cm - 30 cm	8.044	6,44
2	30 cm - 60 cm	14.293	11,44
3	60 cm - 90 cm	38.421	30,76
4	>90 cm	64.130	51,35
Jumlah		124.888	100

Sumber Data : BPS Kab Bangkalan, 2023

Tekstur tanah adalah kasar halusnya bahan padat organik tanah berdasarkan perbandingan fraksi pasir, lempung debu dan air. Tekstur ini akan berpengaruh terhadap pengolahan tanah dan pertumbuhan tanaman terutama dalam mengatur kandungan udara dalam rongga tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di tanah tersebut. Tekstur tanah di Kabupaten Bangkalan bertekstur tanah halus (liat), sedang, hingga kasar dengan luasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Tekstur Tanah Di Kabupaten Bangkalan

NO.	URAIAN	LUAS (HA)	%
1	Sedang	116.267	93,10
2	Halus	8.016	6,42
3	Kasar	605	0,48
Jumlah		**124.888**	**100**

Sumber Data : BPS Kab Bangkalan, 2023

2.1.1.4 Hidrologi

Sebagai bagian dari siklus hidrologi, di Kabupaten Bangkalan terdapat sejumlah mata air, waduk, dan sungai. Pola aliran permukaan dapat dilihat dari pola aliran sungai yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sungai-sungai utama dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangkalan bermuara di selat Madura dan Laut Jawa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangkalan. Nama dan panjang sungai di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada dibawah.

Tabel 2.4
Nama dan Panjang Sungai Kabupaten Bangkalan

NO.	URAIAN	NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)
1.	Kamal	Gulung	2,15
		Kebun	2,05
		Telang	10,15
2.	Labang	Gladak Cina	3,25
3.	Kwanyar	Jangjang	5,05
		Kolpoh	16,15
4.	Modung	Jangklompang	7,10
		Nangger	2,15
		Lekesepat	6,55
		Sbr. Kolla	5,15
		Sikecil	6,65
5.	Blega	Blega	9,95
		Lekesenga	3,15
		Cetek	2,75
		Konyak	5,25
		Pandean	9,95
6.	Konang	Naden	12,15
		Jantu	2,15
		Sambiyan	5,15
		Rampasan	7,05
		Konang	7,15
		Gubugan	5,55
		Bancelok	2,15
		Sawahdalem	4,05
		Karangnata	1,35
7.	Galis	Pandean	9,95
		Jangklompang	7,10
		Jangmarang	2,25
		Lembungselor	4,85
		Tlagah	3,55
		Bancelot	6,05
		Olbek	8,15
		Labisana/Labisani	3,15
8.	Tanah Merah	Pancetan	5,53
		Babusong	3,25
		Pangeleyan	2,15
		Mortengah	2,55
		Seresi	5,15
		Sbr. Pettong	3,25
		Sabupuspa	1,55
		Rangka	2,15

NO.	URAIAN	NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)
		Dlambah Laok	3,55
		Nyantren	3,25
		Pakem	3,55
9.	Tragah	Legung	4,15
		Sbr. Pocong	7,35
10.	Socah	Gladak Landung	8,25
		Jambu	7,55
11.	Bangkalan	Bangkalan	6,25
		Bancaran	5,25
		Serpang	7,75
12.	Burneh	Jangjang	3,25
		Bubut	5,19
		Curga	5,75
13.	Arosbaya	Taburjan	1,85
		Asaemtanto	7,20
		Tambangan	4,00
		Balung	5,05
14.	Geger	Lutung	2,05
		Ombul	5,15
		Klubaikan	2,15
		Polongan	2,25
		Jerdabung	3,15
		Bongbaru	2,55
		Pakem	3,25
		Kalajen	3,55
		Calteng	7,05
		Sbr. Pocong	2,15
		Dungruduk	3,25
		Agung	3,15
15.	Kokop	Durjan	6,15
		Muara	3,55
		Kemuning	1,56
		Pokaan	1,55
		Bulengleng	3,55
		Aengkoning	2,55
		Dupok	5,95
		Brungbung	1,55
		Kirkir	3,05
		Purwo	3,15
		Lebbeng	2,15
		Sbr. Agung	4,15
		Pocet	4,15
16.	Tanjung Bumi	Tambak	9,15

NO.	URAIAN	NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)
		Torpong	7,05
		Budduk	7,15
		Tambak Pocok	4,75
		Tambeng	22,15
17.	Sepulu	Serogan	7,55
		Janger	2,55
		Dangah	1,15
		Sangkeyah	2,25
		Mocangan	3,55
		Gladakmati	7,55
		Gangseyan	2,15
		Lembung	3,25
18.	Klampis	Patemon	1,85
		Bupeng	2,15
		Larangan	1,75
		Manonggal	2,15
		Nangsangkan	1,25
		Ganggakap	2,15
		Pajung	3,15
		Brumbung	1,55

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Selain dipengaruhi oleh adanya sungai, kondisi hidrologi di Kabupaten Bangkalan juga dipengaruhi oleh beberapa sumber air. Sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Bangkalan mempunyai kualitas air baku yang cukup baik untuk kebutuhan irigasi maupun air bersih.

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Kabupaten Bangkalan merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura dan Wilayah Indonesia Timur mempunyai potensi pengembangan wilayah yang cukup prospektif dengan luas wilayah sebesar 1.260,14 Km^2 yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, kawasan militer, dan lain-lain.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh kegiatan pertanian berupa pertanian sawah irigasi, lahan kering, perkebunan, maupun tegalan. Dalam perkembangannya, penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan terkait dengan pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman, fasilitas umum maupun untuk

pengembangan industri. Pengembangan pemanfaatan lahan yang cukup terlihat adalah pengembangan kawasan Suramadu. Setelah dibukanya jalur atau akses Suramadu maka kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan terpadu khususnya di sekitar kawasan kaki jembatan Suramadu.

Data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan KLHS P-RPJMD tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Bangkalan masih mencukupi kebutuhan lahannya untuk pemanfaatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan penggunaan data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang ada dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi KLHS.

Saat ini kawasan tersebut masih belum dikembangkan secara maksimal, lahan yang ada di sepanjang kanan maupun kiri jalur menuju jembatan masih berupa lahan kosong yang masih dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun tegalan, sedangkan disepanjang koridor jalan utama mulai tumbuh kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal berupa warung-warung non permanen yang menjual souvenir, makanan, maupun minuman. Kondisi yang kurang teratur dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan kumuh pada kawasan tersebut. Sehingga perlu pengendalian maupun pengaturan lebih lanjut pada kawasan tersebut.

Secara garis besar penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan dibagi dalam dua kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya meliputi:

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung terbagi atas kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan perlindungan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, disamping kawasan rawan bencana alam. Terkait dengan klasifikasi kawasan lindung, berikut dapat dikemukakan informasi masing-masing kawasan sebagaimana di bawah ini:

1. Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Bangkalan terdiri dari taman wisata alam. Pada dasarnya kawasan pelestarian alam juga merupakan kawasan lindung yang harus tetap dilestarikan sehingga dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata. Kriteria kawasan wisata adalah sebagai berikut:

- Kawasan yang ditunjuk mempunyai keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;
- Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk;
- Mengandung satwa buru yang dapat dikembangbiakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa;
- Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

Kawasan lindung dengan kriteria diatas pada wilayah Kabupaten Bangkalan terdapat di Kecamatan Geger yaitu Kawasan wisata Gunung Geger yang merupakan kawasan dengan ketinggian 125 mdpl dengan luas 30,2 Ha.

2. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: lingkungan bangunan non gedung, lingkungan bangunan gedung serta halamannya. Kawasan tersebut memiliki kriteria antara lain: (1) mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; dan (2) Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh suatu daerah serta keberadaanya memerlukan upaya konservasi.

a. Lingkungan Bangunan Non Gedung

Lingkungan Bangunan non gedung merupakan suatu tempat yang dapat diperuntukkan *sebagai cagar budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan yang harus dilestarikan* antara lain: Makam Aer Mata Ratu Ebuh dan

Makam Agung di Kecamatan Arosbaya dan Makam Syaichona Kholil di Kecamatan Bangkalan.

b. Lingkungan Bangunan Gedung dan Halamannya

Lingkungan Bangunan gedung dan halamannya merupakan cagar budaya yang bersifat pelestarian terhadap bangunan kuno. peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan sebagai ciri cagar budaya diantaranya: Klenteng Eng An Bio di Kecamatan Bangkalan dan Mercusuar di Kecamatan Socah.

c. Kawasan Perlindungan Bawahannya

Kawasan perlindungan bawahannya mencakup kawasan hutan lindung dan kawasan karst 1. Hutan Lindung, merupakan kawasan dengan sifat khas yang mampu memberikan pelindungan kawasan sekitar dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan dan tidak dapat dialihkan peruntukannya.

Hutan lindung di Kabupaten Bangkalan total seluas 654,8 Ha di Desa Gebang seluas 10,6 Ha, Desa Lajing seluas 150,6 Ha, Desa Mrandung seluas 194,0 Ha, Desa Maneron seluas 29,7 Ha, Kelurahan Pejagan seluas 32,3 Ha. Desa Labuhan, Desa Lembung Paseser, Desa Aeng Tabar, Desa Banyusangka seluas 169 Ha dan Desa Martajasah seluas 55,6 Ha.

Kawasan ini bisa dikategorikan sebagai kawasan lindung terbatas. Karena sifat yang dimilikinya maka kawasan yang memiliki perbukitan Kars mutlak tidak bisa di eksploitasi dan diperlakukan konservasi.

Kawasan perlindungan Bentang Alam Karst di Kabupaten Bangkalan berada di Kecamatan Socah, Burneh, Galis, Tragah dan Blega. Kawasan tersebut apabila tidak dilindungi hidrologi dan ekoligisnya akan terjadi bencana longsor dan banjir serta harus di kelola dengan baik.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar sungai, kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar danau/waduk, adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat

penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Waduk di Kabupaten Bangkalan direncanakan di Kecamatan Blega.

Kawasan di sekitar mata air, adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air. Perlindungan di sekitar mata air di wilayah Kabupaten Bangkalan sekurang-kurangnya jarak jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Kawasan mata air ini hampir menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.

Kawasan sempadan pantai, adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan diarahkan pada sepanjang pantai berjarak sekitar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pantai-pantai yang perlu dilindungi adalah pantai yang terdapat di Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Klampis, Arosbaya, Kamal, Socah, Labang, Kwanyar, Modung dan Kecamatan Bangkalan.

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang sungaibuatan/kanal/seluruh jaringan irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan sempadan sungai dilakukan dengan pembebasan selebar 100 meter di kiri kanan sungai bagi sungai yang berada di luar wilayah permukiman, 50 meter pada kiri kanan anak-anak sungai yang berada di luar permukiman, dan 15 meter dari kiri kanan sungai bagi sungai besar dan anak-anak sungai yang berada di sekitar permukiman.

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Hutan Rakyat

Wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki kawasan hutan yang tersebar secara tidak merata pada wilayah Kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian pinggiran, dimana diantara kawasan hutan ini masih ada yang dimanfaatkan sebagai hutan rakyat. Jenis hutan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan didominasi oleh kawasan hutan rakyat yang tersebar merata di 16 Kecamatan. Hutan Rakyat yang berada di Kabupaten Bangkalan berada

di 16 Kecamatan: Kecamatan Arosbaya 147.00 Ha, Kecamatan Kokop 224,2 Ha, Kecamatan Tanah Merah 1231,31 Ha, Kecamatan Kwanyar 846.31 Ha, Kecamatan Konang 762.00 Ha, Kecamatan Klampis 1253 Ha, Kecamatan Sepulu 1573 Ha, Kecamatan Burneh 200 Ha, Kecamatan Tragah 732,69 Ha, Kecamatan Tanjung Bumi 535,50 Ha, Kecamatan Labang 296.96 Ha, Kecamatan Modung 1029,00 Ha, Kecamatan Galis 1744,65 Ha dan Kecamatan Socah 349,00 Ha.

2. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi terbatas diwilayah Kabupaten Bangkalan terdiri dari hutan tanaman jenis mahoni seluas 61,00 Ha, jenis lamtoro gung serta jenis sawo kecik seluas 55,20 Ha. Selanjutnya untuk hutan produksi tetap merupakan hutan dengan jenis accasia seluas 1.869,75 Ha serta hutan jati seluas 101,50 Ha. Kawasan hutan konservasi terdapat di sekitar pantai yaitu jenis hutan bakau yang banyak terdapat di sepanjang pantai seluas 87,85 Ha.

Kawasan hutan produksi luas seluruhnya adalah 4.395,85 Ha yang terdapat di Kecamatan Kwanyar, Tragah, Blega, Modung, Konang, Galis, Bangkalan, Tanjung Bumi, Kokop, Sepulu, Klampis, dan Kecamatan Geger.

3. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan Pertanian tanaman pangan seluas 30.002 Ha, hal ini sesuai dengan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam RTRW Kabupaten Bangkalan. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bertujuan untuk menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat. Lahan pertanian pangan di Kabupaten Bangkalan terbagi atas kawasan pertanian lahan basah (irigasi) dan kawasan pertanian lahan kering. Kawasan lahan basah dan kering terletak di hampir 18 Kecamatan.

4. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri dari kawasan perikanan pertambakan dan kawasan perikanan sungai. Untuk kawasan perikanan pertambakan, terdapat di seluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Labang, Tragah, Tanah Merah, Konang, Galis, Burneh, Kokop dan Kecamatan Geger dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan untuk perikanan pertambakan. Sedangkan kawasan perikanan sungai terdapat di Kecamatan Blega, Socah, Tanjung Bumi, Kokop dan Kecamatan Konang.

5. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan, di mana luas yang terdata sebesar 541,98 Ha. Mengingat jenis perkebunan yang juga menggunakan tegalan, maka sebenarnya termasuk luas perkebunan adalah 12.817,04 Ha.

6. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan di Kabupaten Bangkalan dibagi dalam 2 (dua) kawasan yaitu Kawasan ternak kecil meliputi kluster 1 (satu): Kec. Tanah Merah, Tragah, Kwanyar dan Labang. Kluster 2 (dua) yaitu Kec. Arosbaya, Geger, Klampis dan Sepulu. Kawasan ternak besar meliputi Kluster 1 (satu) yaitu Kec. Bangkalan, Labang, Kamal, Arosbaya, Klampis dan Kokop. Kluster 2 (dua) yaitu Kec. Burneh, Tanah Merah, Tragah, Kwanyar, Galis, Blega dan Konang. Masing-masing kawasan sudah dilengkapi dengan fasilitas peternakan yaitu rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan.

7. Kawasan Pariwisata

Ditinjau dari karakteristik dan potensi obyek-obyek wisatanya, sektor kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu kawasan wisata alam, wisata religi, dan wisata minat khusus/budaya. Selanjutnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan ini dapat dikembangkan melalui pembentukan zona wisata, yaitu:

- ***Zona Pesisir Selatan***, meliputi obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Kwanyar, Labang dan Kamal (Pantai Rongkang, Wisata Bahari Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, Wisata gua Kecamatan Labang, Kolam Renang Impian Maya Kwanyar, Pantai Kutai Sukbar, dan Kapal Rindu, jembatan Rindu).
- ***Zona Kota Bangkalan***, meliputi obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Socah, Bangkalan dan Burneh (Wisata pemandian Jokotole di Kecamatan Socah, Mercusuar Sembilangan di Kecamatan Bangkalan, Wisata kebun salak dan kolam laggundih di Desa Kramat, Wisata budaya Makam Syaichona Kholill di Kecamatan Bangkalan, wisata sejarah benteng Belanda dan museum purbakala di Kecamatan Bangkalan dan wisata budaya pagelaran Kerapan sapi di desa Bancaran Kecamatan Bangkalan, Wisata Bahari Sungai Bancaran di Kecamatan Bangkalan serta kawasan wisata minat khusus disekitar interchange morkepek).
- ***Zona Pesisir Utara***, meliputi obyek wisata di Kecamatan Arosbaya, Sepulu dan Tanjungbumi (Pesarean Aer Mata Ebuh di Kecamatan Arosbaya, wisata pantai Maneron di Kecamatan Sepulu, wisata Pantai Siring Kemuning di Kecamatan Tanjungbumi, wisata batik madura di Kecamatan Tanjung Bumi, Pantai Wisata Talango di Kecamatan Tanjung Bumi, serta Mangrove Labuhan di Kecamatan Sepulu).
- ***Zona Gunung Geger***, meliputi obyek wisata Gunung Geger yang terdapat di Kecamatan Geger Elevasi 125 mdpl dengan suhu rata-rata 28°C pada siang hari, suhu rata-rata 24°C pada malam hari, kecepatan angin kurang lebih 10 knot, merupakan satu-satunya daerah sejuk di Kabupaten Bangkalan dan merupakan daerah yang tertinggi di Pulau Madura. Sebuah arca yang menyerupai Duarapala dengan memegang tongkat, terpahat pada salah satu bagian tebing kapur. Kemungkinan besar masih banyak peninggalan purbakala yang belum ditemukan ataupun terkubur. Peninggalan budaya sejarah masa lalu yang tak ternilai harganya Dua buah gua yang berada di dekat makam RA Tunjung Sekar,

dinamakan gua putra dan gua putri. Pintu masuk kecil dan merupakan satu-satunya masuk ke gua dengan cara membungkuk. Gua ini dibentuk dan dindingnya halus, tidak terdapat stalaktit maupun stalakmit. Pada bagian dasar gua terdapat lobang besar dan lebih menyerupai sebuah bentuk makam.

8. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Bangkalan terbagi atas kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan, luas kawasan permukiman perdesaan sebesar 10.561,98 Ha, sedangkan luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 6.892,30 Ha.

9. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Bangkalan terletak di Kecamatan Burneh, Kwanyar, Arosbaya, Modung, Tanjung Bumi, Blega, Galis, Kamal, Socah, Geger, Kokop, Tragah dan Kecamatan Labang dengan jenis tambang berupa galian golongan C yang meliputi, pasir, batu gunung, phospat, kapur, pasir kwarsa, dan batu gips.

Lokasi penyebaran bahan galian golongan C di Kabupaten Bangkalan berdasarkan peta kontur dan peta geologi adalah sebagai berikut:

a) Batu Kapur/Batu Gamping *(Limestone)*

Tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan kecuali Kecamatan Bangkalan.

b) Dolomit

Dolomit tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Kamal, Tragah, Labang dan Kecamatan Kwanyar.

c) Batu Phospat *(Phospate)*

Batu Phospat tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yaitu, Kecamatan Labang, Modung, Blega, Tragah dan Kecamatan Kwanyar.

d) Pasir Kwarsa *(Quart Sand)*

Pasir Kwarsa tersebar di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Burneh, Tanjung Bumi, Kokop, Galis, Sepulu dan Kecamatan Klampis.

e) Lempung *(Clay)*

Lempung tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tragah, Modung, Blega, Galis, Sepulu, Kokop, Geger, Klampis, Konang dan Kecamatan Tanjung Bumi.

10. Kawasan Perdagangan

Kawasan perdagangan di Kabupaten Bangkalan Bangkalan terletak di area ibukota kecamatan yang meliputi Kecamatan, Socah, Kamal, Burneh, Arosbaya, Sepulu, Galis, Geger, Blega, Tanah Merah, Kokop, Konang, Tragah, Kwanyar, Klampis, Labang, Tanjung Bumi, Kecamatan Modung.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang termasuk dalam kaitan Gerbang Kertasusila sebagai pusat kegiatan nasional. Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, Kabupaten Bangkalan memiliki kawasan strategis yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

2.1.2.1 Kawasan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Baru

A. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu

Merupakan Kawasan Strategis yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sekitar dan dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang. Kawasan ini ditentukan berdasarkan potensi yang ada, serta memiliki aglomerasi terhadap pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, dengan pertimbangan dapat memberikan dampak perkembangan pada suatu wilayah. Kawasan ini meliputi sepanjang jalan tol dan akses jalan Tol Suramadu dan sekitarnya seluas ± 600 ha. Secara umum, peruntukannya dititikberatkan pada keberadaan industri ringan dan hijau yang didukung dengan kawasan perdagangan, wisata dan permukiman.

B. Kawasan Industri & Pelabuhan Socah

Pengembangan pelabuhan Socah yang terintegrasi dengan Kawasan Industri pendukungnya merupakan perencanaan jangka menengah (*intermediate term planning*) dalam pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan industri di Madura.

C. Kawasan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Bulu Pandan

Kawasan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis dan Arosbaya adalah kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Kawasan ini direncanakan memiliki akses langsung dengan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu melalui pengembangan jalan akses Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan melalui *interchange* Burneh. Perkembangan 3 (tiga) kawasan strategis dimaksud didukung dengan pusat-pusat pertumbuhan baru seperti kawasan pendidikan di Desa Telang Kecamatan Kamal, perkembangan masing-masing ibu kota Kecamatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.

2.1.2.2 Kawasan Agropolitan

Kawasan Agropolitan dibentuk untuk mewujudkan Kawasan yang maju, mandiri, berkualitas dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi dan nilai tambah. Kawasan pengembangan agropolitan di Kabupaten Bangkalan meliputi kecamatan Socah-Burneh-Bangkalan (SOBURBANG). Kecamatan Burneh (perkotaan Burneh) sebagai pusat Kota Tani Utama (KU). Kecamatan Socah (perkotaan Socah) dan kecamatan Bangkalan (perkotaan Bangkalan) sebagai Kawasan Kota Tani (KT). Adapun Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan SOBURBANG, ditetapkan berdasarkan kebutuhan ruang untuk mewadahi kegiatan agribisnis. Kota Tani Utama (KU) berfungsi sebagai pusat terminal agribis, /pengkajian teknologi agribisnis, pusat beragam bibit tanaman sekaligus agrowisata edukasi.

2.1.2.3 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bangkalan dikelompokkan sebagai berikut:

A. Kawasan rawan banjir yang meliputi Kecamatan Blega, Kwanyar, Modung, Tanjung Bumi, Socah dan Sepulu.
B. Kawasan rawan longsor yang meliputi Kecamatan Kokop, Geger, Galis, Klampis, Tanjung Bumi, Burneh dan Konang.
C. Kawasan rawan puting beliung yang meliputi Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Geger, Kwanyar, Tragah, Burneh dan Bangkalan.
D. Kawasan rawan abrasi yang meliputi Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Klampis, Arosbaya, Modung, Kwanyar, Bangkalan, Socah dan Kamal.
E. Kawasan Rawan Kekeringan meliputi Kecamatan Kokop, Tragah, Konang, Galis, Labang dan Tanah Merah.

Gambar 2.3
Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bangkalan Tahun 2022
Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bangkalan tahun 2022 menunjukkan kenaikan kejadian bencana yang signifikan dibanding tahun 2021. Pada tahun 2022, kejadian rawan bencana berjumlah 59 kejadian dengan kejadian terbanyak di Kecamatan Blega yaitu 10 kejadian bencana. untuk lebih jelasnya data kejadian bencana tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kejadian Bencana Di Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bangkalan	3	4	5	2	7
2	Burneh	1	3	7	3	3
3	Blega	-	5	6	9	10
4	Modung	-	1	-	2	1
5	Tragah	1	1	4	-	1
6	Kwanyar	-	-	1	1	1
7	Kamal	-	2	1	-	4
8	Arosbaya	-	5	4	2	4
9	Klampis	-	1	1	-	
10	Tanjungbumi	-	-	2	2	1
11	Kokop	1	1	2	2	2
12	Tanah Merah		1	1	1	3
13	Galis	1	2	2	4	2
14	Konang	1	1	1	-	7
15	Socah	-	1	1	4	4
16	Geger	-	7	4	-	6
17	Sepulu	-	-	2	-	
18	Labang	-	-	3	3	3
JUMLAH		**8**	**35**	**47**	**35**	**59**

Sumber Data: BPBD Kabupaten Bangkalan, 2023

2.1.3. Demografi

2.1.3.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.082.656 jiwa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.082.759 jiwa pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan menjadi 1.039.288 jiwa. Terdapat

perbedaan yang cukup signifikan antara tahun 2021 dan 2022 dikarenakan adanya pembaharuan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Rasio Jenis Kelamin		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Bangkalan	43.111	43.400	43.545	44.292	44.589	44.811	97.33	97,33	97,17
2	Socah	31.620	31.898	30.865	32.543	32.866	32.081	97,16	97,05	96,21
3	Burneh	31.702	31.931	31.171	31.928	32.028	31.595	99,29	99,7	98,66
4	Kamal	24.225	24.226	24.138	25.297	25.369	25.237	95,76	95,49	95,65
5	Arosbaya	24.233	24.212	23.180	24.475	24.412	23.567	99,01	99,18	98,36
6	Geger	41.271	41.366	38.919	42.234	42.165	40.584	97,72	98,11	95,90
7	Klampis	28.224	28.329	26.624	29.557	29.577	27.958	95,49	95,78	95,23
8	Sepulu	23.032	22.996	21.203	23.918	23.852	22.147	96,3	96,41	95,74
9	Tanjung Bumi	27.419	27.127	26.043	28.512	28.137	27.088	96,17	96,41	96,14
10	Kokop	37.522	37.340	35.075	38.039	37.875	35.818	98,64	98,59	97,93
11	Kwanyar	25.859	25.941	25.009	26.700	26.781	25.859	96,85	96,86	96,71
12	Labang	19.009	19.100	18.805	19.903	19.844	19.597	95,51	96,25	95,96
13	Tanah Merah	35.665	35.709	34.058	36.681	36.750	34.990	97,23	97,17	97,34
14	Tragah	15.310	15.422	15.225	15.719	15.889	15.635	97,4	97,06	97,38
15	Blega	29.763	29.475	28.703	30.110	29.842	29.007	98,85	98,77	98,95
16	Modung	22.874	22.879	21.407	24.360	24.305	22.916	93,9	94,13	93,42
17	Konang	28.081	28.101	26.326	28.428	28.386	26.521	98,78	99	99,26
18	Galis	45.123	44.923	41.437	45.917	45.717	42.144	98,27	98,26	98,32
Jumlah		**534.043**	**534.375**	**511.733**	**548.613**	**548.384**	**527.555**	**97,34**	**97,45**	**97,00**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan 2023

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut

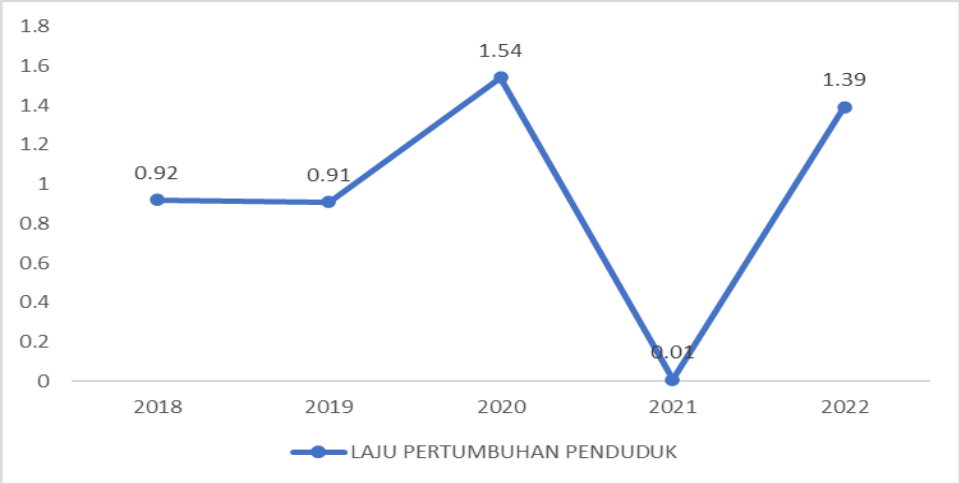

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022
Sumber Data : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2023

Adapun pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 – 2022 adalah sebagai berikut

Grafik 2.3
Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2022
Sumber Data : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2023

2.1.3.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan kotor adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas keseluruhan. Jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 1.039.288 jiwa dengan luas wilayah 1.260,14 Km^2 sehingga pada tahun 2022 jumlah kepadatan penduduk kasar di wilayah perencanaan sebesar 824,74 jiwa/Km^2. Kepadatan tertinggi adalah di Kecamatan Bangkalan sebesar 2.523,02 jiwa/Km^2 dan terendah adalah Kecamatan Modung sebesar 562,55 jiwa/Km^2.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022

Kecamatan	Jumlah penduduk			Kepadatan penduduk		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kamal	48.760	48.763	49.375	1.177,77	1.177,85	1.192,63
Labang	38.320	38.317	38.402	1.087,71	1.087,62	1.090,04
Kwanyar	51.610	51.611	50.868	1.079,48	1.079,50	1.063,96
Modung	46.060	46.057	44.323	584,47	584,55	562,55
Blega	57.730	57.726	57.710	621,96	621,91	621,74
Konang	53.430	53.434	52.847	658,90	658,95	651,71
Galis	88.260	88.262	83.581	732,08	732,10	693,27
Tanah Merah	70.810	70.805	69.048	1.032,82	1.032,75	1.007,12
Tragah	30.320	30.318	30.860	766,04	765,99	779,69
Socah	63.420	63.421	62.946	1.178,15	1.178,17	1.169,35
Bangkalan	86.250	86.245	88.356	2.462,88	2.462,74	2.523,02
Burneh	63.570	63.567	62.766	961,72	961,68	949,56
Arosbaya	48.030	48.025	46.747	1.131,18	1.131,06	1.100,97
Geger	81.830	81.834	79.503	663,61	663,64	644,74
Kokop	73.940	73.941	70.893	587,99	588,00	563,76
Tanjung Bumi	54.340	54.344	53.131	805,16	805,22	787,24
Sepulu	46.490	46.487	43.350	634,68	634,63	591,81
Klampis	57.220	57.220	54.582	852,76	852,76	813,44
Total	**1.060.390**	**1.060.331**	**1.039.288**	**841,49**	**841,44**	**824,74**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan 2023, Data diolah

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Karakteristik makro pembangunan daerah yang ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah, harus dapat menginformasikan tingkat keberdayaan kebijakan dalam mendukung tujuan pembangunan. Representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah, dituangkan dalam Indikator Makro pembangunan daerah meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Pendapatan Perkapita; Inflasi; Struktur Perekonomian Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran umum perekonomian makro daerah yang menggambarkan kondisi awal keberhasilan yang telah dicapai sejak Tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat diuraikan pada penjelasan di bawah ini.

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan. Baik tidaknya kondisi perekonomian dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan.

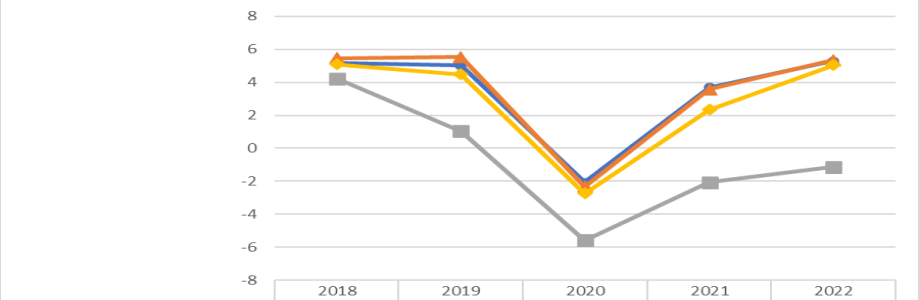

	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	5.17	5.02	-2.07	3.69	5.31
Jawa Timur	5.47	5.53	-2.33	3.57	5.34
Bangkalan (Migas)	4.22	1.03	-5.59	-2.07	-1.12
Bangkalan (Non-Migas)	5.09	4.49	-2.73	2.34	5.04

Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber Data : BPS Nasional, 2023

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan hingga tahun 2018, sementara pertumbuhan ekonomi provinsi mengalami fluktuasi sampai tahun 2019. Keduanya turun signifikan pada tahun 2020 hingga menyentuh angka minus. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh wabah covid-19.

Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan di Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan meskipun tumbuh melambat, hal ini terlihat dari meningkatnya PDRB setiap tahunnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Gambaran umum perekonomian daerah dapat dideskripsikan dengan data tentang PDRB Kabupaten Bangkalan. Secara esensial, data dimaksud mampu memberikan informasi tentang struktur ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan. Perkembangan PDRB Kabupaten Bangkalan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Kategori	U R A I A N	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.728,22	5.815,87	5.975,62	5.961.278,5	6.538.395,2
B	Pertambangan dan Penggalian	5.525,40	5.162,43	4.049,26	4.889.833,2	5.228.647,7
C	Industri Pengolahan	601,53	631,86	573,62	605.701,5	692.367,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,61	10,30	10,20	10.443,0	11.346,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,01	21,43	22,24	23.949,9	26.407,7
F	Konstruksi	3.268,29	3.561,58	3.331,30	3.407.850,7	3.868.747,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.713,16	4.031,62	3.789,95	4.156.817,9	4.673.865,4
H	Transportasi dan Pergudangan	339,33	369,01	337,08	352.894,7	444.746,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	287,47	318,66	298,75	325.466,3	365.352,0

Kategori	U R A I A N	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
J	Informasi dan Komunikasi	1.057,86	1.148,41	1.252,97	1.334.707,6	1.417.072,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	414,24	437,31	436,05	449.410,8	490.705,8
L	Real Estate	264,82	287,12	296,51	305.457,3	326.815,3
M,N	Jasa Perusahaan	59,90	65,66	62,52	64.256,9	65.781,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.410,46	1.565,84	1.604,55	1.596.092,4	1.686.627,2
P	Jasa Pendidikan	895,36	968,60	997,03	1.003.712,1	1.023.836,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85,57	92,57	101,88	108.585,8	117.675,5
R,S,T, U	Jasa lainnya	165,43	175,94	150,49	160.248,5	185.806,0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**23.846,66**	**24.664,21**	**23.290,01**	**24.756.707,1**	**27.164.196,8**
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	**18.671,11**	**19.869,27**	**19.586,50**	**20.228.372,8**	**22.323.920,9**

Sumber Data : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2023

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Kat.	U R A I A N	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.726,64	3.694,66	3.746,91	3.670,21	3.768.425,1
B	Pertambangan dan Penggalian	5.626,28	5.239,33	4.554,70	3.888,81	3.026.379,0
C	Industri Pengolahan	423,93	439,34	396,75	407,32	447.477,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,93	8,36	8,36	8,54	9.083,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,31	14,07	14,57	15,62	16.500,1
F	Konstruksi	2.106,32	2.279,88	2.122,80	2.166,70	2.316.050,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	2.720,68	2.905,45	2.674,91	2.889,15	3.090.658,6

Kat.	U R A I A N	2018	2019	2020	2021	2022
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	246,74	263,58	239,16	250,66	299.659,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	204,21	220,09	203,29	210,42	226.006,3
J	Informasi dan Komunikasi	991,38	1.073,78	1.163,03	1.235,37	1.285.670,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	304,78	318,39	316,86	320,61	329.066,1
L	Real Estate	205,07	217,97	223,51	228,60	240.979,3
M,N	Jasa Perusahaan	41,41	44,02	41,18	41,83	41.865,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	888,74	923,86	902,05	899,51	921.967,6
P	Jasa Pendidikan	654,75	696,55	709,75	713,63	718.415,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,38	73,68	80,51	85,38	87.656,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	130,89	137,79	116,29	120,40	134.048,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**18.361, 44**	**18.550,80**	**17.514, 62**	**17.152,78**	**16.959.909,3**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**12.980,91**	**13.563,27**	**13.192,84**	**13.501.065,6**	**14.181.588,0**

Sumber Data : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2023

Secara lengkap dapat diketahui perubahan PDRB ADHB dan ADHK baik dengan migas maupun non migas sebagaimana grafik berikut :

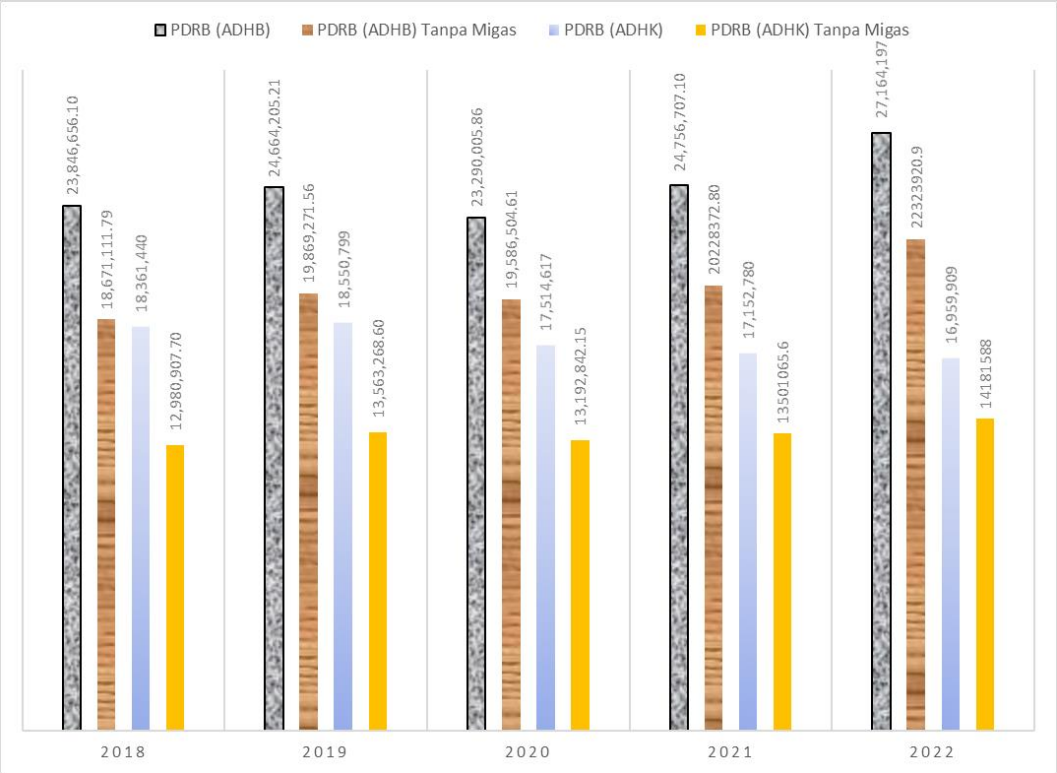

Grafik 2.5
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022
Sumber : Kabupaten Bangkalan dalam angka, 2023

Sehubungan dengan pertumbuhan migas dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang tajam, sedangkan aktifitas pengeboran migas yang berada di lepas pantai dan tidak berpengaruh langsung pada perekonomian masyarakat, maka dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan menggunakan PDRB ADHK tanpa migas.

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Kategori	U R A I A N	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,89	-0,86	1,41	-2,05	2,68
B	Pertambangan dan Penggalian	2,26	-6,88	-13,07	-14,62	-22,18
C	Industri Pengolahan	6,28	3,64	-9,69	2,66	9,86

Kategori	U R A I A N	2018	2019	2020	2021	2022
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,60	5,46	-0,04	2,18	6,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,10	5,72	3,53	7,25	5,61
F	Konstruksi	7,40	8,24	-6,89	2,07	6,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,80	6,79	-7,93	8,01	6,97
H	Transportasi dan Pergudangan	7,34	6,83	-9,27	4,81	19,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,54	7,7,8	-7,63	3,51	7,41
J	Informasi dan Komunikasi	8,11	8,31	8,31	6,22	4,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,93	4,47	-0,48	1,19	2,64
L	Real Estate	6,87	6,39	2,54	2,28	5,42
M,N	Jasa Perusahaan	6,53	6,30	-6,46	1,59	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,64	3,95	-2,36	-0,28	2,50
P	Jasa Pendidikan	6,84	6,38	1,90	0,55	0,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,50	7,75	9,27	6,04	2,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,70	5,27	-15,61	3,54	11,33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		*4,22*	*1,03*	*-5,59*	*-2,07*	*-1,12*

Sumber Data : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan, dimana adanya pandemi covid-19 mengakibatkan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Bangkalan bahkan nasional dan dunia menjadi menurun dan hal ini menjadi sebab penurunan pertumbuhan ekonomi. Adapun aspek yang mengalami penurunan signifikan terkait pandemi covid-19 tersebar pada beberapa lapangan usaha diantaranya jasa lainnya dan transportasi dan pergudangan.

Tabel 2.11
Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018-2022

Kategori	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,02	23,58	25,66	24,08	24,07
B	Pertambangan dan Penggalian	23,17	20,93	17,39	19,75	19,25
C	Industri Pengolahan	2,52	2,56	2,46	2,45	2,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	13,71	14,44	14,30	13,77	14,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,57	16,35	16,27	16,79	17,21
H	Transportasi dan Pergudangan	1,42	1,50	1,45	1,43	1,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,21	1,29	1,28	1,31	1,34
J	Informasi dan Komunikasi	4,44	4,66	5,38	5,39	5,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,74	1,77	1,87	1,82	1,81
L	Real Estate	1,11	1,16	1,27	1,23	1,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,27	0,27	0,26	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,91	6,35	6,89	6,45	6,21
P	Jasa Pendidikan	3,75	3,93	4,28	4,05	3,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,36	0,38	0,44	0,44	0,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,69	0,71	0,65	0,65	0,68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		78,30	80,56	84,10	81,71	82,18

Sumber Data : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2023

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar tanpa migas berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Adapun sektor berikutnya yang memiliki kontribusi peringkat kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Tingkat inflasi PDRB Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yang tercermin dari laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB sebagaimana terlihat dalam di bawah ini :

Tabel 2.12
Laju Implisit PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Kat.	U R A I A N	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,05	2,41	1,31	1,84	6,82
B	Pertambangan dan Penggalian	14,76	0,33	-9,77	41,44	37,40
C	Industri Pengolahan	2,35	1,36	0,53	2,85	4,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,31	1,64	-0,95	0,24	2,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,73	1,30	0,24	0,40	4,40
F	Konstruksi	0,78	0,68	0,46	0,22	6,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,75	1,67	2,11	1,55	5,11
H	Transportasi dan Pergudangan	2,28	1,80	0,68	-0,11	5,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,44	2,85	1,50	5,25	4,52
J	Informasi dan Komunikasi	0,11	0,23	0,73	0,29	2,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,86	1,06	0,19	1,86	6,38
L	Real Estate	3,63	2,01	0,71	0,72	1,50
M,N	Jasa Perusahaan	3,91	3,12	1,79	1,17	2,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,76	6,80	4,95	-0,25	3,10
P	Jasa Pendidikan	1,78	1,69	1,02	0,12	1,33

Kat.	U R A I A N	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,40	0,72	0,51	5,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,69	1,03	1,35	2,85	4,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**5,67**	**2,37**	**0,01**	**8,54**	**10,97**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**2,89**	**1,85**	**1,34**	**0,92**	**5,06**

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan, 2023 (year to year)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa laju inflasi dengan menghitung Laju Implisit PDRB tahun 2017 sebesar 2,36% dan di tahun 2018 naik menjadi sebesar 2,89%. Sedangkan tahun 2019 menjadi 1,85% dan tahun 2020 sebesar 1,34% akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh sektor.

2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks gini mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan antar penduduk. Indeks Gini berkisar antara nol sampai satu. Nilai nol berarti pemerataan sempurna, sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna terjadi.

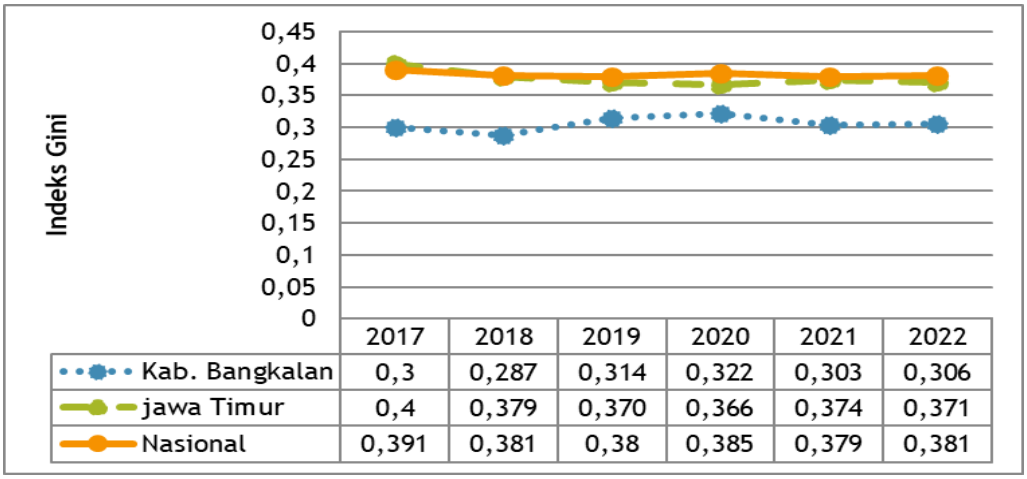

Grafik 2.6
Rasio Gini Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2017-2022
Sumber Data : BPS Nasional, 2023

Data lima tahun terakhir memperlihatkan rasio gini terendah terjadi pada tahun 2018, namun rasio gini meningkat kembali sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 dan kembali semakin mendekati nol di tahun 2021 dan 2022, namun masih belum dapat mengembalikan keadaan seperti di tahun 2018. Tahun 2020 rasio gini kabupaten Bangkalan berada pada angka 0.32. Artinya, ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada level moderat.

2.2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bangkalan mencapai 19,44 persen pada tahun 2022. Jumlah tersebut turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 21,57 persen. Adapun jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 196.110 jiwa.

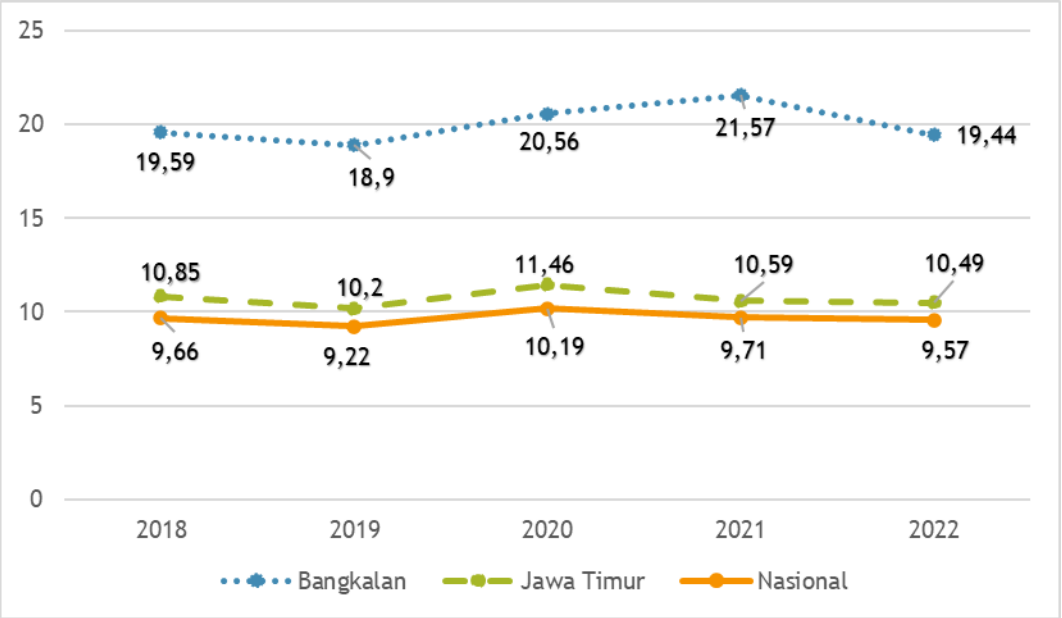

Grafik 2.7
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Nasional, 2023

Trend kemiskinan yang kecenderungan menurun di tahun 2018 hingga 2019 mencerminkan kinerja yang baik dalam kaitannya dengan tujuan Kabupaten Bangkalan untuk semakin dapat mensejahterakan masyarakatnya. Meskipun di tahun 2020 dan 2021 mengalami permasalahan naiknya angka kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Bangkalan, terutama permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Diantara 204.000 jumlah penduduk miskin di tahun 2020 yaitu 123.490 diantaranya adalah jumlah penduduk dengan kategori miskin ekstrim. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, bahwa kemiskinan ekstrem ini harus dituntaskan pada tahun 2024.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Indikator kesejahteraan sosial diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di mana hal ini merupakan cermin dari kualitas kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat. Sejak tahun 2010, BPS mengembangkan metode baru dalam melakukan perhitungan IPM. Dengan

demikian, dalam perubahan RPJMD ini akan digunakan data perhitungan IPM Kabupaten Bangkalan dengan metode yang baru, sehingga terdapat perbedaan data dengan yang telah disajikan sebelumnya dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan.

Semakin tinggi nilai IPM mendeskripsikan bahwa kebijakan pemerintah terhadap penanganan sosial budaya, semakin mengarah pada efektivitas, oleh karena itu, Kabupaten Bangkalan, senantiasa berupaya dalam meningkatkan IPM.

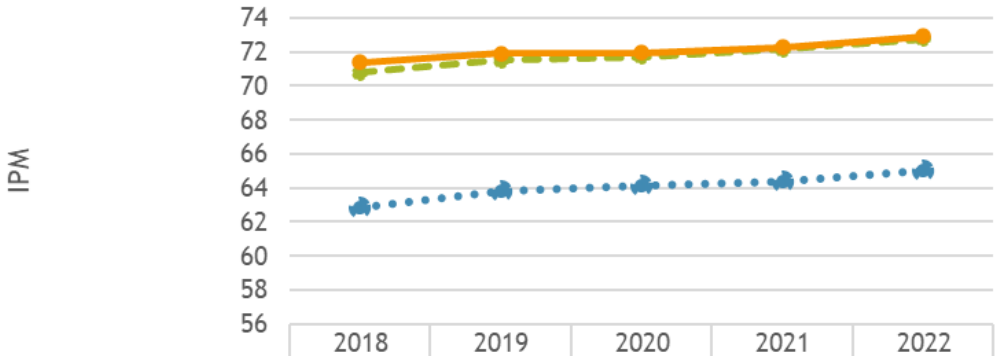

	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Bangkalan	62,87	63,79	64,11	64,36	65,05
Jawa Timur	70,77	71,5	71,71	72,14	72,75
Indonesia	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Grafik 2.8
IPM Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-20*22*
Sumber Data : BPS Nasional, 2023

Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan semakin baik dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari nilai IPM sejak tahun 2018-2022 ini terus meningkat. Namun demikian jika dibandingkan dengan IPM Jawa Timur dan Nasional, maka posisi Kabupaten Bangkalan masih di bawahnya. Hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk terus berupaya mengejar ketertinggalan IPM dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Rendahnya IPM Kabupaten Bangkalan, disumbang oleh faktor rata-rata lama sekolah masyarakat yang masih rendah yaitu 5,97 (tahun 2022). Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat hanya berpendidikan hingga sekolah dasar. Sehingga Bangkalan masih harus mengejar ketertinggalan untuk memenuhi program wajib belajar 12 tahun.

Jika dibandingkan dengan IPM dari 4 Kabupaten di Pulau Madura, maka IPM Kabupaten Bangkalan masih kalah dengan Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Artinya, masih terendah kedua di Pulau Madura. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar ada akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan yang lebih masif agar terjadi percepatan peningkatan IPM. Berikut gambaran perbandingan IPM di 4 Kabupaten di Pulau Madura.

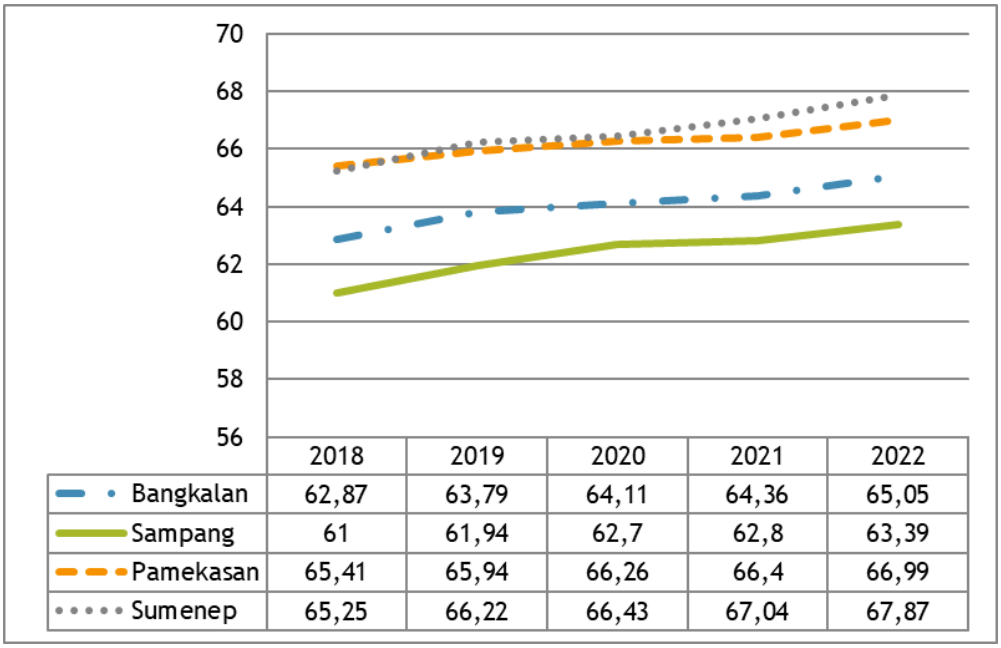

	2018	2019	2020	2021	2022
Bangkalan	62,87	63,79	64,11	64,36	65,05
Sampang	61	61,94	62,7	62,8	63,39
Pamekasan	65,41	65,94	66,26	66,4	66,99
Sumenep	65,25	66,22	66,43	67,04	67,87

Grafik 2.9
Perbandingan IPM di Empat Kabupaten di Pulau Madura
Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

2.2.2.1 Indikator Pendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM)

A. Kesehatan

Indikator kesehatan yang diwakili oleh komponen Angka Harapan Hidup (AHH) diharapkan dapat mencerminkan "lama hidup" sekaligus "status kesehatan" suatu masyarakat. Harapan hidup suatu masyarakat salah satu diantaranya dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah tersebut. Berbagai bukti secara demografis dan epidemiologis memberi dukungan adanya keterkaitan antara perkembangan ekonomi suatu wilayah dengan tinggi rendahnya harapan hidup.

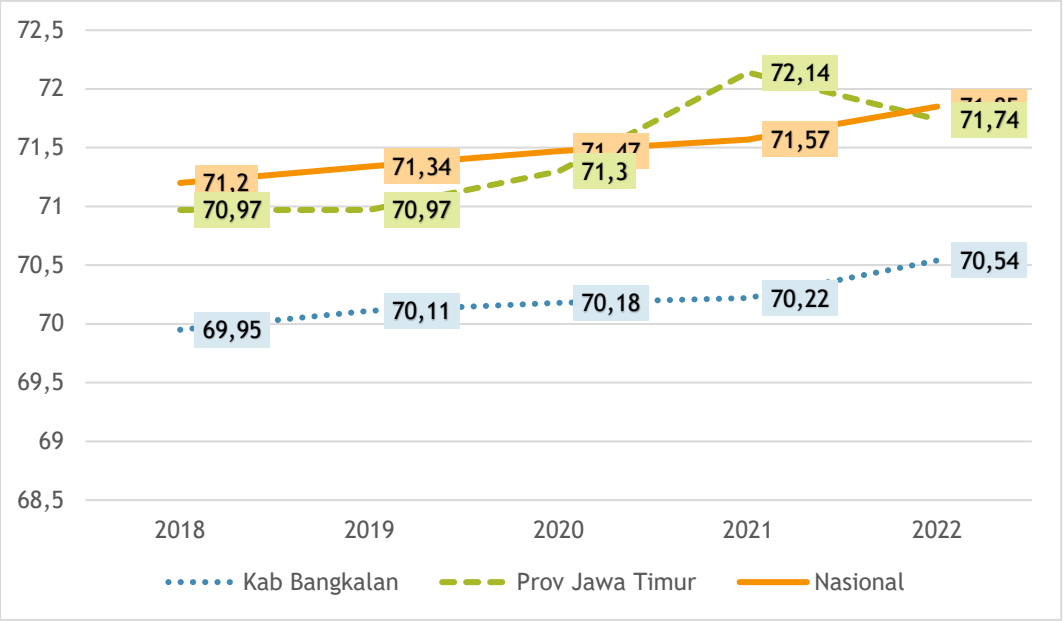

Grafik 2.10
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018-2022 secara umum masih berada di bawah Jawa Timur dan Nasional. Namun demikian upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup terus digencarkan.

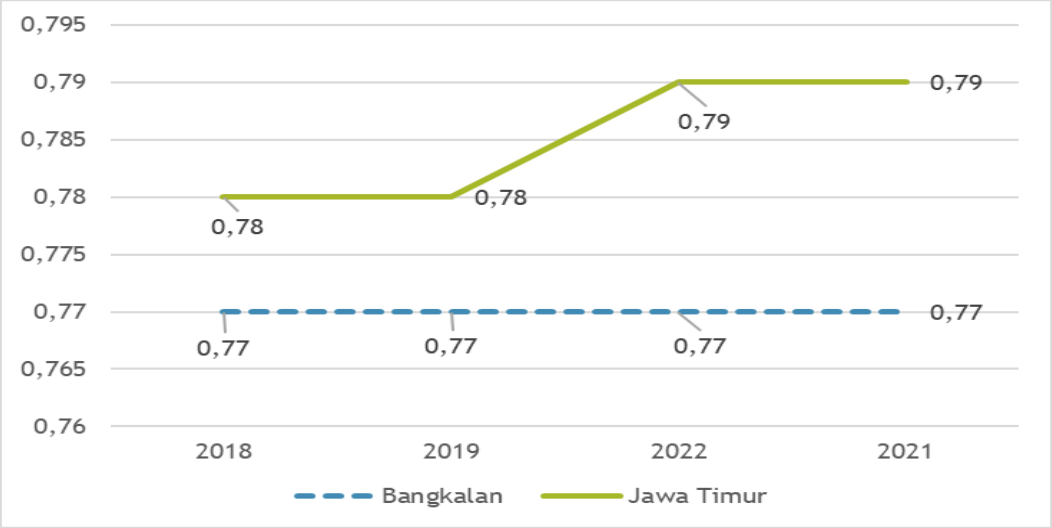

Grafik 2.11
Perbandingan Indeks Kesehatan Kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur Tahun 2018-2021
Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

B. Pendidikan

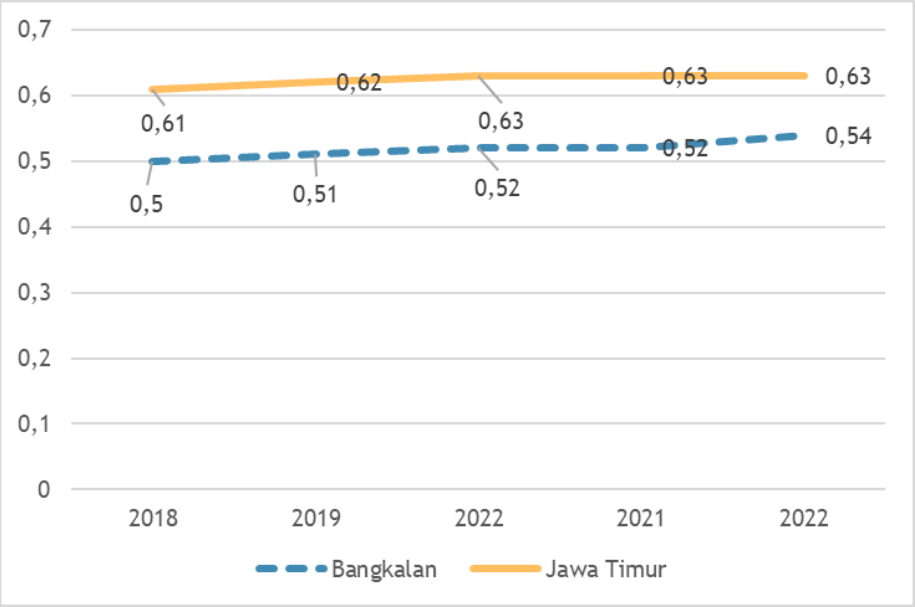

Grafik 2.12
Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur
Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi penilaian terhadap fasilitas pendidikan daerah. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka harapan lama sekolah tahun 2018-2022 mengalami kecenderungan naik. Adapun Angka Harapan Sekolah di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2018-2022 ada sebagai berikut:

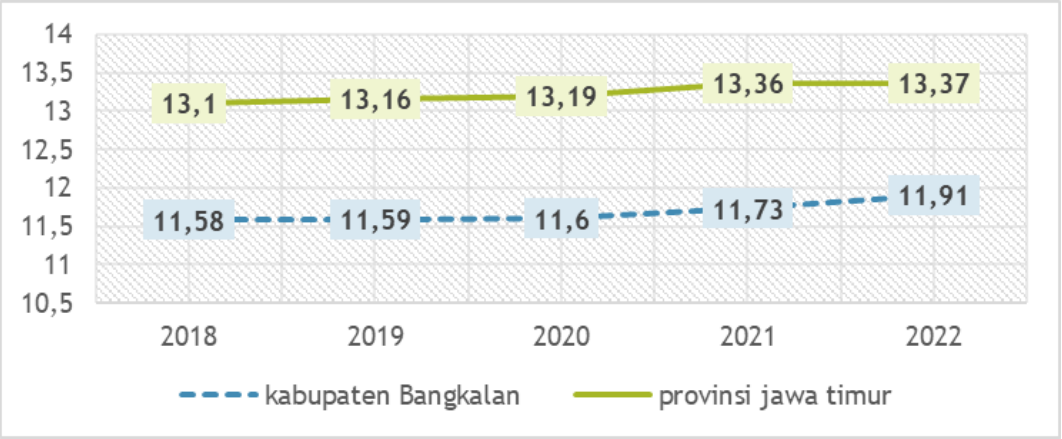

Grafik 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah
di Kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2023

Seperti halnya dengan Angka Harapan Lama Sekolah, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun juga mengalami perubahan. Program BOS (Biaya Operasional Sekolah) ditujukan untuk dapat meringankan biaya pendidikan yang dipikul oleh masyarakat, program wajib belajar 9 (sembilan) tahun menjadi prioritas pemerintah dan dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mampu menggugah kesadaran pelajar dan orang tua untuk tetap melanjutkan sekolahnya. Hal itu mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangkalan.

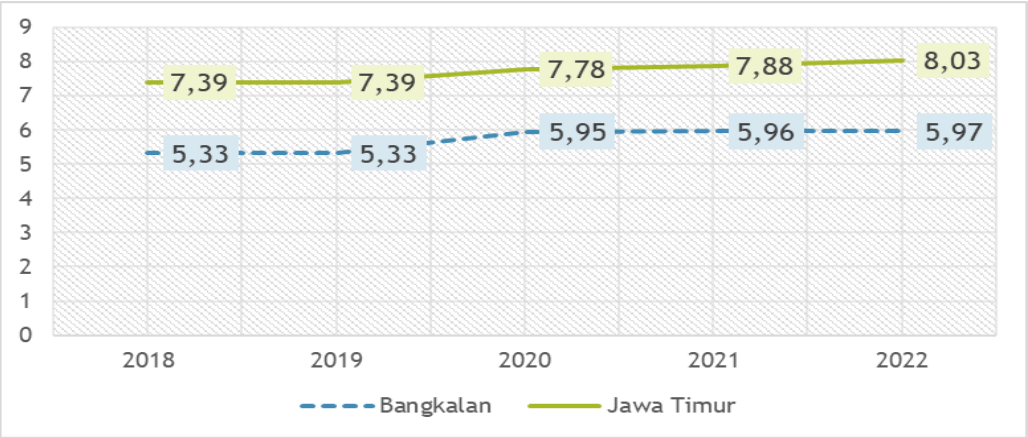

Grafik 2.14
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022
Sumber Data : BPS Jawa Timur, 2023

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangkalan terus mengalami kenaikan sesuai dengan tren rata-rata lama sekolah di Jawa Timur. Tahun 2018 rata-rata lama sekolah 5,33 telah naik menjadi 5,97 pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan masih memiliki selisih rata-rata lama sekolah yang terpaut dua tahun.

C. Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan

Pengeluaran per Kapita per Tahun menunjukkan seberapa besar jumlah pengeluaran untuk konsumsi masyarakat dalam satu tahun yang disesuaikan dengan jumlah pendapatan (uang) yang diterima. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk membeli berbeda-beda, tergantung pada pendapatan dan kebutuhannya. Pada intinya, semakin tinggi kemampuan daya beli seseorang berarti semakin banyak ragam barang/jasa yang mampu dibeli.

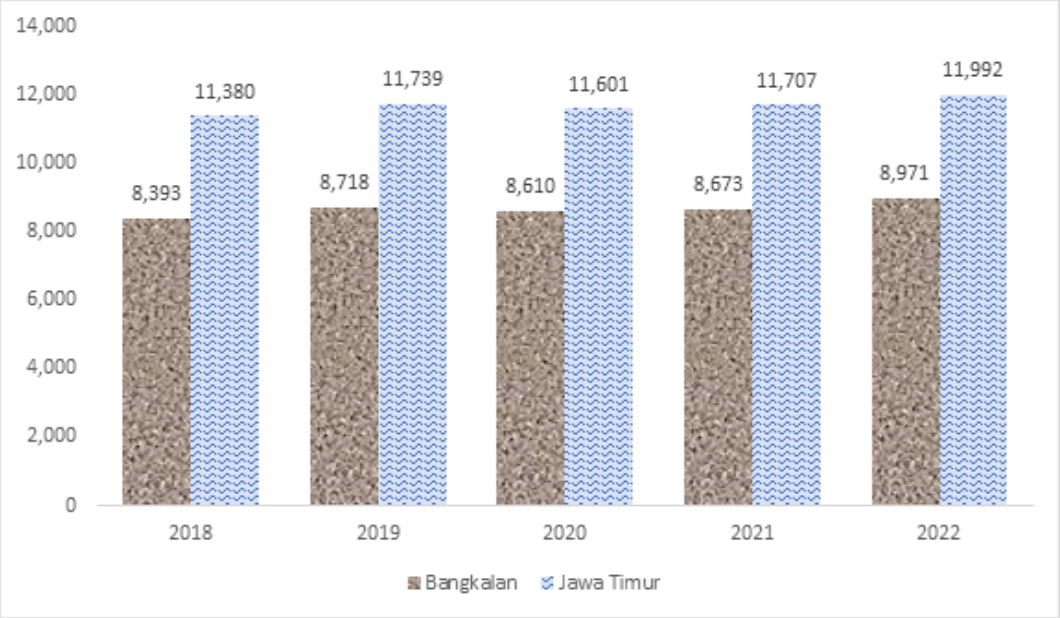

Grafik 2.15
Pengeluaran per Kapita Masyarakat
Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur (Ribu Rupiah)
Tahun 2018-2022
Sumber Data : BPS Jawa Timur, 2023

Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bangkalan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang sama, yaitu mengalami peningkatan pada tahun 2022. Tahun 2022 pengeluaran per kapita mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022 sebesar Rp. 8.673.000,- dimana jumlah tersebut naik dari Rp. 8.673.000,- pada tahun 2021.

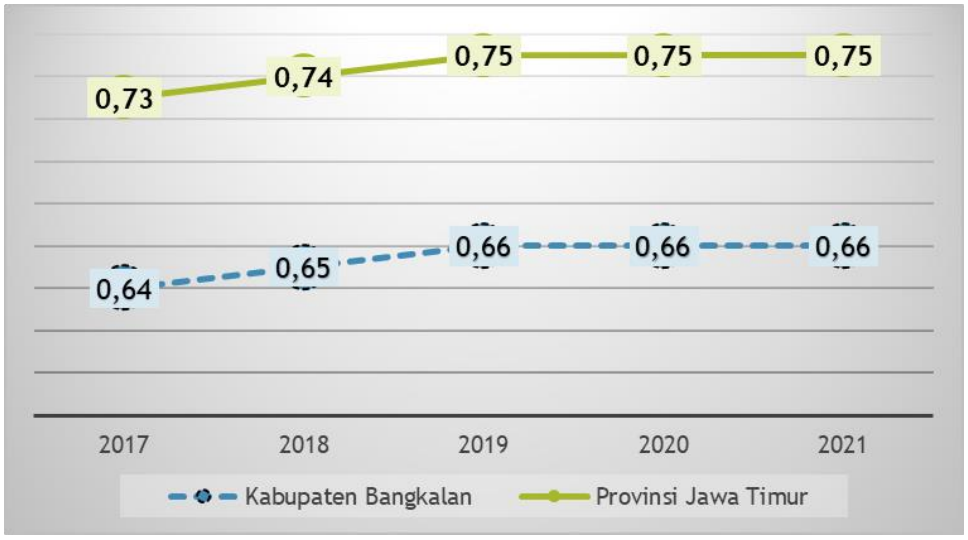

Grafik 2.16
Indeks Pengeluaran
Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021
Sumber Data : BPS Jawa Timur, 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran perkapita penduduk di Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan yang cukup stabil dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

2.2.2.2 Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

Indeks kesalehan sosial digunakan sebagai indikator kinerja utama. Indeks Kesalehan sosial merupakan indikator baru sehingga angka dari indikator ini belum tersedia. Tingkat kesalehan sosial dapat menjadi ukuran kesejahteraan di bidang sosial kemasyarakatan. Masyarakat yang saleh berarti masyarakat yang memiliki ketaatan (kepatuhan) dalam menjalankan ibadah maupun bersungguh-sungguh menunaikan ajaran agamanya,

sehingga tercermin dalam sikap dan perilaku yang baik. Indikator yang dapat digunakan adalah Indeks Kesalehan Sosial yang merupakan gabungan dari nilai (indeks) lima komponan, yaitu: solidaritas sosial, toleransi, kerjasama, keadilan, dan stabilitas dalam masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa timur telah menggunakan indeks ini sebagai salah satu indikator kinerja pembangunannya. Indikator ini telah menjadi indikator kinerja pemerintah Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Madura telah dikenal sebagai masyarakat yang religius serta wilayah yang memiliki banyak pondok pesantren (pendidikan keagamaan). Sehingga kehidupan beragama/bermasyarakat seharusnya berkualitas (memiliki kesalehan yang tinggi). Adapun perbandingan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Bangkalan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

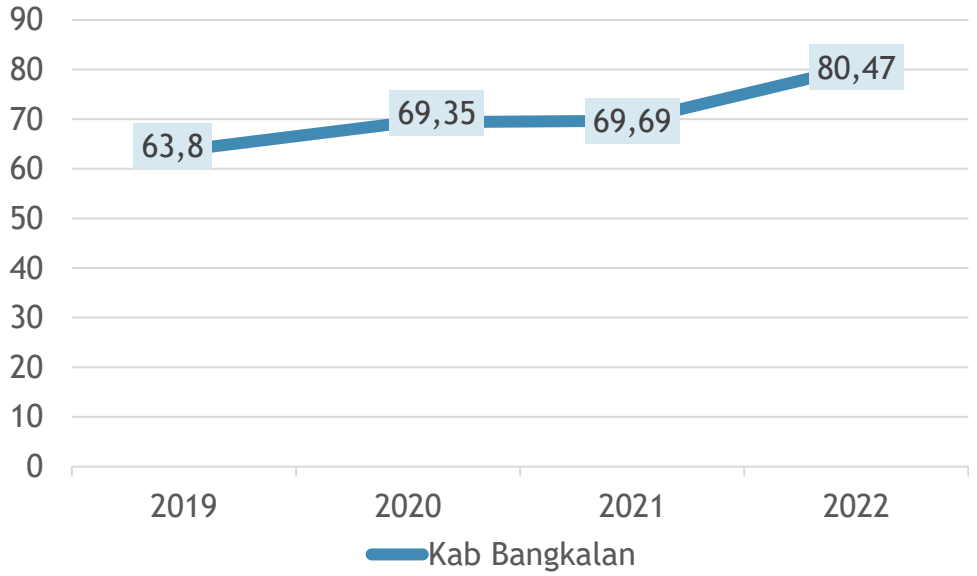

Grafik 2.17
Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022
Sumber: Kementerian Agama Kab. Bangkalan, 2023

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Adapun perbandingan IPG Kabupaten Bangkalan dengan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut:

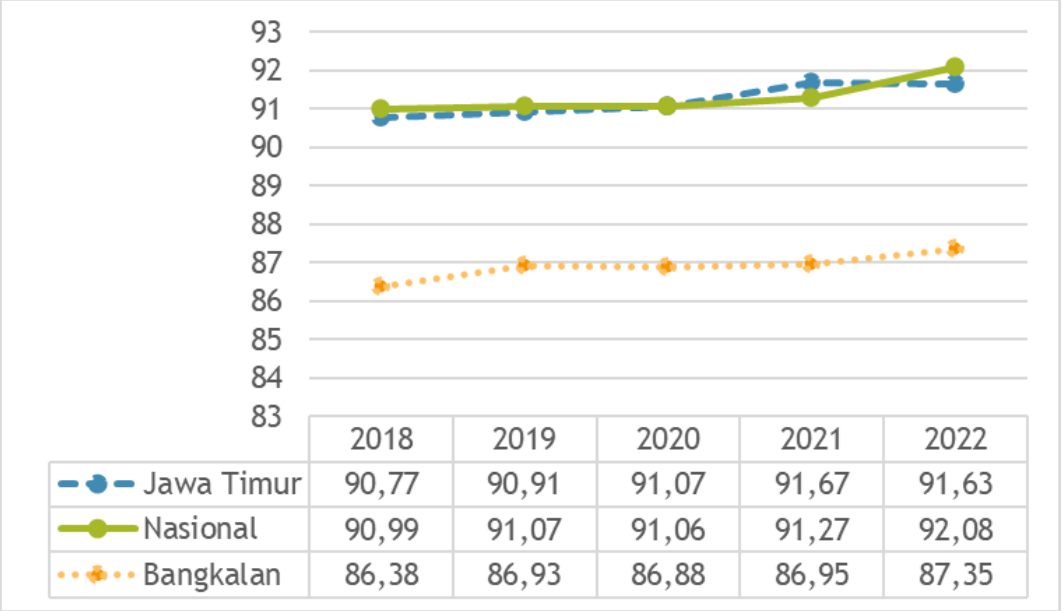

Grafik 2.18
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Nasional, 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa IPG Kabupaten Bangkalan masih lebih rendah daripada Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat

keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi dan lain-lain.

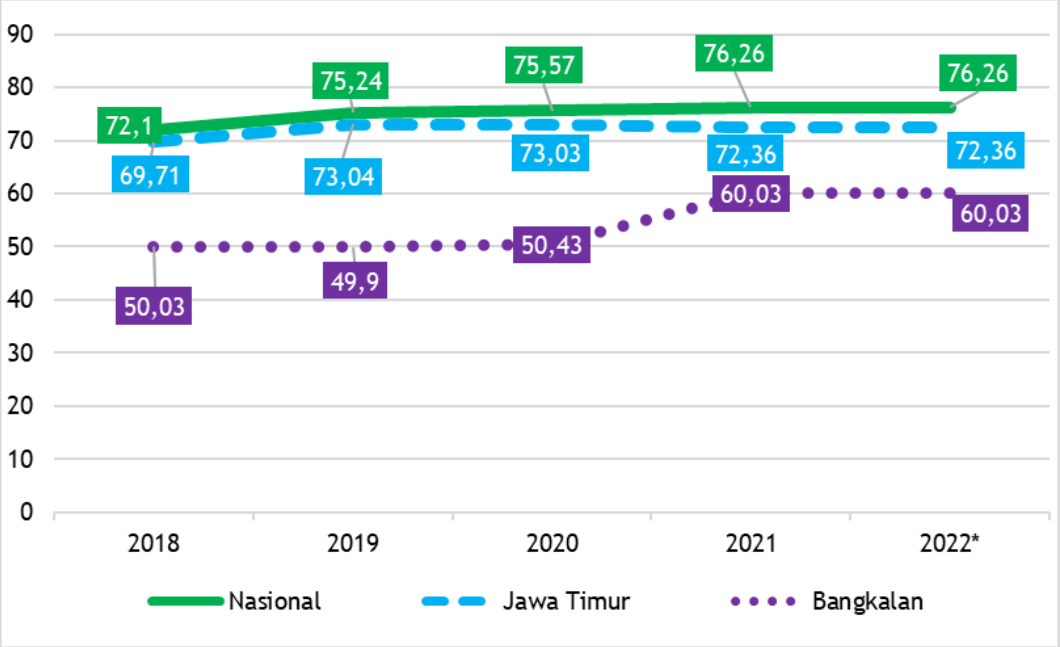

**data sementara*

Grafik 2.19
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Bangkalan cukup bagus meskipun ada penurunan angka di tahun 2019. Namun demikian upaya peningkatan peran perempuan terutama dalam dunia politik masih perlu ditingkatkan.

2.2.2.5 Stunting

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dan dibandingkan dengan standar WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Terkait dengan isu bayi stunting, berikut data balita stunting di Kabupaten Bangkalan:

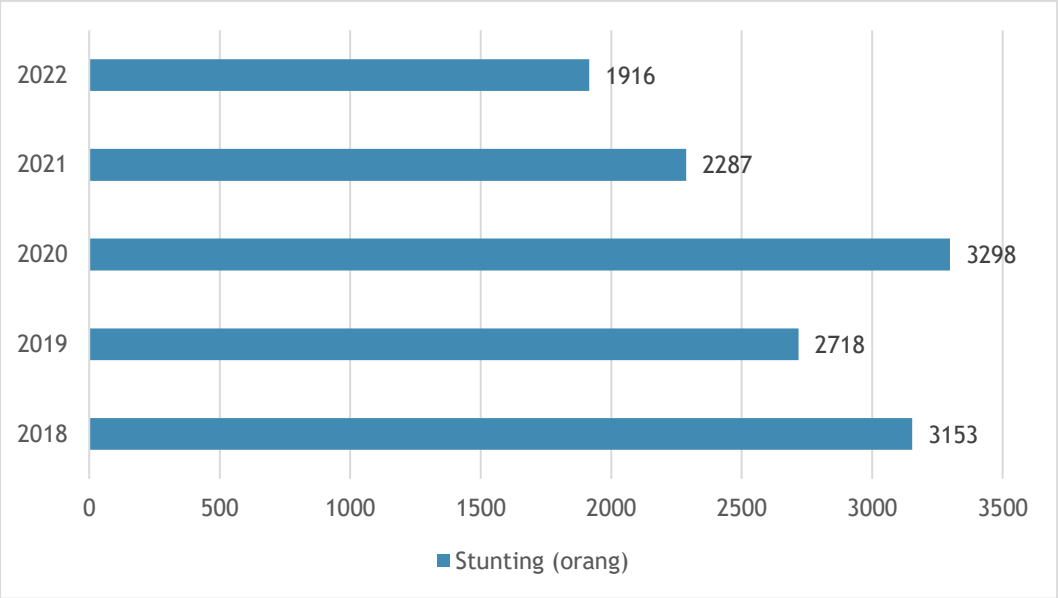

Grafik 2.20
Data Stunting di Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangkalan, 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa data stunting di Kabupaten Bangkalan bergerak fluktuatif dan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 yakni pada angka 1.748 orang, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga menyentuh angka 1.444 orang, namun pada tahun 2020 angka stunting di Kabupaten Bangkalan Kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni mencapai angka 3.294 orang. Berdasarkan data EPPGBM, kasus stunting pada tahun 2021 mencapai angka 2.287 orang dengan prevalensi sebesar 4,80%, sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.916 orang dengan angka prevalensi sebesar 4,30%. Dari tabel di atas angka stunting tertinggi terjadi di tahun 2020. Sedangkan di akhir tahun evaluasi, angka stunting telah menurun.

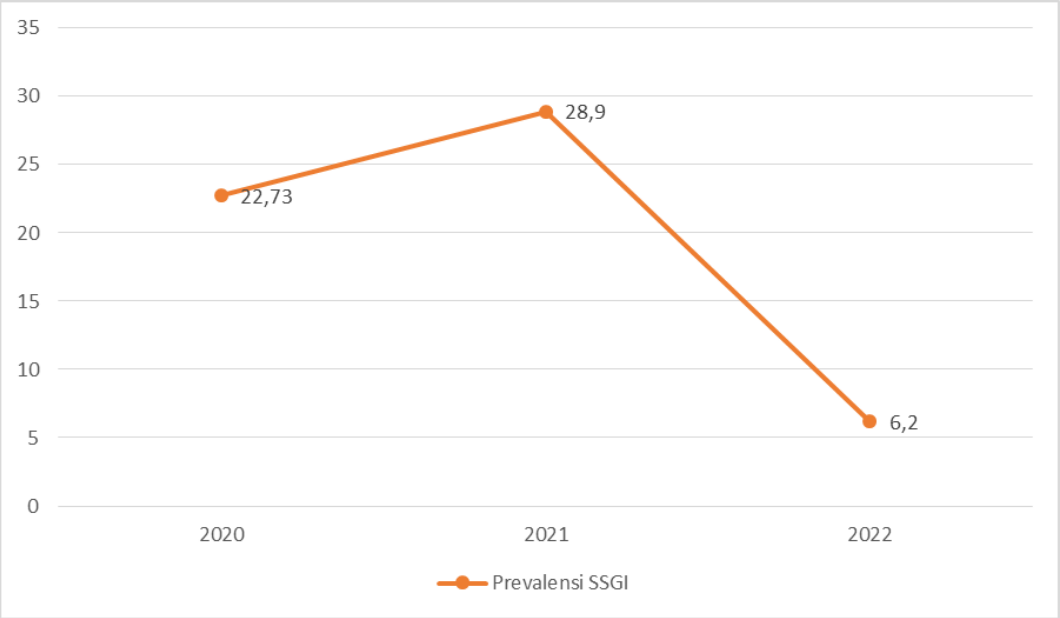

Grafik 2.21
Data Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI
di Kabupaten Bangkalan
Tahun 2020-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangkalan, 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa data Prevalensi stunting berdasarkan SSGI di tahun 2020 pravelansinya sebesar 22,37% mengalami peningkatan di tahun 2021 prevalensinya sebesar 28,90%, dan tahun 2022 prevalensinya mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 26,20%.

2.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

2.2.3.1 Seni Budaya

Banyaknya informasi yang masuk dapat mempengaruhi perilaku budaya masyarakat, sehingga menyebabkan semakin dilupakannya budaya ataupun nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang. Tentunya ini sangat memprihatinkan, karena berakibat tidak paham dengan budayanya sendiri. Untuk itu pemerintah dan masyarakat perlu upaya yang keras dalam menjaga kelestarian kebudayaan leluhur dengan menyediakan ruang,

tempat dan waktu, serta melestarikan dan mengembangkan seni budaya juga pemberdayaan seniman dan budayawan serta masyarakat secara luas.

Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi organisasi dan anggota kesenian di Kabupaten Bangkalan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah organisasi kesenian yang terdapat di Kabupaten Bangkalan sangat terbatas. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian demi kelangsungan kesenian yang ada di Kabupaten Bangkalan. Selain itu event-event budaya seperti *rokat tase',* kerapan sapi dan kirab budaya di Kabupaten Bangkalan harus terus secara rutin dilaksanakan.

Tabel 2.13
Perkembangan Seni dan Budaya
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Sanggar/Grup Kesenian	11	11	12	19	22
2.	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Museum	1	1	1	1	3
4.	Jumlah Kelompok Seni Lukis	2	2	2	2	3
5.	Jumlah Kelompok Seni Patung	1	1	1	0	0

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangkalan Tahun 2023

Perkembangan seni dan budaya terlihat pada jumlah sanggar/grup kesenian yang satu grup. Di masa mendatang budaya diharapkan berkontribusi bagi pembangunan Kabupaten Bangkalan, khususnya di bidang ekonomi. Sektor ekonomi yang terkait adalah pariwisata. Event-event budaya ataupun situs budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bangkalan dapat menjadi objek wisata dan mampu menarik kunjungan wisatawan.

Tabel 2.14
Data Seni dan Tradisi Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

No	Kecamatan	Nama Kesenian/Tradisi	Jumlah
1	Bangkalan	- Hadrah - Barongan (Kel. Pejagan)	125 org (5 kelompok) 10 org (1 kelompok)
2	Socah	- Jaran Tandhang -Sandur (Desa Keleyan)	20 org (1 kelompok) 20 org (1 kelompok)
3	Kamal	-Pelet kandung (Guluh Timur)	20 orang

No	Kecamatan	Nama Kesenian/Tradisi	Jumlah
4	Burneh	-Mantan toddhuk - Jaran Kenca - Musik Tangkateng - Ga onggha kerbau	8 orang 10 orang 20 orang 10 orang
5	Labang	-Penca' keco'an/ajeman	20 orang
6	Kwanyar	-Penca'can macanan	20 orang
7	Tragah	- Macan gerembis pote - Pellet Bettheng	20 orang 20 orang
8	Tanah Merah	- Hadrah	20 orang
9	Blega	- Musik Ul Daul	30 orang
10	Modung	- Angklung topeng patenteng - Angklung topeng brekas	25 orang 25 orang
11	Galis	-Reog	20 orang
12	Konang	-Pencak silat	25 orang
13	Arosbaya	-Hadrah	20 orang
14	Geger	-Hong Bahong	20 orang
15	Klampis	-Barongan	10 orang
16	Sepulu	-Rokat tase'	100 orang
17	Tanjung Bumi	-Mantan kak okek -Angklung topeng tamba'	15 orang 15 orang
18	Kokop	-Hadrah	20 orang

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangkalan Tahun 2023

Kesenian dan tradisi di Kabupaten Bangkalan rata-rata beranggotakan 26 orang. Kesenian paling banyak yaitu hadrah yang tersebar di Kecamatan Bangkalan, Tanah Merah, Arosbaya, dan Kokop. Disamping itu Jumlah budayawan di Kabupaten Bangkalan ada sebanyak 8 orang dan jumlah seniman sebanyak 15 orang.

2.2.3.2 Olah Raga

Pembangunan di bidang olahraga diarahkan kepada peningkatan prestasi olahraga di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat luas. Selain itu, pembangunan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kondisi fisik dan mental masyarakat, memajukan olahraga dengan meningkatkan mutu prestasi keolahragaan di Kabupaten Bangkalan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya fasilitas olahraga yang memenuhi standar sehingga perlu peningkatan. Kekurangan fasilitas olahraga tersebut sangat mempengaruhi prestasi olahraga di Kabupaten Bangkalan, artinya belum semua cabang olahraga terfasilitasi

dengan baik, sehingga sangat sulit untuk mengembangkan prestasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan secara bertahap dan berkesinambungan berupaya untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan dan penyediaan anggaran bagi cabang olahraga melalui KONI Bangkalan.

Adapun indikator kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga sebagai berikut:

Tabel 2.15
Perkembangan Olahraga
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Capaian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Prasarana Olahraga	431	431	439	439	442
Jumlah Klub Olahraga	157	235	252	272	252
Jumlah Sarana Olahraga	540	545	554	613	616
Jumlah pemuda berprestasi	30	6	2	8	8
Jumlah atlet yang dibina	763	20	14	87	50
Jumlah atlet berprestasi	776	1.186	233	289	74

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bangkalan Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana olahraga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berbanding terbalik dengan bertambahnya sarana olahraga, jumlah atlet yang dibina mengalami penurunan. Jumlah atlet berprestasi juga menurun dari tahun 2019 sebanyak 1.186 atlet menjadi 233 atlet. Program dan kegiatan pembangunan urusan pemuda dan olahraga ditujukan untuk mencetak pemuda-pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di tingkat regional dan nasional.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci strategi dalam mempersiapkan terwujudnya anak bangsa yang demokratis, berketrampilan, cerdas, kreatif, memperteguh akhlak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia pada umumnya

untuk menghadapi persaingan global yang tanpa batas, khususnya mempersiapkan anak-anak di daerah, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, seiring dengan pelaksanaan otonomi.

Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Bangkalan di bidang pendidikan termasuk dalam urusan wajib pendidikan, dilaksanakan untuk peningkatan angka partisipasi sekolah; peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan; peningkatan kualitas proses pembelajaran; peningkatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengawas dan penilik; dan peningkatan minat baca masyarakat.

Pendidikan semata-mata bukan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk masyarakat dan swasta. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara berjenjang yaitu mulai pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat pendidikan selain dilaksanakan oleh Pemerintah juga dilaksanakan oleh swasta melalui pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan Al-qur'an, madrasah, pondok pesantren dll. Pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 dimana kebijakan pendidikan diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran pendidikan sebagai peningkatan sumber daya manusia serta membentuk kapasitas dalam kompetensi era globalisasi.

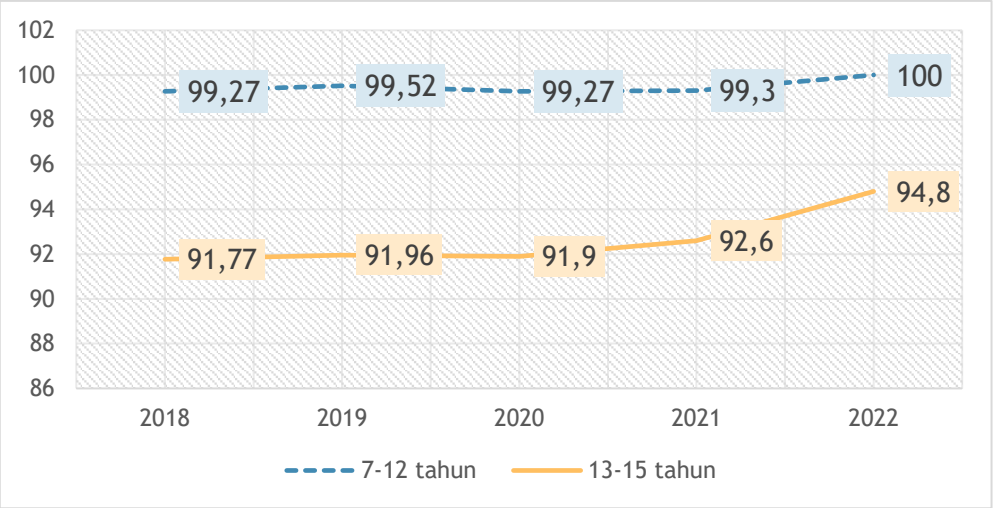

Grafik 2.22
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan, 2023

Angka partisipasi sekolah pada tingkat SD/Mimengalami fluktuasi. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, angka ini menunjukkan tren kenaikan, namun pada 2020 turun sebanyak 0,86. Tahun 2021, angka tersebut naik hingga mencapai nilai 92,6 dan tahun 2022 mencapai nilai 94,8. Adapun untuk tingkat SMP/MTs tahun 2017 sebesar 99,51. Tahun berikutnya turun menjadi 99,27. Tahun 2019 hingga 2022 tren APS SMP/MTs naik, namun kembali turun menjadi 99,27 pada tahun 2020.

Perkembangan Jumlah Murid, Guru, dan Unit Sekolah Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Atas Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.15 dan tabel 2.16. Dari tabel di bawah menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Bangkalan menunjukkan dimana peningkatan jumlah murid secara keseluruhan (SD/sederajat - SMA/sederajat) terjadi di tahun 2021. Pada tabel tersebut juga dapat diamati bahwa minat masyarakat pada pendidikan sekolah dasar banyak bergeser ke pendidikan berbasis agama (MI).

Peningkatan murid juga diiringi dengan peningkatan jumlah guru di seluruh jenjang pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Begitu juga dengan peningkatan jumlah sekolah juga mengalami kenaikan sehingga dapat menjadi pendorong peningkatan daya tampung

murid serta memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Peningkatan jumlah sekolah terlihat pada tahun 2018 ke 2019 meskipun peningkatan jumlah unitnya tidak begitu signifikan. Tahun 2020, adanya perubahan pola interaksi karena covid-19 menyebabkan menurunnya jumlah unit ketersediaan sekolah di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.16
Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Taman Kanak-Kanak (TK)						
	a. Negeri	Unit	1	1	1	1	4
	b. Swasta	Unit	478	496	493	459	482
	JUMLAH		479	497	494	460	486
2	Sekolah Luar Biasa (SDLB)						
	a. Negeri	Unit	1	1	1	1	1
	b. Swasta	Unit	1	1	1	1	3
	JUMLAH		2	2	2	2	4
3	Sekolah Dasar (SD)						
	a. Negeri	Unit	650	650	650	648	650
	b. Swasta	Unit	57	59	55	59	62
	JUMLAH		707	709	705	707	712
4	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)						
	a. Negeri	Unit	55	55	55	55	55
	b. Swasta	Unit	170	183	171	185	191
	JUMLAH		225	238	226	240	246
5	Jumlah Sekolah Umum dan Agama						
	SD/MI	Unit	848	851	851	848	848
	SMP/MTs	Unit	366	381	381	384	384
	SMA/MA	Unit	128	138	136	69	69
	SMK	Unit	64	65	65	65	65
	JUMLAH		1406	1435	1433	1366	1366

Sumber Data: BPS Kabupaten Bangkalan, Tahun 2023

Tabel 2.17
Jumlah Guru dan Murid
Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Atas
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Guru						
	SD	Orang	6.612	6.589	5409	6.160	5.871
	SMP	Orang	3.456	3.383	2388	2.759	2.786
	SMA	Orang	2.009	1.670	853	909	1.000
	SMK	Orang	814	797	797	806	916
	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Orang	1.199	1.222	1098	1.290	1.443
	a. Negeri	Orang	55	55	53	47	63
	b. Swasta	Orang	1.144	1.167	1045	1.243	1.380
	Madrasah Tsanawiyah (MTs)		1.648	1.721	1440	1.803	2.046
	a. Negeri	Orang	75	75	55	56	88
	b. Swasta	Orang	1.573	1.646	1385	1.747	1.958
2	Jumlah Murid						
	SD	Siswa	116.256	114.999	102.315	98.625	96.693
	SMP	Siswa	37.147	35.878	35.242	35.965	35.827
	SMA	Siswa	24.011	24.962	16.398	16.607	16.413
	SMK	Siswa	12.735	14.288	14.288	14.845	15.207
	Madrasah Ibtidaiyah (MI)		13.016	14.273	1.916	15.690	15.607
	a. Negeri	Siswa	753	753	941	900	957
	b. Swasta	Siswa	12.263	13.520	14.996	14.790	15.119
	Madrasah Tsanawiyah (MTs)		14.723	15.992	1.630	15.498	15.875
	a. Negeri	Siswa	824	824	790	922	840
	b. Swasta	Siswa	13.899	15.168	14.749	14.576	15.035

Sumber Data : Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, 2023

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka yang harus dilaksanakan adalah bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat itu secara sadar untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta wawasan melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Pendidikan tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan saja akan tetapi juga dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan juga pihak swasta seperti tampak pada tabel diatas.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk aspek dalam rangka peningkatan derajat hidup manusia serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan modal utama dalam pembangunan, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dapat dilihat dari 2 indikator yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan, dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

Angka Partisipasi Murni merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender di bidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar untuk Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2018 dan 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)					Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
SD/ MI /Sederajat	95,41	96	95,72	96,39	99,99	110,54	109,25	107,29	108,39	108,56
SMP/ MTs /Sederajat	73,81	73,46	74,4	74,16	72,92	90,03	84,86	87,83	89,64	94,50
SMA/ SMK/Sederajat	40,06	39,92	40,46	41,61	41,39	49,37	55,91	56,07	57	61,76

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, Tahun 2023

2.3.1.2 Kesehatan

Urusan kesehatan memegang peranan penting dalam upaya untuk irigasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025, ditegaskan bahwa Pembangunan Kesehatan diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang memadai, keberadaan/ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sangatlah penting baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selama tahun 2015-2019 pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangkalan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berbagai fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai dapat dijadikan barometer untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan.

Tabel 2.19
Perkembangan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	RSU Daerah Pemerintah	Unit	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Swasta	Unit	2	3	3	3	3
3	Balai Pengobatan (BP)	Unit	232	232	232	232	232
4	Puskesmas Rawat Inap	Unit	25	29	29	29	27
5	Puskesmas Pembantu	Unit	69	72	72	72	56
6	Puskesmas Keliling	Unit	41	41	41	16	16
7	Rumah Sakit Bersalin	Unit	2	2	2	2	4
8	Praktik Dokter Perseorangan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA
9	Posyandu	Unit	1.119	1.084	1136	1136	1126
10	Polindes	Unit	281	189	189	189	189
11	Poskesdes	Unit	NA	NA	65	65	65

Sumber data: BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan RSUD, rumah bersalin dan Balai Pengobatan di Kabupaten Bangkalan jumlahnya tetap. Sedangkan jumlah Puskesmas Rawat Inap tidak ada peningkatan. Puskesmas Pembantu sejak tahun 2018 sebanyak 69 unit dan bertambah jumlahnya pada tahun 2021 sebanyak 72 unit dan berkurang ditahun 2022 menjadi 56 unit. Posyandu sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi mengalami peningkatan, dimana semula pada tahun 2018 posyandu sebanyak 1.119 unit dan berkembang pada tahun 2021 menjadi 1.136 unit yang mengalami pengurangan di tahun 2022 menjadi 1.126 unit. Kondisi ini tentu perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi dari PD terkait untuk lebih menggiatkan dan mengembangkan posyandu di tengah-tengah masyarakat.

Terkait indikator kepuasan masyarakat di RSUD Bangkalan, berikut data capaian indikator untuk tahun 2018-2022 :

Tabel 2.20
Indikator Kepuasan Masyarakat
di RSUD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
2018	70,49
2019	70,52
2020	70,59
2021	76,97
2022	80,19

Sumber : Laporan SKM Kab Bangkalan, 2023

Indikator kepuasan masyarakat di RSUD Bangkalan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Salah satu indikator kinerja pelayanan kesehatan adalah kondisi fasilitas layanan kesehatan. Di Kabupaten Bangkalan semua tempat layanan kesehatan 100% dalam kondisi baik. Seiring dengan meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum, keberadaan Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Bangkalan sangat mendukung di bidang kesehatan, sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan yang mempunyai fasilitas lengkap dan rujukan bagi pasien yang tidak tertangani di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dapat diarahkan melalui perbaikan kinerja pengelolaan keuangan dan organisasi melalui pola PPK-BLUD sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja akreditas RSUD Kabupaten Bangkalan. Selain penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai, juga didukung oleh tenaga kesehatan sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan, perkembangan keberadaan tenaga Paramedis dan non paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan Tenaga Medis & Paramedis Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokter Umum	Orang	136	104	115	110	41
2	Dokter Spesialis	Orang	39	71	71	55	55

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
3	Dokter Gigi	Orang	40	32	32	32	20
4	Perawat	Orang	970	1.041	1.023	993	619
5	Bidan	Orang	1.095	1.118	980	1133	788
6	Ahli Penyehatan Lingkungan	Orang	4	14	15	15	15
7	Ahli kesehatan masyarakat	Orang	NA	4	8	8	8
8	Ahli Gizi	Orang	20	33	36	32	25
9	Apoteker	Orang	26	31	27	33	11

Sumber Data : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2023 dan SIPD, 2022

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan dokter umum di RSUD mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlah dokter umum, perawat dan bidan terus berfluktuasi. Hal ini adalah indikator kinerja dari layanan kesehatan. Bahwa dalam setiap fasilitas layanan kesehatan baik Rumah sakit maupun Puskesmas telah memiliki sumber daya kesehatan.

Selain RSUD, pelayanan kesehatan juga dilakukan di puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis kesehatan terdepan dalam pelayanan kesehatan, yang bersifat preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) atau Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Beberapa puskesmas memiliki sub unit pelayanan seperti puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, pos kesehatan desa maupun Pos Bersalin Desa (polindes).

Salah satu tujuan dari *Millenium Development Goals* (MDG's) adalah meningkatkan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa indikator di bidang Kesehatan antara lain: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Balita Gizi Buruk. AKB adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKI adalah jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus

insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Berikut data terkait AKB, AKI, dan Gizi Buruk di Kabupaten Bangkalan tahun 2018 sampai 2022 :

Tabel 2.22
Data AKB, AKI, dan Gizi Buruk
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	9,06	7,74	7,19	6,27	9,1
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	71,2	85,22	81,3	27,15	106,1
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,19	0,23	0,26	1,53	0,94

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, 2023

Angka kematian bayi terus menurun meskipun jumlah kematian bayi sempat bertambah pada tahun 2018 dan 2022. Sementara itu angka kematian ibu sempat mengalami kenaikan drastis di tahun 2022. Tingkatan kabupaten tidak menghitung AKI karena perhitungan AKI adalah per 100.000 kelahiran hidup sedangkan di Kabupaten Bangkalan rata-rata jumlah kelahiran hidup adalah 15.000. Sedangkan untuk jumlah kematian Ibu di tahun 2021 adalah 42 orang (25 diantaranya disebabkan oleh covid-19). Sedangkan di tahun 2022 jumlah kematian ibu menurun yaitu sebesar 16 orang.

Terkait dengan prevalensi balita gizi buruk terus mengalami fluktuasi sepanjang 5 tahun terakhir. Sedangkan jumlah penderita penyakit yang ada di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2018-2022 dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.23
Jumlah Penderita Penyakit
di Kabupaten BangkalanTahun 2018-2022

No	Jenis Penyakit	2018	2019	2020	2021	2022
1	Muntaber	0	31,123	13,608	23.254	15,271
2	Demam Berdarah	76	168	60	140	128
3	Infeksi Saluran Pernafasan	2,217	2,091	11,993	3,078	2,156
4	Campak	0	42	5	6	104
5	Malaria	0	0	0	0	0
6	Hiv/Aids	49	29	14	19	17
7	Gizi Buruk	0	1,140	1,140	91	-
8	Sakit Jiwa	30,509	1,394	1,821	1.419	1,614

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Bangakalan, 2023

Jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan dan campak terus menurun. Penderita jenis penyakit lainnya berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Adapun penderita muntaber mengalami penurunan drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 11.437. Menurunnya jumlah penderita muntaber menunjukkan semakin baiknya masyarakat dalam menjaga kebersihan seperti mencuci tangan.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata-rata layanan infrastruktur dilihat dari persentase infrastruktur dasar ke-pu-an dalam kondisi baik/terlayani dan persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang.

Tabel 2.24
Rata-Rata Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kabupaten BangkalanTahun 2018-2022

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase infrastruktur dasar ke-pu-an dalam kondisi baik	NA	62,26%	61,42%	62,80%	63,35%
Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang	NA	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Bangkalan, 2023

Berdasarkan tabel di atas persentase infrastruktur PUPR hanya mampu melayani sebesar 63,35% pada tahun 2022. Nilai ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang mampu melayani 62,80%. Adapun kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang tahun 2022 sebesar 88% meningkat sebesar 1% dari tahun sebelumnya.

A. Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi

Saluran irigasi keberadaanya sangat dibutuhkan di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan karena dapat meningkatkan ekonomi penduduk melalui sektor pertanian. Pengembangan irigasi di wilayah ini sebenarnya dapat memanfaatkan sumber-sumber air dan sungai-sungai yang ada dengan syarat wilayah yang akan diairi harus lebih rendah lokasinya. Pada kenyataannya sumber-sumber air dan sungai-sungai di Kabupaten Bangkalan lokasinya lebih rendah dari pada daerah pertanian sehingga perlu suatu teknik pemanfaatan air tersebut, misalnya dengan gravitasi bumi.

Tabel 2.25
Kondisi Irigasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2021

2018		2019		2020		2021	
BAIK	TIDAK BAIK	BAIK	TIDAK BAIK	BAIK	TIDAK BAIK	BAIK	TIDAK BAIK
68,2	31,8	68,2	31,8	59,1	41,8	59,0	41,0

Sumber: Dinas PUPR Kab. Bangkalan, 2022

Sebagian besar sektor pertanian di Kabupaten Bangkalan memanfaatkan curah hujan guna menyuplai sistem pengairan untuk areal pertaniannya. Untuk daerah irigasi pada kawasan pertanian ini sebagian besar menggunakan metode konvensional atau sistem irigasi non teknis yang juga tergantung juga dari curah hujan. Adapun Daerah Irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Dinas Pengairan Bangkalan terdapat Tujuh Puluh Delapan lokasi.

Tabel 2.26
Inventaris Daerah Irigasi Kabupaten Bangkalan

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)	Kecamatan
A.	KABUPATEN/KOTA		
I	PENGAMAT BANGKALAN		
1	D.I Dam Tunjung selatan	1807	Burneh
	D.I Dam Tunjung utara		
2	D.I Dam Patona'an	124	Burneh
3	D.I Dam Paorampak	106	Burneh
4	D.I Dam Jambu	73	Burneh
5	D.I Sumber Buluh	136	Socah
6	D.I Sumber Gening	146	Kamal
7	D.I Sumber Rojing	13	Socah
8	D.I Sumber Kabanan	54	Burneh
9	D.I Sumber Telang	75	Kamal
10	D.I Sumber Kambah	35	Socah
11	D.I Sumber Banyuajuh	10	Kamal
12	D.I Sumber Rabah	16	Kamal
II	PENGAMAT KWANYAR		
1	D.I Sumber Gayam	20	Kwanyar
2	D.I Sumber Mantan	46	Kwanyar
3	D.I Sumber Karang Entang	65	Kwanyar
4	D.I Sumber Landak	80	Tanah Merah
5	D.I Sumber Tambak Agung	18	Tanah Merah
6	D.I Sumber Petrah	75	Tanah Merah
7	D.I Sumber Kuning	20	Tanah Merah
8	D.I Sumber Pettong	30	Tanah Merah
9	D.I Pompa Pamorah	250	Tragah
10	D.I Sumber Petapan	69	Labang
11	D.I Sumber Korot	18	Labang
III	PENGAMAT BLEGA		
1	D.I Sumber Pancor	40	Blega
2	D.I Sumber Keong	5	Blega
3	D.I Sumber Gondang	40	Blega
4	D.I Sumber Karang Gayam	20	Blega
5	D.I Sumber Klampar	40	Blega
6	D.I Sumber Kesastreyan	131	Modung
	Sek. Pang pajung Timur		Modung
	Sek. Pang pajung Timur		
	Sek.Serabi Barat		Modung
7	D.I Sumber Mencay	50	Modung
8	D.I Sumber Langkap	45	Modung
9	D.I Sumber Modung	20	Modung
10	D.I Sumber Buwak	44	Modung
11	D.I Sumber Klompek	43	Modung
12	D.I Dam Glisgis	150	Modung
13	D.I Sumber Bleteran	13	Galis

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)	Kecamatan
14	D.I Sumber Kolbuk	35	Galis
15	D.I Sumber Bungur	30	Galis
16	D.I Sumber Banyubenih	4	Galis
17	D.I Sumber Tancak	3	Galis
IV	PENGAMAT AROSBAYA		
1	D.I Dam Umbul	1085	Arosbaya
	D.I Umbul Barat		
	D.I Umbul Utara		
2	D.I Sumber Lancang	20	Arosbaya
3	D.I Dam Glagah	60	Arosbaya
4	D.I Sumber Pandan Lanjang	5	Arosbaya
5	D.I Sumber Duwak	70	Arosbaya
6	D.I Sumber Kr.Asem	68	Geger
7	D.I Sumber Bindang	60	Klampis
8	D.I Sumber Bulung	8	Klampis
9	D.I Sumber Rojing	22	Klampis
10	D.I Sumber Banyuloren	20	Geger
11	D.I Sumber Pocong	25	Geger
12	D.I Sumber Kemarong	75	Geger
13	D.I Sumber Kompol	60	Geger
14	D.I Sumber Tancak/Agung	10	Geger
V	PENGAMAT SEPULU		
1	D.I Dam Sepulu	35	Sepulu
2	D.I Dam Maneron	121	Sepulu
3	D.I Sumber Klabetan	22	Sepulu
4	D.I Sumber Bangsereh	50	Sepulu
5	D.I Sumber Banyior	38	Sepulu
6	D.I Sumber Jrangoh	10	Sepulu
7	D.I Sumber Gunilap	35	Sepulu
8	D.I Sumber Rajah	44	Sepulu
9	D.I Sumber Binoloh	5	Sepulu
10	D.I Dam Tagungguh	300	Tanjung Bumi
11	D.I Dam Lamkajang	169	Tanjung Bumi
12	D.I Sumber Sangkeyah	140	Tanjung Bumi
13	D.I Sumber Moddung	17	Tanjung Bumi
14	D.I Sumber Budduk	128	Tanjung Bumi
15	D.I Sumber Taman	5	Tanjung Bumi
16	D.I Sumber Kolla	3	Tanjung Bumi
17	D.I Dam Dupok	70	Kokop
18	D.I Sumber Batu Korogan	15	Kokop
19	D.I Sumber Kwanyar	7	Kokop
20	D.I Sumber Ampara'an	5	Kokop
21	D.I Sumber Coraleggung	5	Kokop
22	D.I Sumber Agung	2	Kokop
23	D.I Sumber Durjan	2	Kokop
24	D.I Sumber Tatadan	2	Kokop

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Bangkalan, 2023 (hasil konfirmasi dengan Dinas PU. Binmarga Provinsi)

B. Sumber Mata Air

Terdapat 120 lokasi sumber air dan terdapat 16 lokasi yang mempunyai debit relatif besar, yang tersebar di 11 Kecamatan. Dari ke-16 sumber air tersebut, sumber air Pocong mempunyai debit terbesar, sehingga oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan penduduk di bawah pengelolaan PDAM. Disamping itu, kebutuhan air bersih juga dikelola oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) untuk melayani layanan air bersih tingkat Pedesaan. Jumlah Rumah Tangga yang terlayani KPSPAM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Lokasi Sumber Mata Air Kabupaten Bangkalan (Debit Besar)

NO.	Sumber Air	Lokasi (Kecamatan)	Jarak (KM)	Kapasitas (Lt/Dt)
1.	Gening	Kamal	35	207
2.	Pocong	Tragah	30	4.500
3.	Buluh	Socah	27	160
4.	Klompek	Modung	53	75
5.	Langkap	Modung	53	200
6.	Kesatrian	Modung	53	180
7.	Banyuputih	Galis	25	80
8.	Karang Gentang	Kwanyar	40	63
9.	Mantan	Kwanyar	40	65
10.	Duwak	Arosbaya	13	84
11.	Kemarong	Geger	20	150
12.	LB. Paseser	Sepulu	7	82
13.	Cobik	Bangkalan	17	250
14.	DAM Tunjung	Burneh	20	2000
15.	Rencana Waduk Blega	Blega	31	3,2 m³/det
16.	Sungai Geger	Geger	10	1000

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Bangkalan, 2023

C. Jalan

Total panjang jaringan jalan yang ada di Kabupaten Bangkalan sampai dengan tahun 2020 adalah sepanjang 721.365 Km. Jaringan jalan

kabupaten di Kabupaten Bangkalan sebagian besar telah beraspal sepanjang 721.365 Km pada tahun 2020 (Dinas PUPR Kab. Bangkalan, 2021). Jenis prasarana jalan di Kabupaten Bangkalan berupa jalan aspal, kerikil/makadam, tanah, paving dan beton rabat. Untuk jalan aspal terdapat pada ruas-ruas jalan utama Kecamatan, sedangkan jalan tanah dan makadam masih banyak terdapat pada jalan desa dan jalan lingkungan. Kondisi jalan dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: baik, sedang, rusak dan rusak berat. Berikut adalah data yang menggambarkan tentang panjang jalan menurut kondisinya.

Tabel 2.28
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Bangkalan (km) Tahun 2018-2022

NO.	KETERANGAN	JUMLAH					SATUAN
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Panjang Jalan Kabupaten / Kota						
1	Kondisi Baik	320,263	276,950	303,255	304,505	240,915	Km
2	Kondisi Sedang	148,618	194,068	180,160	179,510	228,625	Km
3	Kondisi Rusak Ringan	105,711	114,801	106,200	125,850	66,925	Km
4	Kondisi Rusak Berat	146,773	135,546	131,750	111,500	184,900	Km
TOTAL		**721,365**	**721,365**	**721,365**	**721,365**	**721,365**	**Km**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Bangkalan, 2023

pada tahun 2020 tidak ada penanganan jalan kabupaten karena *refocusing* anggaran. sehingga kondisi jalan yang rusak pada tahun 2021 meningkat. ini juga terjadi pada tahun 2022. Selanjutnya diperlukan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar kondisi jalan tetap terpelihara sehingga memudahkan akses bagi warga serta memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pengangkutan hasil-hasil produksi di wilayah Kabupaten Bangkalan menuju pasar–pasar

potensial dan memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.29
Panjang Jalan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2021

NO.	KETERANGAN JALAN	JUMLAH RUAS	PANJANG RUAS (KM)
A	Jalan Desa	723	849,134
	Jalan Poros Desa	723	849,134
B	Jalan Kabupaten	165	721,365
	Jalan Kabupaten Kecamatan	115	694,250
	Jalan Kabupaten Perkotaan	50	27,115
C	Jalan Nasional	9	111,150
	Jalan Nasional	9	111,150
TOTAL		897	1.681,65

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan, 2022 & Dinas PUPR Kab Bangkalan, 2022

D. Sungai

Sungai di Kabupaten Bangkalan bervariasi baik panjang sungai maupun lebar dan kedalaman sungai, Bagian Hulu relatif sempit sekitar 3-5 meter. Bagian rentang dan hilir melebar seiring bersatunya beberapa anak sungai. Demikian pula kedalaman sungai bervariasi. Perbedaan kedalaman (tinggi muka air) sungai terjadi signifikan pada musim kemarau dengan musim hujan. Selain itu, perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor alam diantaranya banjir, erosi dan ulah manusia.

Pada grafik digambarkan tiga sungai yang memiliki debit maksimum yang terbesar adalah Kali Blega 62,83 m3/det, Sumber Pocong 57 m3/det, dan Kali Konang 26 m3/det. Namun apabila dilihat rasio perbedaan debit antara debit maksimum dan minimum (Qmax/Qmin) maka sungai-sungai yang berada di Kabupaten Bangkalan tidak lebih besar dari 50. Hal ini menunjukkan bahwa Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bangkalan masih aman terkendali, dan belum terjadi kerusakan pada DAS tersebut.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar sumber mata air, sungai/saluran irigasi primer, sekunder dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kawasan tersebut dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian kawasan sungai maupun sumber mata air lainnya.

Air yang mengalir ke sungai dari hulu ke hilir mempunyai 2 fase yang pertama air mengalir dari sumber mata air menuju muara sungai sebagai mekanisme mengalirnya air bersih untuk kegiatan pemenuhan hajat kehidupan, fase kedua air laut masuk ke sungai sebagai proses penetralan sumber-sumber pencemar yang ada di sungai.

Tabel 2.30
Debit Air Sungai
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Nama Sungai	Kecamatan	Desa	Bangunan	Debit (m3/dt)					Keterangan
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Gulung	Kamal	1. Gili Barat 2. Gili Timur 3. Gili Anyar	Sumber Air Jembatan	1,6125	1,5625	1,51	1,46	1,413	debit air dari sumber mencukupi kebutuhan irigasi
			Gili Timur	Sumber Air Jembatan	1,2125	1,1625	1,11	1,06	1,013	
2	Kebun	Kamal	1. Kamal 2. Kebun	Sumber Air Jembatan	1,4125	1,3625	1,31	1,26	1,213	sedimentasi di sungai mempengaruhi debit sungai
3	Telang	Kamal	1. Telang	Jembatan	0,8	0,7500	0,70	0,65	0,600	sedimentasi tanah berdampak thd debit air
4	Gladak Cina	Labang	1. Sukolilo Barat	Jembatan	1,602	1,5520	1,50	1,45	1,402	debit air dari sumber mencukupi kebutuhan irigasi
			2. Bringen	Jembatan	4	3,5520	3,50	3,45	3,402	
5	Jangjang	Kwanyar	1. Batah Barat 2. Batah Timur	Jembatan	1402,00	1401,95	1401,90	1401,85	1401,800	sedimentasi di sungai mempengaruhi debit sungai
6	Kolpoh	Kwanyar	1. Ketetang	Jembatan	1,602	1,5520	1,50	1,45	1,402	debit air mencukupi
7	Nangger	Modung	1. Pangpajung	Jembatan	2,4045	2,3545	2,30	2,25	2,205	debit air mencukupi
8	Lekesepat	Modung	1. Patereman 2. Kolla 3. Srabi Timur	Sumber Air Jembatan	2,9125	2,8625	2,81	2,76	2,713	debit air mencukupi
9	Sbr. Kolla	Modung	1. Srabi barat	Sumber Air Jembatan	0,6125	0,5625	0,51	0,46	0,413	sedimentasi di sungai mempengaruhi debit sungai

No	Nama Sungai	Kecamatan	Desa	Bangunan	Debit (m3/dt)					Keterangan
					2018	2019	2020	2021	2022	
10	Sikecil	Modung	1. Patenteng	Jembatan	1,2125	1,1625	1,11	1,06	1,013	sedimentasi di sungai mempengaruhi debit sungai
11	Jangklompang	Galis	1. Paka'an Laok	Jembatan	0,808	0,7580	0,71	0,66	0,608	Perbedaan kontur dan sedimentasi
13		Modung	2. Gligis 3. Pakong			-0,0500	-0,10	-0,15	-0,200	di sungai mempengaruhi debit sungai
14	Cetek	Blega	1. Rosep	Jembatan	3,05	3,0000	2,95	2,90	2,850	debit air mencukupi kebutuhan irigasi
15	Blega	Blega	1. Blega 2. Blega oloh	Jembatan	3,05	3,0000	2,95	2,90	2,850	debit air mencukupi kebutuhan irigasi
16	Konyak	Blega	1. Nyiormanes	Jembatan	1,65	1,6000	1,55	1,50	1,450	debit air mencukupi kebutuhan irigasi
					8,6	8,5500	8,50	8,45	8,400	
17	Pandean	Galis Blega	1. Tellok 1. Kajjan	Sumber air	2,25	2,2000	2,15	2,10	2,050	debit air mencukupi kebutuhan irigasi
18	Lembungselor	Galis	1. Kelbung	Jembatan	3,6	3,5500	3,50	3,45	3,400	Distribusi air dari sungai utama cukup
19	Tlagah	Galis	1. Tlagah	Jembatan	1,85	1,8000	1,75	1,70	1,650	
20	Sbr. Pocong	Tragah	1. Karang Leman 2. Pocong 3. Pamorah	Jembatan	2,0125	1,9625	1,91	1,86	1,813	Debit air dihasilkan oleh sumber air untuk keperluan air minum untuk irigasi masih belum terpenuhi
21	Gladak Landung	Socah	1. Pataoman	Jembatan	2,15	2,1000	2,05	2,00	1,950	debit air memenuhi kebutuhan irigasi

No	Nama Sungai	Kecamatan	Desa	Bangunan	Debit (m3/dt)					Keterangan
					2018	2019	2020	2021	2022	
22	Bancaran	Bangkalan	1. Bancaran	Bangunan Bagi	4,45	4,4000	4,35	4,30	4,250	wilayah Tunjung bisa debit air memenuhi kebutuhan irigasi
23	Serpang	Bangkalan	1. Sarbiyan 2. Gebang	Jembatan Jembatan	2,7125	2,6625	2,61	2,56	2,513	debit air mencukupi kebutuhan irigasi
24	Jambu	Burneh Socah	1. Jambu	Jembatan	1,05	1,0000	0,95	0,90	0,850	Debit air memenuhi kebutuhan irigasi
			1. Parseh	Bangunan Bagi	0,6	0,5500	0,50	0,45	0,400	
			2. Bilaporah	Bangunan Bagi	1,2125	1,1625	1,11	1,06	1,013	
			1. Mertajasah	Bangunan Bagi	2,6	2,5500	2,50	2,45	2,400	
25	Bangkalan	Burneh Bangkalan	1. Tunjung	Bangunan Bagi	1,85	1,8000	1,75	1,70	1,650	Debit air memenuhi kebutuhan irigasi wilayah Kec. Bangkalan beberapa titik sungai di genangi sampah
			1. Pangeranan	Bangunan Bagi	1,85	1,8000	1,75	1,70	1,650	
			2. Kraton	Bangunan Bagi	1,85	1,8000	1,75	1,70	1,650	
			3. Pejagan	Bangunan Bagi	1,85	1,8000	1,75	1,70	1,650	
26	Bubut	Burneh	1. Sobih	Jembatan	1,85	1,8000	1,75	1,70	1,650	debit air dari sungai utama tidak terdistribusi pengaruh sedimen dan kecepatan air sungai utama
27	Durga	Burneh	1. Pangolangan	Jembatan	0,65	0,6000	0,55	0,50	0,450	kontur tanah yang tinggi menyebabkan

No	Nama Sungai	Kecamatan	Desa	Bangunan	Debit (m3/dt)					Keterangan
					2018	2019	2020	2021	2022	
28	Pakem	Geger	Geger	Jembatan	0,9125	0,8625	0,81	0,76	0,713	kontur tanah yang tinggi menyebabkan debit air tidak bisa mengalir terutama di musim kemarau
29	Aengkoning	Kokop	1. Bandang laok	Jembatan	0,6	0,5500	0,50	0,45	0,400	Sedimentasi dan kontur tanah yang tinggi menyebabkan debit yang sampai di sungai kecil
30	Dupok	Kokop	1. Dupok	Bendung Dupok	0	-0,0500	-0,10	-0,15	-0,200	
31	Brumbung	Kokop	Tramok	Jembatan	0,65	0,6000	0,55	0,50	0,450	Sedimentasi dan kontur tanah yang tinggi menyebabkan debit yang sampai di sungai kecil
32	Kirkir	Kokop	Ampara'an	Jembatan	1,808	1,7580	1,71	1,66	1,608	
33	Purwo	Kokop	1. Lembung gunong	Jembatan	0,6	0,5500	0,50	0,45	0,400	
34	Torpong	Tanjung Bumi	1. Planggiran 2. Aeng taber	Jembatan	1,85	1,8000	1,75	1,70	1,650	Debit air mencukupi
35	Tambak	Tanjung Bumi	1. Tagungguh	Jembatan	1,85	1,8000	1,75	1,70	1,650	Debit air mencukupi
36	Tambak Pocok	Tanjung Bumi	1. Tambak Pocok 2. Bumi Anyar		0,65	0,6000	0,55	0,50	0,450	Sedimentasi dan kontur tanah yang tinggi menyebabkan debit yang sampai di sungai kecil
37	Budduk	Tanjung Bumi	1. Macalah	Jembatan	4,25	4,2000	4,15	4,10	4,050	Debit air memenuhi, kecepatan air lambat kemungkinan bisa menyebabkan air tidak menjangkau daerah lain
38	Gladak mati	Sepulu	1. Klabetan 2. Maneron	Jembatan	0,608	0,5580	0,51	0,46	0,408	Sedimentasi, kontur tanah yang tinggi menyebabkan debit yang sampai di sungai kecil
39	Gangseyan	Sepulu	1. Gangseyan	Jembatan	0,65	0,6000	0,55	0,50	0,450	

No	Nama Sungai	Kecamatan	Desa	Bangunan	Debit (m3/dt)					Keterangan
					2018	2019	2020	2021	2022	
40	Lembung	Sepulu	1. Lembung Paseser	Jembatan	0,65	0,6000	0,55	0,50	0,450	
41	Nangsakan	Klampis	1. Larangan sorjan	Jembatan	0,65	0,6000	0,55	0,50	0,450	Sedimentasi, kontur tanah yang tinggi menyebabkan debit yang sampai di sungai kecil
42	Ganggakap	Klampis	1. Tenggun dajah	Jembatan	0,65	0,6000	0,55	0,50	0,450	
43	Pajung	Klampis	1. Bulukagung	Jembatan	0,65	0,6000	0,55	0,50	0,450	
44	Brumbung	Klampis	1. Bator	Jembatan	0,65	0,6000	0,55	0,50	0,450	
				Saluran Pembuang	2,6	2,5500	2,50	2,45	2,400	
45	Tambangan	Arosbaya Klampis	1. Buduran 2. Tengket 1. Muarah	Jembatan	6,05	6,0000	5,95	5,90	5,850	Debit air memenuhi kebutuhan irigasi
46	Taburjan	Arosbaya	1. Glagah 2. Ombul	Sumber air Bendung Ombul	1,25	1,2000	1,15	1,10	1,050	Debit air di bendung kecil
47	Asemtanto	Arosbaya	1. Lajing	Bangunan Pengambilan	19,4	19,3500	19,30	19,25	19,200	Debit air memenuhi kebutuhan irigasi beberapa titik pengambilan terdapat sedimentasi tanah

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Bangkalan, 2023

E. Drainase/Pematusan/Avour

Saluran drainase yang ada di Kota Bangkalan sebagian sudah bersifat teknis,namun sebagian lagi masih bersifat alami dan merupakan saluran terbuka/saluran tertutup. Saluran drainase ini umumnya mengikuti jaringan jalan yang ada dan berfungsi secara baik kecuali beberapa tempat yang menimbulkan genangan pada waktu hujan. Pembuangan akhir dari saluran drainase diarahkan ke seluruh saluran primer.

Saluran pembuangan primer air hujan/irigasi yang terdapat di Kota Bangkalan meliputi:

- Sungai Bangkalan dengan sungai Kepang sebagai anak sungainya.
- Sungai Jambu.
- Sungai Bancaran.
- Saluran-saluran pematus permukiman.

Saluran-saluran pembuang atau pematus tersebut akan bermuara ke Selat Madura yang berada di sebelah Barat Kota Bangkalan, sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan sistem drainase yang ada saat ini adalah dengan pemeliharaan dan perbaikan saluran serta pembangunan saluran-saluran baru terutama untuk daerah padat dan tergenang.

Tabel 2.31
Jaringan Drainase di Kabupaten Bangkalan

No	Keterangan	Nama	Panjang (Km)
1	Drainase Primer	Kali Jangjang	5,45
2	Drainase Primer	Kali Topong	7,93
3	Drainase Primer	Kali Tambak	6,25
4	Drainase Primer	Kali Jilanabume	4,75
5	Drainase Primer	Kali Budur	9,59
6	Drainase Primer	Kali Torpong	7,67
7	Drainase Primer	Kali Maneron	4,31
8	Drainase Primer	Kali Glintong	3,20
9	Drainase Primer	Kali Bator	4,43
10	Drainase Primer	Kali Rojing	2,68
11	Drainase Primer	Sungai Bekapok	2,33
12	Drainase Primer	Sungai Mrandung	1,16

No	Keterangan	Nama	Panjang (Km)
13	Drainase Primer	Kali Tambangan	17,28
14	Drainase Primer	Kali Asemtantoh	6,55
15	Drainase Primer	Kali Bancaran	6,91
17	Drainase Primer	Kali Gladagpanjang	7,95
18	Drainase Primer	Kali Kejawan	0,50
19	Drainase Primer	Kali Telang	8,92
20	Drainase Primer	Kali Gilih	2,28
21	Drainase Primer	Kali Kebun	1,73
22	Drainase Primer	Kali Morkepah	1,82
23	Drainase Primer	Kali Koalas	6,08
24	Drainase Primer	Kali Dremmer	4,53
25	Drainase Primer	Kali Mencoy	5,74
26	Drainase Primer	Kali Sumberkolla	10,28
27	Drainase Primer	Kali Blega Satu	8,34
28	Drainase Primer	Kali Blega Dua	5,93
29	Drainase Primer	Kali Modung	0,92
30	Drainase Primer	Kali Buwak	0,68
31	Drainase Primer	Kali Girbedih	0,78
32	Drainase Primer	Kali Pejagan	6,48
33	Drainase Primer	Kali Bancaran	1,21
34	Drainase Primer		0,41
35	Drainase Primer		0,64
36	Drainase Primer		0,78
37	Drainase Primer		0,72
38	Drainase Primer		0,10
39	Drainase Primer		0,11
40	Drainase Primer		0,07
41	Drainase Primer		0,35
42	Drainase Primer		0,36
43	Drainase Primer		0,88
44	Drainase Primer		0,85
45	Drainase Primer		0,77
46	Drainase Primer		1,27
47	Drainase Primer		0,34
48	Drainase Primer		0,92
49	Drainase Primer		1,40
50	Drainase Primer	Kali Jambu	8,46
51	Drainase Primer	Kali Jambu	0,36
52	Drainase Primer		2,05
63	Drainase Primer	Kali Jangklompan	8,60
64	Drainase Primer	Kali Bancelot	5,72

No	Keterangan	Nama	Panjang (Km)
65	Drainase Primer		0,93
66	Drainase Primer	Kali Pandan	5,97
67	Drainase Primer	Kali Morombuh	3,54
68	Drainase Primer		0,60
70	Drainase Primer		3,31
71	Drainase Primer	Kali Pandean	18,01
72	Drainase Primer	Kali Soala	8,78
73	Drainase Primer		0,35
74	Drainase Primer		1,25
75	Drainase Primer	Kali Sumbernyamplong	19,58
76	Drainase Primer	Kali Platar	5,48
77	Drainase Primer		0,26
78	Drainase Primer		2,75
79	Drainase Primer		1,15
80	Drainase Primer		0,35
81	Drainase Primer		0,13
82	Drainase Primer		2,14
83	Drainase Primer		0,10
84	Drainase Primer		0,99
85	Drainase Primer		0,37
86	Drainase Primer	Kali Petesan	4,31
87	Drainase Primer		0,05
88	Drainase Primer	Kali Sumberkembang	8,19
89	Drainase Primer		0,02
90	Drainase Primer		1,85
91	Drainase Primer	Kali Klompek	5,15
92	Drainase Primer		2,66
93	Drainase Primer		0,05
94	Drainase Primer		4,38
95	Drainase Primer		0,02
96	Drainase Primer		3,82
97	Drainase Primer		1,64
98	Drainase Primer		4,72
99	Drainase Primer	Kali Tojurung	13,57
100	Drainase Primer	Kali Kebang	2,47
101	Drainase Primer	Kali Kebang	1,53
105	Drainase Primer		0,34
106	Drainase Sekunder		65,77
107	Drainase Sekunder		0,91
108	Drainase Sekunder		39,76

Sumber : KLHS P-RPJMD Kabupaten Bangkalan, 2021

F. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dinas PUPR dalam tiga tahun terakhir mencatat pemenuhan standar pelayanan minimum yang tergambarkan dalam penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Presentase Layanan Air Minum di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Layanan Penyediaan Air Minum Tahun	Presentase Layanan
1	2018	41,67
2	2019	42,02
3	2020	42,38
4	2021	44,29
5	2022	44,74

Sumber Data : Dinas PRKP Kabupaten Bangkalan, 2023

Kegiatan air minum yang dilaksanakan telah mampu melayani sebanyak 44,74% dari total jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan peningkatan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan air minum bagi penduduk Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.33
Presentase Layanan Sanitasi (Pengolahan air limbah domestik) di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Kegiatan Sanitasi Tahun	Presentase Layanan
1	2018	36,88
2	2019	36,98
3	2020	26,28
4	2021	27,34
5	2022	28,63

Sumber Data : Dinas PRKP Kabupaten Bangkalan, 2023

Kondisi pelayanan sanitasi mengalami penurunan pada tahun 2020 hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan refocusing anggaran sehingga cakupan layanan sanitasi pada tahun 2020 sebesar

26.28% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 dan 2022 pelayanan sanitasi dapat ditingkatkan kembali.

Tabel 2.34
Indikator dan Realisasi dan Target Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangkalan

Indikator	Baseline	Realisasi		Target			Target Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prosentase penataan ruang yang dilaksanakan	88.97 %	67%	78.33 %	90.98 %	90.98 %	90.98 %	90.98 %
Prosentase pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air	68%	26%	16%	80%	83%	85%	85%
Prosentase jasa kontruksi yang dilaksanakan	98.99 %	16.65 %	33%	100%	100%	100%	100%
*Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik	65%	37,41 %	40,97 %	71%	73%	75%	75%
**Persentase jalan kabupaten/desa dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	65%	32,45 %	33,06 %	71%	73%	75%	75%
*Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Pedesaan dalam Kondisi baik	66.25 %	83.33 %	33,5%	70,83 %	72,80 %	74,76 %	74,76 %

** = Indikator RPJMD awal dimulai dari tahun 2019-2021*
*** = Perubahan indikator yang dimulai dari tahun 2021-2023*
Sumber Data : Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, 2021

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rata-rata layanan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditinjau dari persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik.

Tabel 2.35
Rata-Rata Kualitas Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bangkalan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	31.05%	32,37%	35,73%	36,04%	36,18%

Sumber Data : Dinas PRKP Kab. Bangkalan, 2023

Indikator sasaran RPD infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dengan kondisi baik menunjukkan *trend* positif dari tahun ke tahun. Kawasan perumahan adalah kawasan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. Kawasan perumahan di Kabupaten Bangkalan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum diimbangi dengan kemampuan penyediaan, baik oleh masyarakat maupun dunia usaha dan pemerintah. Secara keseluruhan jumlah rata - rata kualitas infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 sebesar 36.18%, dimana angka ini mengalami kenaikan yang konsisten sejak tahun 2018. Hal ini juga mempengaruhi kenaikan jumlah rumah layak huni yang meningkat sebesar 3.36% dari tahun 2019 (Dinas PRKP tahun 2021).

Ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang responsif (sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan), dikarenakan terbatasnya akses, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan pembiayaan perumahan. Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan mengakibatkan terjadinya mismatch pendanaan dalam pengadaan perumahan.

Di samping itu, sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah masih perlu dimantapkan, baik melalui mekanisme pasar formal maupun melalui mekanisme perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat. Berdasarkan data yang telah didapat angka penurunan jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2020 cukup kecil yaitu hanya 19 unit dari tahun sebelumnya.

Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan, baik sebagai kawasan perumahan maupun kawasan permukiman yang berkelanjutan, seperti terbatasnya ruang terbuka hijau, lapangan olah raga, tempat usaha dan perdagangan di samping prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Secara fisik lingkungan, masih banyak ditemui kawasan perumahan dan permukiman yang telah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Dampak semakin menurunnya daya dukung lingkungan di antaranya adalah dengan meningkatnya lingkungan permukiman kumuh pertahunnya, Secara visual wujud lingkungan, juga terdapat kecenderungan yang kurang positif bahwa sebagian kawasan perumahan dan permukiman telah mulai bergeser menjadi lebih tidak teratur, kurang berjati diri, dan kurang memperhatikan nilai-nilai kontekstual sesuai sosial budaya setempat serta nilai-nilai arsitektural yang baik. Selain itu, kawasan yang baru dibangun juga tidak secara berlanjut dijaga penataannya sehingga secara potensial dapat menjadi kawasan kumuh yang baru. Perumahan dan permukiman yang spesifik, unik, tradisional, dan bersejarah juga semakin rawan keberlanjutannya, padahal merupakan aset budaya bangsa yang perlu dijaga kelestariannya.

Tabel 2.36
Kondisi Perumahan dan Permukiman
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	111.220	111.797	190.422	194.942	197.637
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni/RTLH (Unit)	119.134	118.557	118.538	116.278	111.323
3	Jumlah Kawasan Permukiman (Unit)	230.354	230.354	308.960	27.795,08	308.960

Sumber: Dinas PRKP Kab. Bangkalan, 2023

Secara umum jumlah rumah layak huni meningkat sedangkan jumlah rumah tidak layak huni menurun. Penyediaan dan rehabilitasi maupun fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun ini menggunakan dana BTT namun hanya sebatas bantuan material bukan berupa rumah secara fisik yang diakomodir oleh dinas PRKP. Adapun tahun lalu masih dikoordinir oleh BPBD dengan pemberian bantuan berupa penggantian atap genting atau asbes.

2.3.1.5 Pertanahan

Perkembangan hak atas tanah di Kabupaten Bangkalan secara lengkap ditampilkan pada tabel dibawah.

Tabel 2.37
Kondisi Pertanahan di Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018-2022

Elemen Data	2018	2019	2020	2021	2022
I. Jenis Hak Atas Tanah*					
1. Jumlah Hak Milik	135.883 Bidang	193.050 Bidang	213.430 Bidang	258.518 Bidang	294.585 Bidang
2. Jumlah Hak Guna Bangunan	6.639 Bidang	7.925 Bidang	9.013 Bidang	9.488 Bidang	10.981 Bidang
3. Jumlah Hak Guna Usaha	5 Bidang	5 Bidang	5 Bidang	5 Bidang	5 Bidang
4. Jumlah Hak Pakai	1.158 Bidang	1.248 Bidang	1.343 Bidang	1.475 Bidang	1.646 Bidang

Elemen Data	2018	2019	2020	2021	2022
5. Jumlah Hak Sewa	-	-	-	-	-
6. Jumlah Girik	-	-	-	-	-
7. Jumlah Hak-Hak Lain	-	237 Bidang	245 Bidang	265 Bidang	288 Bidang
II. Luas Tanah Berdasarkan Hak*					
1. Luas Hak Milik	23.579,12 M2	330.144,564 M2	360.722.549 M2	435.248.042 M2	487.136.779 M2
2. Luas Hak Guna Bangunan	427.17 M2	5.096.331 M2	5.314.502 M2	5.524.558 M2	5.839.208 M2
3. Luas Hak Guna Usaha	90,99 M2	880.713 M2	880.713 M2	880.713 M2	880.713 M2
4. Luas Hak Pakai	1.287,37 M2	13.386.467 M2	13.594.713 M2	13.947.147 M2	16.125.499 M2
5. Luas Hak Sewa	-	-	-	-	-
6. Luas Girik	-	-	-	-	-
7. Luas Hak-Hak Lain	-	444.605 M2	456.965 M2	498.675 M2	529.409 M2
III. Tanah Kosong*					
1. Jumlah Tanah Kosong	-	-	-	-	-
2. Luas Tanah Kosong	-	-	-	-	-
3. Jumlah Tanah Kosong Dimanfaatkan	-	-	-	-	-
4. Luas Tanah Kosong Dimanfaatkan	-	-	-	-	-
5. Jumlah Tanah Kosong Belum Dimanfaatkan	-	-	-	-	-
6. Luas Tanah Kosong Belum Dimanfaatkan	-	-	-	-	-
IV. Sengketa Tanah*					
1. Jumlah Kasus Sengketa Tanah**					
1. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Selesai	1 Bidang	-	-	2 Bidang	2 Bidang
2. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Belum Selesai	2 Bidang	1 Bidang	-	-	-

Sumber Data : BPN Kab Bangkalan, 2023

2.3.1.6 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu indikator tingkat Ketertiban Masyarakat adalah jumlah pelanggaran masyarakat atas Perda yang telah ditetapkan. Semakin tinggi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka makin rendah pula tingkat ketertiban masyarakat yang dicapai. Salah satu langkah yang bisa dilakukan guna menekan jumlah pelanggaran masyarakat adalah tindakan pengamanan atas wilayah lingkup kewenangan Polisi Pamong Praja yang dirasa rawan terjadi tindak pelanggaran.

Tabel 2.38

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022

No.	Uraian Data	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah pelanggaran K3	16 Kasus	35 kasus	113 kasus	139 kasus
	Pelajar	3 kasus	5 kasus	0 kasus	0 kasus
	Anak Jalanan dan Gelandangan	4 kasus	7 kasus	49 kasus	37 kasus
	Pemberantasan Pelacuran dan Pencabulan	2 kasus	7 kasus	16 kasus	1 kasus
	Pemberantasan Minuman Keras dan beralkohol	2 kasus	7 kasus	5 kasus	0 kasus
	Penertiban Reklame/ spanduk	1 kasus	5 kasus	4 kasus	57 kasus
	Penertiban Pedagang Kaki Lima	1 kasus	1 kasus	14 kasus	39 kasus
	Penghentian Reklame Pantai	1	1	0	0
	Penyegelan	1	1	25	5
	Lainnya	1	1	0	0
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	60%	65%	85%	99%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bangkalan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, bentuk pelanggaran K3 terbanyak adalah terkait dengan penertiban reklame/spanduk (59 kasus di tahun 2022) disusul dengan penertiban pedagang kaki lima (39 kasus di tahun 2022). Namun demikian banyaknya pelanggaran tersebut telah berhasil diselesaikan/ditertibkan dengan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 99%. Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian adalah semakin banyaknya sebaran petugas dan peran aktif petugas serta masyarakat maka potensi ditemukannya pelanggaran akan semakin banyak. Namun demikian, yang menjadi fokus adalah bahwa tingkat penyelesaian dari pelanggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga adanya pelanggaran tidak menjadi permasalahan masif yang dapat mengganggu ketentraman dan keamanan di daerah.

Kabupaten Bangkalan mempunyai dua iklim yaitu musim kemarau dan penghujan, dampak perubahan musim di Kabupaten Bangkalan pada saat musim kemarau terjadi kekeringan yang menyebabkan banyaknya masyarakat kekurangan air bersih selain dampak tersebut terjadi kekeringan di kawasan hutan yang dikhawatirkan terjadi kebakaran, apabila tiba musim penghujan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan dua musim tersebut di Kabupaten Bangkalan sering terjadi banjir.

Penanggulangan bencana di Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan metode mitigasi bencana, yaitu sosialisasi penanggulangan bencana pada masyarakat, melakukan assesment pada saat bencana dan memberikan bantuan kepada korban bencana serta memberikan pemulihan psikologi bagi korban bencana pada fase pasca bencana.

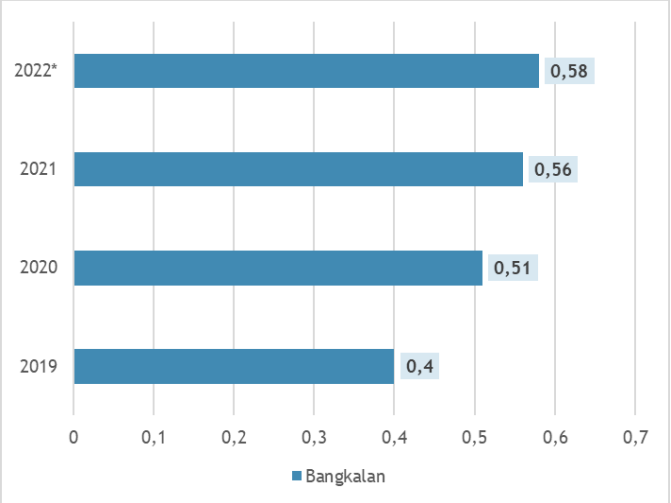

**data sementara*

Grafik 2.23

Indeks Ketahanan Bencana Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022

Sumber Data : BPBD Kab. Bangkalan, 2023

Adapun Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada Tahun 2018-2022 sebagai berikut

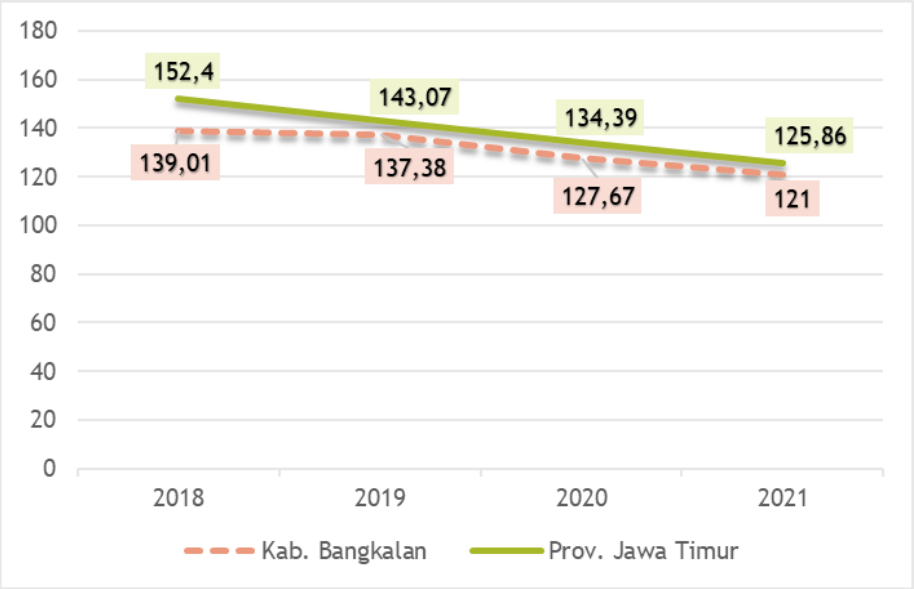

Grafik 2.24
Indeks Resiko Bencana
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2018-2022
Sumber Data : BNPB, 2023

Dalam melakukan pelayanan terhadap daerah rawan bencana beberapa kegiatan yang di lakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan melalui Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dilakukan melalui Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; serta
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui Kegiatan Kedaruratan dan Logistic.

Penanganan bencana di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai dengan kegiatan yg tercantum dalam APBD di BPBD Kabupaten Bangkalan, adapun beberapa kegiatan yg dilakukan yaitu :

1. Melakukan pencegahan berupa penguatan kapasitas berbasis masyarakat dalam pengurangan risiko bencana khususnya di daerah-daerah rawan bencana;
2. Melakukan *assesment* dan kaji cepat di lokasi terdampak pada saat terjadi bencana untuk meminimalisir dampak yang lebih luas di daerah yang terdampak bencana;
3. Memberikan bantuan kepada korban bencana sesuai kebutuhan berdasarkan hasil *assesment* dan kaji cepat yang dilakukan agar bantuan tepat sasaran;
4. Melakukan pemulihan psikologis kepada korban terdampak bencana terutama kepada kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, kaum disabilitas, ibu hamil dan kaum wanita.

2.3.1.7 Sosial

Kesejahteraan sosial diarahkan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan tingkat sosial yang rendah pula. Salah satu faktor kurangnya kesejahteraan bagi masyarakat adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil evaluasi Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan yaitu sebesar 229.000 Penduduk atau 24,62% pada tahun 2012 menjadi 18,90% atau 186.110 penduduk pada tahun 2019. Disamping masalah kemiskinan, Kabupaten Bangkalan masih mengalami permasalahan sosial lainnya yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah yaitu penanganan terhadap penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Data-data berikut ini menunjukkan kondisi PMKS di Kabupaten Bangkalan.

Tabel. 2.39
Kategori dan Jumlah PPKS
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No.	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah PPKS	87.419	539.162	501.674	638.972	721.044
2.	Jumlah yang mendapat bantuan	750	6.694	19.863	7.763	10.626
	- Jumlah anak terlantar dan lansia	-	-	3.634	64	211
	- Jumlah tuna sosial	-	46	18	27	26
	- Jumlah penyandang disabilitas	-	-	367	40	473
	- Jumlah fakir miskin	750	630	13.293	7.521	3.296
	- Jumlah korban bencana (kekeringan)	-	6.000	2.533	111	6.620
	- Jumlah PSKS	-	18	18	0	279
3.	Jumlah PPKS yang ditangani	750	6.694	19.863	7.716	10.626
4.	PPKS yang diberdayakan	750	6.694	19.863	7.716	10.626

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, 2023

Perlu dikembangkan lebih lanjut dengan mengembangkan data PPKS yang dibina dan dapat pulih kembali fungsi sosialnya, tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi permasalahan PPKS yang muncul. Dengan data tersebut nantinya akan dilihat persentase keberhasilan pembinaan para penyandang PPKS dan peningkatannya tiap tahunnya.

Terkait dengan target indikator kesuksesan urusan sosial adalah pada tahun 2021 ditarget jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 567.110 orang. Indikator pada sasaran RPD 2024-2026 adalah persentase PPKS yang ditangani. Kondisi tahun 2021-2022 PPKS yang ditangani adalah sebagai berikut:

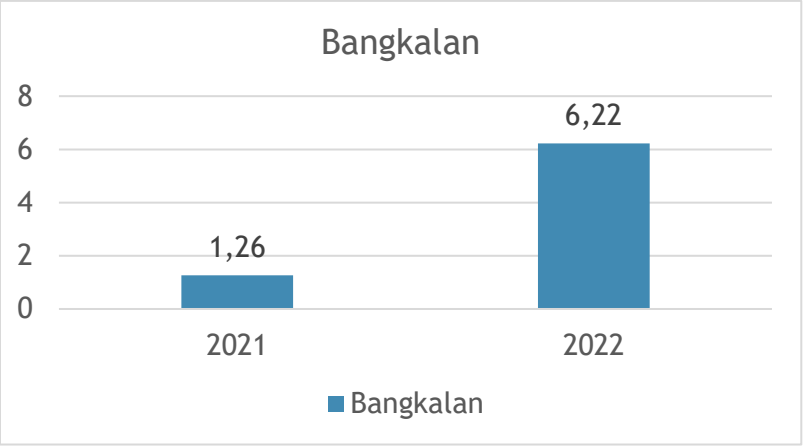

Grafik 2.25
Persentase PPKS yang ditangani
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2022
Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, 2023

Dampak yang diharapkan dari semua program atau kegiatan penyelenggaraan urusan sosial ini adalah menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) di Kabupaten Bangkalan. Selama ini, penduduk miskin belum dimasukkan sebagai PMK, namun di masa mendatang, penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan menjadi sasaran dari penyelenggaraan urusan sosial ini. Dengan demikian jumlah PPKS akan sangat besar, mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangklan masih sanagt besar. Di tahun 2018, jumlah PPKS tercatat 567.348 orang. Seiring dengan pembangunan urusan/bidang sosial di masa yang akan datang. Indikator kinerja urusan ini (jumlah PPKS) akan terus menurun.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Trend tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan masih meningkat, walaupun di tahun 2021 ada penurunan angka pengangguran. Oleh karena itu upaya untuk menurunkan angka TPT ini tentu menjadi prioritas bagi daerah. Adanya pandemi covid-19 tidak dipungkiri menjadi factor penyumbang utama. Namun demikian, dengan adalnya penurunan

angka covid diharapkan bisa menurunkan tingkat pengangguran di Bangkalan. Hal ini telah terlihat pada menurunnya angka TPT di tahun 2022.

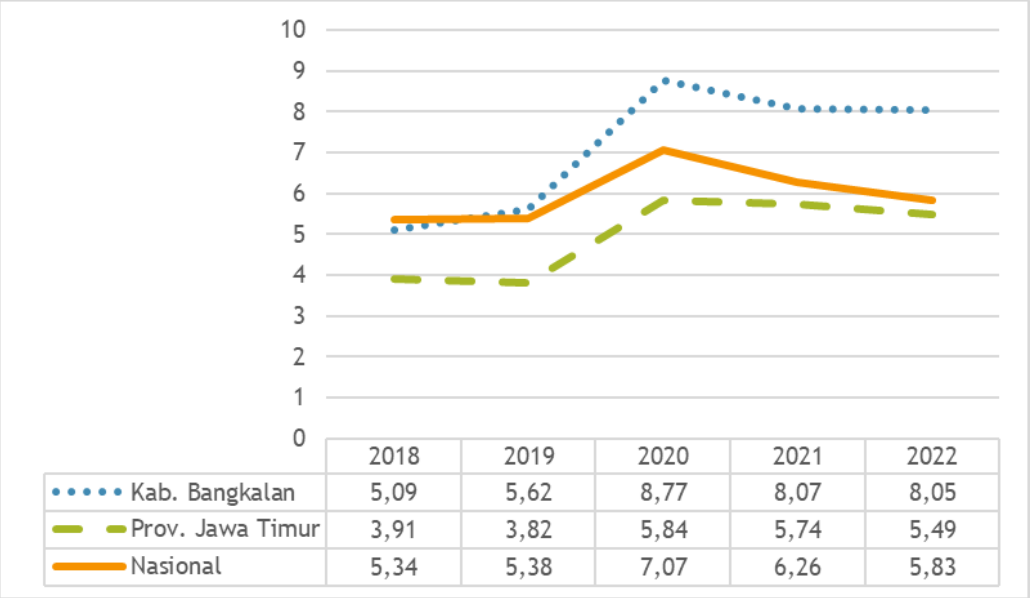

Grafik 2.26
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Sumber Data: BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Pada tahun 2022, kondisi Penduduk Usia Kerja, diketahui sebanyak 762.093 orang. Adapun data jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan menunjukkan angka sebesar 562.869 orang, dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 517.564 orang. Lebih jelasnya berikut dapat dikemukakan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.40
Situasi Umum Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018-2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja	717.771	726.233	734.621	746.659	762.093
2	Jumlah Angkatan Kerja	494.269	458.312	500.295	518.065	562.869
3	Jumlah Orang Yg. Bekerja	468.316	431.637	456.436	476.269	517.564
4	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	125	408	180	291	45.305

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Bangkalan dan BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan, hal tersebut mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yang masih fluktuatif dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan penduduk usia kerja yang juga terus mengalami peningkatan. Sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, ditambah lagi semenjak terjadi covid-19 di tahun 2020 yang telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat, termasuk tatanan dunia pasar kerja. Banyak perusahaan yang gulung tikar dikarenakan persaingan yang ketat dengan bisnis yang beralih ke market online. Pasar banyak beralih ke online sementara penyedia layanan/swasta/industri butuh waktu untuk peralihan. Penurunan output industri yang terserap di pasar juga menyumbang pada naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Untuk meningkatkan upaya pembangunan perlindungan terhadap tenaga kerja diperlukan pengembangan indikator yang dapat memicu penyajian data yang dapat menggambarkan kinerja perlindungan terhadap tenaga kerja/buruh. Data yang diperlukan untuk menggambarkan perlindungan terhadap tenaga kerja /buruh adalah dengan data jumlah tenaga kerja/buruh yang mengikuti program Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan manusia diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya tanpa membedakan jenis kelamin. Sebenarnya potensi yang dimiliki oleh perempuan dalam kualitas maupun kuantitas tidak berbeda dengan laki-laki. Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataannya masih dijumpai kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan dalam keluarga, peningkatan kesetaraan *gender* dalam pembangunan serta menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap anak. Untuk dapat mengukur kinerja kesetaraan gender dalam pembangunan daerah maka diperlukan pengembangan tolok ukur kinerja yang baru, seperti Indeks Pemberdayaan *Gender*.

Perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, maka pada tanggal 30 Maret 2011 Pemerintah Kabupaten Bangkalan membentuk suatu wadah yang khusus menangani korban kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan, Dinas Kesehatan, RSUD Syamrabu, Dinas KBP3A, Dinas Sosial, BAPPEDA, Dinas Kominfo, Bagian Hukum Setda, dan Pengadilan Agama Kab Bangkalan.

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan meliputi penelantaran ekonomi, pemerkosaan anak dibawah umur, persetubuhan, sodomi anak dibawah umur, KDRT, pencabulan, *trafficking*, kekerasan fisik pada anak, penelantaran anak, penganiayaan kepada perempuan dan pencemaran nama baik, dimana jumlah laporan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2019 sebanyak 24 kasus dan 17 kasus pada tahun 2020 dan terus menurun di tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 20 kasus (*Sumber : SIPD Kab Bangkalan, 2022).*

Tabel 2.41
Data Kekerasan Anak dan Perempuan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Elemen Data	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	5 kasus	13 kasus	5 kasus	15 kasus	15 kasus
Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan belum ditindak lanjuti	0 kasus	11 kasus	13 kasus	5 kasus	5 kasus
Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	13 kasus	11 kasus	15 kasus	5 kasus	15 kasus
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	69%	61%	80%	86%

Sumber Data : Dinas KBP3A Kab Bangkalan, 2023

Indikator baru pada urusan pemberdayaan perempuan yaitu Indeks Pemberdayaan Gender. Pada tahun 2018 dan 2019 capaian indeks pemberdayaan Gender adalah sebesar 49,74, 49,75 dan 49,75. Pada tahun 2020 mencapai 50.43 dan 2021 diharapkan 51,14. Di samping itu indikator lain seperti Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan Kekerasan juga digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah kabupaten memfasilitasi/melindungi perempuan dan anak dari tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam penanganan kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penanganannya di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangkalan. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan Kekerasan pada kondisi tahun 2021 sebesar 80%, dan realisasi tahun 2022 juga 86%.

2.3.2.3 Pangan

Berdasarkan data produktivitas tanaman padi pada tahun 2019 di Kabupaten Bangkalan yang mencapai 58,2 Kw/Ha, serta luas panen produksi seluas 49.129 Ha, maka dapat diketahui produksi padi pada tahun 2019 mencapai angka 286.267 ton. Apabila dibandingkan dengan tingkat konsumsi padi rata-rata sebesar 120 kg/tahun/orang, dapat diketahui bahwa konsumsi beras di Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 290,126 kg per tahun (asumsi jumlah penduduk tahun 2019 mencapai 986.700 jiwa) maka seharusnya terdapat surplus sebesar 167.863,32 ton per tahun. Kelebihan jumlah produksi ini tidak mencerminkan bahwa Kabupaten Bangkalan terbebas dari rawan pangan, karena penetapan status daerah rawan pangan adalah berdasarkan 13 kriteria yang telah disepakati.

Bentuk intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk penanganan daerah rawan pangan ini adalah berupa bantuan gabah/beras/alsintan, ternak kambing dan sapi/ ayam petelur dan penjualan hasil pertanian

berikut dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi kelompok afinitas di daerah rawan pangan.

A. Diversifikasi Bahan Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia dipantau dengan menggunakan ukuran melalui Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada data KKDP (Ketersediaan Kerawanan dan Distribusi Pangan) Dinas Ketahanan Pangan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.42
Skor Pola Pangan Harapan Berdasar Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	%AKE*	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	1,312	64,4	65,6	0,5	32,2	32,8	25	25
2.	Umbi-umbian	52	2,6	2,6	0,5	1,3	1,3	2,5	1,3
3.	Pangan Hewani	190	9,3	9,5	2	18,7	19	24.0	19
4.	Minyak dan Lemak	249	12,2	12,4	0,5	6,1	6,2	5.0	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	8	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	1.0	0.2
6.	Kacang-kacangan	58	2,9	2,9	2.0	5,7	5,8	10.0	5,8
7.	Gula	59	2,9	3.0	0,5	1,5	1,5	2,5	1,5
8.	Sayur dan Buah	62	3.0	3,1	5.0	15,2	15,5	30.0	15,5
9.	Lain lain	48	2,3	2,4	-	-	-	-	-
Total		**2.038**	**100.0**	**101,9**		**80,9**	**82,4**	**100.0**	**73,4**
Ket : *) Angka Kecukupan Energi *(AKE) 2400,0 Kkal/Kap/Hari*									

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangkalan menunjukkan angka 73,4. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan masuk dalam kategori "Cukup" dimana mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan telah tercukupi dan memenuhi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

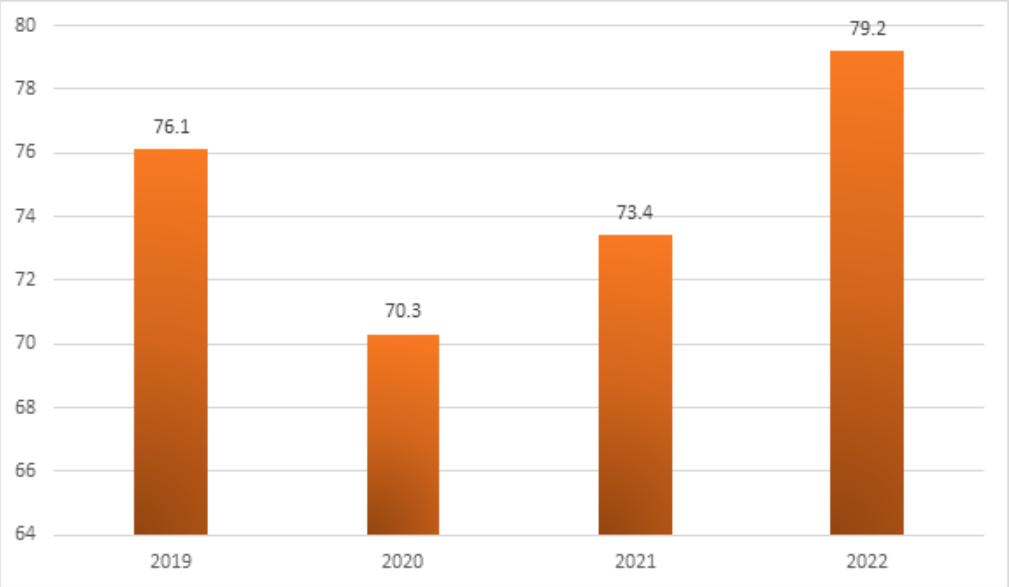

Grafik 2.27
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022
Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan, 2023*

B. Sarana Dan Prasarana Penyuluh Yang Didukung Oleh Kualitas Sumber Daya Manuasia Di Bidang Pertanian Dalam Arti Luas

Dinas Ketahanan Pangan juga menetapkan kebijakan berupa revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan menyediakan balai penyuluh dengan kondisi yang layak. Jumlah balai tersebar di 6 (enam) kecamatan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Kondisi balai penyuluhan yang ada secara keseluruhan dalam kondisi baik.

Tabel 2.43
Kondisi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

NO	Nama BPP	Alamat	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	BPP Telang	Kamal	v	-
2	BPP Burneh	Burneh	v	-
3	BPP Tanah Merah	Tanah Merah	v	-
4	BPP Galis	Galis	v	-
5	BPP Klampis	Klampis	v	-
6	BPP Tanjungbumi	Tanjungbumi	v	-

Sumber Data: Dinas Pertanian TPHP Kab. Bangkalan, 2023

2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia menunjukkan peningkatan sebesar 3,72 poin dari 66,55 pada tahun 2019 menjadi 70,27 pada tahun 2020. IKLH tahun 2020 tersebut melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu 68,71. Peningkatan IKLH tahun 2020 dikarenakan adanya perbaikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air (IKA), adanya perubahan pembobotan dalam rumus untuk tahun 2020, dan penambahan indeks baru. Adapun untuk capaian IKLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 termasuk kategori cukup baik (69,92), IKA kurang (56,13), IKTL kurang (47.36), IKU sangat baik (84,28) dan IKAL sangat baik (85.45). IKLH Provinsi tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 adalah 68,49.

Ketercapaian Indikator kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Dimana data IKLH di Kabupaten Bangkalan cenderung naik yaitu tahun 2021 sebesar 55.36 dan tahun 2022 sebesar 56.84.

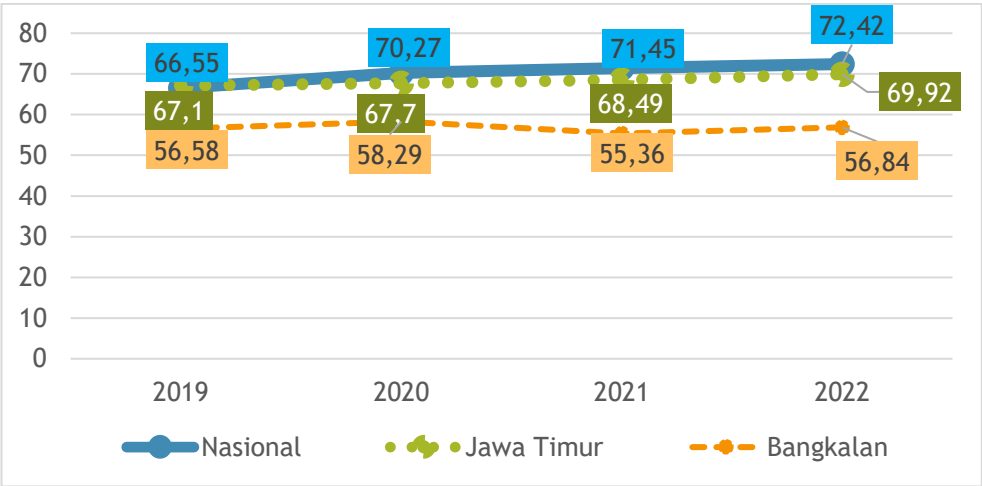

Grafik 2.28
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2022

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, 2023

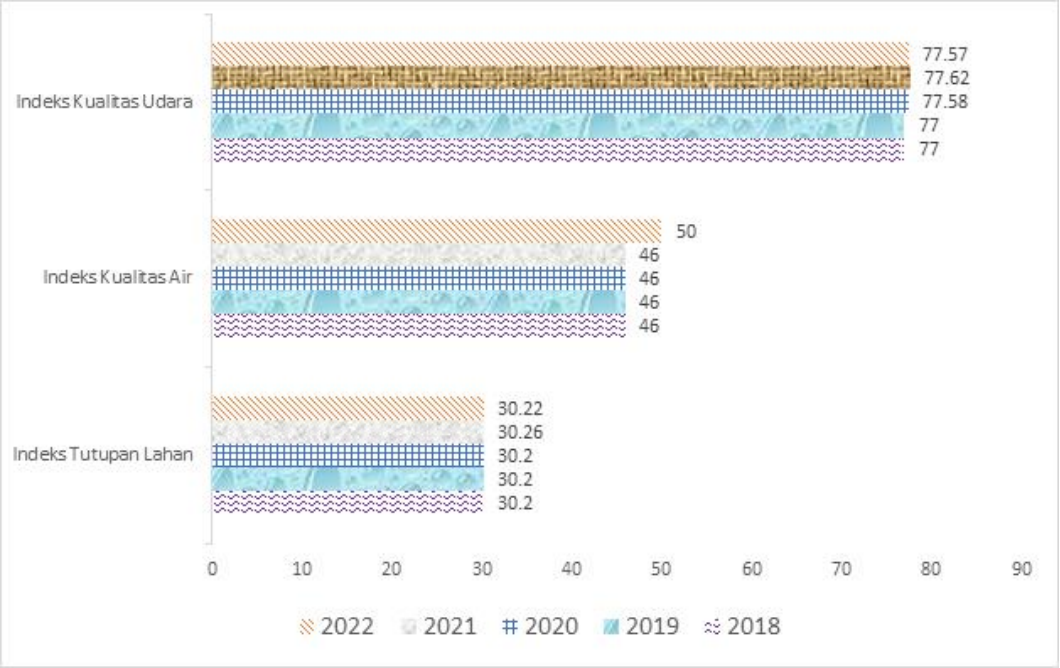

Grafik 2.29
Indeks Kualitas Udara, Air, dan Tutupan Lahan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022
Sumber Data : Kementerian LHK, 2023

Dari kedua grafik di atas, dapat diketahui bahwa indeks tutupan lahan di Kabupaten Bangkalan lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kualitas udara dan indeks kualitas air. Sedangkan kondisi lingkungan hidup lainnya dapat dilihat dari uraian berikut ini.

Penghitungan emisi gas rumah kaca dilakukan terhadap 5 (lima) kategori sumber emisi atau sektor, yaitu energi, pertanian, kehutanan, peternakan, serta pengelolaan limbah. Di Kabupaten Bangkalan. Untuk tahun 2022 total emisi Gas Rumah Kaca diperkirakan mencapai 393,75 ton CO2eq. Sedangkan data dari website PPRK Aksara Bappenas total emisi GRK Kab. Bangkalan sebesar 364,921 ton CO2eq untuk tahun 2022.

Upaya penurunan emisi GRK di Kabupaten Bangkalan dapat dilakukan melalui institusi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bangkalan dan dukungan lembaga swasta untuk mendukung pelaksanaan RAD GRK yang telah disusun tahun 2021. Angka Penurunan Emisi gas

rumah kaca dapat dipantau dalam Jadwal Pelaksanaan RAD GRK yang memuat usulan mitigasi setiap sektor Sumber Emisi GRK Kabupaten Bangkalan.

A. Ruang Terbuka Hijau

RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan dan dalam pemanfaatannya lebih bersifat terbuka, pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman (Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota). Maka dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bangkalan adalah salah satu isu strategis yang relevan dengan pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan. Kawasan lain yang termasuk RTH adalah taman kota, hutan kota, jalur hijau, Rest Area, lapangan olah raga, lahan makam, halaman rumah, kawasan perumahan, jalur hijau di sepanjang kali, perkantoran dan pusat perdagangan yang tersebar di wilayah perkotaan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bangkalan bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem dan estetika kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjamin keseimbangan ekosistem dan estetika kota. Dengan data sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.44
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Menjamin Kesimbangan Ekosistem dan Estetika Kota di Kabupaten Bangkalan tahun 2022

NO	ADMINISTRASI	JENIS RTH	LUAS (HA)	STATUS LAHAN	TITIK KOORDINAT	
					X	Y
Kecamatan Bangkalan						
1	Kel. Demangan	Taman Kota	0,25	Aset Pemerintah Daerah	-7.029613°	112.747613°
2	Kel Mlajah	Taman `Kota	0,3	Aset Pemerintah Daerah	-7.040942°	112.739504°
3	Kel. Demangan	Taman Kota	0.4	Aset Pemerintah Desa	-7.029738°	112.746982°
4	Kel. Kraton	Taman Media	0,15	Aset Pemerintah Daerah	-7.027371°	112.754843°
5	Kel. Pejagan	Taman Kota	0.1	Aset Pemerintah Daerah	-7.024522°	112.751637°
6	Kel. Kraton	Taman Kota	0.1	Aset Pemerintah Daerah	-7.029615°	112.759018°
7	Kel. Kraton	Taman Kota	0.1	Aset Pemerintah Daerah	-7.029474°	112.758826°
8	Kel. Kraton	Taman Kota	0,06	Aset Pemerintah Daerah	-7.029153°	112.758464°
9	Kel. Kraton	Taman Kota	0.0	Aset Pemerintah Daerah	-7.029010°	112.758252°
10	Kel. Kraton	Taman Kota	0.5	Aset Pemerintah Daerah	-7.029084°	112.758389°
11	Kel. Kraton	Taman Kota	0.0	Aset Pemerintah Daerah	-7.027677°	112.754521°
12	Kel. Mlajah	Hutan Kota	0,9	Aset Pemerintah Daerah	-7.047868°	112.736932°
13	Kel. Mlajah	Hutan Kota	0,8	Aset Pemerintah Daerah	-7.047267°	112.735741°
14	Kel. Mlajah	Hutan Kota	0,25	Aset Pemerintah Daerah	-7.048366°	112.733835°
15	Kel. Mlajah	Hutan Kota	100.0	Aset Pemerintah Daerah	-7.034459°	112.728695°
16	Kel. Mlajah	Taman Rekreasi	0,16	Aset Pemerintah Daerah	-7.043631°	112.740485°
17	Kel. Mlajah	Taman Kota	0,07	Aset Pemerintah Daerah	-7.040468°	112.729905°
18	Kel. Mlajah	Taman Kota	0,06	Aset Pemerintah Daerah	-7.040467°	112.729668°
19	Kel. Mlajah	Taman Kota	0,28	Aset Pemerintah Daerah	-7.050475°	112.734206°
20	Kel. Demangan	Taman Kota	0,94	Aset Pemerintah Daerah	-7.029927°	112.747410°
21	Kel. Demangan	Taman Kota	0,11	Aset Pemerintah Daerah	-7.028938°	112.747294°
22	Kel. Demangan	Taman Kota	0,29	Aset Pemerintah Daerah	-7.029006°	112.748270°
23	Kel. Mlajah	Taman Kota	0,05	Aset Pemerintah Daerah	-7.053297°	112.783625°

NO	ADMINISTRASI	JENIS RTH	LUAS (HA)	STATUS LAHAN	TITIK KOORDINAT	
					X	Y
24	Gebang	Hutan Kota	8,43		65,910	112.4659
25	Kraton	Hutan Kota	3.6	Aset Pemerintah Daerah	-703,098	112,753
26	Bancaran	RHL	2.0	Aset Pemerintah Daerah	-701,166	1,127,526
27	Bancaran	RHL	2.0	Aset Pemerintah Daerah	-70,035	1,127,645
28	Kraton	Jalur Hijau	0,07	Aset Pemerintah Daerah		
29	Mlajah	Jalur Hijau	0,05	Aset Pemerintah Daerah		
30	Mlajah	Jalur Hijau	0,15	Aset Pemerintah Daerah		
31	Bancaran	Jalur Hijau	0,87	Aset Pemerintah Daerah		
32	Martajasah	Jalur Hijau	0,04	Aset Pemerintah Daerah		
33	Mlajah	Jalur Hijau	0,09	Aset Pemerintah Daerah		
34	Bancaran	Jalur Hijau	0,	Aset Pemerintah Daerah		
35	Kel. Mlajah	Pemakaman	0,05	Aset Pemerintah Daerah		
36	Kel. Mlajah	Pemakaman	0,02	Aset Pemerintah Daerah		
37	Bancaran	Pemakaman	1.0	Aset Pemerintah Daerah		
38	Martajasah	Pemakaman	1,4	Aset Pemerintah Daerah		
Kecamatan Kamal						
39	Gili Barat	Hutan Kota	17,98	Aset Pemerintah Daerah	-7.0821	112.4126
40	Telang	Hutan Kota	15,56	Aset Pemerintah Daerah	-7.0707	112.421
Socah						
41	Buluh	Hutan Kota	24,74	Aset Pemerintah Daerah	.-7.0559	112.4219
42	Socah	Hutan Kota	12,84	Aset Pemerintah Daerah	-7.0549	112.4222
43	Bilaporah	Jalur Hijau	40.0	Aset Pemerintah Daerah		
Modung						
44	Karanganyar	Hutan Kota	7,11	Aset Pemerintah Daerah	-7.1105	112.551
45	Modung	Hutan Kota	17,83	Aset Pemerintah Daerah	-71,111	112.5535
46	Glisgis	RHL	25.0	Aset Pemerintah Daerah	-716,111	1,129,139
Arosbaya						

NO	ADMINISTRASI	JENIS RTH	LUAS (HA)	STATUS LAHAN	TITIK KOORDINAT	
					X	Y
47	Lajing	Hutan Kota	8.1	Aset Pemerintah Daerah	-697,039	1,127,979
48	Tengket	Hutan Kota	11.6	Aset Pemerintah Daerah	-694,196	1,128,176
49	Tengket	RHL	44.5	Aset Pemerintah Daerah	-693,902	112,822
Konang						
50	Sambiyan	Hutan Rakyat	10.0	Aset Pemerintah Daerah	-707,722	1,131,078
51	Sambiyan	Hutan Rakyat	10.0	Aset Pemerintah Daerah	-704,778	1,131,075
Galis						
52	Pakaan Laok	Hutan Rakyat	10.0	Aset Pemerintah Daerah	-711,528	1,129,483
53	Balteran	Hutan Rakyat	10.0	Aset Pemerintah Daerah	-711,361	1,129,722
54	Paka'an Daya	Hutan Rakyat	6.0	Aset Pemerintah Daerah	-710,833	1,129,333
Kokop						
55	Tlokoh	Hutan Rakyat	10.0	Aset Pemerintah Daerah	-699,111	1,130,969
56	Kokop	Hutan Rakyat	10.0	Aset Pemerintah Daerah	-699,306	1,130,478
Sepuluh						
57	Labuhan	RHL	9.0	Aset Pemerintah Daerah	-6.886431°	112.992733°
58	Labuhan	RHL	0,41	Aset Pemerintah Daerah	-6.886173°	112.982339°
59	Bangsereh	Hutan Rakyat	10.0	Aset Pemerintah Daerah	-695,111	1,129,578
Burneh						
60	Burneh	Pemakaman	7.3	Aset Pemerintah Daerah		
61	Burneh	Taman RW	1.0	Aset Pemerintah Daerah		
62	Burneh	Taman Kelurahan	3.4	Aset Pemerintah Daerah		
63	Burneh	Taman Kecamatan	8.2	Aset Pemerintah Daerah		
64	Burneh	Taman Kota	4.1	Aset Pemerintah Daerah		
Tanjung Bumi						
65	Tanjung Bumi	Pemakaman	9.6	Aset Pemerintah Daerah		
66	Tanjung Bumi	Taman Kelurahan	1.8	Aset Pemerintah Daerah		
67	Tanjung Bumi	Taman Kota	11.6	Aset Pemerintah Daerah		
Klampis						

NO	ADMINISTRASI	JENIS RTH	LUAS (HA)	STATUS LAHAN	TITIK KOORDINAT	
					X	Y
70	Klampis	Pemakaman	2.0	Aset Pemerintah Daerah		
71	Klampis	Taman Kelurahan	0.3	Aset Pemerintah Daerah		
Tanah Merah						
72	Tanah merah	Pemakaman	0.2	Aset Pemerintah Daerah		
73	Tanah Merah	Taman Kelurahan	0.9	Aset Pemerintah Daerah		
Labang						
74	Labang	Pemakaman	9.5	Aset Pemerintah Daerah		
75	Labang	Taman RW	-	Aset Pemerintah Daerah		
76	Labang	Taman Kelurahan	53.6	Aset Pemerintah Daerah		
77	Labang	Taman Kecamatan	6.7	Aset Pemerintah Daerah		
78	Labang	Taman Kota	103.6	Aset Pemerintah Daerah		
Kwanyar						
79	Kwanyar	Pemakaman	0.1	Aset Pemerintah Daerah		
80	Kwanyar	Taman Kelurahan	3.9	Aset Pemerintah Daerah		
81	Kwanyar	Taman Kota	33.1			
Geger						
82	Geger	Pemakaman	0.3	Aset Pemerintah Daerah		
83	Geger	Taman Kelurahan	0.7	Aset Pemerintah Daerah		
Tragah						
84	Tragah	Pemakaman	12.4	Aset Pemerintah Daerah		
85	Tragah	Taman Kelurahan	25.8	Aset Pemerintah Daerah		
86	Tragah	Taman Kecamatan	29.2	Aset Pemerintah Daerah		
87	Tragah	Taman Kota	6.7	Aset Pemerintah Daerah		
total (ha)			659.8			

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, 2023

Berdasarkan data tahun 2022 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan data luasan RTH di 18 kecamatan sebesar 659,8 ha.

B. Air Limbah Domestik

Sumber air limbah domestik adalah seluruh buangan air yang berasal dari seluruh kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, asrama yang meliputi limbah buangan kamar mandi, toilet, dapur dan air bekas pencucian pakaian. Berbagai macam sumber pencemar menunjukkan bahwa konsentrasi senyawa pencemar sangat bervariasi, tergantung sumber air limbahnya.

Adapun jumlah Kepala Keluarga terlayani air bersih dan sanitasi sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2.45
Jumlah Kepala Keluarga Terlayani Air Bersih dan Sanitasi Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jml Penduduk (BPS)		Air Bersih		Sanitasi		Distribusi Air Minum / Air Bersih Rumah Tangga (m3)
		Jiwa	KK	KK Terlayani	%	KK Terlayani	%	
1	Bangkalan	73.288	18.322	13.837	75,52	6.108	33,33	3,06
2	Socah	46.904	11.726	779	6,64	863	7,36	0,16
3	Burneh	51.552	12.888	2.743	21,28	1.265	9,82	0,625
4	Kamal	42.004	10.501	1.281	12,2	627	5,97	0,155
5	Arosbaya	36.508	9.127	491	5,38	411	4,5	0,24
6	Geger	57.784	14.446	983	6,8	404	2,79	0,34
7	Klampis	42.632	10.658	590	5,54	550	5,16	0,28
8	Sepulu	34.432	8.608	384	4,46	572	6,64	0,24
9	Tanjung B	45.040	11.260	1.111	9,87	335	2,97	0,175
10	Kokop	62.648	15.662	702	4,48	577	3,68	0,205
11	Kwanyar	36.608	9.152	416	4,55	759	8,29	0,18
12	Labang	29.636	7.409	172	2,32	469	6,33	0,15
13	Tanah M	48.860	12.215	1.941	15,89	1.095	8,96	0,46
14	Tragah	24.696	6.174	305	4,94	401	6,49	0,34
15	Blega	43.944	10.986	738	6,72	951	8,65	0,3
16	Modung	37.452	9.363	1.064	11,36	491	5,24	0,26
17	Konang	43.400	10.850	512	4,72	340	3,13	0,3
18	Galis	64.732	16.183	2.462	15,21	1.154	7,13	0,48

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Bangkalan, 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 berjumlah 997.124 jiwa, dimana jumlah ini setiap tahunnya akan mengalami peningkatan, yang secara otomatis akan meningkatkan buangan limbah cair domestik, sehingga akan berpengaruh terhadap lingkungan.

Jika kebutuhan air bersih tiap orang 100-200 liter/orang/hari sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 berjumlah 970.894 jiwa maka limbah cair domestik yang dihasilkan adalah 9.800,87 liter/hari. Adapun jumlah KK yang terlayani sanitasi nya adalah sebesar 36,88% atau sekitar 76.043 dari 199.416 Kepala Keluarga di Kabupaten Bangkalan.

C. Sampah (Limbah Padat) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Salah satu isu lingkungan yang berkembang adalah jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat. Kepadatan penduduk dan perkembangan perekonomian perkotaan meningkatkan volume sampah baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah sampah berakibat buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia, untuk mengurangi volume sampah yang semakin banyak, terutama yang ada di TPS, Transfer Depo atau TPA tentunya harus dilakukan dengan mereduksi timbunan sampah yang berasal dari rumah tangga maupun industri yang ada sehingga volume sampah yang ada di TPS, Transfer Depo atau TPA dapat berkurang.

Sebagaimana kita maklumi bahwa munculnya sampah akan tetap ada selama masih ada kehidupan. Timbulan sampah akan terus meningkat tidak saja sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk tetapi juga meningkat sejalan dengan pola hidup masyarakat. Disamping itu pembuangan sampah ke TPA tidak lepas dari persoalan pencemaran lingkungan apalagi kalau masih menggunakan metode open dumping. Persoalan lingkungan dapat disebabkan karena air lindi maupun gas metan yang lepas ke udara.

Target penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga telah dirumuskan dalam JAKSTRADA tahun 2018. Data penanganan sampah yang telah ditangani oleh DLH pada tahun 2021 di desa/kelurahan yang terlayani TPS3R menunjukkan penanganan sampah sebesar 19.311,41 ton dari jumlah timbulan sampah 53.642,80 ton atau 36%. yang telah tertangani. Artinya, ini baru memenuhi ½ dari target penanganan sampah JAKSTRADA untuk tahun 2021 sebesar 74%.

Sedangkan untuk data pengurangan sampah di Kabupaten Bangkalan tahun 2021 sebesar 2.800 ton atau hanya berkurang 5.2%. Hal ini masih jauh dari target pengurangan sampah JAKSTRADA sebesar 24% untuk tahun 2021.

Tabel 2.46
Jumlah Timbulan Sampah
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No.	Lokasi Layanan	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/Jiwa/Hr) 2018	Penanganan 2018	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/Jiwa/Hr) 2019	Penanganan 2019	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/Jiwa/Hr) 2020	Penanganan 2020	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/Jiwa/Hr) 2021	Penanganan 2021	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/Jiwa/Hr) 2022	Penanganan 2022
1	Kel. Mlajah	3.553,31	1.279,19	3.712,97	1.336,67	3.879,80	1.396,73	4.084,00	1.470,24	4.084,00	1.470,24
2	Kel. Kemayoran	2.437,55	877,52	2.547,08	916,95	2.661,52	958,15	2.801,60	1.008,58	2.801,60	1.008,58
3	Kel. Pangeranan	3.707,83	1.334,82	3.874,43	1.394,80	4.048,52	1.457,47	4.261,60	1.534,18	4.261,60	1.534,18
4	Kel. Demangan	2.602,86	937,03	2.719,81	979,13	2.842,02	1.023,13	2.991,60	1.076,98	2.991,60	1.076,98
5	Kel. Kraton	3.179,19	1.144,51	3.322,04	1.195,93	3.471,30	1.249,67	3.654,00	1.315,44	3.654,00	1.315,44
6	Kel. Pejagan	6.510,46	2.343,77	6.802,99	2.449,08	7.108,66	2.559,12	7.482,80	2.693,81	7.482,80	2.693,81
7	Kel. Bancaran	3.639,28	1.310,14	4.141,36	1.490,89	4.327,44	1.557,88	4.555,20	1.639,87	4.555,20	1.639,87
8	Desa Martajasah	553,70	199,33	578,58	208,29	604,58	217,65	636,40	229,10	636,40	229,10
9	Desa Bilaporah	1.673,03	602,29	2.065,47	743,57	2.549,96	917,99	2.602,00	936,72	2.602,00	936,72
10	Desa Kamal	2.442,45	879,28	2.531,04	911,17	3.124,74	1.124,91	3.289,20	1.184,11	3.289,20	1.184,11

No.	Lokasi Layanan	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/Jiwa/Hr) 2018	Penanganan 2018	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/Jiwa/Hr) 2019	Penanganan 2019	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/Jiwa/Hr) 2020	Penanganan 2020	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/Jiwa/Hr) 2021	Penanganan 2021	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/Jiwa/Hr) 2022	Penanganan 2022
11	Desa Banyuajeh	3.955,86	1.424,11	4.883,78	1.758,16	6.029,35	2.170,57	6.152,40	2.214,86	6.152,40	2.214,86
12	Desa Telang	710,36	255,73	876,99	315,72	1.082,70	389,77	1.104,80	397,73	1.104,80	397,73
13	Kel. Tunjung	5.446,63	1.960,79	5.557,78	2.000,80	5.671,21	2.041,63	6.033,20	2.171,95	6.033,20	2.171,95
14	Desa Burneh	3.605,69	1.298,05	3.679,27	1.324,54	3.754,36	1.351,57	3.994,00	1.437,84	3.994,00	1.437,84
	Total	**44.018,21**	**15.846,55**	**47.293,59**	**17.025,69**	**51.156,16**	**18.416,22**	**53.642,80**	**19.311,41**	**53.642,80**	**19.311,41**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, 2023

Timbulan sampah di Kabupaten Bangkalan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan diproyeksikan akan meningkat juga pada tahun 2021 menjadi 53.642,80 kg/jiwa/hari. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah juga meningkat setiap tahunnya. Pada data tahun terakhir jumlah penanganan dari total timbulan sampah sebesar 18.416,22. Kondisi ini perlu diperhatikan untuk perencanaan penanganan timbunan sampah untuk tahun berikutnya. Berikut data jumlah sarana prasarana persampahan untuk proses pengumpulan hingga pembuangan:

Tabel 2.47
Jumlah Sarana Prasarana Persampahan
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	Truk Pengangkut Sampah	14 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit
3	Kontainer (model kupu-kupu)	10 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit
4	Kontainer (Mini)	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
5	Gerobak Pengangkut Sampah	55 Unit	60 Unit	65 Unit	65 Unit	65 Unit
6	Motor Pengangkut Sampah	20 Unit	21 Unit	21 Unit	23 Unit	30 Unit
7	Pick-up Pengangkut Sampah	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
8	Beco	1 Unit (sewa)	1 Unit (Aset)	1 Unit (Aset)	1 Unit (Aset)	1 Unit (Aset)
9	TPS	55 Unit	55 Unit	55 Unit	55 Unit	55 Unit
10	TPS3R	0	1 unit	4 unit	6 unit	6 unit
11	Rumah Daur Ulang (RDU)	-	-	-	1 unit	1 unit
11	Compactor	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
12	Crossbow	10 unit	10 unit	50 unit	50 unit	50 unit
13	Bulldozer	1 Unit (sewa)	1 Unit (sewa)	1 Unit (aset)	1 Unit (aset)	1 Unit (aset)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, 2023

Tabel 2.48
Jumlah Limbah B3
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Limbah B3 (Ton)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Medis	266,051	2,731,456	137,845	14,5705	14,5705
Non Medis	203,527	197,014	349,915	15,0445	15,0445
Total	**469,578**	**470,160**	**487,760**	**34,9915**	**34,9915**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, 2023

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang sifat atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. B3 umumnya digunakan pada sektor industri, pertanian, pertambangan dan rumah tangga. Penggunaan B3 pada berbagai sektor tersebut akan menghasilkan limbah B3, yang mana limbah B3 memerlukan pengolahan lebih lanjut.

Kondisi terkait Limbah B3 yang dikelola lanjut di Kabupaten Bangkalan terus meningkat tiap tahun hingga pada tahun 2020 sebesar 48,7760 ton. Adapun upaya pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah:

1. Inventarisasi kegiatan/industri pemakai B3.
2. Menyiapkan perizinan dengan dokumen lingkungan.
3. Inventarisasi jumlah B3 yang dipakai oleh Non industri/kegiatan.
4. Pemantauan tentang penyimpanan B3 serta penyiapan tanggap darurat B3.
5. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, analisis dan evaluasi, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

D. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Bangkalan yang wilayah administrasinya sebanyak sepuluh Kecamatan di tepi laut/pesisir pantai dan mempunyai daratan yang cukup luas saat ini dipastikan memiliki keanekaragaman hayati yang cukup banyak, yang saat ini sudah dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Bangkalan, tetapi belum sepenuhnya teridentifikasi jenis guna dan manfaatnya. Dengan panjang garis pantai 125 km tentunya akan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan keragaman jenis flora dan fauna. Adanya potensi keragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Bangkalan merupakan sumber daya penting untuk dijadikan modal dasar dalam pengembangan berbagai keperluan yang mempunyai nilai ekonomi.

Kabupaten Bangkalan memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar di 18 Kecamatan. Jumlah populasi keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya baik karena kepunahan secara alami maupun perbuatan manusia dalam mengedepankan kepentingan pembangunan. Adapun keanekaragaman hayati jenis flora dan fauna adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.49
Keanekaragaman Hayati Di Kabupaten Bangkalan

NO.	Golongan	Nama Spesies	Status
1	Hewan menyusui	Sapi Madura	Endemik
2	Burung	Glatik	Terancam
3	Reptil	Biawak	Terancam
4	Amphibi	Kura-kura	Terancam
5	Ikan	Kerang Sempeng	Endemik
		Ikan Betthok	Terancam
6	Keong	Keong Raja	Endemik
7	Serangga	Kupu-kupu	Berlimpah
8	Tumbuh-tumbuhan	Melati Rato Ebu	Endemik
		Salak Kramat	Endemik

Sumber : Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Kab. Bangkalan, 2023

Wilayah Kabupaten Bangkalan beriklim tropis basah dan kering dengan 2 (dua) musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau

dimanakondisi wilayah Kabupaten Bangkalan yang berada yang berada pada daerah pesisir dengan ketinggian 2-100m diatas permukaan air laut yang mendukung keberadaan flora dan fauna. Adapun flora yang menjadi andalan Kabupaten Bangkalan dan dilindungi adalah Melati Rato Ebu dan Salak Kramat. Kedua populasi komuditas tersebut fluktuatif karena banyaknya permintaan baik Regional maupun Nasional, konon pada zaman pemerintahan orde baru sampai sekarang Melati Rato Ebu menjadi pilihan utama bagi Ibu Negara dan setiap hari petani Melati Rato Ebu menyiapkan dan mengirim komoditi tersebut.

E. Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang paling mendasar bagi kehidupan, oleh sebab itu penggunaan air perlu ditata agar memberikan manfaat yang merata bagi manusia dan kehidupan lainnya. Dalam jaringan distribusi air diperlukan suatu sistem koordinasi baik di antara para pelaku maupun pembuat kebijakan di antara perairan dan jaminan perolehan air yang cukup.

Tidak dapat dipungkiri bahwa air menjadi suatu komoditas yang memiliki nilai/posisi strategis dari kepentingan untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidup dan merupakan bagian dari sistem ketahanan Nasional. Oleh karena itu, pengelolaan air baik di daerah maupun di tempat lainnya harus ditata melalui perangkat Peraturan Daerah sebagai integral dari perundang-undangan yang dapat melindungi dan mewujudkan keadilan masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk membawa banyak konsekuensi, diantaranya terhadap kecukupan penyediaan air. Berdasarkan para ahli, bahwa beberapa tahun yang akan datang akan terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, semakin meningkatnya pola hidup masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan air.

Secara umum tingkat konsumsi air bersih per kapita (rumah tangga PDAM) menurut standar kuantitas Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum, bahwa Kota Kecil seperti kota Bangkalan, memiliki kecenderungan kebutuhan air per kapita mencapai 90 liter per hari.

Dalam rangka menyelamatkan sumber daya air sebagaimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan konsep pelestarian (konservasi) sumber daya air untuk menjaga stabilitas sumber air dan siklus air melalui reboisasi pada hutan-hutan di hulu/pegunungan.

F. Air bersih/Air Minum.

Air bersih adalah salah satu sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi dalam melakukan aktifitas sehari-hari termasuk sanitasi. Konsumsi air minum menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia terdapat resiko bahwa air tersebut telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat berbahaya lain.

Upaya mengantisipasi bakteri dan zat-zat yang berbahaya air harus dimasak hingga bersuhu 100°C. Diperolehnya air bersih di Kabupaten Bangkalan berasal dari sumber mata air yang mengalir lewat pipa-pipa dan yang berasal dari sungai, maka air bersih dapat didefinisikan bahwa air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk kebutuhan minum, masak, mandi dan energi. Air sebagai salah satu faktor esensial bagi kehidupan masyarakat, pemerintah harus mampu menyediakan, mengendalikan dan mengatur distribusi agar sumber daya air dapat dilestarikan.

Upaya yang juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga kualitas air bersih, antara lain pelayanan pencegahan pencemaran air. Sebanyak 20% (tahun 2013) dan 60% (tahun 2017) upaya pencegahan pencemaran air dapat terealisasi.

Pemanfaatan air yang berasal dari PDAM atau ledeng dikonsumsi oleh masyarakat di 11 wilayah Kecamatan; Kecamatan Kamal, Kecamatan

Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Galis, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tragah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Burneh dan Kecamatan Arosbaya. Disamping kebutuhan air yang berasal dari PDAM masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ada juga yang memakai air sumur. Berikut data sumber air minum di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.50
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Di Kabupaten Bangkalan

No	Sumber Air Minum	Distribusi Persentase Rumah Tangga				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Leding/pompa	28,42	22,66	32,35	39,75	35,29
2	Air dalam Kemasan	24.25	27.12	28,73	13,61	19.34
3	Sumur /mata air terlindungi	41,82	41,52	34,38	44,79	41,68
4	Sumur/mata air tak terlindungi	4,33	8,03	4,54	1,46	2,76
5	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya	1,18	0,67	0,00	0,40	0,91

Sumber Data : Statistik Perumahan Permukiman Provinsi Jawa Timur, 2023
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2022-2023

Persentase sumber air terbesar pada tahun 2020 berasal dari sumur/mata air terlindungi sebesar 34,38%. Diikuti oleh sumber air dari leding/pompa sebesar 32,35%, air dalam kemasan 28,73%, dan sumur/mata air tak terlindungi sebesar 4,54%. Adapun secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir tren distribusi sumber air mengalami fluktuasi.

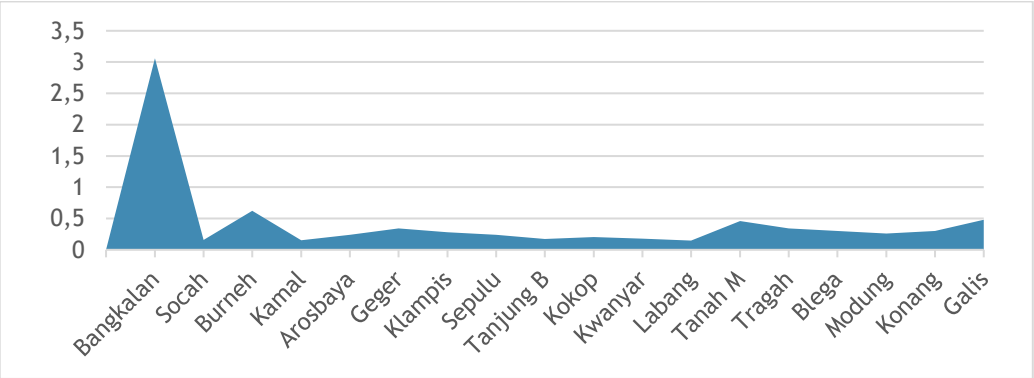

Grafik 2.30
Distribusi Air Minum / Air Bersih Rumah Tangga Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 (m3)
Sumber Data : PDAM Kab. Bangkalan, 2022

Dari data di atas menunjukkan bahwa kecamatan Bangkalan memiliki jumlah distribusi terbesar sebanyak 3.597.899 m3, dan Kecamatan Burneh dengan distribusi terendah yaitu 54.088 m3. Hal ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan memiliki distribusi air bersih yang layak dari PDAM, sedangkan untuk kawasan perdesaan terlayani dengan SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) dengan dikelola oleh masyarakat melalui KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Pengelolaan Air Minum).

2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025, kebijakan pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, melalui peningkatan tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas penduduk. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta administrasi kependudukan dengan biaya yang relatif terjangkau.

Dengan makin membaiknya pelayanan administrasi kependudukan, seiring dengan dilaksanakannya penerapan e-KTP pada Tahun 2012, diharapkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan KTP, KK dan Akta Kelahiran meningkat. Pada tahun 2018 diketahui kondisi awal Rata-rata Prosentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebesar 66% dari jumlah penduduk. Pada tahun 2020 dan 2021 diharapkan sudah ada 71,5% dan 73% dari penduduk yang berdokumen administrasi kependudukan yang lengkap.

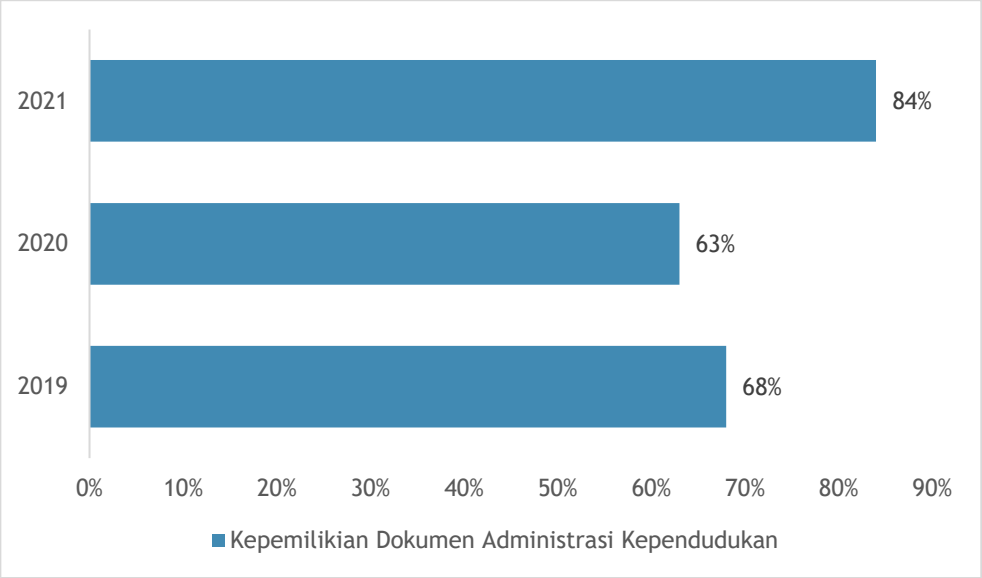

Grafik 2.31
Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (%) Di Kabupaten Bangkalan 2019-2021
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bangkalan, 2022

2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat, merupakan suatu proses membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan, dengan tujuan untuk memandirikan masyarakat serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil tetapi ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, baik dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.

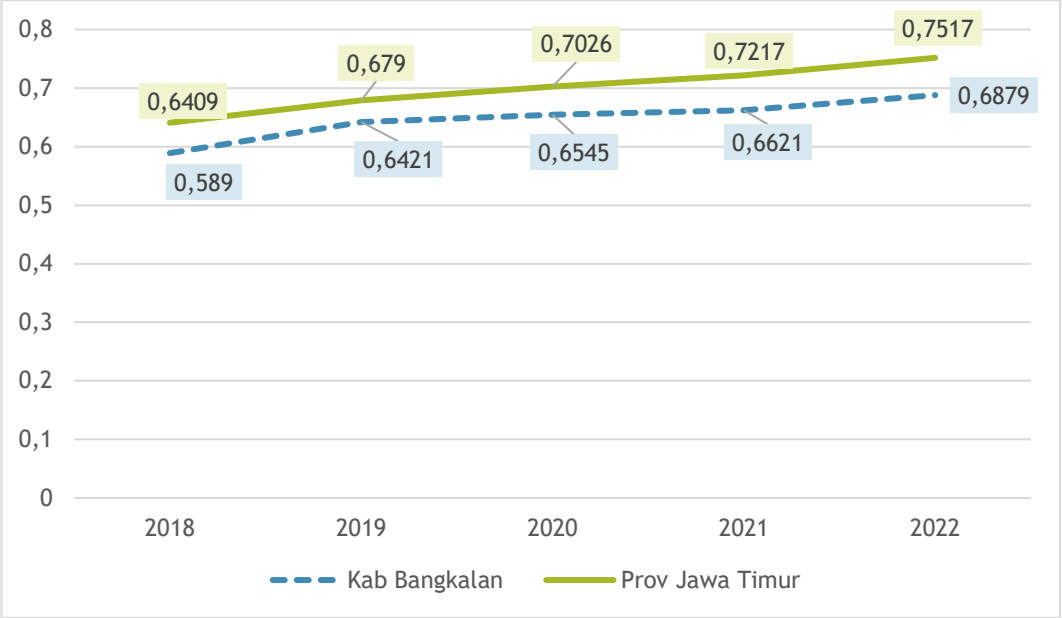

Grafik 2.32
Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022

Sumber Data : Kemendesa, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Desa Membangun dalam kategori mandiri dan berkembang meningkat, hal ini menandakan bahwa sudah banyak desa yang semakin sejahtera. Selain itu terdapat desa dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Indikator desa membangun dimulai tahun 2018 berdasarkan keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 52 tahun 2018.

Dilihat dari segi peringkat, Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke tiga dalam kategori maju dan berada dibawah Provinsi Bali dan Yogyakarta. Meski demikian jika dilihat dari peringkat Kabupaten, Bangkalan berada pada Ranking 232 dengan status IDM Berkembang.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi,

sosial. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya. Untuk melihat kondisi terse\but perlu mengembangkan penyajian data lembaga ekonomi desa yang aktif dan di bawah pembinaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Keberhasilan urusan pemberdayaan masyarakat desa digambarkan dengan Jumlah desa tertinggal yang dientaskan. Tahun 2022 sudah tidak ada desa tertinggal dengan demikian di Kabupaten Bangkalan desa tertinggal telah berhasil dientaskan seluruhnya.

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan mengatur jarak kelahiran, dengan jumlah anak dalam sebuah keluarga yang ideal adalah dua dengan pengaturan yang bisa dilakukan melalui penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, Implan, IUD/Spiral, dan lain sebagainya. Selain itu Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga (Bapak, ibu dan anak) dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.

Keluarga Berencana merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Peningkatan dan perluasan pelayanan Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Banyak wanita harus menentukan pilihan kontrasepsi yang tepat di tengah keberagaman pilihan metode/kontrasepsi, disamping itu terbatasnya jumlah alat kontrasepsi keluarga miskin (gakin) yang tersedia, adanya metode-metode tertentu yang mungkin kurang dapat diterima sehubungan adanya kontrasepsi merk

baru yang belum dikenal dan ketidak sesuaian dengan kultur budaya di daerah tertentu, kesehatan individual dan seksualitas wanita atau biaya untuk memperoleh kontrasepsi, juga perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari semua pihak.

Untuk mengetahui tingkat kemajuan Keluarga Berencana di Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu lima tahun dapat kami sajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Kabupaten BangkalanTahun 2018-2022

NO	URAIAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	IUD	5.227	5.283	5.555	5.638	858
2	Pil	36.369	36.882	36.396	37.169	10.254
3	Kondom	3.514	2.422	2.427	2.273	192
4	MOP /MOW	3.620	3.841	4.049	691	1.750
5	Suntik	71.860	74.028	71.904	76.456	42.770
6	Susuk / Implant	19.953	20.107	20.353	21.147	2.593

Sumber Data : Dinas Dinas KBP3A Kab. Bangkalan 2023

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk peserta KB aktif di Kabupaten Bangkalan, pemakaian alat kontrasepsi menurun drastis di tahun 2022 pada segala jenis alat kontrasepsi. Jika dikaitkan dengan jumlah PUS memang di tahun 2022 turun cukup drastis. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab menurunnya pemakaian alat kontrasepsi. Selain dilihat berdasarkan alat kontrasepsinya, peserta KB juga disajikan data berdasarkan usianya sebagai berikut.

Tabel 2.52
Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) di Kabupaten Bangkalan

NO	PUS (PASANGAN USIA SUBUR)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PUS	193.891	199.353	195.475	195.475	119.423
	a. Jumlah PUS yang Ber-Kb	140.543	142.590	137.786	137.786	58.417
	b. Jumlah Pus Yang Tidak Ber Kb	53.348	56.763	57.689	57.689	61.006
3	ASFR	12,69	16,42	15,75	16,3	2,20
4	TFR	2,19	2,18	2,16	2,14	2,26

Sumber Data : Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan, 2022

Secara spesifik untuk peserta KB yang merupakan pasangan usia subur terus bertambah dari tahun 2018-2019. Tahun 2020 dan 2022 terjadi penurunan jumlah pasangan usia subur yang ber KB dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021. Tren PUS yang ber KB ini tidak serta merta mempengaruhi jumlah kelahiran yang dilihat pada nilai ASFR yang terus naik turun selama 5 tahun terakhir. Jumlah kelahiran berdasarkan nilai TFR menunjukkan bahwa wanita usia 15-49 tahun secara rata-rata mempunyai 1-3 anak.

2.3.2.8 Perhubungan

Persentase pelayanan infrastruktur perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Rata-Rata Kualitas Infrastruktur Perhubungan

Perhubungan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	79%*	68%	60%	77%	78%
Persentase angkutan umum yang layak fungsi	50%	50%	50%	54%	74%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan, 2023

Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik mengalami penurunan setiap tahun. Awalnya tahun 2018 sebesar 79% lalu berangsur mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 60%. Hal ini dikarenakan ada refocusing anggaran yang mengakibatkan infrastruktur perhubungan mengalami penurunan. Namun demikian, di tahun 2021 dan 2022 persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik, meningkat kembali dan lebih tinggi dibandingkan dengan data 5 tahun terakhir.

Sementara itu persentase angkutan umum yang layak fungsi konstan pada 50% hingga tahun 2020, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 74%. Peningkatan ini disebabkan mulai normalnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi meningkatnya pelayanan transportasi umum pasca pandemi Covid-19.

A. Jenis Angkutan

Angkutan umum pedesaan merupakan jasa angkutan umum yang tersedia di wilayah perencanaan menghubungkan daerah-daerah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Ketersediaan angkutan umum yang melintasi rute trayek yang telah tersedia sebanyak 43 angkutan ada tahun 2020.

Adanya angkutan umum mengarahkan pemerintah untuk menyediakan halte sebagai fasilitas layanan kepada masyarakat agar merasa lebih nyaman. Adapun halte di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 25%. Kebutuhan fasilitas umum yang lain dengan adanya angkutan umum adalah ketersediaan terminal. Terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sudah mencapai 37,5%. Berikut ini rute angkutan umum di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Data Jalur Angkutan Umum Kabupaten Bangkalan

NO	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jarak KM	Status
I	Angkutan Pedesaan dan Perkotaan			
1	A	Terminal Bangkalan-sub terminal burneh PP	6	Aktif
2	B	Terminal-terminal bancaran PP	5,5	Aktif
3	C	Sub terminal-terminal bancaran PP	6	Non-aktif
4	DD	Terminal Kamal-Perumnas PP	5	Aktif
5	D1	Kamal-Bangkalan-Tanah Merah-Galis-Blega-Lomaer PP	62	Aktif
6	D2	Terminal Kamal-Bangkalan-Tanah Merah PP	36	Aktif
7	D3	Terminal Kamal-Bangkalan PP	18	Aktif
8	D4	Terminal Kamal-Terminal Bangkalan-Burneh-Nyerondung-Tragah-Kwanyar PP	38	Non-aktif
9	D5	Terminal Bangkalan-Burneh-Langkap-Labang PP	15,8	Non-aktif
10	D6	Terminal Bangkalan-Burneh-Nyrondung-Tragah-Kwanyar PP	20	Non-aktif
11	E1	Terminal Kamal-Bangkalan-Arosbaya-Sepulu-Tanjung Bumi PP	68	Aktif
12	E2	Terminal Bangkalan-Arosbaya-Sepulu-Tanjung Bumi PP	50	Aktif
13	E3	Terminal Kamal-Bangkalan-Arosbaya-Geger Kombangan PP	44	Non-aktif
14	E4	Arosbaya-plakaran-geger-petrah-tanah merah PP	26	Non-aktif

NO	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jarak KM	Status
15	E5	Sepulu-banyeor-bangsereh-kombangan-geger-petrah-tanah merah PP	25	Non-aktif
16	F1	Terminal kamal-Labang-Kwanyar-Modung-Kedundung-Blega PP	51,1	Non-aktif
17	F2	Terminal Kamal-Labang-Kwanyar-Tanah Merah PP	26	Non-aktif
18	F3	Terminal Kamal-Jukonh-Labang-Kesek-Sukolilo-Kwanyar PP	19	Non-aktif
19	F4	Terminal Kamal-Labang-Kwanyar-Tragah-Nyrondung-Burneh-Bangkalan PP	39	Non-aktif
20	G	Terminal Bangkalan-Kemayoran-Ujung piring-Socah-Bangkalan PP	20	Non-aktif
21	H1	Blega-Lomaer-Bungkak-Konang PP	12	Non-aktif
22	H2	Blega –lomaer-bungkak-kokop-banyusangkah PP	45	Non-aktif
III	Angkutan AKDP			
1		Kamal-Sumenep	Station Wagon	Aktif
2		Kamal-Pamekasan	Station Wagon	Aktif
3		Kamal-Sampang	Station Wagon	Aktif
4		Kamal-Tamberu	Station Wagon	Aktif

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jaringan Trayek untuk angkutan pedesaan dan perkotaan sebanyak 22 (dua puluh dua) trayek hanya terlayani sebanyak 8 (delapan) trayek. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan akses dari terminal kamal ke jembatan Suramadu serta maraknya penggunaan jasa ojek *online*, untuk Trayek AKDP tetap melayani rute dari terminal Kamal menuju Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Tamberu.

B. Transportasi

Keberadaan jembatan Suramadu dapat memperlancar arus penumpang, barang dan jasa. Kemudahan akses dan jarak tempuh yang lebih cepat melalui jembatan suramadu merupakan pilihan utama moda transportasi dari dan ke Madura. Adapun terkait data sarana dan prasarana

perhubungan dan rambu keselamatan jalan di Kab Bangkalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.55
Data Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Rambu-Rambu Keselamatan Jalan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	Rambu	Guardrill	Marka
1	2018	2182 unit	224 m2	22.100,25 m
2	2019	2238 unit	724 m2	22.300,25 m
3	2020	2295 unit	724 m2	22.500,25 m
4	2021	2300 unit	724 m2	22.700,25 m
5	2022	2380 unit	724 m2	22.900,25 m

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Bangkalan, 2023

Berdasarkan data diatas, terjadi penurunan wajib uji di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya dampak dari pandemi Covid-19 sehingga data menunjukkan penurunan pelaku usaha transportasi yang melakukan uji kendaraan. Selain itu, ada beberapa alasan terkait penurunan jumlah kendaraan wajib uji, diantaranya :

1. Banyaknya bus yang mengubah bentuk kendaraan dirubah menjadi kendaraan angkutan barang
2. Banyak kendaraan yang dijual oleh pemilik dan dimutasi ke luar daerah kabupaten bangkalan
3. Kurangnya tingkat kesadaran para pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya, terutama di daerah pedesaan
4. Banyak kendaraan barang bukan umum yang over dimensi dan over load sehingga para pemilik enggan untuk menguji kendaraannya

Dalam upaya meningkatkan pelayanan sektor transportasi publik wajib dilakukan Uji Kelayakan kendaraan bermotor yang dapat dilihat pada Tabel berikut. Di samping harus ada uji kelayakan sebagai standart pelayanan, standart keselamatan bagi angkutan umum trayek juga harus tersedia.

Tabel 2.56

Jumlah Kendaraan Wajib Uji
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Kendaraan Wajib Uji	2018	2019	2020	2021	2022
MPU	185	116	99	36	37
BUS Umum	288	108	93	79	61
BUS Bukan Umum	212	164	131	125	129
BARANG Umum	3.164	1.567	1.421	1.056	543
BARANG Bukan Umum	6.473	4.585	3.959	3.582	3.255
TOTAL	**10.322**	**6.540**	**5.703**	**4.878**	**4.025**

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan, 2023

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bangkalan.

Kondisi geografis serta ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan menjadi kendala yang perlu diupayakan pemecahannya secara optimal, agar kesenjangan informasi dan komunikasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dapat dipersempit. Sebagai upaya mengurangi kesenjangan tersebut, bidang komunikasi dan informatika sesuai tugas dan fungsinya terus melakukan upaya antara lain melalui kegiatan penyebarluasan informasi, memfasilitasi kemudahan akses informasi, pemanfaatan jaringan infrastruktur TIK, pendayagunaan media informasi, pemberdayaan masyarakat melalui TIK, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan mengingatkan masyarakat berbasis TIK. Selain beberapa upaya di atas implementasi rintisan *e-government* di Kabupaten Bangkalan yang dimaksudkan sebagai upaya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh semua jajaran dan sudah barang tentu urusan ini menjadi tanggung jawab bidang Komunikasi dan Informatika untuk mengkoordinasikannya. Perubahan

mindset Aparatur Pemerintahan dan masyarakat merupakan salah satu aspek yang memiliki resistensi cukup besar dan memerlukan waktu dan proses secara bertahap dalam upaya penerapan *e-government*.

Dengan beberapa upaya tersebut maka pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika serta pemenuhan hak informasi publik dapat terselenggara dengan baik seiring dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Harapannya masyarakat menjadi sadar hak-hak dalam memperoleh dan memanfaatkan layanan tersebut melalui program-program bidang Kominfo melalui indikator kinerja utama mengurangi kesenjangan informasi dan komunikasi antar wilayah di Kabupaten Bangkalan.

Oleh karena itu berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Media Pertunjukkan Rakyat (Pertura), pemberdayaan TIK untuk masyarakat dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu pengembangan dan sinergitas manajemen Pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi Pemerintahan di seluruh Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.57
Kinerja Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2019-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Target	2,3 (Cukup Baik)	2,6 (Baik)	2,9 (Baik)	3,2 (Baik)
2	Realisasi	2,3 (Cukup Baik)	2,6 (Baik)	1,62 (Cukup)	1,89 (Cukup)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Adapun prasarana dan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Bangkalan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.58
Jumlah Sarana & Prasarana Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah *Base Transceiver Station* / BTS (Menara)	275	200	201	201	203
2	Jumlah Kantor Pos (Unit)	18	18	18	18	18
3	Jumlah Stasiun Radio Pemerintah (Stasiun)	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Bangkalan, 2023

Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika selama 5 tahun terakhir konstan, kecuali jumlah BTS yang meningkat dari tahun 2016 sebanyak 275 menjadi 2020 sebanyak 201 dan menjadi 203 pada 2023. sel

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. Koperasi

Selain UKM, yang berperan dalam ekonomi kerakyatan adalah koperasi. Sebagai usaha ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kualitas kehidupan anggotanya. Dengan demikian, maka keberadaan koperasi perlu didukung agar semakin diminati masyarakat. Secara detail data keragaman koperasi Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.59
Keragaman Koperasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Koperasi	814	819	830	836	855
2	Koperasi Aktif	151	156	167	173	197
3	Koperasi Tidak Aktif	663	663	663	663	658
4	Jenis Koperasi Produsen	160	161	165	166	168
5	Jenis Koperasi Konsumen	606	609	612	614	625
6	Jenis Koperasi Jasa	5	5	6	7	9

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
7	Jenis Koperasi Pemasaran	15	15	16	17	18
8	Jenis Koperasi Simpan Pinjam	26	29	31	32	35
9	Anggota	18083	14997	13542	19126	16.269
10	Persentase usaha mikro yang naik kelas	12,2	12,6	12,4		
11	Persentase usaha kecil yang naik kelas	3,6	3,8	3,9		
12	Jumlah usaha mikro yang dibina	120.445	221.745	128.745	156.654	166.495

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2023

Jumlah koperasi dari tahun ke tahun meningkat, namun jumlah anggotanya terus dinamis. Sementara itu usaha mikro yang dibina juga dinamis, akan tetapi tahun 2020 terjadi penurunan jumlah usaha mikro yang dibina karena adanya refocusing anggaran terkait waba Covid-19 yang juga menyebabkan beberapa usaha gulung tikar karena kebijakan PSBB. Namun demikian adanya pandemi, mengubah tatanan kehidupan masyarakat termasuk pola interaksi antara industri dengan pasar. Sehingga jumlah usaha mikro mulai meningkat kembali di tahun 2022. Adapun data perkembangan jumlah koperasi aktif yang ada di Kabupaten Bangkalan pada periode tahun 2018-2022 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.60
Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kamal	44	17	16	16	16
Labang	25	3	4	4	5
Kwanyar	33	4	2	3	4
Modung	34	3	1	1	3
Blega	32	2	3	3	4
Konang	20	3	1	1	2
Galis	31	1	0	0	0
Tanah Merah	39	6	3	3	3
Tragah	30	2	2	2	2
Socah	22	4	3	3	3
Bangkalan	169	84	60	65	69

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Burneh	43	11	5	8	7
Arosbaya	30	4	2	2	2
Geger	5	6	5	6	6
Kokop	26	2	1	1	1
Tanjung Bumi	37	2	1	1	1
Sepulu	36	2	1	1	1
Klampis	33	2	2	2	3
Total	**689**	**158**	**112**	**114**	**132**

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Sedangkan, perkembangan koperasi aktif menurut jenisnya di tahun 2021 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.61
Koperasi Aktif Menurut Jenisnya
di Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2021

Kecamatan	Jenis Koperasi				
	Koperasi Produksi	Koperasi Konsumsi	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Serba Usaha	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kamal	1	16	1	2	19
Labang	0	4	0	1	6
Kwanyar	0	3	0	0	7
Modung	0	1	0	1	4
Blega	0	3	0	0	5
Konang	0	1	0	0	2
Galis	0	0	1	0	1
Tanah Merah	1	3	2	1	8
Tragah	1	2	0	0	3
Socah	2	3	0	0	5
Bangkalan	6	65	9	6	91
Burneh	3	8	1	3	16
Arosbaya	2	2	0	0	4
Geger	0	6	2	0	10
Kokop	1	1	0	0	2
Tanjung Bumi	2	1	0	0	3
Sepulu	0	1	3	0	4
Klampis	0	2	4	0	7
Total	**19**	**122**	**23**	**14**	**197**

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Kecamatan Bangkalan merupakan basis terbesar koperasi di Kabupaten Bangkalan. Data tahun 2021 tercatat bahwa terdapat sebanyak 173 koperasi. Masing-masing kecamatan terdapat koperasi kecuali Kecamatan Galis.

B. UMKM

Profesi UMKM adalah potensi yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah yang saat ini masih belum tergali secara maksimal. Keberadaan UMKM merupakan sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Khusus Usaha Mikro merupakan unit usaha yang berdirinya belum terorganisir (baik segi usaha, tempat, fasilitas, izin usaha dan sistem kerjanya) usahanya mudah untuk berpindah-pindah lokasi, tidak menggunakan sarana yang permanen dengan modal dan teknologi yang relatif sederhana, dalam kegiatannya menjual barang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat utamanya golongan ekonomi menengah dan bawah.

Tabel 2.62
Data Jumlah Usaha Mikro Kab Bangkalan
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Usaha Mikro
1	2018	120.445
2	2019	121.745
3	2020	128.745
4	2021	156.654
5	2022	161.329

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UM Kab. Bangkalan, 2023

Pertumbuhan jumlah usaha mikro di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun cukup signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan, perkembangan jumlah UMKM terhitung sejak tahun 2018 sebanyak 120.445 usaha mikro sampai dengan tahun 2022 menjadi sebanyak 161.329 usaha mikro.

2.3.2.11 Penanaman Modal

Perkembangan nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bangkalan telah memberikan arti dalam meningkatkan perekonomian Bangkalan. Perkembangan investasi secara kumulatif pada periode ini dapat dilihat dari angka realisasi Penanaman Modal. Indikator utama terkait penanaman modal yaitu nilai investasi daerah. Nilai investasi daerah terdiri dari PMA dan PMDN. Adapun perkembangan nilai investasi di Kabupaten Bangkalan ada pada grafik di bawah ini.

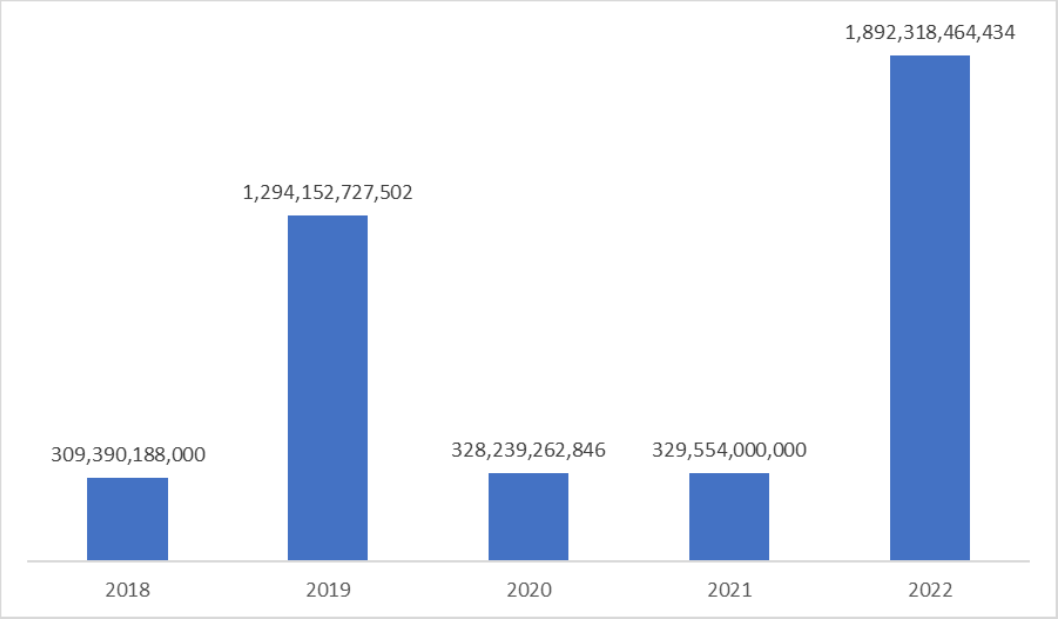

Grafik 2.33
Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDN
Di Kabupaten Bangkalan
Sumber data : Dinas PMPTSP Kab Bangkalan, 2023

Kabupaten Bangkalan tidak memiliki penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri tertinggi terjadi di tahun 2019 dan 2022. Dimana pertumbuhan nilai investasinya mencapai 318% (2019) dan 319.9% (2022). Penurunan drastis di tahun 2020 disebabkan oleh menurunkan kondisi perekonomian disebabkan oleh *shock* yang mengguncang ekonomi di berbagai penjuru negeri. Dimana kejutan ekonomi ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membuat kemandegan aktivitas perekonomian di berbagai sektor.

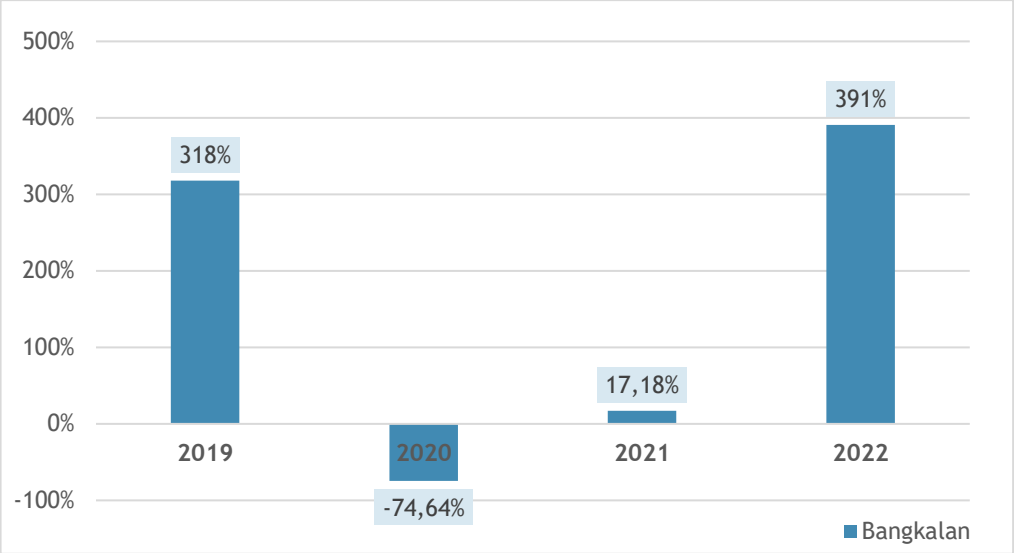

Grafik 2.34
Perkembangan Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022
Sumber data : Dinas PMPTSP Kab Bangkalan, 2023

Perkembangan investasi sebagaimana digambarkan di atas, harus menjadi perhatian bagi semua pihak dalam hal kelengkapan infrastruktur yang memadai, kesiapan SDM yang berkualitas, pemberian layanan perizinan yang prima serta jaminan stabilitas keamanan yang mantap serta peraturan daerah yang mendukung dan kepastian hukum.

Pada kondisi awal tahun 2018, nilai investasi daerah baik dari PMDN dan PMA disebutkan sebesar Rp. 309.390.188.000,-. Terjadinya lonjakan nilai investasi di tahun 2019, berdasarkan data jumlah modal yang dicantumkan dalam aplikasi *OSS* (*One Single Submission)* yang para pelaku ekonomi mendaftarkan diri melalui aplikasi dimaksud untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Kondisi pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 yang mulai menyerang di berbagai penjuru negara. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun diakibatkan karena adanya beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan bepergian

keluar rumah. Hal tersebut menyebabkan investasi penanaman modal menjadi sangat terdampak.

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Peran pemuda bagi suatu bangsa adalah sangat strategis, karena pemuda adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan proses pembangunan. Jumlah organisasi kepemudaan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun jumlah organisasi pemuda dan olahraga seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Organisasi Pemuda dan Olah Raga
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Organisasi kepemudaan (kelompok)	70	96	103	103	103
2	Karang Taruna (kelompok)	10	10	10	10	21
3	Organisasi Olah Raga (kelompok)	138	138	148	148	148
4	Sarana Olah Raga (unit)	540	545	554	613	616

Sumber data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangkalan 2023

Organisasi kepemudaan, organisasi olahraga, dan jumlah sarana olah raga terus meningkat. Perkembangan kinerja organisasi kepemudaan dan Olah Raga sudah cukup baik, namun pada realitasnya relatif stagnan karena jumlah organisasi yang jenisnya relatif sama dan sudah ditetapkan, misalnya organisasi Olah Raga mengikuti ketentuan dari KONI.

2.3.2.13 Statistik

Dalam rangka mendukung misi kedua yaitu mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi, maka sasaran yang ingin diraih oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait dengan statistik adalah *tersedianya sistem data statistik daerah yang handal, efektif dan efisien*. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut maka disusun indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Indikator kinerja urusan statistik dalam hal ini adalah jumlah elemen data statistik yang tersedia.

Adapun jumlah elemen data statistik di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Jumlah Elemen Data Statistik
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Bidang	Jumlah Elemen Data				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kesehatan	48	51	49	49	52
Penanaman Modal	3	4	4	4	4
Pendapatan	1	1	1	1	1
Sosial	6	7	8	8	8
Pendidikan	5	6	7	7	7
Koperasi	-	-	6	6	6
Pariwisata	-	-	2	2	2
Pertanian	-	-	11	11	11
Total	**63**	**69**	**88**	**88**	**91**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Bangkalan, 2023

Tabel diatas menunjukkan penurunan jumlah elemen data di beberapa bidang Karena keterbatasan data.

2.3.2.14 Kebudayaan

Perkembangan kebudayaan di kabupaten Bangkalan dapat dilihat melalui intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya serta pelestarian sejumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya. Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya daerah maka perlu dilakukan beberapa strategi melalui program-program antara lain: (1) Melakukan konservasi benda cagar budaya yang menjadi aset daerah; (2) melestarikan tradisi keragaman di pusat kebudayaan islam Bangkalan; (3) memfasilitasi kelompok kesenian, situs, budaya lokal; (4) menjadikan Masjid Maqbarah Syaikhona Kholil, sebagai pusat kebudayaan Islam; dan (5) memfasilitasi kelompok kesenian situs-situs budaya lokal.

Tabel 2.65
Data Kebudayaan
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah Benda Bersejarah	Jumlah Situs & Kawasan Cagar Budaya				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kamal	-	7	7	7	7	7
2	Labang	-	15	15	15	15	15
3	Kwanyar	-	6	6	6	6	6
4	Modung	-	6	6	6	6	6
5	Blega	-	3	3	4	7	4
6	Konang	-	12	12	12	15	12
7	Galis	-	1	1	1	6	1
8	Tanah Merah	-	3	3	3	6	3
9	Tragah	-	3	3	3	3	3
10	Socah	-	14	14	14	12	13
11	Bangkalan	76	21	21	23	1	24
12	Burneh	-	2	2	2	3	2
13	Arosbaya	-	7	7	7	3	9
14	Geger	-	7	7	7	13	7
15	Kokop	-	3	3	3	24	3
16	Tanjung Bumi	-	5	5	5	2	5
17	Sepulu	-	6	6	6	9	6
18	Klampis	-	8	8	8	7	8
Total		**76**	**129**	**129**	**129**	**129**	**147**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bangkalan, 2023

Dari data tabel diatas data diketahui bahwa situs dan kawasan cagar budaya terbanyak terdapat di Kecamatan Bangkalan. Untuk benda bersejarah sebanyak 76 buah tersimpan di museum Cakraningrat Bangkalan.

Tabel 2.66
Perkembangan Kebudayaan Tahun 2017-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
Jumlah penyelenggaraan festival seni, dan budaya	4 Event	3 Event	1 Event	1 Event	3 Event

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bangkalan, 2023

Dari data tabel diatas diketahui bahwa jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kecamatan Bangkalan konstan selama lima tahun terakhir. Adapun untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya menurun sejak tahun 2019. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang membuat akses perjalanan wisatawan sangat terbatas, walau demikian Jumlah Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta Jumlah penyelenggaraan festival seni, dan budaya harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, karena bagaimanapun hal tersebut merupakan identitas daerah dan banyak meningkatkan wisatawan.

2.3.2.15 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan karena pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang agar bisa menjawab tantangan kehidupan. Untuk memperoleh ilmu, banyak cara yang dapat kita capai, diantaranya melalui perpustakaan. Karena di perpustakaan terdapat berbagai sumber informasi yang bisa di dapat dan mudah diakses oleh masyarakat umum dan merupakan upaya untuk mengefisiensi dan efektifitas baik secara langsung maupun tidak langsung proses belajar mengajar, selain itu banyak juga manfaat lain yang dapat kita peroleh melalui perpustakaan. Perpustakaan mempunyai peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu perkembangan suatu perpustakaan tidak lepas dari perkembangan masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran perkembangan keperpustakaan di Kabupaten Bangkalan selama Tahun 2018-2022 dapat kami sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Perkembangan Perpustakaan Tahun 2018-2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perpustakaan yang dibina	72	72	72	154	174
2	Jumlah Jenis Buku	10	10	10	10	10
3	Jumlah Pengunjung	13,073	1,355	3397	1353	3.466
4	Jumlah Koleksi Judul Buku	16,604	1,765	1,839	18.460	18.828
5	Jumlah kunjungan Perpustakaan Keliling	956	962	136	12	50
6	Jumlah buku	28,206	3,055	3,228	32.351	32.798

Sumber Data : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Bangkalan, 2023

Perkembangan jumlah perpustakaan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan/kenaikan. Peningkatan juga terjadi pada jumlah kunjungan ke Perpustakaan yang semula 1.355 pada tahun 2019 menjadi 3.466 pada tahun 2022. Di sisi lain untuk meningkatkan minat baca terhadap masyarakat, terutama di kalangan anak sekolah yang jauh dari jangkauan/tidak ada perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi menyediakan mobil perpustakaan keliling. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan indikator baru yang dapat mengukur kinerja minat baca masyarakat untuk menilai kinerja pembangunan perpustakaan untuk masyarakat. Indikator yang dimaksud adalah indeks gemar membaca, yang akan dijelaskan dalam Bab 7 Perubahan RPJMD ini. Indeks Gemar Membaca merupakan IKU untuk mengukur minat baca masyarakat Bangkalan pada periode RPD 2024-2026 tahun ke depan.

Sesuai dengan dokumen RPJMD, bahwa kondisi awal indeks gemar membaca Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sebesar 29,9. Pada tahun 2020 menurun menjadi 22, karena ada kebijakan PSBB. Sehingga masyarakat tidak dapat mengakses perpustakaan umum. Namun seiring berjalannya waktu dan pademi covid masih melanda di tahun 2021, maka masyarakat telah dapat menyesuaikan diri sehingga indeks gemar membaca juga meningkat kembali. Dan pada 2022 terus meningkat menjadi 67,2.

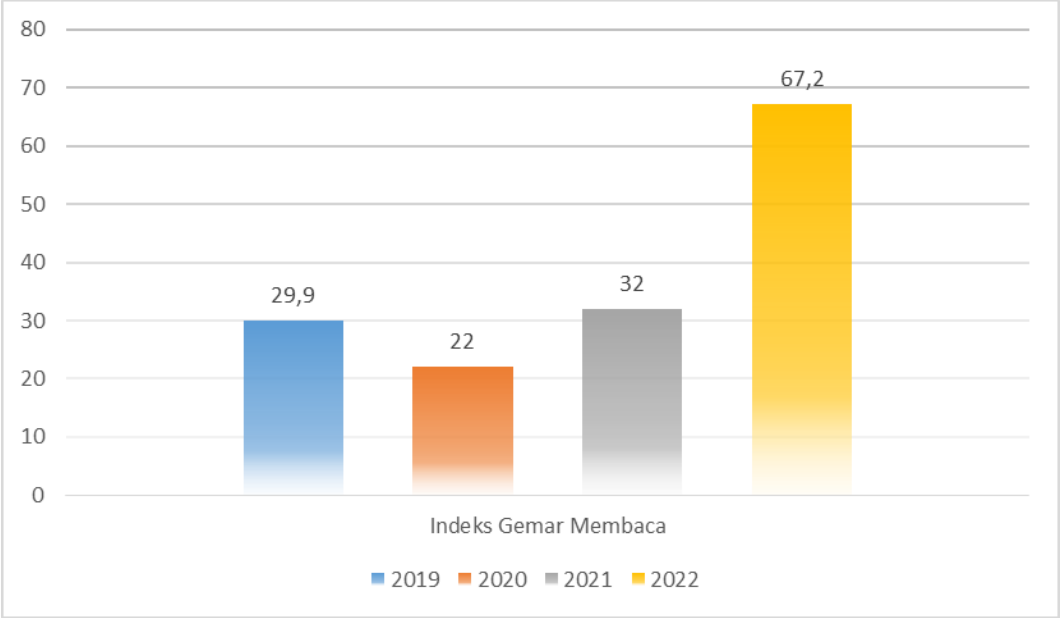

Grafik 2.35
Indeks Gemar Membaca Kabupaten Bangkalan 2019-2022
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

2.3.2.16 Kearsipan

Urusan Kearsipan dilakukan melalui program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan tujuan untuk meningkatkan tertibnya administrasi pemerintahan. Capaian sasaran program ini diukur melalui indikator Prosentase PD/Unit kerja yang melaksanakan tertib administrasi.

Menurut UU No. 43 Tahun 2009, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang diterima oleh lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tabel 2.68
Perkembangan Jumlah Arsip yang Dikelola
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Arsip Tekstual (Statis)	0	41	100	128	128
2	Arsip Visual (Foto)	52	52	52	52	52
3	Arsip dikelola	3,431	3,536	3,686	3939	3989
4	Kualitas pengelolaan Arsip	20%	20%	25%	25%	30%

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Jumlah arsip tekstual dan arsip dikelola secara umum dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan, sedangkan arsip visual dalam tiga tahun terakhir jumlahnya tetap yaitu 52. Arsip tekstual mengalami penambahan dari 41 pada tahun 2019 menjadi 100 arsip pada tahun 2020 serta terus mengalami penambahan hingga tahun 2022 menjadi 128 arsip. Adapun arsip yang dikelola meningkat dari 3.939 pada tahun 2021 menjadi 3.989 pada tahun 2022.

Perbaikan sistem administrasi Kearsipan bertujuan untuk menyelamatkan, melestarikan dan memperbaiki sistem administrasi kearsipan dengan mengikuti standarisasi pengolahan dan penyimpanan arsip daerah yang benar. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dalam upaya melestarikan kearsipan adalah penataan dan pendataan sistem kearsipan daerah, pengadaan sarana dan prasarana sistem penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan sistem kearsipan daerah serta pembinaan sistem kearsipan.

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2009 tentang Program Arsip Masuk Desa. Pada tahun 2011

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mampu melaksanakan Sosialisasi program Arsip Masuk Desa yang diikuti oleh 281 desa se-Kabupaten Bangkalan. Atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas kearsipan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan penyelenggarakan dan pembinaan sistem Kearsipan serta mampu mewujudkan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) khususnya Arsip Keuangan dan semua Arsip Daerah pada seluruh PD Kabupaten Bangkalan.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Secara umum pada tahun 2019, peningkatan pertumbuhan PDRB untuk sub sektor perikanan melambat hanya sebesar 1,02%, turun dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 3,43%. Peningkatan tersebut didukung oleh beberapa komoditas. Potensi perikanan Kabupaten Bangkalan dibedakan menjadi, Potensi perikanan darat (budidaya), potensi perikanan laut (tangkap) serta potensi budidaya laut. Masing - masing informasi terkait dengan potensi perikanan di atas, dapat dipaparkan sebagai berikut:

A. Perikanan Darat (Budidaya)

Potensi Perikanan Darat (Budidaya), terbagi atas perikanan tambak, perikanan kolam serta sawah tambak, dimana secara detail menggambarkan sebagai berikut:

1. Perikanan Tambak

Perikanan tambak dapat diketahui dari tingkat produksi terhadap berbagai jenis ikan, yang meliputi: ikan Bandeng, Belanak, Kakap, Mujaer, Tawes, Udang Windu, Udang Putih, Udang Api - api, Vanamei dan Kepiting. Ditinjau dari sisi produksi, potensi perikanan tambak memberikan informasi cukup baik, walaupun masing-masing tahun menunjukkan keragaman tingkat produksi

Secara khusus, tingginya produksi perikanan tambak, dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk didalamnya, terkait dengan kapabilitas pengelola tambak dalam melakukan pengelolaan areal tambak.

2. Perikanan Kolam

Perikanan kolam dapat diketahui dari tingkat produksi terhadap berbagai jenis ikan, yang meliputi, ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Gurami, Ikan Lele, serta Ikan Bawal. Potensi perikanan kolam menunjukkan tingkat produksi yang cukup baik, dengan tingkat produksi masing-masing tahun menunjukkan jumlah yang beragam dan dapat berproduksi secara kontinyu.

3. Sawah Tambak

Perikanan Sawah Tambak dapat diketahui dari tingkat produksi terhadap berbagai jenis ikan, yang meliputi, ikan Mas, Ikan Tawes, Ikan Mujair, Ikan Bandeng, Ikan Nila serta Ikan Bawal.

Tabel berikut menggambarkan perkembangan produksi perikanan darat/budidaya di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 dan 2022, yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.69
Perkembangan Produksi Perikanan Darat/Budidaya di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018– 2022 (Ton)

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kamal	440,71	631,34	781,81	815,9	855,07
2.	Labang	-	-	-	32,2	34,14
3.	Kwanyar	57,35	82,21	101,80	121,5	152,36
4.	Modung	31,25	98,04	121,41	139,4	145,70
5.	Blega	622,30	891,45	1.103,92	1.189,40	1.246,39
6.	Konang	-	-	-	9,3	9,16
7.	Galis	-	-	-	139,8	146,54
8.	Tanah Merah	-	-	-	25,3	26,64
9.	Tragah	-	-	-	17,6	18,32
10.	Socah	610,70	829,64	1.027,37	1.090,50	1.143,14
11.	Bangkalan	315,11	451,41	559	855,9	889,21
12.	Burneh	-	-	-	93,5	98,25
13.	Arosbaya	318,25	455,91	564,57	589,2	617,78
14.	Geger	-	-	-	13,2	14,15
15.	Kokop	-	-	-	23,8	-
16.	Tanjung Bumi	231,55	331,71	410,77	905,7	949,15

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
17.	Sepulu	152,40	218,32	270,35	282,1	295,57
18.	Klampis	322,20	1.711,57	2.119.50	1.607,30	1.684,33
Jumlah		28715,6	3.101,82	5.701,60	7.951,90	8.325,89

Sumber: Kabupaten BPS Kabupaten Bangkalan, 2022

Kecamatan Klampis, Blega, dan Socah merupakan tiga kecamatan yang menghasilkan produksi perikanan darat/budidaya terbesar pada tahun 2022. Sedangkan Kecamatan penghasil perikanan darat/budidaya terendah yaitu Kecamatan Sepulu, Modung, dan Kwanyar. Secara keseluruhan jumlah produksi perikanan darat/budidaya di Kabupaten Bangkalan meningkat sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

B. Perikanan Laut (Tangkap)

Potensi Perikanan Laut (Tangkap), meliputi berbagai jenis ikan yang meliputi, ikan peperek, ikan Manyung, Ikan Kakap Merah, Ikan Layang, Ikan Selar, Ikan Tembang, Ikan Kembung, Ikan Tengiri, Ikan Layur, serta Ikan laut lainnya.

Tabel 2.70
Perkembangan Produksi Perikanan Laut/Tangkap di Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2018 - 2022 (Ton)

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kamal	180,70	181,10	179,50	184,1	82,60
2.	Labang	1.164,30	1.173,30	1.153,80	1.183,70	1.340,30
3.	Kwanyar	3.608,80	3.625,80	3.563,90	3.656,30	3.994,50
4.	Modung	21,00	22,10	25,60	26,3	26,00
5.	Blega	-	-	91,30	-	-
6.	Konang	-	-	-	-	-
7.	Galis	-	-	-	-	-
8.	Tanah Merah	-	-	-	-	-
9.	Tragah	-	-	-	-	-
10.	Socah	2.943,80	2.946,00	2.897,40	2.973,40	2.654,20
11.	Bangkalan	3.427,10	3.441,30	3.385,50	3.471,20	3.626,90
12.	Burneh	-	-	-		-
13.	Arosbaya	3.089,60	3.102,40	3.052,20	3.130,20	3.442,60
14.	Geger	-	-	3	-	-
15.	Kokop	-	-	-	-	-
16.	Tanjung Bumi	5.504,10	5.529,90	5.435,70	5.576,50	5.282,30
17.	Sepulu	1.973,20	1.981,50	1.948,60	1.999,10	1.892,10

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
18.	Klampis	4.050,20	4.067,00	3.999,80	4.103,40	3.938,20
Jumlah		**24.660**	**26.070,40**	**25.736,30**	**26.304,20**	**26.279,70**

Sumber: Kabupaten BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Tabel data di atas memberikan informasi bahwa potensi perikanan Laut (Tangkap) menunjukkan tingkat produksi yang cukup baik. Selain perikanan laut tangkap terdapat pula potensi budidaya laut seperti budidaya rumput laut basah.

2.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu industri baru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi/mengaktifkan sektor produktivitas lainnya. Pariwisata dipandang sebagai industri yang kompleks karena dalam industri pariwisata terdapat industri-industri yang berkaitan seperti kerajinan tangan, cinderamata, penginapan dan transportasi. Hal ini senada dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 dimana sektor pariwisata diarahkan pada Pengelolaan potensi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Jembatan Suramadu yang beroperasi sejak tahun 2008, mempunyai dampak pada sektor pariwisata, hal ini dibuktikan dengan banyak bermunculan industri pariwisata kuliner di sepanjang jalan dan pedagang yang menjual batik tradisional maupun kerajinan khas Madura umumnya dan Bangkalan khususnya, disamping itu juga adanya peningkatan kunjungan wisatawan dari luar Kabupaten yang datang untuk berziarah ke Makam Syaikhona Cholil. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena adanya kesempatan untuk bekerja di sektor pariwisata.

Pariwisata juga tidak lepas dari kebudayaan suatu daerah, masyarakat Madura umumnya dan Bangkalan khususnya dikenal sebagai penganut

islam yang taat, hal ini mempengaruhi kehidupan orang Madura yaitu nilai-nilai Agama Islam melandasi setiap aspek kehidupan masyarakat Madura, termasuk orang Bangkalan. Ini sesuai dengan ungkapan orang madura yaitu "Bhuppa' Bhabbu', Guru, Rato" yang maksudnya dalam kehidupan orang Madura terdapat tiga komponen penting yang menjadi figur panutan yaitu Bapak, Ibu, Guru (dalam hal ini merajuk pada figur kyai atau ulama), dan yang terakhir figur Pemimpin Formal (birokrasi).

Hingga saat ini jumlah objek wisata di Kabupaten Bangkalan adalah 26 (dua puluh enam) objek wisata. Salah satu budaya dan sebagai obyek wisata di Kabupaten Bangkalan sampai saat ini tetap dipertahankan adalah Kerapan Sapi. Hal tersebut perlu dicatat sebagai nilai positif suatu budaya karena meskipun mendapat hal – hal baru diluar, namun masyarakat Bangkalan tetap mempertahankan ciri khas daerahnya. Meskipun demikian masyarakat Bangkalan tidak menutup kemungkinan untuk menerima arus perubahan dan kemajuan zaman, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengembangkan sumber daya manusia di Bangkalan tanpa menghilangkan identitasnya.

Kabupaten Bangkalan mempunyai obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan dan dapat dinikmati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, mulai dari wisata religi, alam/pantai, budaya, kuliner, tradisional (batik tulis) serta wana wisata bukit Geger. Untuk mengetahui jumlah objek wisata di Kabupaten Bangkalan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Jumlah Objek Wisata
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

NO	KECAMATAN	OBJEK WISATA				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kamal	-	-	-	-	-
2	Labang	-	-	-	1	1
3	Kwanyar	2	2	2	2	2
4	Modung	-	-	-	-	-
5	Blega	-	-	-	-	-
6	Konang	1	1	1	1	1
7	Galis	1	1	1	1	1
8	Tanah Merah	-	-	-	-	-
9	Tragah	-	-	-	-	-
10	Socah	1	1	1	1	1
11	Bangkalan	7	7	7	7	7
12	Burneh	-	-	-	-	-
13	Arosbaya	2	2	2	3	3
14	Geger	1	1	1	1	1
15	Kokop	1	1	1	1	1
16	Tanjung Bumi	2	2	3	5	5
17	Sepulu	2	2	2	2	2
18	Klampis	0	0	0		-
Total		**20**	**20**	**21**	**25**	**25**

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Berdasarkan data diatas, dari 20 objek wisata di Kabupaten Bangkalan tahun 2019 terdapat wisata alam sebanyak 9 objek, wisata religi sebanyak 7 objek, dan wisata buatan sebanyak 4 objek.

Fokus pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan (RIPARKAB) yang merupakan dokumen dasar perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai tahun 2035 terdapat 31 Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK) jenis alam, 11 Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK)

jenis budaya, dan 11 Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK) jenis hasil buatan manusia (minat khusus).

Dalam peraturan tersebut dikenal yang nama Daya tarik wisata, dimana daya tarik wisata Kabupaten Bangkalan dikelompokkan menjadi 3 jenis :

1. Daya tarik wisata alam adalah daya Tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
2. Daya Tarik wisata budaya adalah daya Tarik wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
3. Daya Tarik wisata hasil buatan manusia atau daya tarik wisata minat khusus adalah daya tarik wisata yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya

Untuk mensinergikan Program percepatan pembangunan ekonomi Se-Kawasan Prioritas Gerbang kertosusila sesuai Perpres No 80 Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan dalam giat wisatanya ikut mendukung program "Dewi Cemara". Adapun potensi Desa wisata di Kabupaten Bangkalan sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.72
Potensi Desa Wisata Kabupaten Bangkalan

No	DESA	KECAMATAN	POTENSI WISATA
1	Desa Pendabah	Kecamatan Kamal	Bukit Sendeng
2	Desa Gili Barat		Mangrove Gili Barat
3	Desa Kamal		Pelabuhan Kamal, Pantai, Pemotongan kapal
4	Desa Morkepek - Sukolilo Barat	Kecamatan Labang	Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM)
5	Desa Jaddih	Kecamatan Socah	Bukit Kapur Jaddih
6	Desa Socah		Pemandian Sumber Air Jokotole
7	Desa Buduran	Kecamatan Arosbaya	Bukit Kapur Arosbaya
8	Desa Lajing		Pantai Pocokan Lajing
9	Desa Buduran		Makam Aermata ibu
10	Desa Plakaran		Makam Agung Plakaran
11	Desa Makam Agung	Kecamatan Bangkalan	Makam Agung Ki Lemah Duwur
12	Desa Ujung Piring		Sumber Mata Air Kolla Langgundih

No	DESA	KECAMATAN	POTENSI WISATA
13	Desa Sembilangan		Mercusuar Sembilangan, Pantai dan hutan Mangrove
14	Desa Martajasah		Makam Syaikhona Kholil, Kolla Laggundih
15	Desa Demangan		Makam Sultan Abdul Kadirun, Taman Paseban
16	Desa Mlajah		Museum Cakraningkrat, Taman Rekreasi Kota, Pasar Wisata Ki Lemah Duwur
17	Desa Kramat		Agrowisata Salak Kramat
18	Desa Tonjung	Kecamatan Burneh	Air DAM Tunjungan
19	Desa Tragah	Kecamatan Tragah	Pengrajin perak terbesar di Madura
20	Desa Pocong		Pemandian Sumber Pocong
21	Desa Mecajah	Kecamatan Tanjung Bumi	Pantai Siring Kemuning
22	Desa Bumi Anyar		Pantai Bumi Anyar
23	Desa Tlangoh		Pantai Tlangoh
24	Desa Telaga Biru		Pantai Telaga Biru, Sentra batik
25	Desa Banyusangka		1. Buju' Azimat Sayyid Husein (Bujuk Banyosangkah) 2. Penghasil ikan terbesar di Madura dengan kualitas ikan terbaik
26	Desa Tanjung Bumi		Sentra Batik Tanjung Bumi
27	Desa Maneron	Kecamatan Sepuluh	Pantai Maneron
28	Desa Prancak		Pantai Tengket
29	Desa Labuhan		Kawasan Hutan Mangrove Labuhan Taman Laut Konservasi Terumbu Karang
30	Desa Prancak		Sumber Mata Air Tekobir
31	Desa Genteng	Kecamatan Konang	Api Alam Konang (Api Abadi)
32	Desa Geger	Kecamatan Geger	Hutan dan Gunung Geger
33	Desa Kwanyar	Kecamatan Kwanyar	Pantai Rongkang
34	Desa Ketetang		Makam Sunan Cendana
35	Desa Durjan	Kecamatan Kokop	Air Terjun Kokop
36	Desa Batokoragan		Gua Batokorogan
37	Desa Banyubunih	Kecamatan Galis	Air Terjun Galis
38	Desa Paka'an Laok		Makam (Buju') Seleret
39	Desa Paterongan		Sentra Clurit dan Pecut Hias
40	Desa Patengteng	Kecamatan Modung	Sentra Batik

Sumber: Puslit Pariwisata LPPM UTM, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan, terdapat 15 kecamatan yang memiliki

potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk mendukung program "Dewi Cemara". Sedangkan untuk mengetahui perkembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Elemen Data Urusan Pariwisata
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2022

Elemen Data	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
I. Jumlah Obyek Wisata*						
Objek Wisata Budaya	2	5	8	2	2	Objek
Objek Wisata Buatan	3	3	4	6	6	Objek
Objek Wisata Bahari	3	4	7	0	0	Objek
Objek Wisata Cagar Alam	12	8	9	0	0	Objek
Objek Wisata Sejarah dan Religi	7	9	15			Objek
Objek Wisata Pendidikan	1	1	1	0	0	Objek
II. Jenis Penginapan*						
1. Hotel*						
Jumlah Hotel Melati	1	6	6	2	2	Hotel
Jumlah Kamar	32	172	172	58	58	Kamar
Jumlah Tempat Tidur	48	339	339	*101*	*101*	*bed*
III. Biro Wisata						
1. Jumlah Biro Wisata	12	10	11	14	14	Biro
IV. Wisata Kuliner						
1. Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman*						
Jumlah Restoran	132	137	129	8	8	Buah
Jumlah Cafetaria/Cafe	3	6	6	0	0	Buah
Jumlah Warung/Kedai Makan	1911	2744	3108			Buah
2. Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan Yang Disediakan*						
Sea Food	2	2	2	0	0	Buah
Indonesian Food	4	4	5	0	0	Buah
V. Pusat Penjualan Cenderamata*						
1. Penjualan Cenderamata*						
Toko Cenderamata	5	5	5	0	0	Buah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Secara umum jumlah objek wisata di Kabupaten Bangkalan terus bertambah, terutama objek wisata sejarah dan religi. Wisata Kuliner untuk jenis usaha jasa makanan/minuman juga bertambah apabila ditinjau dari tahun 2017 – 2022. Jumlah hotel juga bertambah dari yang awalnya 1 menjadi 6 hotel.

Tabel 2.74
Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

NO	KECAMATAN	WISATAWAN DOMESTIK					WISATAWAN MANCA NEGARA				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kamal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Labang	-	-	-	-	1.529	-	-	-	-	-
3	Kwanyar	7.519	8.680	2.990	1,258	1.368	0	0	-	-	-
4	Modung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Blega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Konang	805	257	469	72	-	0	0	-	-	-
7	Galis	697	957	996	208	-	0	0	-	-	-
8	Tanah Merah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tragah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Socah	22.411	18.601	8.278	4800	10.500	0	0	-	-	-
11	Bangkalan	1.286.993	1.644.310	756.443	162.074	3.292.575	0	71	-	-	13
12	Burneh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Arosbaya	1.103.735	848.625	143.889	21.796	11.935	0	99	-	-	-
14	Geger	4.779	5.575	2.197	498	1.443	0	0	-	-	-
15	Kokop	669	805	677	147	-	-	-	-	-	-
16	Tanjung Bumi	5.147	6.061	27.809	42.702	57.746	0	0	-	-	-
17	Sepulu	8.678	4.096	17.403	14.620	16.731	0	0	-	-	-
18	Klampis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Bangkalan		**2.441.433**	**2.537.967**	**961.151**	**248.265**	**3.393.979**	**281**	**0**	**170**	**0**	**13**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bangkalan, 2023

Dari tabel di atas, nampak bahwa kunjungan Wisatawan Domestik yang datang ke Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 sebanyak 248.265 orang. Sedangkan, obyek wisata yang berkembang sampai dengan tahun 2021 sebanyak 21 tempat. Guna mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan terdapat 5 (lima) penginapan yaitu hotel ningrat, Hotel Rose, Mess PKPN, Mess Madrasah Aliyah dan penginapan Rato Ebuh.

2.3.3.3 Pertanian

Indikator utama pertanian adalah besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi suatu sektor berindikasi pada kinerja dari sektor tersebut. Adapun data kontribusi subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memiliki kontribusi 62,15% dari jumlah produksi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 5,82 Triliun.

A. Tanaman Pangan

Secara umum pada tahun 2019, peningkatan pertumbuhan PDRB untuk sektor tanaman pangan adalah sebesar -6,43% dan kontribusinya terhadap PDRB ADHB adalah sebesar 30,91% dari produksi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peningkatan tersebut didukung oleh beberapa komoditas. Potensi tanaman pangan di Kabupaten Bangkalan, meliputi beberapa tanaman, baik berupa tanaman padi, jagung, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, serta kacang hijau, namun produksi tanaman pangan yang paling dominan adalah padi dan jagung. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tanaman padi dan jagung, menunjukkan tingkat produksi yang fluktuatif setiap tahunnya.

Tabel 2.75
Tanaman Pangan Padi dan Jagung
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi					
	a. Produksi (Ton)	247.868	201.621	249.415	2.526.642,30	237.468,70
	b. Luas Panen (Ha)	41.680	39.854	49.396	49.889	46,994
	c. Produktivitas (Ton/Ha)	5,95	5,09	5,05	51,15	50,53
2	Jagung					
	a. Produksi (Ton)	145.062	124.261	100.154	1.038.438,37	95.939,61
	b. Luas Panen (Ha)	63.670	54.931	45.676	46.133	42,556
	c. Produktivitas (Ton/Ha)	2,27	2,26	2,19	22,74	22,54
3	Ubi Kayu					
	a. Produksi (Ton)	40.377,22	24.362,23	-	-	27.245,07
	b. Luas Panen (Ha)	2.528	1.516	-	-	1.130
	c. Produktivitas (Ton/Ha)	159,72	160,70	-	-	241,11
4	Ubi Jalar					
	a. Produksi (Ton)	11.269,99	11.278,52	-	-	6.850,17
	b. Luas Panen (Ha)	600	594	-	-	209
	c. Produktivitas (Ton/Ha)	187,80	190,03	-	-	328,07
5	Kacang Hijau					
	a. Produksi (Ton)	1.484,78	1.091,37	-	29.394,72	863,69
	b. Luas Panen (Ha)	1.644	1.226	-	3.372	1.494
	c. Produktivitas (Ton/Ha)	9,03	8,90	-	8,81	5,78
6	Kacang Tanah					
	a. Produksi (Ton)	25.452,90	17.484,06	-	203.409,07	22.247,20
	b. Luas Panen (Ha)	21.364	14.643	-	17.061	16.086
	c. Produktivitas (Ton/Ha)	11,91	11,94	-	12,04	13,83
7	Kedelai					
	a. Produksi (Ton)	10.477,60	5.557,14	-	15.902,10	463,16
	b. Luas Panen (Ha)	7.854	4.593	-	1.385	366
	c. Produktivitas (Ton/Ha)	13,34	12,10	-	11,59	12,65

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2023 & Dinas Pertanian Tapahorbun Kabupaten Bangkalan, 2023

Dari uraian tabel data di atas, dapat diketahui bahwa produksi tanaman padi mengalami peningkatan pada satu tahun terakhir. Sedangkan produksi tanaman jagung posisi tertinggi pada tahun 2018 berdasarkan data pada 5 tahun terakhir. Produktivitas pertanian perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah konkret dari Pemerintah Daerah untuk mempertahankan ketersediaan lahan agar tidak terjadi alih fungsi.

B. Tanaman Holtikultura dan Tanaman Sayuran

Potensi tanaman holtikultura, meliputi beberapa tanaman diantaranya, tanaman pisang, rambutan, salak, nangka, dan mangga. Dari keseluruhan jenis tanaman tersebut, masing-masing menunjukkan jumlah produksi, jumlah pohon yang menghasilkan dan tingkat produktivitasnya. Berikut disajikan potensi tanaman hortikultura dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

Tabel 2.76
Tanaman Holtikultura
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman Pisang					
	a. Produksi (Kg)	71.883	75.592	137.685	139.062	63.297
	b. Tanaman Menghasilkan (Phn)	420.806	741.461	N/A	738.361	741.264
	c. Produktivitas (Kg /Phn)	0,17	0,27	N/A	0,35	0,09
2	Tanaman Rambutan					
	a. Produksi (Kg)	22.457	10.224	31.385	31.699	34.627
	b. Tanaman Menghasilkan (Phn)	162.847	89.217	N/A	280.486	313.341
	c. Produktivitas (Kw /Phn)	0,14	0,11	N/A	0,23	0,11
3	Tanaman Salak					
	a. Produksi (Kw)	7.700	7.302	15.049	15.195	15.231
	b. Tanaman Menghasilkan (Phn)	125.474	108.820	N/A	157.199	320.761
	c. Produktivitas (Kw /Phn)	0,06	0,07	N/A	0,11	0,05
4	Tanaman Nangka					
	a. Produksi (Kg)	15.071	12.194	12.519	12.644	11.819

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	b. Tanaman Menghasilkan (Phn)	57.529	33.090	N/A	99.532	64.397
	c. Produktivitas (Kg/Phn)	0,28	0,37	N/A	0,28	0,18
5	Tanaman Mangga					
	a. Produksi (Kg)	132.055	221.339	277.262	139.062	174.498
	b. Tanaman Menghasilkan (Phn)	297.257	394.774	N/A	738.361	842.439
	c. Produktivitas (Kg/Phn)	0,50	0,56	N/A	0,35	0,21

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Dari tabel di atas, menggambarkan bahwa tanaman pisang, rambutan, salak, nangka serta mangga, merupakan bagian dari potensi tanaman hortikultura yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan. Ditinjau dari tingkat produksi tanaman, selama kurun waktu lima tahun terakhir diketahui bahwa untuk produksi tertinggi tanaman pisang dan mangga tahun 2022. Sedangkan ditinjau dari produktivitasnya, buah mangga dan nangka memiliki produktivitas yang paling tinggi.

Selain tanaman pangan dan tanaman Holtikultura, potensi pertanian di Kabupaten Bangkalan juga terdapat tanaman sayuran, dimana, dalam lingkup ini terdiri dari beberapa tanaman yang meliputi, tanaman bawang merah, kacang merah, kacang panjang, dan cabe besar yang merupakan bagian dari potensi serta turut mewarnai potensi pertanian di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.77
Tanaman Sayuran
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman Bawang Merah					
	a. Produksi (Kw)	590	320	73	74	60
	b. Luas Panen (Ha)	7	8	5	5	2
	c. Produktivitas (Kw/Ha)	84,29	40,00	14,6	14,7	30,00
2	Tanaman Kacang Merah					
	a. Produksi (Kw)	298	102	NA	76	NA
	b. Luas Panen (Ha)	25	15	NA	30	NA
	c. Produktivitas (Kw/Ha)	11,92	6,80	NA	2,5	NA

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Tanaman Kacang Panjang					
	a. Produksi (Kw)	1.635	853	NA	290	NA
	b. Luas Panen (Ha)	88	33	NA	39	NA
	c. Produktivitas (Kw/Ha)	18,58	25,85	NA	7,36	NA
4	Tanaman Cabe Besar					
	a. Produksi (Kw)	1.989	2.353	670	677	608
	b. Luas Panen (Ha)	65	110	55	63	47
	c. Produktivitas (Kw/Ha)	30,60	21,39	12,18	10,8	12,94

Sumber: Dinas Pertanian Tapahorbun, 2023

Berdasarkan tabel di atas, produksi tertinggi tanaman sayuran di kabupaten bangkalan yaitu tanaman bawang merah, kacang merah dan kacang panjang di tahun 2018, sedangkan tanaman cabe besar di tahun 2019.

C. Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Bangkalan, terdiri dari berbagai jenis tanaman, diantaranya: tanaman kelapa, kapok/randu, jambu mente, cabe jamu, pocok agel, kencur/empon-empon, pinang, dan siwalan.

Pada tahun 2019 data yang berhasil dihimpun adalah produksi hasil perkebunan untuk jenis tanaman tebu yang mencapai 50 ton/ha. Kelapa dengan jumlah produksi 0,9 ton/ha. Jambu mente 2,525 ton/ha. Cabe Jamu 0,3 ton/ha dan pocok 0,47 ton/ha (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2018).

Indikator untuk mengukur kinerja perkebunan yaitu *Persentase Meningkatnya Pengelolaan Komoditas Perkebunan*. Indikator tersebut akan tinggi nilai jika dilakukan peningkatan produksi perkebunan. Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan keragaman tanaman perkebunan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.78
Produksi Perkebunan Kelapa dan Tebu
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022 (Ton)

No	Kecamatan	Kelapa					Tebu				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kamal	11,1	11,19	10,86	13,42	73,1	-	7541,11	-	-	-
2	Labang	57,53	57,09	53,41	49,79	109,16	1 468,8	16,74	16,74	-	-
3	Kwanyar	105,11	104,32	97,6	104,69	245,07	-	-	-	-	-
4	Modung	28,65	28,86	30,26	26,63	127,15	7485,7	342,41	-	-	-
5	Blega	66,97	66,95	62,64	66,28	242,1	1125,4	-	-	-	-
6	Konang	125,54	123,77	126,41	132,73	365,3	733,2	-	-	-	-
7	Galis	215,64	213,28	213,56	222,32	600,1	832,6	337,02	337,02	11,43	13
8	Tanah Merah	216	216,57	324,45	300,58	677,05	3539	2386,27	630,38	22,12	9,18
9	Tragah	35,5	35,7	35,24	41,92	187,84	750,2	-	-	-	-
10	Socah	181,69	179,24	176,95	164,74	538,5	530,3	205,46	-	-	-
11	Bangkalan	201,33	199,8	183,36	202,77	505,25	115,5	125	25	-	-
12	Burneh	86,36	86,79	80,03	87,09	375,33	4184,7	287,03	39,6	0,74	0,5
13	Arosbaya	59,21	59,68	49,48	52,37	274,73	395,6	46,5	-	-	-
14	Geger	186,78	186,71	175,57	155,9	653,02	1152,7	86	48,93	-	-
15	Kokop	184,13	184,5	168,89	184,17	719,22	-	-	-	-	-
16	Tanjung Bumi	137,57	139,15	119,65	108,23	604,85	11462,8	844,52	382,92	4	4,2
17	Sepulu	75,04	75,34	69,47	65,4	292,38	2323,2	45	-	-	-
18	Klampis	86	86,68	79,93	79,99	405,79	3928,8	1031,49	-	-	-
Kabupaten Bangkalan		2060,15	2055,62	2.057,76	2.059,01	2.059,01	6995,94	13294,6	1480,59	38,29	26,88

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Terdapat 2 komoditas perkebunan yang menjadi andalan Kabupaten Bangkalan, yaitu Kelapa dan Tebu. Produksi Kelapa pada tahun 2019 sebesar 2.055,62 ton dan meningkat menjadi sebesar 2.057,76 ton pada tahun 2020. Begitu juga dengan komoditas Tebu memiliki produksi sebesar 13.294,55 ton di tahun 2019 dan 1.480,59 ton di tahun 2020.

D. Peternakan

Potensi Peternakan di Kabupaten Bangkalan, diklasifikasikan atas 2 (dua) hal, yaitu potensi ternak kecil dan potensi ternak besar. Potensi ternak kecil, terdiri dari beberapa jenis ternak, yaitu ayam buras, ayam petelur, ayam ras pedaging, itik dan menthok. Sedangkan potensi ternak besar terdiri dari beberapa jenis ternak yaitu, kambing, kuda, sapi potong, sapi perah, kerbau serta domba.

Populasi ayam buras merupakan populasi tertinggi dibanding dengan populasi ternak kecil lainnya. Khusus untuk ternak unggas, secara umum semua komoditas mengalami peningkatan, dengan produksi tertinggi tetap pada ternak ayam buras sebesar 1.609.012 ekor di tahun 2022. Dimana selama kurun waktu 5 tahun terakhir populasi ayam buras terus meningkat. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi populasi ternak unggas di Kabupaten Bangkalan adalah tidak terlepas dari hukum demand dan supply sebagai akibat beroperasinya jembatan Suramadu yang memudahkan peternak dalam hal transportasi, pendistribusian ternak bibit sampai dengan transportasi ternak siap jual.

Tabel 2.79
Ternak Besar dan Unggas di Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018-2022 (Ekor)

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Populasi Kambing	91.446	90.467	92.460	88.944	80.901
2	Populasi Kuda	603	597	597	564	564
3	Populasi Sapi Potong	226.897	245.897	259.923	276,476	277.179

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Populasi Sapi Perah	20	20	20	11	12
5	Populasi Kerbau	1.276	1.219	1.219	1.198	960
6	Populasi Domba	1.947	1.010	1.010	935	940
7	Ayam Buras	1.097.987	1.561.166	1.576.769	1.584.431	1.609.012
8	Ayam Pedaging	377.981	389.868	372.883	323433	302.230
9	Ayam Petelur	107.096	108.089	105.482	88.486	84.369
10	Itik	76.695	83.055	82.381	85.630	85.701
11	Itik Manila	40.765	40.540	38.006	37.388	37.108

Sumber: Kabupaten BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Dari tabel di atas, memberikan informasi bahwa masing-masing populasi ternak, baik ternak kambing, kuda, sapi potong, sapi perah, kerbau, maupun domba, menunjukkan jumlah beragam, dengan peringkat populasi tertinggi, lebih banyak pada populasi sapi potong. Jenis ternak yang semakin gencar dikembangkan adalah sapi potong. Hal ini sejalan dengan kebijakan bahwa pulau Madura sebagai pulau ternak. Kebijakan penetapan Pulau Sapudi sebagai Plasma Nutfah sapi Madura adalah memungkinkan masuknya sapi potong dari luar pulau Madura ke Madura. Meningkatnya populasi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Bangkalan menyebabkan Bangkalan sebagai salah satu lumbung sapi potong di Jawa Timur.

2.3.3.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana ada perubahan kewenangan bidang Energi dan Sumberdaya mineral yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten kini ditarik ke pusat. Sehingga ESDM di Kabupaten bangkalan bukan menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan. Namun demikian gambaran tentang potensi energy dan sumber daya mineral dapat disampaikan sebagai berikut:

- ***Dolomit,*** tersebar di Kecamatan Kamal, Tragah, Kwanyar dan Labang
- ***Tanah Liat (clay),*** tersebar di Kecamatan Geger, Galis, Tragah, Konang, Labang, Modung, Blega, Kokop, Tanjung Bumi, Sepulu, Klampis
- ***Batu Phospat,*** tersebar di Kecamatan Tragah, Kwanyar, Labang, Modung dan Kecamatan Blega.
- ***Pasir,*** tersebar di Kecamatan Geger, Galis, Burneh, Kokop, Tanjung Bumi, Sepulu, Klampis.
- ***Batu Gamping,*** tersebar di Kecamatan Geger, Galis, Kamal, Tragah, Kwanyar, Konang, Labang, Modung, Blega, Tanah Merah, Socah, Burneh, Arosbaya, Kokop, Tanjung Bumi, Sepulu, Klampis.

Terkait dengan Energi elektrifikasi di Kabupaten Bangkalan, Rasio dihitung oleh PLN Bangkalan. Adapun data rasio Elektrifikasi yang tercatat dari tahun 2017-2020 dapat dilihat dari grafik berikut:

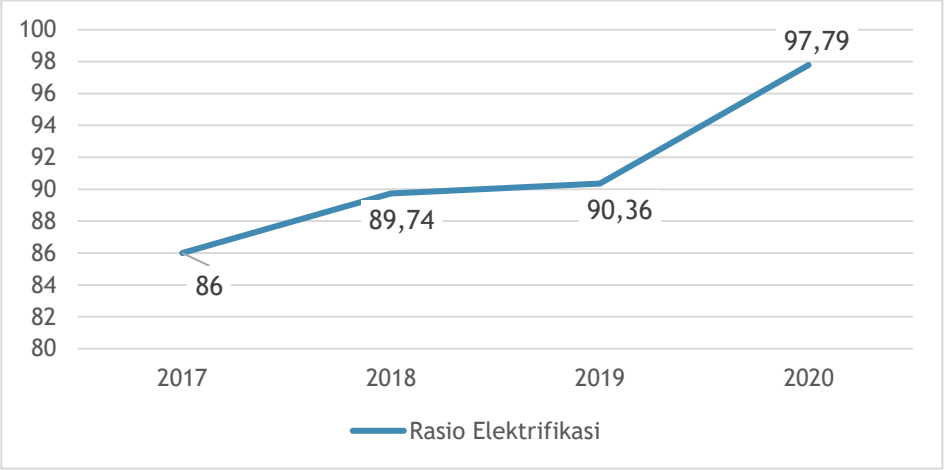

Grafik 2.36
Rasio Elektrifikasi
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2020
Sumber : PLN Kabupaten Bangkalan, 2021

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa nilai Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 97,79%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan

pelayanan PLN menjangkau hampir seluruh wilayah kecamatan di Bangkalan.

2.3.3.5 Perdagangan

Kawasan perdagangan di Kabupaten Bangkalan nampak lebih bergeliat terjadi di kecamatan kota Bangkalan. Di kecamatan kota Bangkalan terdapat 3 (tiga) simpul pertumbuhan ekonomi dengan dominasi sektor perdagangan yang sangat potensial dan dapat disebut sebagai kawasan segitiga emas Bangkalan. Simpul pertama adalah di Kelurahan Mlajah, dimana terdapat Bangkalan Plasa, dan Pasar Ki Lemah Duwur merupakan pusatnya. Simpul kedua di Kelurahan Bancaran, dengan Pasar Bancaran sebagai pusatnya. Sementara simpul ketiga terdapat di Desa Martajasa dengan Pesarean Syaichona Mohammad Cholil (Wisata Religi) sebagai pusatnya. Pengembangan ketiga kawasan ini dimasa yang akan datang tetap harus mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan, tanpa meninggalkan pengembangan kawasan sekitar Jembatan Suramadu di kecamatan Labang, kecamatan Tragah dan kecamatan Burneh.

Pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyerang di berbagai penjuru negara. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun diakibatkan karena adanya beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan bepergian keluar rumah. Hal tersebut menyebabkan beberapa industri ataupun UMKM yang bergantung dengan sektor riil (misal: UMKM kuliner) menjadi sangat terdampak. Dampak dari menurunnya omset menyebabkan adanya pengurangan karyawan (PHK). Kondisi inilah yang secara tidak langsung mempunyai sumbangsih terhadap naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.

Adanya *shock* dalam perekonomian dapat dengan mudah mempengaruhi kondisi makro ekonomi daerah. Bahkan adanya *shock* berupa pandemi Covid-19 yang menyerang perekonomian tidak hanya Negara Indonesia mengalami perlambatan dan bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak ke peningkatan kemiskinan, sebagaimana negara lain juga mengalami hal yang sama. Hal tersebut berindikasi pada lambatnya faktor-faktor penyokong pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan cukup tajam.

Adapun kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan sebagaimana grafik berikut:

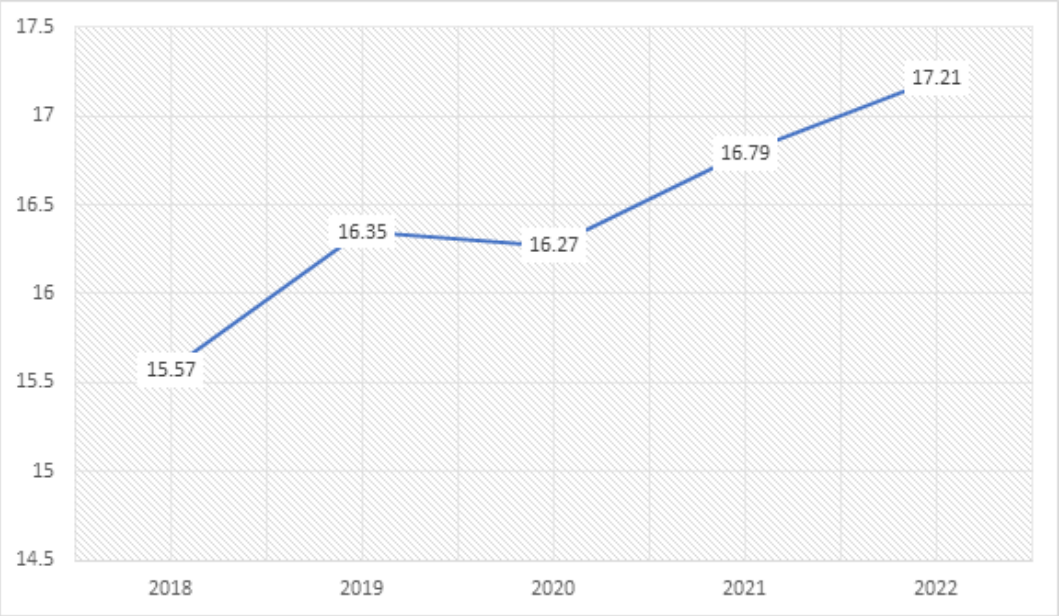

Grafik 2.37
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022
Sumber Data: BPS Kabupaten Bangkalan, 2023

Sektor ini terbagi menjadi subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasi dan subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Kabupaten Bangkalan dari kedua kategori ini, perdagangan eceran non kendaraan selalu mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini wajar, mengingat aktivitas perdagangan di Bangkalan masih

dominan komoditas yang bersifat lokal, seperti hasil makanan dan minuman, olahan pertanian dan kerajinan kecil.

Perkembangan perdagangan di Kabupaten Bangkalan juga dapat dilihat dari jumlah prasarana dan sarana perdagangan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.80
Jumlah Prasarana dan Sarana Perdagangan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

NO	JENIS SARPRAS	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasar Daerah	29	29	29	29	29
2	Pasar Desa	71	71	71	71	71
3	Toko	13.957	14.032	13.325	13.340	13.240
4	Kios	1.406	2.008	2.070	2.081	2.081
5	Warung	505	707	1.009	1.016	1.016

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2022, Dinas PMD, 2022 dan Dinas Perdagangan, 2022

Dari data tabel di atas, menunjukkan bahwa prasarana dan sarana perdagangan di Kabupaten Bangkalan relatif memadai. Jumlah toko menurun drastis di tahun 2020 karena adanya perubahan tatanan kehidupan masyarakat dalam bertransaksi akibat pandemi covid-19. Adapun jumlah kios dan warung terus bertambah selama lima tahun terakhir.

2.3.3.6 Perindustrian

Potensi Perindustrian, diklasifikasikan atas industri besar, industri sedang, industri kecil, industri mikro serta industri non formal, dimana hal ini merupakan bagian dari potensi yang dimiliki Kabupaten Bangkalan. Adapun data jumlah industri dari tahun 2017-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.81
Jumlah Industri di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Besar						

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	a. Jumlah Perusahaan	4	4	4	4	4	4
	b. Jumlah Tenaga Kerja	690	690	690	690	690	378
2	Industri Sedang						
	a. Jumlah Perusahaan	11	11	6	6	12	21
	b. Jumlah Tenaga Kerja	214	214	139	139	283	416
3	Industri Kecil						
	a. Jumlah Perusahaan	152	152	681	681	394	508
	b. Jumlah Tenaga Kerja	1.738	1.738	4.684	4.684	2.701	3.198
4	Industri Mikro						
	a. Jumlah Perusahaan	342	342	300	321	648	980
	b. Jumlah Tenaga Kerja	2.082	2.082	1.699	1.734	2.425	3.158
5	Industri Non Formal						
	a. Jumlah Sentra	153	160	176	187	NA	NA
	b. Jumlah Tenaga Kerja	12.101	12.101	6.204	6.204	NA	NA

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bangkalan, 2023

Tenaga kerja pada tahun 2022 banyak terserap pada industri kecil dan paling sedikit terserap pada industri besar. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan industri sedang, industri kecil dan industri mikro mampu menyerap tenaga kerja yang relatif banyak dibandingkan dengan keberadaan industri besar yang justru penyerapan tenaga kerjanya cenderung menurun. Data jumlah industri besar yang cenderung stabil menjadi salah satu indikasi lambatnya perkembangan investasi di Kabupaten Bangkalan. Pertumbuhan industri sedang, industri kecil dan industri mikro memberi kontribusi terhadap perekonomian yang terus naik dari tahun ke tahun meskipun pertumbuhannya sangat lambat.

Indikator kinerja utama urusan industri adalah pertumbuhan sektor industri pengolahan. Perkembangan laju pertumbuhan harus terus diamati pergerakannya sebagai upaya penjagaan stabilitas ekonomi pada sektor industri pengolahan. Data Perkembangan pertumbuhan industri di kabupaten bangkalan masih belum dapat dikategorikan stabil dan aman karena trend yang ditunjukkan masih fluktuatif yang artinya sektor industri pengolahan masih sangat terpengaruh dengan faktor-faktor eksternal. Sedangkan kontribusinya relatif stabil namun kontribusi hanya menunjukkan kenaikan angka sumbangan industri pengolahan terhadap PDRB.

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Pendukung

2.3.4.1 Sekretariat DPRD

Indikator kinerja Sekretariat DPRD adalah Prosentase Pencapaian Pembahasan Raperda. Adapun rincian capaian indikator yang telah diperoleh oleh Sekretariat DPRD dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.82
Capaian Indikator Sekretariat DPRD Kab Bangkalan
Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Prosentase Pencapaian Pembahasan Raperda	85%	85%	85%	85%	73,68%

Sumber : Sekretariat DPRD Kab Bangkalan, 2023

2.3.4.2 Sekretariat Daerah

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Nilai evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan. Adapun rincian capaian indikator yang telah diperoleh oleh Sekretariat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.83
Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kab Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	ST	ST	ST*	ST*	ST*
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B (60,10)	B (61,25)	B (61,96)	B (61,18)	(B) 63,01
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	80,27	80,75	83,92	80,95	82,78

Sumber : Sekretariat Daerah Kab Bangkalan, 2023

Keterangan : *=data tidak dihitung pada tahun berkenaan

2.3.5 Fokus Layanan Urusan Penunjang

2.3.5.1 Perencanaan

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan pada urusan Unsur pendukung pada periode tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dicermati pada table berikut:

Tabel 2.84
Capaian Indikator Perencanaan Kab Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Perencanaan Kinerja dalam mendukung Nilai SAKIP	NA	97,92 %	94,54 %	94,56%	94,42%
2	Persentase perangkat daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	NA	93,94 %	94,43 %	-	-
3	Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja program	NA	-	-	93,37%	99,21%
4	Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	NA	103,8 9%	86,53 %	96,44%	107,13 %
5	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	NA	96,84 %	90,89 %	90,34%	97,09%

Sumber : Bappeda Kab Bangkalan, 2023

2.3.5.2 Keuangan

Pada aspek keuangan, perangkat daerah yang mendukung ketercapaian indikator dari aspek ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Adapun capaian indikator yang telah dicapai dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.85
Capaian Indikator Keuangan Kab Bangkalan
Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pertumbuhan PAD	19,71%	57,61%	16,55%	35,76%	40,89%

Sumber : Kemenpan RB, 2022 & LKJIP Bapenda, 2023

2.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Nilai indeks tersebut di Kabupaten Bangkalan ditunjukkan dalam grafik berikut.

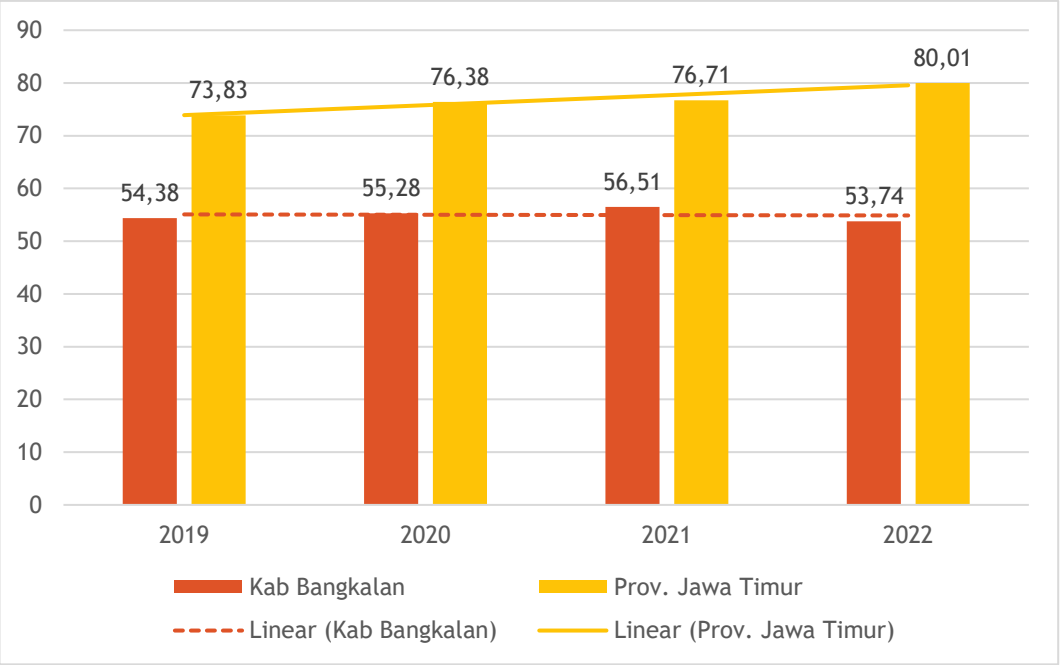

Grafik 2.38
Indek Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan IKU RPD 2024-2026 yang digawangi oleh Badan Kepegawaian dan Sumber daya Aparatur. Adapun untuk mendukung nilai IRB yang tinggi perlu didukung oleh performance dari tingkat profesionalisme aparatur. Berikut data pendukung IRB yang menjadi tanggungjawab BKPSDA.

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kab Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Profesionalitas Aparatur	NA	54,52	51,03	52,85	55,03
2	*Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat yang memuaskan	NA	79,70%	91%		
3	**Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial, teknis/fungsional, sosio kultural dan kompetensi lainnya**				4,62%	5,87%
4	*Persentase peningkatan ketersediaan PNS sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi*	NA	NA	60%		
5	**Indeks kepuasan aparatur tehadap pelayanan kepegawaian**				84,25%	84,17%

** = Indikator RPJMD awal dimulai dari tahun 2019-2021*

*** = Perubahan indikator yang dimulai dari tahun 2021-2023*

Sumber : BKPSDA *Kab Bangkalan, 2022*

2.3.5.4 Penelitian

Indikator kinerja unsur Penelitian adalah Prosentase Pencapaian Pembahasan Raperda. Adapun rincian capaian indikator yang telah diperoleh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.87
Capaian Indikator Penelitian Kab Bangkalan
Tahun 2021-2022

Indikator	2021	2022
Indeks Inovasi Daerah*	57,46	52,68

Sumber : Balitbangda Kab Bangkalan, 2023

2.3.6 Fokus Layanan Urusan Pengawasan

2.3.6.1 Inspekorat

Dalam Fokus Layanan Unsur pengawasan, diampu oleh 1 perangkat daerah yaitu Inspektorat. Capaian kinerja inspektorat mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Capaian Indikator Inspektorat Kab Bangkalan
Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kab Bangkalan, 2023

Indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimana penyelenggaraannya mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan, capaian tingkat maturitas SPIP di Kabupaten Bangkalan pada tahun Capaian kinerja inspektorat menunjukkan peningkatan tingkat kapabilitas APIP.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Bangkalan dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Daya Saing Kabupaten Bangkalan merupakan kemampuan perekonomian Kabupaten Bangkalan dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten/Kota di sekitar Provinsi Jawa Timur khususnya dan tingkat nasional maupun internasional.

Terkait kinerja aspek kemampuan ekonomi, indikator pertama yaitu indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga. Indikator tersebut mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

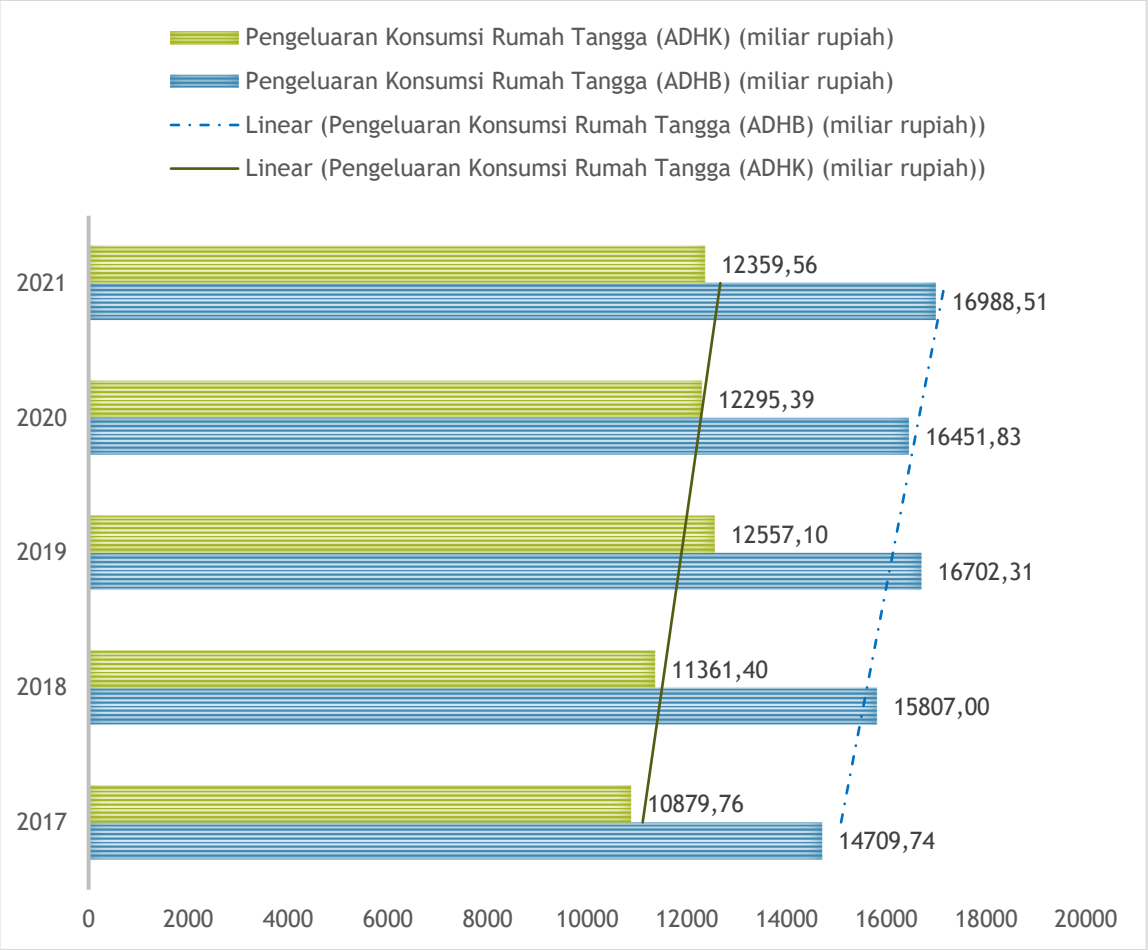

Grafik 2.39
Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan ADHB dan ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)
Sumber data: BPS Kabupaten Bangkalan, 2022

Indikator selanjutnya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP menghitung perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP dapat digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar hal tersebut upaya spesialisasi produk peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Melihat pentingnya NTP maka Kabupaten Bangkalan diupayakan

untuk dapat menyusun NTP dan digunakan dalam indikator aspek daya saing RPJMD.

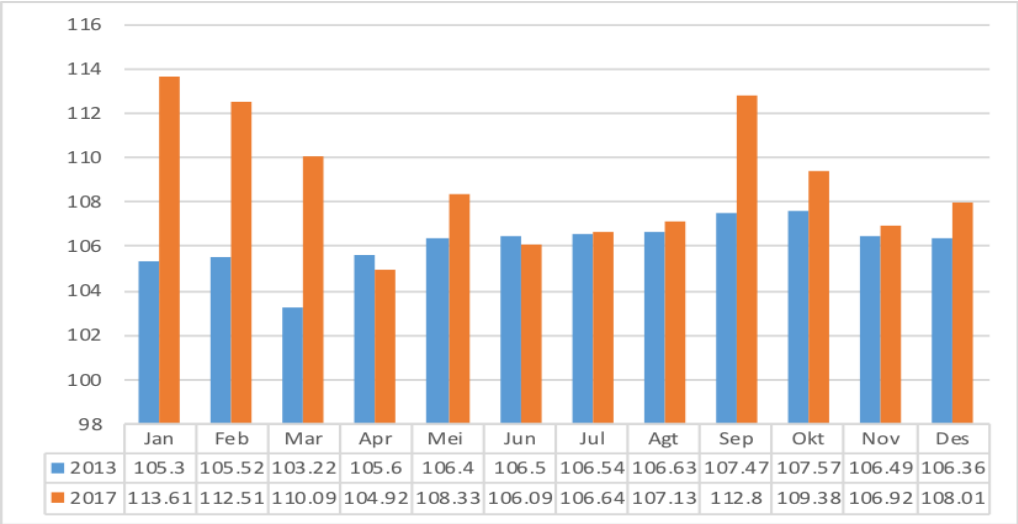

Grafik 2.40
NTP Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 dan 2017
Sumber data: Indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangkalan, 2013 dan 2017

NTP Kabupaten Bangkalan apabila membandingkan nilai pada tahun 2013 dengan 2017, maka dapat dilihat adanya kenaikan NTP dari yang semula 106,36 menjadi 108,01. Sebagai tambahan informasi berikut data NTP pada 5 (lima) provinsi di Pulau Jawa.

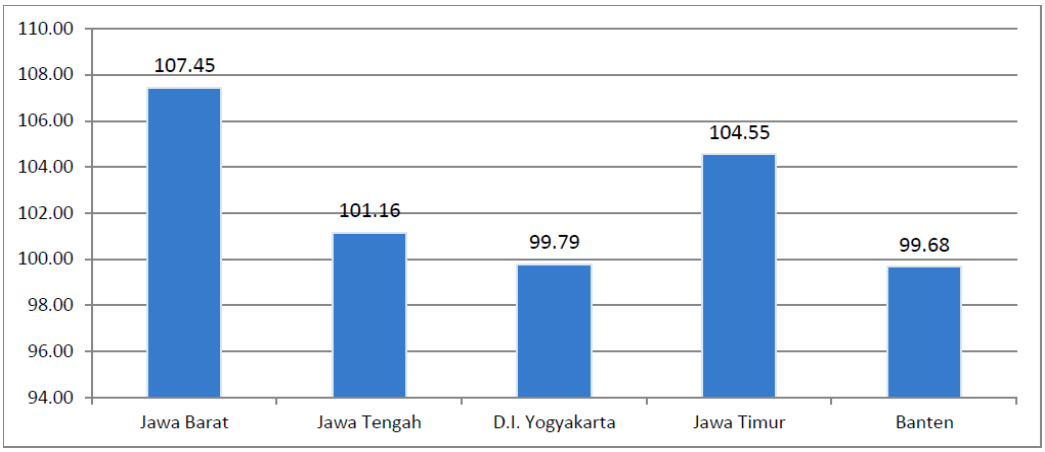

Grafik 2.41
NTP di Pulau Jawa Per April 2018
Sumber: BPS Jawa Timur, 2019

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Jenis dan Fungsi Jalan

Panjang jalan Kabupaten Bangkalan sekitar 721.365 Km. Jaringan jalan di Kabupaten Bangkalan cenderung membentuk pola linier terutama untuk jalan utama. Berdasarkan fungsi jalan, maka jalan-jalan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan termasuk ke dalam jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.

Koridor Surabaya-Madura saat ini telah dilayani oleh Jembatan Suramadu selain layanan transportasi penyeberangan Ujung-Kamal. Jembatan Suramadu menjadi koneksi Arteri Primer Jaringan pulau Jawa dengan jaringan pulau Madura. Jembatan Suramadu juga berfungsi sebagai konektor antara jaringan jalan tol Surabaya dengan jaringan arteri primer dan jaringan jalan tol pada masa depan. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura-Surabaya terletak di Kecamatan Labang. Pembangunan jembatan tersebut diharapkan mampu menjadi akses yang menunjang perkembangan di Pulau Madura secara keseluruhan. Untuk kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bangkalan sebagian besar telah beraspal.

2.4.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Transportasi

Sarana angkutan umum di Kabupaten Bangkalan dilayani oleh jenis angkutan MPU, bus dan mobil barang serta angkutan laut. Jalur atau rute angkutan umum yang ada berupa angkutan pedesaan yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Angkutan Bus melayani jalur antar kota di Pulau Madura-Surabaya. Sedangkan, angkutan laut melayani penyeberangan Bangkalan-Surabaya dan Bangkalan-Gresik.

2.4.2.3 Posisi Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan Kabupaten Bangkalan dalam ruang lingkup Gerbang Kertasusila (GKS)

sebagai Kawasan Strategis Nasional. Kondisi ini mengakibatkan adanya perubahan yang signifikan terhadap peranan dan struktur ruang kabupaten dalam konstelasi Lokal, regional maupun nasional. Dalam ruang lingkup regional Bangkalan akan menjadi primary urban atau perkotaan utama di kluster Madura dalam struktur Surabaya Metropolitan Area (SMA). SMA merupakan antisipasi dari perkembangan kota Surabaya sehingga kawasan sekitarnya menjadi kawasan penyangga termasuk di dalamnya Kabupaten Bangkalan yang meliputi wilayah pengembangan Kamal, Socah, Labang, Burneh, Arosbaya, Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi.

Sebagai daerah penyangga kota Surabaya yang mendukung sektor industri, Kabupaten Bangkalan dapat terus mengoptimalkan kinerja ekonomi wilayah yang telah berkembang. Untuk itu perlu pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi perkotaan yaitu peningkatan fungsi terminal angkutan kota, pengembangan pelabuhan di pantai utara Bangkalan, serta mendukung pembangunan kawasan suramadu dan jalan tol yang mengaksesnya.

2.4.2.4 Ketersediaan Air Bersih

Pengembangan industri dan pemukiman di kabupaten Bangkalan membutuhkan ketersediaan air bersih yang salah satunya akan dipenuhi melalui mata air Sumber Pocong yang merupakan salah satu mata air yang baku daerah Bangkalan dengan debit sungai hingga mencapai 4,5 m^3/det disaat musim hujan dan 5 m^3/det. Adapun kebutuhan air untuk industri yang akan datang direncanakan instalasi pegolahan air baku yang bisa menjangkau kawasan peruntukan industri yang telah ditentukan.

Sumber Daya air merupakan sumber daya yang berguna atau potensial sebagai manusia seutuhnya. Kegunaan air meliputi pengggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, aktivitas lingkungan dan rekreasi.Permintaan air telah melebihi suplai di berbagai kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terus meningkat sehingga mengakibatkan permintaan terhadap air bersih meningkat pula.

Beberapa sumber mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM adalah Sumber Pocong dimana debitnya dari sumber mata air ini adalah 200 liter/detik dgunakan 80% oleh PDAM, debit dari sumber sungai 4500 liter/detik digunakan 30% oleh PDAM. Potensi dari Sumber Mata Air ini sangat besar untuk perencanaan pembangunan ke depan mengingat sampai saat ini pemanfaatan sumber mata air Pocong masih relatif rendah khususnya untuk air minum, sebagian besar air dari Sumber Pocong disalurkan melalui saluran pembuangan.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Kabupaten Bangkalan menjadi primadona baru bagi investor baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk berbisnis. Pasca pembangunan Jembatan Suramadu dan bencana lumpur di sidoarjo memberikan peluang bagi Kabupaten Bangkalan untuk bersaing dengan - daerah lain dalam usaha menarik pemilik modal baik yang bergerak di bidang konstruksi, industri maupun migas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan biaya transportasi hasil industri menuju pelabuhan baik laut maupun udara guna memasarkan produknya.

Beberapa investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan antara lain PT. Pelabuhan Socah , dan PT MISI (Madura Industrial Seaport City), Wings Group, PT. Adi luhung, PT Suramadu Sukses Sejahtera , PT. Unilever dll. Disamping itu indikator keamanan dalam menjaga iklim investari di Kabupaten Bangkalan adalah "*Fasilitasi Penyelesaian Pertikaian Parpol".* Indikator tersebut untuk melihat seberapa besar kasus pertikaian antar parpol yang tertangani.

2.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kabupaten Bangkalan yang terjaga dengan baik akan menjadi situasi yang kondusif dan sangat mendukung bagi terlaksananya segala kegiatan pembangunan. Oleh karena itu segenap lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan

Kamtibmas. Keberadaan Satuan Tugas Perlindungan masyarakat desa (Satgas Linmas) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kamtibmas. Selain itu peran Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bangkalan kondusif. Hal ini dapat digambarkan bahwa tidak ada kejadian-kejadian yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Adapun indikator di Kabupaten Bangkalan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur meningkatnya kententraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat adalah: 1) penurunan pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat atau perda, 2) rata-rata persentase pencegahan dan penanganan konflik SARA/politik/bela negara.

Tabel 2.89
Ketentraman, Ketertiban dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat atau Perda yang terselesaiakan	-	60%	65%	85%	85%
2	Rata-rata persentase pencegahan dan penanganan konflik SARA/politik/bela negara	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP & Bakesbangpol, 2023

Pembangunan politik sebagai suatu bagian dari pembangunan secara menyeluruh, dimana adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Pembangunan politik suatu hal yang wujudnya tak kelihatan, namun dampaknya begitu dominan, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang dianggap penting pada akhir-akhir ini, banyak dipelajari orang terutama dalam kaitannya dengan perkembangan suatu

negara/daerah. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi, secara konseptual, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, selain itu tingkat partisipasi masyarakat berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya umur, jenis kelamin, status ekonomi dan sosial, pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 2.90
Perkembangan Kinerja Bakesbangpol Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Unjuk Rasa	25	47	39	49	55
	Bidang Sosbud	-	19	6	27	36
	Bidang Politik	9	25	31	18	7
	Bidang Ekonomi	16	3	2	4	12
2	Linmas Desa/Kelurahan	1.405	7.646	7.646	8.992	8.992
3	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Terdaftar	132	136	142	149	10
4	Jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar	1	4	6	35	3

Sumber Data : Satpol PP & Bakesbangpol, 2023

Melihat tabel di atas kesadaran berpolitik dapat diketahui dengan data yang disajikan. Jumlah organisasi masyarakat yang aktif terus bertambah. Namun, kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum belum terakomodasi. Unjuk rasa meningkat drastis pada tahun 2019 karena masuknya pandemi covid-19. Untuk itu, diperlukan pengembangan penyajian data berupa data jumlah pelanggaran perda atau kasus ketertiban umum yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan data tersebut akan diketahui perkembangan kecenderungan pelanggaran oleh masyarakat.

2.4.3.2 Pelayanan Perijinan

Pelayanan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk di telusuri perkembangannya mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berlakunya undang-undang tersebut akan mengakibatkan interaksi antara aparat daerah dan masyarakat menjadi lebih intens. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia akan melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat sebagai penyedia pelayanan. Kepentingan pemerintah Daerah terhadap pelayanan perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi Daerah. Kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi serta penerbitan izin menurut Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun untuk mencegah terjadinya pungutan pajak dan retribusi yang berlebihan serta perizinan yang menghambat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di daerah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penting dan perlunya pengembangan kinerja birokrasi pemerintah yang kompetitif seiring dengan perubahan trend globalisasi telah menjadi agenda penting bagi pemerintahan di banyak Negara. Tetapi upaya kearah tersebut masih banyak mengalami permasalahan serius, terutama menyangkut keberadaan dan penerapan sistem dan lembaga birokrasi pemerintah yang masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan sistem adaftif terhadap dinamika masyarakat, mengadopsi nilai-nilai yang relevan dari dunia bisnis untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik.

Hakekat pelayanan perizinan adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan wujud dari kewajiban aparatur

pemerintah sebagai abdi masyarakat. Menggunakan Asas Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipasif, Kesamaan Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan serta memperhatikan dan menerapkan prinsip standar pelayanan, pola penyelenggaraan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan penyelesaian pengaduan.

Tabel 2.91
Jumlah Retribusi Perijinan
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Jenis Perijinan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	451	435	1.147	2214	802
2	Ijin Gangguan (HO)/Ijin Tempat Usaha (SITU)	191	-	-	0	0
3	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	442	-	-	0	0
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	645	-	-	0	0
5	Tanda Daftar Industri (TDI)	11	2	6	8	0
6	Tanda Daftar Gedung (TDG)	8	20	45	12	0
7	Ijin Reklame	61	161	93	198	167
8	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	99	56	44	0	0
9	Ijin Prinsip	38	-	-	0	0
10	Ijin Lokasi	4	-	-	0	0

No	Jenis Perijinan	2018	2019	2020	2021	2022
11	Ijin Penggilingan Padi	6	1	1	0	0
12	Ijin Pertambangan	6	-	-	0	0
13	Ijin Reklamasi	-	-	-	198	0
Jumlah		**1.962**	**675**	**1.336**	**2.630**	**969**

Sumber Data: Dinas PMPTSP Kab Bangkalan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah perizinan yang relatif meningkat setiap tahun, salah satunya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Selain itu, fokus sumber daya manusia juga dapat diketahui dari tingkat ketergantungan sebagaimana penjabaran berikut ini.

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang berpendidikan sarjana.

Tabel 2.92
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja	708.983	717.771	726.233	734.621	746.659
2	Jumlah Angkatan Kerja	482.634	494.269	458.312	500.295	518.065
3	Jumlah Orang Yg. Bekerja	460.988	468.316	431.637	456.436	476.269
4	Jumlah Pencari Kerja	638	1.250	408	180	291

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bangkalan, 2023

2.4.4.2 Tingkat Ketergantungan

Usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

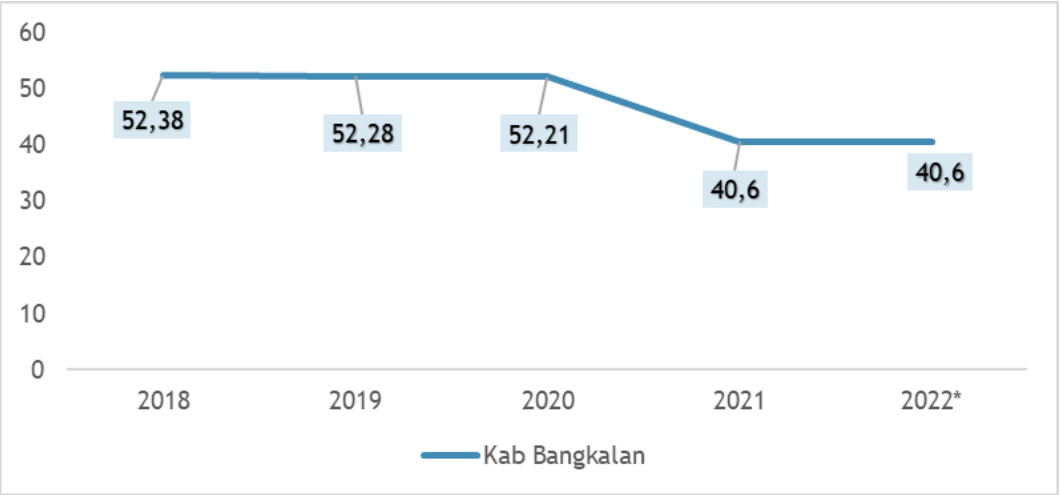

Grafik 2.42
Ratio Ketergantungan
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022
Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Dari data diatas dapat diketahui bahwa angka beban ketergantungan Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini

berarti bahwa semakin besar beban usia produktif untuk menanggung usia tidak produktif atau belum produktif, dengan kontribusi penduduk tidak produktif lebih besar daripada penduduk belum produktif.

2.5 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD yang ada di Kabupaten Bangkalan yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR), PT. Sumber Daya (Persero), Perumda Sumber Sejahtera. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bangkalan adalah :

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c. Mendorong pembiayaan usaha mikro dan kecil dan efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
e. Memperoleh laba/keuntungan.

Berikut merupakan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018-2022.

Tabel 2.93 Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangkalan 2018-2022

TAHUN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	CAPAIAN KINERJA
BUMD PT.SUMBER DAYA (PERSERO) KAB. BANGKALAN			
2018	Rp 1.426.700.000	Rp 1.586.283.669	100%
2019	Rp 3.665.700.000	Rp 3.226.593.914	88,02%
2020	Rp 4.774.000.000	Rp 2.388.071.234	50,02%
2021	Rp 1.261.184.928	Rp 1.510.017.096	100%
2022	Rp 6.352.578.064	Rp 2.306.844.934	36%
BUMD BANK PERKREDITAN RAKYAT KAB. BANGKALAN			
2018	Rp -	Rp -	-
2019	Rp -	Rp -	-
2020	Rp 878.660.532	Rp 1.196.959.105	136,23%
2021	Rp 379.709.771	Rp 379.709.771	100%
2022	Rp 379.709.771	Rp 360.327.255	94,90%
BUMD PERUMDA SUMBER SEJAHTERA KAB. BANGKALAN			
2018	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	100%
2019	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	100%
2020	Rp 200.000.000	Rp 250.000.000	125%
2021	Rp 450.000.000	Rp 450.000.000	100%
2022	Rp 545.000.000	Rp 545.000.000	100%

Sumber: Laporan Evaluasi BUMD Kab. Bangkalan Tahun 2023

2.5.1 BUMD PT Sumber Daya (Persero)

Pendirian PT. SUMBER DAYA (PERSERO) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi PAD guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pendirian PT. SUMBER

DAYA (PERSERO) meliputi : (a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perseroan yang baik; dan (c) memperoleh laba dan/ atau keuntungan. BUMD PT. SUMBER DAYA (PERSERO) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2020. Bidang usaha perseroan terdiri dari usaha skala besar dan usaha skala kecil. Usaha skala besar yang dimaksud antara lain: (1) pertanian dan perikanan; (2) Pengelolaan minyak dan gas bumi; (3) Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas; (4) Properti dan perhotelan; (5) Jual beli tanah dan Bangunan; (6) distributor hasil tambang, pertanian dan perikanan; (7) transportasi pariwisata; (8) pengelolaan limbah; (9) usaha besar lainnya di bidang pelayanan umum dan jasa terhadap masyarakat. Sedangkan usaha kecil yang dimaksud meliputi: (1) persewaan alat berat, gedung dan tanah, (2) usaha alat tulis kantor dan percetakan; (3) penjualan sembako; (4) penjualan tiket; (5) kafe; (6) usaha kecil lainnya dibidang pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.

2.5.2 BUMD Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan

BUMD BPR Bangkalan didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. Seperti halnya BUMD tujuan BUMD BPR Bangkalan adalah memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Namun, selain itu tujuan yang lebih khusus dari BUMD BPR Bangkalan adalah untuk memperluas akses keuangan kepada masyarakat serta mendorong pembiayaan usaha mikro dan kecil dan efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMD Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2020. Kegiatan usaha BUMD BPR Bangkalan meliputi:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. memberikan kredit dan sekaligus pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil;
3. melakukan kerjasama dengan bank umum, BPR lainnya, dan/atau lembaga keuangan/lembaga lainnya;
4. menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, giro di bank lain, deposito berjangka, dan/atau tabungan di bank lainnya;
5. membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

2.5.3 BUMD Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera

BUMD Perumda Sumber Sejahtera didirikan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan Air Minum kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumda Sumber Sejahtera untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan Tata Kelola perusahaan yang baik. diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2020. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) SUMBER SEJAHTERA diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2020. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) SUMBER SEJAHTERA memiliki kegiatan utama yaitu penyediaan air minum. Penyediaan air minum tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan SPAM. SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
2. terwujudnya pengeloaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Perumda Sumber Sejahtera dan pemangku kepentingan;
4. tercapainya air minum yang efektif.

BAB III
GAMBARAN
KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran keuangan daerah Kabupaten Bangkalan dengan melalukan analisis terhadao pengelolaan keuangan daerah di masa lalu dan akan menjadi basis data dalam proyeksi pengelolaan keuangan daerah ke depan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya dan menandingkan antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah

membandingkan dan menandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 3 tahun ke depan (dari tahun 2024 s.d tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada dasarnya pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan semakin meningkat setiap tahunnya, namun secara umum jumlahnya belum terlalu besar. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih bergantung pada Dana Perimbangan, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal inilah yang menjadi persoalan yang penting dan perlu dijadikan perhatian oleh daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan melalui upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi di daerah tetap kondusif terutama pada saat perekonomian sedang lesu.

Berdasarkan data selama tahun 2018-2022 perkembangan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bangkalan cukup baik dan terus meningkat. Pada tahun 2018, total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 2.034.156.539.451,02, Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp.2.331.628.800.501,49. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 ke Rp. 2.140.808.956.309,69 dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi Rp.2.275.095.391.762,23. Sedangkan untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.220.215.269.051,80 Penurunan kinerja pendapatan ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	+/(-)
1	2	3	4	5	6
1	2018	2.071.928.257.959,40	2.034.156.539.451,02	98,18%	-37.771.718.508,38
2	2019	2.382.973.830.019,56	2.331.628.800.501,49	97,85%	-51.345.029.518,07
3	2020	2.114.788.485.851,24	2.140.808.956.309,69	101,23%	26.020.470.458,45
4	2021	2.177.909.188.855,00	2.275.095.391.762,23	104,46%	97.186.202.907,23
5	2022	2.277.199.322.134,00	2.220.215.269.051,80	97,50%	-56.984.053.082,20

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD Unaudited 2022 Kabupaten Bangkalan

Kinerja pendapatan Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif stabil, walaupun realisasi pendapatan daerah tidak selalu meningkat. Bahkan ditengah pandemic Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 mampu melampaui target yang ditetapkan yaitu 101,23% pada tahun 2020 dan 104,46% pada tahun 2021 serta 97,50% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian target pendapatan masih berada dalam kondisi yang baik sekalipun dalam situasi Pandemi Covid-19.

Secara terperinci, capaian kinerja pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2018-2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Uraian	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a. PAD	225.239.028.383	199.258.427.616	88,47%	244.180.072.575	262.258.214.631	107,40%	211.620.744.167	233.177.792.497	110,19%	202.795.570.271	271.656.434.588	133,96%	275.105.625.212	281.897.411.488	102,47%
b. Pendapatan Transfer	1.730.778.303.076	1.720.504.486.699	99,41%	2.019.415.157.445	1.959.949.569.070	97,06%	1.794.231.454.684	1.799.215.689.527	100,28%	1.812.086.047.808	1.859.860.667.819	102,64%	2.002.093.696.922	1.937.435.857.564	96,77%
c. Lain-lain Pendapatan yg sah	115.910.926.500	114.393.625.136	98,69%	119.378.600.000	109.421.016.800	91,66%	108.936.287.000	108.415.474.285	99,52%	163.027.570.776	143.578.081.352	88,07%	0	882.000.000	0,00%
Jumlah	**2.071.928.257.959**	**2.034.156.539.451**	**98,18%**	**2.382.973.830.020**	**2.331.628.800.501**	**97,85%**	**2.114.788.485.851**	**2.140.808.956.310**	**101,23%**	**2.177.909.188.855**	**2.275.095.183.759**	**104,46%**	**2.277.199.322.134**	**2.220.215.269.052**	97,50%

Sumber: LKPD 2018-2021 Audited dan LKPD Unaudited 2022 Kabupaten Bangkalan

Proporsi komponen pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh pendapatan transfer yang memiliki kontribusi lebih dari 50% terhadap total pendapatan pada setiap tahun anggaran (tabel 3.3). Tentunya ke depan peningkatan PAD ini menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan. Mengingat dengan terbitnya Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penggunaan dana transfer sudah ditentukan peruntukannya, sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki keleluasaan seperti sebelumnya dalam melakukan optimalisasi pembangunan prioritas daerah melalui dana transfer. Selain itu kemandirian daerah akan sangat bergantung pada kinerja PAD-nya.

Tabel 3.3 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
a. PAD	199.258.427.616	9,80%	262.258.214.631	11,25%	233.177.792.497	10,89%	271.656.434.588	11,94%	281.897.411.488	12,70%
b. Pendapatan Transfer	1.720.504.486.699	84,58%	1.959.949.569.070	84,06%	1.799.215.689.527	84,04%	1.859.860.667.819	81,75%	1.937.435.857.564	87,26%
c. Lain-lain Pendapatan yg sah	114.393.625.136	5,62%	109.421.016.800	4,69%	108.415.474.285	5,06%	143.578.081.352	6,31%	882.000.000	0,04%
Total Pendapatan Daerah	**2.034.156.539.451**	**100,00%**	**2.331.628.800.501**	**100,00%**	**2.140.808.956.310**	**100%**	**2.275.095.183.759**	**100%**	**2.220.215.269.052**	**100%**

Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan 2018-2021 Audited, LKPD Kabupaten Bangkalan 2022 Unaudited

B. Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Tabel 3.4. Proporsi Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 s.d Tahun 2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	BELANJA DAERAH										
1	**Belanja Operasi**	**1.377.245.385.467,39**	**65,99%**	**1.458.689.965.141,27**	**62,42%**	**1.451.137.046.183,98**	**68,57%**	**1.525.963.686.343,32**	**69,01%**	**1.606.107.920.276,00**	**70,92%**
	Belanja Pegawai	1.011.711.484.289,13	73,46%	1.106.034.350.942,43	75,82%	1.061.630.419.881,41	73,16%	899.180.424.174,75	58,93%	903.828.576.072,51	56,27%
	Belanja Barang dan Jasa	307.075.179.067,22	22,30%	309.015.335.344,23	21,18%	278.070.922.310,29	19,16%	473.613.116.938,57	31,04%	511.083.571.909,49	31,82%
	Belanja Bunga	3.383.431.681,00	0,25%	743.860.437,00	0,05%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Belanja Subsidi	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Belanja Hibah	54.940.290.430,04	3,99%	42.528.760.217,61	2,92%	106.961.621.692,28	7,37%	147.337.207.653,00	9,66%	160.676.652.007,00	10,00%
	Belanja Bantuan Sosial	135.000.000,00	0,01%	367.658.200,00	0,03%	4.474.082.300,00	0,31%	5.832.937.577,00	0,38%	30.519.120.287,00	1,90%
2	**Belanja Modal**	**324.705.615.061,02**	**15,56%**	**420.929.339.410,27**	**18,01%**	**177.101.047.200,71**	**8,37%**	**226.715.282.463,00**	**10,25%**	**220.718.172.066,33**	**9,75%**
	Belanja Tanah	1.916.723.560,00	0,59%	1.249.724.000,00	0,30%	3.947.876.100,00	2,23%	3.054.830.160,00	1,35%	2.438.655.307,00	1,10%
	Belanja Peralatan dan Mesin	66.780.744.280,67	20,57%	92.032.325.604,49	21,86%	67.892.106.419,71	38,34%	45.309.137.270,00	19,99%	68.782.503.011,33	31,16%
	Belanja Gedung dan Bangunan	30.681.564.445,00	9,45%	125.734.380.924,45	29,87%	53.022.859.890,90	29,94%	84.496.417.275,00	37,27%	53.570.960.809,00	24,27%

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	223.917.024.225,35	68,96%	195.102.875.028,33	46,35%	51.778.978.170,10	29,24%	90.816.357.475,00	40,06%	94.870.522.162,00	42,98%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.458.000,00	0,00%	5.780.632.571,00	1,37%	20.000.000,00	0,01%	2.726.816.283,00	1,20%	504.085.137,00	0,23%
	Belanja Aset Lainnya	1.401.100.550,00	0,43%	1.029.401.282,00	0,24%	439.226.620,00	0,25%	311.724.000,00	0,14%	551.445.640,00	0,25%
3	**Belanja Tidak Terduga**	**-**	**0,00%**	**711.435.025,00**	**0,03%**	**51.566.660.834,87**	**2,44%**	**1.106.958.000,00**	**0,05%**	2.139.767.191,00	0,09%
	Belanja Tidak Terduga	-	0,00%	711.435.025,00	100,00%	51.566.660.834,87	100,00%	1.106.958.000,00	100,00%	2.139.767.191,00	100,00%
4	**Belanja Transfer**	**385.120.412.850,83**	**18,45%**	**456.451.883.758,96**	**19,53%**	**436.419.429.300,00**	**20,62%**	**457.435.844.497,00**	**20,69%**	**435.623.479.100,00**	**19,24%**
	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	4.788.289.756,00	1,24%	6.374.399.000,00	1,40%	6.816.362.200,00	1,56%	6.309.063.000,00	1,38%	6.723.398.000,00	1,54%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Bantuan Keuangan ke Desa	378.952.772.049,10	98,40%	448.682.222.000,00	98,30%	429.603.067.100,00	98,44%	451.126.781.497,00	98,62%	428.900.081.100,00	98,46%
	Bantuan Keuangan Lainnya	1.379.351.045,73	0,36%	1.395.262.758,96	0,31%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL BELANJA DAERAH		**2.087.071.413.379,24**	**100,00%**	**2.336.782.623.335,50**	**100,00%**	**2.116.224.183.519,56**	**100,00%**	**2.211.221.771.303,32**	**100,00%**	**2.264.589.338.633,33**	**100,00%**

Sumber: LKPD 2018-2021 Audited dan LKPD Unaudited 2022 Kabupaten Bangkalan

Tabel 3.4 di atas menyatakan proporsi belanja daerah tertinggi Kabupaten Bangkalan adalah belanja operasi disusul kemudian oleh belanja transfer, belanja modal, dan proporsi terkecil adalah belanja tak terduga. Belanja operasi dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di kisaran 65-70 persen dengan belanja pegawai menempati proporsi tertinggi, yaitu di kisaran 58-75 persen dari total belanja operasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan total belanja daerah, proporsi belanja pegawai berada di kisaran 35-39 persen. Tentunya ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan, mengingat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dalam beberapa tahun ke depan proporsi belanja pegawai harus disesuaikan hingga maksimal 30 persen dari total belanja.

Sementara itu, Belanja modal selama tahun 2018-2022 proporsinya terhadap total belanja berada di kisaran 8-18 persen. Penurunan belanja modal pada tahun 2022 disebabkan karena penurunan transfer DAU. Belanja Modal tertinggi adalah belanja Peralatan dan Mesin, belanja Gedung dan bangunan serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki komitmen yang kuat terhadap optimalisasi pelayanan publik.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

Berikut ini merupakan perkembangan realisasi pembiayaan daerah APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2022:

Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2022

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)	APBD 2023 (Rp)
Total Realisasi Pembiayaan	**189.600.320.290**	**113.904.656.342**	**104.587.170.830**	**129.171.943.620**	**171.795.564.079,00**	**73,29%**	**92.180.000.000,00**
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	**220.833.999.518**	**136.674.495.953**	**108.730.185.508**	**129.171.943.620**	**193.045.564.079,00**	**41,24%**	**132.180.000.000,00**
Penggunaan SiLPA	220.816.801.318	136.665.676.003	108.722.833.508	129.171.943.620	193.045.564.079,00	56,20%	81.775.000.000,00
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	-	-20,00%	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	-	0,00%	0
Pinjaman Dalam Negeri	17.198.200	0	7.352.000	0	-	-18,72%	50.405.000.000
Penerimaan Kembali Pinjaman	0	0	0	0	-	0,00%	0
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0	8.819.950	0	0	-	-20,00%	0
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	**31.233.679.228,00**	**22.769.839.611,00**	**4.143.014.678,00**	**0,00**	**21.250.000.000,00**	**-42,90%**	**40.000.000.000,00**

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)	APBD 2023 (Rp)
- Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	20.000.000.000,00	-20,00%	40.000.000.000
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	7.153.000.000,00	4.143.014.678,00	0,00	1.250.000.000,00	-28,42%	0
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	31.233.679.228,00	15.616.839.611,00	0	0	-	-30,00%	0
- Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	-	0,00%	0
- Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0	-	0,00%	0
PEMBIAYAAN NETTO	**189.600.320.290,00**	**113.904.656.342,00**	**104.587.170.830,00**	**129.171.943.620,09**	**171.795.564.079,00**	**73,29%**	**92.180.000.000,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**136.685.446.361,89**	**108.750.833.507,96**	**129.171.943.620,09**	**193.045.564.079,00**	**127.421.494.497,47**	**-4,86%**	0

Sumber : LKPD Kabupaten Bangkalan 2018-2021 Audited, LKPD Kabupaten Bangkalan 2022 Unaudited, dan Perda APBD Kabupaten Bangkalan 2023

Sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan yang konsisten selama kurun waktu 2018-2022 ada pada pos Penggunaan SiLPA dan Penerimaan Kembali Pinjaman. Sementara itu pengeluaran pembiayaan terdiri atas pos pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, serta pembayaran ganti rugi. Penyertaan modal daerah terutama diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda), Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera (PDAM), dan Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bangkalan (tabel 3.6). Penanaman modal daerah telah dilakukan sejak awal berdiri, namun tidak dilakukan pada setiap tahun. Selama kurun waktu 2018 hingga 2022, penambahan penyertaan modal daerah dilakukan pada tahu 2019, 2020 dan 2022 seperti yang terlihat pada tabel 3.6. PD. Sumberdaya hanya memperoleh tambahan modal pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.3.143.014.678. Adapun untuk Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera (PDAM) menerima tambahan modal pada tahun 2019, 2020, dan 2022 sebagai modal peningkatan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat dengan menemukan sumber-sumber air baru serta pemutakhiran peralatan. Kemudian penyertaan modal Pemda untuk Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bangkalan dilakukan pada tahun 2019, 2020, dan 2022 yaitu masing-masing sebesar 2,5 Milyar, 500 juta, dan 250 Juta Rupiah diantaranya untuk pemenuhan modal sesuai dengan regulasi OJK dan Bank Indonesia serta untuk memperluas layanan bagi masyarakat Bangkalan. Sedangkan untuk kebijakan tahun 2023 hingga 2026 tidak ada penyertaan modal daerah pada masing-masing BUMD tersebut.

Tabel 3.6 Perkembangan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018-2022

BUMD	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan				
	2018	2019	2020	2021	2022
PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda)	-	-	3.143.014.678	-	-
Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera (PDAM)	-	4.653.000.000	500.000.000	-	1.000.000.000
Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bangkalan	-	2.500.000.000	500.000.000	-	250.000.000
Penyertaan Modal pada Tahun Berjalan	**-**	**7.153.000.000**	**4.143.014.678**	**-**	**1.250.000.000**

Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan Unaudited 2022, APBD Kabupaten Bangkalan 2023

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi masing-masing selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Bangkalan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7. Rata-Rata Pertumbuhan Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)	APBD 2023 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH							
Pendapatan Asli Daerah	**199.258.427.616,41**	**262.258.214.631,49**	**233.177.792.497,49**	**271.656.642.591,09**	**281.897.411.487,80**	**0,40%**	**297.184.953.930,00**
Pajak Daerah	49.473.211.878,38	50.833.629.203,50	46.623.597.590,16	48.377.072.078,00	56.255.130.523,53	7,11%	64.050.912.728,00
Retribusi Daerah	14.682.564.847,41	14.326.974.115,29	10.226.164.999,85	13.359.256.495,70	12.077.921.348,50	-3,25%	14.222.869.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.067.212.391,25	2.309.660.420,34	13.621.358.514,80	2.763.879.429,15	2.878.946.403,49	87,50%	2.405.502.609,00
Lain - Lain PAD yang Sah	133.035.438.499,37	194.787.950.892,36	162.706.671.392,68	207.156.434.588,24	210.685.413.212,28	1,75%	301.670.722.832,00
Pendapatan Transfer	**1.720.504.486.699,00**	**1.959.949.569.070,00**	**1.799.215.689.527,00**	**1.859.860.667.819,14**	1.937.435.857.564,00	**1,41%**	**1.938.270.848.324,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.615.468.979.010,00**	**1.803.528.099.412,00**	**1.679.238.305.014,00**	**1.707.399.447.633,00**	1.788.051.067.687,00	**0,98%**	**1.783.149.960.611,00**
Dana Perimbangan	**1.344.825.042.010,00**	**1.463.559.120.412,00**	**1.314.106.777.014,00**	**1.360.545.328.033,00**	1.471.347.071.287,00	**0,58%**	1.478.572.384.611
Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	115.358.054.088,00	106.518.658.305,00	111.248.228.108,00	121.607.412.662,00	132.265.482.193,00	12,88%	112.609.352.611
Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	968.770.449.680,00	1.024.441.794.080,00	933.519.578.000,00	933.349.617.000,00	929.878.834.850,00	-1,22%	966.016.856.000
Dana Transfer Khusus DAK Fisik	65.996.679.829,00	145.449.324.465,00	71.332.881.649,00	121.128.384.219,00	130.765.518.882,00	16,02%	51.374.485.000

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)	APBD 2023 (Rp)
Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik	194.699.858.413,00	187.149.343.562,00	198.006.089.257,00	184.459.914.152,00	278.437.235.362,00	10,81%	348.571.691.000
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**270.643.937.000,00**	**339.968.979.000,00**	**365.131.528.000,00**	**346.854.119.600,00**	**316.703.996.400,00**	**3,85%**	**304.577.576.000,00**
Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0,00	0,00%	0
Dana Penyesuaian	0,00	9.078.913.000,00	37.191.773.000,00	0,00	0,00	21,93%	0
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	18.986.222.000,00	0,00	-20,00%	0
Dana Desa	270.643.937.000,00	330.890.066.000,00	327.939.755.000,00	327.867.897.600,00	316.703.996.400,00	3,59%	304.577.576.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**105.035.507.689,00**	**156.421.469.658,00**	**119.977.384.517,00**	**152.461.220.186,14**	149.384.789.877,00	**9,10%**	**155.120.887.713,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	105.035.507.689,00	124.346.684.158,00	108.135.059.217,00	140.648.642.329,00	137.801.860.877,00	5,64%	144.497.033.713
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	32.074.785.500,00	11.842.325.300,00	0,00	0,00	-0,326158	10.623.854.000
Bantuan Keuangan Provinsi Lainnya	-	-	-	11.812.577.857,14	11.582.929.000,00	-0,0038882	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**114.393.625.135,61**	**109.421.016.800,00**	**108.415.474.285,20**	**143.578.081.352,00**	882.000.000,00	**46,03%**	**0,00**
Pendapatan Hibah	98.700.090.933,61	109.401.696.000,00	108.370.156.972,00	0,00	882.000.000,00	71,24%	0
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	0	0,00	0,00%	0

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)	APBD 2023 (Rp)
Pendapatan Lainnya	15.693.534.202,00	19.320.800,00	45.317.313,20	143.578.081.352,00	0,00	63342,89%	0
Total Pendapatan Daerah	**2.034.156.539.451,02**	**2.331.628.800.501,49**	**2.140.808.956.309,69**	**2.275.095.391.762,23**	2.220.215.269.051,80	**0,65%**	**2.235.455.802.254,00**
BELANJA DAERAH						0	
Belanja Operasi	**1.377.245.385.467,39**	**1.458.689.965.141,27**	**1.451.137.046.183,98**	**1.525.963.686.343,32**	**1.606.107.920.276,00**	**3,87%**	**1.634.885.071.538,00**
Belanja Pegawai	1.011.711.484.289,13	1.106.034.350.942,43	1.061.630.419.881,41	899.180.424.174,75	903.828.576.072,51	-1,42%	938.397.145.045,00
Belanja Barang dan Jasa	307.075.179.067,22	309.015.335.344,23	278.070.922.310,29	473.613.116.938,57	511.083.571.909,49	16,80%	538.078.908.942,00
Belanja Bunga	3.383.431.681,00	743.860.437,00	0	0,00	0,00	-45,02%	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Hibah	54.940.290.430,04	42.528.760.217,61	106.961.621.692,28	147.337.207.653,00	160.676.652.007,00	31,36%	153.897.224.751,00
Belanja Bantuan Sosial	135.000.000,00	367.658.200,00	4.474.082.300,00	5.832.937.577,00	30.519.120.287,00	333,35%	4.511.792.800,00
Belanja Modal	**324.705.615.061,02**	**420.929.339.410,27**	**177.101.047.200,71**	**226.715.282.463,00**	**220.718.172.066,33**	**1,35%**	**230.954.640.896,00**
Belanja Tanah	1.916.723.560,00	1.249.724.000,00	3.947.876.100,00	3.054.830.160,00	2.438.655.307,00	23,55%	3.596.120.194,00
Belanja Peralatan dan Mesin	66.780.744.280,67	92.032.325.604,49	67.892.106.419,71	45.309.137.270,00	68.782.503.011,33	11,56%	51.640.484.987,00
Belanja Gedung dan Bangunan	30.681.564.445,00	125.734.380.924,45	53.022.859.890,90	84.496.417.275,00	53.570.960.809,00	48,83%	51.409.892.855,00

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)	APBD 2023 (Rp)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	223.917.024.225,35	195.102.875.028,33	51.778.978.170,10	90.816.357.475,00	94.870.522.162,00	1,53%	122.802.585.360,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.458.000,00	5.780.632.571,00	20.000.000,00	2.726.816.283,00	504.085.137,00	16300,57%	1.455.557.500,00
Belanja Aset Lainnya	1.401.100.550,00	1.029.401.282,00	439.226.620,00	311.724.000,00	551.445.640,00	7,75%	50.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	**0**	**711.435.025,00**	**51.566.660.834,87**	**1.106.958.000,00**	2.139.767.191,00	**14,287417**	**6.000.000.000,00**
Belanja Tidak Terduga	0	711.435.025,00	51.566.660.834,87	1.106.958.000,00	2.139.767.191,00	14,287417	6.000.000.000,00
Transfer	**385.120.412.850,83**	**456.451.883.758,96**	**436.419.429.300,00**	**457.435.861.497,00**	435.623.479.100,00	**2,93%**	**455.796.089.820,00**
Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	4.788.289.756,00	6.374.399.000,00	6.816.362.200,00	6.309.080.000,00	6.723.398.000,00	9,51%	7.675.629.120,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Bantuan Keuangan ke Desa	378.952.772.049,10	448.682.222.000,00	429.603.067.100,00	451.126.781.497,00	428.900.081.100,00	2,85%	448.120.460.700,00
Bantuan Keuangan Lainnya	1.379.351.045,73	1.395.262.758,96	0	0	0,00	-0,1976929	0,00
Total Belanja Daerah	**2.087.071.413.379,24**	**2.336.782.623.335,50**	**2.116.224.183.519,56**	**2.211.221.788.303,32**	**2.264.589.338.633,33**	**2,66%**	**2.327.635.802.254,00**
Surplus (Defisit)	**-52.914.873.928,22**	**-5.153.822.834,01**	**24.584.772.790,13**	**63.873.603.458,91**	**-44.374.069.581,53**	**-169,47%**	**-92.180.000.000,00**
Total Realisasi Pembiayaan	**189.600.320.290**	**113.904.656.342**	**104.587.170.830**	**129.171.943.620**	**171.795.564.079**	**73,29%**	**92.180.000.000**

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)	APBD 2023 (Rp)
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	**220.833.999.518**	**136.674.495.953**	**108.730.185.508**	**129.171.943.620**	**193.045.564.079**	**41,24%**	**132.180.000.000**
Penggunaan SiLPA	220.816.801.318	136.665.676.003	108.722.833.508	129.171.943.620	193.045.564.079	56,20%	81.775.000.000
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	-20,00%	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0,00%	0
Pinjaman Dalam Negeri	17.198.200	0	7.352.000	0	0	-18,72%	50.405.000.000
Penerimaan Kembali Pinjaman	0	0	0	0	0	0,00%	0
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0	8.819.950	0	0	0	-20,00%	0
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	**31.233.679.228,00**	**22.769.839.611,00**	**4.143.014.678,00**	**0,00**	**21.250.000.000,00**	**-42,90%**	**40.000.000.000,00**
- Pembentukan Dana Cadangan	0	0	-	0	20.000.000.000,00	-20,00%	40.000.000.000
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	7.153.000.000,00	4.143.014.678,00	0,00	1.250.000.000,00	-28,42%	0
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	31.233.679.228,00	15.616.839.611,00	0	0	0	-30,00%	0
- Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0,00%	0

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)	APBD 2023 (Rp)
- Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0,00%	0
PEMBIAYAAN NETTO	**189.600.320.290,00**	**113.904.656.342,00**	**104.587.170.830,00**	**129.171.943.620,09**	**171.795.564.079,00**	**73,29%**	**92.180.000.000,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**136.685.446.361,78**	**108.750.833.507,99**	**129.171.943.620,13**	**193.045.547.079,00**	**127.421.494.497,47**	**-4,86%**	**-**

Sumber: LKPD 2018-2021 Audited, LKPD 2022 Unaudited dan Perda APBD 2023 Kabupaten Bangkalan

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah. Berikut ini tabel 3.8 perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Tabel 3.8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bangkalan

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	**136.867.501.746,49**	**108.880.253.305,67**	**129.218.674.034,69**	**193.069.898.262,00**	**127.507.040.622,47**	**-4,87%**
Kas di Kasda	130.527.442.488,35	100.187.260.338,70	120.690.995.399,83	112.016.128.257,87	58.383.303.746,29	-19,03%
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.413.573,00	4.910.650,00	99,00	58.611.047,58	-	11840563,68%
Kas di Bendahara Penerimaan	166.120.933,00	113.445.431,00	46.730.414,00	24.334.183,00	18.000,00	-47,67%
Kas di BLUD	4.976.897.619,26	8.558.662.519,26	8.480.948.121,26	76.040.384.885,26	68.872.732.394,02	185,49%
Kas JKN Kapitasi	0	0	0	4.911.881.159,13	-	-40,00%
Kas Dana BOS	1.181.627.132,88	0	0	18.558.729,16	165.440.357,16	145,89%
Kas TPG	0	0	0	-	-	0,00%

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)
Kas Lainnya	0	15.974.366,71	0,6	-	85.546.125,00	-40,00%
Investasi Jangka Pendek	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0,00%**
Piutang	**59.134.956.374,43**	**79.812.271.660,96**	**69.093.921.402,03**	**50.903.235.711,36**	**52.383.625.535,56**	**35,56%**
Piutang Pendapatan	**5.879.082.061,73**	**4.641.923.566,03**	**3.325.746.771,43**	**50.903.235.711,36**	**52.383.625.535,56**	**279,39%**
Piutang Pajak	13.936.903.681,00	14.249.347.447,00	15.580.853.972,00	16.766.447.285,00	17.737.906.316,00	7,52%
Piutang Retribusi	824.119.178,00	552.328.026,00	296.213.051,00	76.557.551,00	76.557.551,00	-19,16%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.340.072.450,00	10.340.072.450,00	10.340.072.450,00	0,00	0,00	1860,28%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	38.449.687.362,86	38.529.465.007,86	0,04%
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	9.338.195.859,00	10.837.671.700,00	3,21%
Penyisihan Piutang Pendapatan	-19.222.013.247,27	-20.499.824.356,97	-22.891.392.701,57	-13.727.652.346,50	-14.797.975.039,30	26,52%
Piutang Lain-Lain	**53.255.874.312,70**	**75.170.348.094,93**	**65.768.174.630,60**	**0,00**	**0,00**	**32,57%**

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.708.078.766,70	1.285.001.719,93	1.677.293.263,93	0,00	0,00	4674,05%
Piutang Lainnya	48.547.795.546,00	73.885.346.375,00	64.090.881.366,67	0,00	0,00	28,80%
Penyisihan Piutang Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban dibayar Dimuka	**174.007.000,00**	**398.477.800,00**	**285.212.983,33**	**120.138.066,67**	**76.923.166,67**	**22,50%**
Persediaan	**43.915.931.136,00**	**46.444.734.500,00**	**26.083.640.687,00**	**21.796.591.875,00**	**22.048.322.035,00**	**-12,20%**
Jumlah Aset Lancar	**240.092.396.256,92**	**235.535.737.266,63**	**224.681.449.107,05**	**265.889.863.915,03**	**202.015.911.359,70**	**-5,86%**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Dana Bergulir	2.492.986.361,00	2.484.166.411,00	2.476.814.411,00	2.476.814.411,00	0,00	-20,27%
Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-2.480.486.361,00	-2.484.166.411,00	-2.476.814.411,00	-2.476.814.411,00	0,00	-20,18%
Jumlah Investasi Non Permanen	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,2**
Investasi Permanen						

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	126.356.064.660,65	139.455.353.425,10	154.302.811.900,75	142.449.073.861,00	134.249.131.655,30	-1,37%
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	0,00%
Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
Jumlah Investasi Permanen	**126.356.064.660,65**	**139.455.353.425,10**	**154.302.811.900,75**	**142.449.073.861,00**	**134.249.131.655,30**	**-1,37%**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**126.368.564.660,65**	**139.455.353.425,10**	**154.302.811.900,75**	**142.449.073.861,00**	**134.249.131.655,30**	**-1,37%**
ASET TETAP						
Tanah	750.259.010.976,00	758.219.810.199,00	791.868.421.299,00	795.961.007.509,00	1.052.141.543.693,00	7,69%
Peralatan dan Mesin	592.596.319.413,45	687.204.263.244,45	778.385.083.222,92	821.815.761.946,92	890.091.399.707,25	11,13%
Gedung dan Bangunan	1.140.768.531.842,89	1.219.721.826.517,00	1.264.517.989.445,97	1.408.040.742.706,97	1.444.768.577.685,78	5,61%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.154.692.611.903,20	2.304.999.832.528,99	2.366.709.238.614,63	2.505.841.325.143,82	2.617.705.097.796,82	4,68%
Aset Tetap Lainnya	6.427.997.276,00	5.614.881.110,00	5.653.199.010,00	5.653.199.010,00	5.966.939.147,00	-0,71%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	399.344.662,00	46.626.997.545,00	52.613.702.400,00	2.186.029.989,00	2.980.093.422,00	2288,52%
Akumulasi Penyusutan	-1.973.908.089.057,02	-2.369.847.420.325,97	-2.627.702.230.021,90	-2.877.405.678.325,36	-3.161.831.221.452,76	12,85%

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)
Jumlah Aset Tetap	**2.671.235.727.016,52**	**2.652.540.190.818,47**	**2.632.045.403.970,62**	**2.662.092.387.980,35**	**2.851.822.429.999,09**	**0,88%**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0	0	0	0	20.000.000.000	-0,2
Jumlah Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000.000,00**	**-0,2**
ASET LAINNYA						
Tuntutan Ganti Rugi	5.518.438.032,00	5.518.438.032,00	5.502.438.032,00	5.457.763.032,00	5.457.763.032,00	-1,21%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	46.608.461.406,00	40.932.741.534,00	90.314.741.933,00	90.314.741.933,00	90.314.741.933,00	19,52%
Aset Tak Berwujud	5.268.373.500,00	6.730.551.268,00	7.509.934.577,00	8.014.741.577,00	8.954.589.892,00	19,08%
Aset Lain - Lain	151.408.377.465,86	143.845.813.508,86	140.513.960.386,86	120.566.631.489,86	110.836.065.729,86	1261,77%
Amortisasi	-2.466.502.835,00	-5.175.810.555,00	-6.122.071.478,00	-7.429.395.794,00	-8.139.392.001,00	0,381697016
Jumlah Aset Lainnya	**206.337.147.568,86**	**191.851.733.787,86**	**237.719.003.450,86**	**216.924.482.237,86**	**207.423.768.585,86**	0,46886832
JUMLAH ASET	**3.244.033.835.502,95**	**3.219.383.015.298,06**	**3.248.748.668.429,28**	**3.287.355.807.994,24**	**3.415.511.241.599,95**	**1,09%**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	881.573,00	0	0	11.655.626.644,00	7.698.215.004,00	-46,56%
Utang Bunga	276.114.401,00	0	0	-	-	-33,33%
Utang Pajak	0	0	0	-	-	0,00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	15.616.839.610,81	0	0	-	-	-30,00%
Pendapatan diterima dimuka	666.944.666,67	943.184.175,75	943.736.099,50	1.236.211.615,68	959.974.726,50	26,36%
Utang Belanja	44.851.589.748,62	46.153.646.525,35	45.444.361.054,69	52.890.876.641,20	17.064.388.847,97	-10,00%
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.061.552.920,00	0	0	-	-	-38,55%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**66.473.922.920,10**	**47.096.830.701,10**	**46.388.097.154,19**	**65.782.714.900,88**	**25.722.578.578,47**	**-16,96%**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0			-20,00%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20,00%**
JUMLAH KEWAJIBAN	**66.473.922.920,10**	**47.096.830.701,10**	**46.388.097.154,19**	**65.782.714.900,88**	**25.722.578.578,47**	**-18,68%**

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir (%)
EKUITAS						
Ekuitas	3.177.559.912.582,85	3.172.286.184.596,96	3.202.360.571.275,09	3.221.573.093.093,46	3.389.788.663.021,48	1,70%
Jumlah Ekuitas	**3.177.559.912.582,85**	**3.172.286.184.596,96**	**3.202.360.571.275,09**	**3.221.573.093.093,46**	**3.389.788.663.021,48**	**1,70%**
JUMLAH EKUITAS	**3.177.559.912.582,85**	**3.172.286.184.596,96**	**3.202.360.571.275,09**	**3.221.573.093.093,46**	**3.389.788.663.021,48**	**1,70%**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.244.033.835.502,95**	**3.219.383.015.298,06**	**3.248.748.668.429,28**	**3.287.355.807.994,34**	**3.415.511.241.599,95**	**1,09%**

*Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan, * : LKPD Kab Bangkalan 2022 Unaudited*

Data tabel di atas menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah asset Kabupaten Bangkalan selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,09 persen per tahun. Aset terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan berupa asset tetap dengan nilai mencapai sekitar 2,8 trilyun pada tahun 2022, dimana jalan, irigasi, dan jaringan merupakan asset yang terbesar.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 25.722.578.578,47 dimana hal ini jauh lebih kecil daripada kewajiban tahun 2021. Namun jika ditinjau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalami rata-rata penurunan pertumbuhan -18,68 persen selama 5 tahun.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 mencapai Rp. 3.389.788.663.021,48 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,70%.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas,

rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Tabel 3.9 berikut akan menyajikan hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Bangkalan selama 5 tahun terakhir:

Tabel 3.9. Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)
A	**Rasio Likuiditas**					
	Aset Lancar	240.092.396.256,92	235.535.737.266,63	224.681.449.107,05	265.889.863.915,03	202.015.911.359,70
	Persediaan	43.915.931.136,00	46.444.734.500,00	26.083.640.687,00	21.796.591.875,00	22.048.322.035,00
	Kewajiban Jangka Pendek	66.473.922.920,10	47.096.830.701,10	46.388.097.154,19	65.782.714.900,88	25.722.578.578,47
1	Rasio Lancar	3,61	5,00	4,84	4,04	7,85
2	Rasio Quick	2,95	4,01	4,28	3,71	7,00
B	**Rasio Solvabilitas**					
	Total Aset	3.244.033.835.502,95	3.219.383.015.298,06	3.248.748.668.429,28	3.287.355.807.994,24	3.415.511.241.599,95
	Total Hutang	66.473.922.920,10	47.096.830.701,10	46.388.097.154,19	65.782.714.900,88	25.722.578.578,47
	Total Ekuitas	3.177.559.912.582,85	3.172.286.184.596,96	3.202.360.571.275,09	3.221.573.093.093,46	3.389.788.663.021,48
1	DAR (*Debt to Assets Ratio*)	0,0205	0,0146	0,0143	0,0200	0,0075

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)
2	DER (*Debt to Equity Ratio*)	0,0209	0,0148	0,0145	0,0204	0,0076
C	**Rasio Aktivitas**					
	Pendapatan Daerah	2.034.156.539.451,02	2.331.628.800.501,49	2.140.808.956.309,69	2.275.095.391.762,23	2.220.215.269.051,80
	Saldo Awal Piutang	21.229.409.463,07	59.308.963.374,43	80.210.749.460,96	69.379.134.385,36	51.023.373.778,03
	Saldo Akhir Piutang	59.308.963.374,43	80.210.749.460,96	69.379.134.385,36	51.023.373.778,03	51.023.373.778,03
1	**Rata-rata Umur Piutang**	**7,2**	**10,9**	**12,8**	**9,7**	**8,4**
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)	173.578.035.780,12	180.416.035.997,56	205.830.408.920,69	188.493.184.769,14	188.493.184.769,14
	Saldo Awal Persediaan	47.536.905.786,00	43.915.931.136,00	46.444.734.500,00	26.083.640.687,00	21.796.591.875,00
	Saldo Akhir Persediaan	43.915.931.136,00	46.444.734.500,00	26.083.640.687,00	21.796.591.875,00	21.796.591.875,00
2	**Rata-rata Umur Persediaan**	**96,15**	**91,40**	**64,31**	**46,36**	**42,21**

*Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan (diolah), *Unaudited LKPD Kabupaten Bangkalan 2022*

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kabupaten Bangkalan positif dan cenderung membaik. Kedua rasio tersebut jauh masih di atas 1, sehingga bisa dikatakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki posisi keuangan yang sangat kuat. Kinerja kedua rasio tersebut menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress*) yang serius dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, meski cenderung kinerjanya cenderung fluktuatif karena memang jika dilihat dari informasi kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Bangkalan cukup hati-hati dan tetap menjaga kondisi arus kasnya.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

Rata-rata Umur Piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Jika dilihat dari rasio rata-rata umur piutang, adanya kecenderungan penurunan,

hal ini berarti terjadi perbaikan kinerja piutang menjadi kas untuk operasional Pemerintah Daerah (antara 10-37 hari).

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijkaan tersebut akan dijelaskan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bangkalan selama 5 (lima) tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran [Belanja + Pengeluaran Pembiayaan] (Rp)	Persentase (%)
1	2018	1.011.711.484.289,13	2.118.305.092.607,24	47,76%
2	2019	1.106.034.350.942,43	2.359.552.462.946,50	46,87%
3	2020	1.061.630.419.881,41	2.120.367.198.197,56	50,07%
4	2021	899.180.424.174,75	2.211.221.771.303,32	40,66%
5	2022	903.828.576.072,51	2.285.839.338.633,33	39,54%

*Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan (diolah), *: LKPD 2022 Kab. Bangkalan Unaudited*

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan angka yang stabil dan cukup tinggi. Proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran berada di kisaran 35-39 persen. Dengan demikian kondisi ini perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, mengingat mandate Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang mewajibkan adanya efisiensi belanja pegawai maksimal 30 persen. Kebijakan ini tentunya harus didukung secara maksimal demi memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah. Adapun beberapa Langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait Undang-Undang tersebut diantaranya:

a. Menyusun peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan yang diamanatkan uu nomor 1 tahun 2022 (dalam proses);
b. Melakukan evaluasi terhadapa potensi pajak dan retribusi daerah baik yang hilang maupun potensi baru.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; pemberian pinjaman daerah; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam kurun tahun 2018-2022 dapat digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.11 Defisit/Surplus Rill Anggaran Kabupaten Bangkalan

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	**Realisasi Pendapatan Daerah**	**2.034.156.539.451,02**	**2.331.628.800.501,49**	**2.140.808.956.309,69**	**2.275.095.391.762,23**	**2.220.215.269.051,80**
	Dikurangi realisasi:					
2	**Belanja Daerah**	**2.087.071.413.379,24**	**2.336.782.623.335,50**	**2.116.224.183.519,56**	**2.211.221.771.303,32**	**2.264.589.338.633,33**
3	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**31.233.679.228,00**	**22.769.839.611,00**	**4.143.014.678,00**	**-**	**21.250.000.000,00**
A	**Surplus (Defisit) Riil**	**(84.148.553.156,22)**	**(27.923.662.445,01)**	**20.441.758.112,13**	**63.873.620.458,91**	**(65.624.069.581,53)**
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
	- Penggunaan SiLPA	220.816.801.318,11	136.665.676.002,97	108.722.833.507,96	129.171.943.620,09	193.045.564.079,00
	- Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	- Pinjaman Dalam Negeri	17.198.200,00	-	7.352.000,00	-	-
	- Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-	-
	- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	8.819.950,00	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan**	**220.833.999.518,11**	**136.674.495.952,97**	**108.730.185.507,96**	**129.171.943.620,09**	**193.045.564.079,00**
A+B	**SILPA**	**136.685.446.361,89**	**108.750.833.507,96**	**129.171.943.620,09**	**193.045.564.079,00**	**127.421.494.497,47**

*Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan (diolah), *: LKPD 2022 Kab. Bangkalan Unaudited*

Upaya yang dapat dilakukan untuk menutupi defisit anggaran tersebut adalah dengan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Bangkalan

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)
	Surplus (Defisit) Riil	**(84.148.553.156,22)**	**(27.923.662.445,01)**	**20.441.758.112,13**	**63.873.620.458,91**	**(65.624.069.581,53)**
1	- Penggunaan SiLPA	262,41%	489,43%	-531,87%	-202,23%	294,17%
2	- Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
3	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
4	- Pinjaman Dalam Negeri	-0,02%	0,00%	0,04%	0	0
5	- Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00%	-0,03%	0,00%	0	0
6	- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00%	-489,46%	0,00%	0	0
7	**SILPA**	**-162,43%**	**-389,46%**	**631,90%**	**302,23%**	**-194,17%**

*Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan (diolah), *: LKPD 2022 Kab. Bangkalan Unaudited*

Tabel di atas memberi infomasi bahwa dengan surplusnya anggaran pada tahun 2020 menyebabkan kenaikan jumlah SiLPA. Dengan demikian, kebijakan penggunaan anggaran ke depan harus terus dilakukan perbaikan agar penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran bisa diwujudkan sehingga secara langsung juga akan mengurangi jumlah SiLPA di akhir tahun anggaran.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan dalam menentukan kerangka pendanaan adalah dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian sebelumnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024-2026 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

No	Uraian	Tahun Dasar (TA 2023)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
				2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.235.455.802.254,00**	0,55%	**2.283.643.532.219,00**	**2.329.593.088.673,00**	**2.382.130.628.069,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**297.184.953.930**	9,54%	**319.302.927.219**	**347.737.322.598**	**382.350.007.169**
4.1.01	Pajak Daerah	61.334.663.999	3,99%	62.430.746.070,00	62.908.632.243,00	64.050.912.728,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.421.627.200	0,97%	14.192.143.500,00	14.208.493.500,00	14.222.869.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.381.085.148	-8,66%	2.385.502.609,00	2.395.502.609,00	2.405.502.609,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	217.047.577.583	11,65%	240.294.535.040	268.224.694.246,00	301.670.722.832,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.938.270.848.324**	-0,86%	**1.964.340.605.000**	**1.981.855.766.075**	**1.999.780.620.900**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.783.149.960.611**	-1,01%	**1.815.121.791.000**	**1.832.636.952.075**	**1.850.561.806.900**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**1.478.572.384.611**	-0,62%	**1.515.544.215.000**	**1.538.059.376.075**	**1.560.984.230.900**

No	Uraian	Tahun Dasar (TA 2023)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
				2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	112.609.352.611	-9,78%	92.588.000.000,00	93.313.880.000,00	94.047.018.800,00
	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	966.016.856.000	2,94%	978.300.000.000,00	997.866.000.000,00	1.017.823.320.000,00
	Dana Transfer Khusus DAK Fisik	51.374.485.000	-10,88%	98.046.105.000,00	98.536.335.525,00	99.029.016.300,00
	Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik	348.571.691.000	-2,38%	346.610.110.000,00	348.343.160.550,00	350.084.875.800,00
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah**	**0**	0,00%	0	0	0
4.2.01.03	**Dana Desa**	**304.577.576.000**	-3,00%	**299.577.576.000,00**	294.577.576.000,00	289.577.576.000,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**155.120.887.713**	1,15%	**149.218.814.000,00**	**149.218.814.000,00**	**149.218.814.000,00**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	144.497.033.713	1,24%	138.594.960.000,00	138.594.960.000,00	138.594.960.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.623.854.000	0,00%	10.623.854.000,00	10.623.854.000,00	10.623.854.000,00

No	Uraian	Tahun Dasar (TA 2023)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
				2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	-	0,00%	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**BELANJA**	**2.327.635.802.254,00**	0,80%	**2.367.673.286.719,00**	**2.395.593.088.673,00**	**2.452.130.628.069,50**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.634.885.071.538**	1,21%	**1.637.214.015.848**	**1.636.616.142.368**	**1.678.129.125.550**
5.1.01	Belanja Pegawai	938.397.145.045	0,36%	978.603.564.431,00	998.175.635.719,62	998.674.723.537,48
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.078.908.942	-2,26%	403.172.076.167,00	462.978.110.611,16	502.237.382.015,23
5.1.03	Belanja Bunga	0	0,00%	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0,00%	0,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	153.897.224.751	53,24%	253.036.296.550,00	173.036.296.550,00	174.766.659.515,50

No	Uraian	Tahun Dasar (TA 2023)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
				2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.511.792.800	-16,33%	2.402.078.700,00	2.426.099.487,00	2.450.360.481,87
5.2	**BELANJA MODAL**	**230.954.640.896**	15,56%	**313.130.605.914**	**342.569.669.730,22**	**360.409.514.465,92**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.596.120.194	174,26%	3.113.957.000,00	3.736.748.400,00	3.923.585.820,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.640.484.987	33,16%	76.467.185.795,00	77.231.857.652,95	78.004.176.229,48
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.409.892.855	80,51%	98.201.537.187,00	99.183.552.558,87	100.175.388.084,46
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.802.585.360	-14,19%	132.080.352.800,00	158.496.423.360,00	174.346.065.696,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.455.557.500	2,22%	3.267.573.132,00	3.921.087.758,40	3.960.298.635,98
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	0,00%	0	-	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.000.000.000**	-5,56%	**3.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	-5,56%	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

No	Uraian	Tahun Dasar (TA 2023)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
				2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**455.796.089.820**	-4,29%	**414.328.664.957**	**411.407.276.575**	**408.591.988.053,50**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa)	7.675.629.120	3,40%	7.662.288.957,00	7.711.712.575,00	7.827.378.173,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	448.120.460.700	-4,42%	406.666.376.000,00	403.695.564.000,00	400.764.609.880,50
	Total Surplus/(Defisit)	**(92.180.000.000)**	51,05%	**(84.029.754.500)**	**(66.000.000.000)**	**(70.000.000.001)**
6	**PEMBIAYAAN**		0,00%			
	Pembiayaan Netto	**92.180.000.000,00**	-6,34%	**84.029.754.500,00**	**66.000.000.000,00**	**70.000.000.000,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**132.180.000.000,00**	-17,27%	**84.029.754.500,00**	**66.000.000.000,00**	**70.000.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	81.775.000.000	-3,89%	62.029.754.500,00	66.000.000.000,00	70.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0,00%	22.000.000.000,00	-	-

No	Uraian	Tahun Dasar (TA 2023)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
				2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0,00%	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.405.000.000	-33,33%	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0,00%	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	0	0,00%	-	-	-
6.1.08	Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	0	0,00%	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**40.000.000.000**	0,00%	**0**	**-**	**-**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000	0,00%	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0,00%	-	-	-

No	Uraian	Tahun Dasar (TA 2023)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
				2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh tempo Kepada Lembaga Keu. Bukan Bank		0,00%	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan	**-**	0,00%	-	-	-
TOTAL APBD		**2.367.635.802.254**	-0,30%	**2.367.673.286.719**	**2.395.593.088.673**	**2.452.130.628.069**

Sumber: Perda APBD 2023 dan Perbup 1 2023, Bappeda, Bapenda, BPKAD Kabupaten Bangkalan

A. Kebijakan Pendapatan

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara tidak langsung memberikan kewajiban sekaligus legitimasi hukum bagi daerah untuk terus melakukan peningkatan pendapatan dari sector pajak dan retribusi.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah

tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan demikian, Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan diharapkan mampu mengalami peningkatan yang signifikan melalui optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Menyikapi peraturan baru tersebut, pemerintah Kabupaten Bangkalan telah memulainya dengan menyusun naskah akademik dan menindaklanjutinya dengan proses penyusunan Peraturan Daerah yang ditargetkan akan diundangkan pada tahun 2023. Selain itu, analisis tahunan terkait dengan potensi dan capaian target pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai evaluasi rutin dan peningkatan kinerja PAD Kabupaten Bangkalan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Seperti halnya pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah juga harus dilakukan penyesuaian dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintahan Daerah. Beberapa poin penting yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
2. Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
3. Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
4. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
5. Adapun kebijakan belanja untuk mendukung beberapa program prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Belanja Program Prioritas
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN		
		2024	2025	2026
1	Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Rp 325.696.664.402	Rp 327.767.003.452	Rp 331.264.682.602
2	Penanggulangan Kemiskinan	Rp 456.667.109.647	Rp 461.604.926.397	Rp 465.828.643.843

NO	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN		
		2024	2025	2026
3	Konvergensi Penurunan Stunting	Rp 357.628.553.286	Rp 357.409.572.791	Rp 360.909.878.640
4	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rp 322.283.696.700	Rp 323.714.475.150	Rp 327.268.646.000
5	Penurunan Angka Pengangguran	Rp. 985.959.800	Rp. 1.393.957.390	Rp. 1.050.163.600
6	Pertumbuhan Ekonomi	Rp 2.649.749.250	Rp 2.458.548.265	Rp 2.462.366.150

Sumber Data: SIPD Data diolah 2023

6. Pembenahan penganggaran belanja daerah juga harus dilakukan mulai dari sejak perencanaan, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Selain Pendapatan dan Belanja Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengakses Pembiayaan kreatif berupa Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Perluasan akses Pembiayaan bagi Daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan Pembiayaan, antara lain melalui pengintegrasian persetujuan DPRD atas Pembiayaan Utang Daerah dalam proses pembahasan rancangan APBD. Selain itu, Pemerintah mendorong adanya sinergi pendanaan antar-sumber pendapatan dan/atau Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, kerja sama antar-Daerah, dan kerjasama antara

Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam rangka penguatan sumber pendanaan program/kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih signifikan.

Selain itu kebijakan pembiayaan daerah pada aspek penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan Kabupaten Bangkalan juga diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu (1) telaah atas kebutuhan pendanaan pada peristiwa besar yang bersifat tidak teratur misalnya pilkada, pileg, maupun pilpres ataupun acara besar tingkat nasional yang diamanahkan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan (2) telaah atas kebutuhan daerah yang dapat diakomodir oleh pendanaan dari sumber lain sesuai dengan regulasi yang berlaku, misalnya pinjaman daerah kepada lembaga keuangan ataupun lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.10 dijelaskan bahwa pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan

prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal. Tabel di bawah merupakan data perkembangan realisasai pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan selama 5 (lima) tahun terakhir serta pertumbuhan per tahunnya.

Tabel 3.15 Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun Dasar (TA 2018)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Tahun			
			2019	2020	2021	2022*
Total Belanja Wajib dan Mengikat	**1.398.835.977.775,23**	**-4,93%**	**1.561.834.832.379,43**	**1.498.049.849.181,41**	**1.356.616.268.671,75**	**1.339.452.055.172,51**
Belanja Pegawai	1.011.711.484.289,13	-6,27%	1.106.034.350.942,43	1.061.630.419.881,41	899.180.424.174,75	903.828.576.072,51
Belanja Bunga	3.383.431.681,00	0,00%	743.860.437,00	0	0	-
Belanja Subsidi	0	0,00%	0	0	0	-
Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	4.788.289.756,00	2,02%	6.374.399.000,00	6.816.362.200,00	6.309.063.000,00	6.723.398.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0,00%	0	0	0	-
Bantuan Keuangan ke Desa	378.952.772.049,10	-1,39%	448.682.222.000,00	429.603.067.100,00	451.126.781.497,00	428.900.081.100,00
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	**31.233.679.228,00**	**-60,60%**	**22.769.839.611,00**	**4.143.014.678,00**	**0,00**	**21.250.000.000,00**
Pembentukan Dana Cadangan	0	33,33%	0	0	0	20.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	-47,36%	7.153.000.000,00	4.143.014.678,00	0	1.250.000.000,00

Uraian	Tahun Dasar (TA 2018)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Tahun			
			2019	2020	2021	2022*
Pembay aran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	31.233.679.228,00	-33,33%	15.616.839.611,00	0	0	-
Pembay aran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0	0,00%	0	0	0	-
Jumlah	**1.430.069.657.003,23**		**1.584.604.671.990,43**	**1.502.192.863.859,41**	**1.356.616.268.671,75**	**1.360.702.055.172,51**

Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan 2018-2021 *Audited* (diolah) dan LKPD *unaudited* 2022

Tabel 3.16 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

No	Uraian	Perda APBD Tahun 2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 3 Tahun Terakhir (%)
A	**Total Belanja Wajib dan Mengikat**	**1.434.193.234.865,00**	**1.390.932.229.388,00**	**1.388.010.841.006,00**	**1.385.195.552.484,50**	**0,19%**
	Belanja Pegawai	938.397.145.045,00	976.603.564.431,00	976.603.564.431,00	976.603.564.431,00	0,70%
	Belanja Bunga	0	0	0	0	0,00%
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	7.675.629.120,00	7.662.288.957	7.711.712.575	7.827.378.173	1,48%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	0,00%
	Bantuan Keuangan ke Desa	448.120.460.700,00	406.666.376.000	403.695.564.000	400.764.609.881	-0,72%
B	**Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**		**0**	**0**	**0**	**-8,77%**
	- Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	0	0	0	0,00%

No	Uraian	Perda APBD Tahun 2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan 3 Tahun Terakhir (%)
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0,00%
	- Pembay aran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	-8,77%
	- Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0,00%
	- Pembay aran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0	0,00%
	Jumlah	**1.434.193.234.865,00**	**1.390.932.229.388,00**	**1.388.010.841.006,00**	**1.385.195.552.484,50**	**-0,16%**

Sumber: Perda APBD Kabupaten Bangkalan 2023 (diolah) dan Bappeda, Bapenda, BPKAD Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan perhitungan di tabel 3.16 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan per tahun tidak disebabkan karena adanya kenaikan yang tidak merata tiap tahunnya. Jika dilihat data keuangan per tahun anggaran maka, data yang ada menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar tiap tahunnya.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total peneriman riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama (tabel 3.15) sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 s.d tahun 2026 disajikan pada tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

No	Uraian	Perda APBD	Proyeksi		
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	2.235.455.802.254	2.258.669.746.284	2.305.415.494.738	2.358.141.124.689
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	60.000.000.000	0	0
3	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	81.775.000.000	67.986.427.536	53.735.822.081	52.875.000.000
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.405.000.000	0	0	0
	Total Penerimaan	**2.367.635.802.254**	**2.386.656.173.820**	**2.359.151.316.819**	**2.411.016.124.689**
	Dikurangi:				
5	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000	45.600.000.000	37.601.250.000	37.601.250.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**2.235.455.802.254**	**2.341.056.173.820**	**2.321.550.066.819**	**2.373.414.874.689**

Sumber: APBD Kabupaten Bangkalan 2023 (diolah) dan Bappeda, Bapenda, BPKAD Kabupaten Bangkalan

Kemudian, Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 3 (tiga) tahun mendatangkan yang akan dirumuskan dalam RPD ini. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) diluar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar; dan terakhir
c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam bab IV ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Bangkalan, khususnya untuk jangka waktu 2024-2026. Komponen pembentuk isu strategis di Kabupaten Bangkalan terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan Kabupaten Bangkalan; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan 2005-2025; P-RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023; isu aktual yang sedang berlangsung termasuk pandemi COVID-19; dan RPJMN 2020-2024. Adapun penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini.

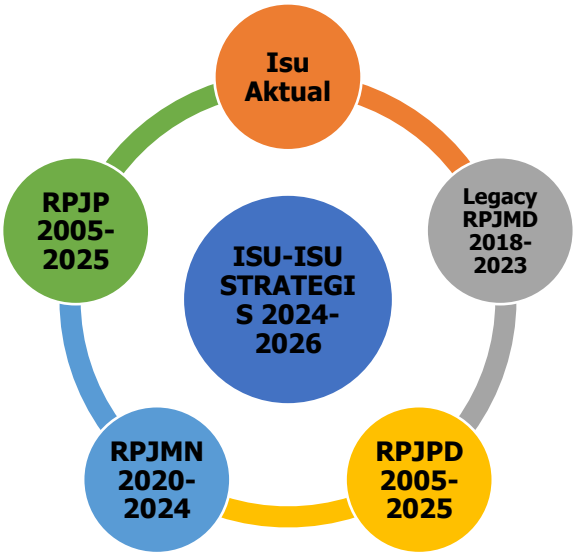

Gambar 4.1
Konsideran Pembentuk Isu Strategis
Kabupaten Bangkalan

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan

Perencanaan pembangunan didasarkan antara lain pada analisis masa lalu dan masa datang untuk menentukan masa depan, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Analisis masa lalu untuk menggambarkan permasalahan pembangunan dan analisis masa depan untuk mendapatkan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (*strength*) yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (*weakness*) yang belum diatasi, peluang (*opportunity*) yang belum dimanfaatkan, dan ancaman (*threat*) yang belum diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dirumuskan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2022 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 Tahap IV dan Tahap V. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan gambaran umum, hasil telaahan evaluasi capaian kinerja P-RPJMD tahun 2018 – 2023, telaah pencapaian RPJPD 2005-2025 serta permasalahan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2023, selanjutnya dianalisis permasalahan rencana pembangunan yang perlu diperhatikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Tabel 4. 1. Permasalahan Pembangunan

NO	PERMASALAHAN	KINERJA DAERAH	ANALISA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat Kemiskinan yang masih relatif tinggi	Angka kemiskinan mengalami peningkatan tahun 2020-2021 akibat dampak covid-19	Tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan jika dibandingkan dengan 4 kabupaten lainnya di Madura masih kalah dengan Kabupaten Pamekasan. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi masih jauh yang berada diangkat 11,4%.
2	Indeks Pembangunan Manusia yang masih relatif rendah	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan tahun 2020-2021	Jika dibandingkan dengan 4 kabupaten lainnya di Madura, IPM Kab. Bangkalan tahun 2021 sebesar 64,36 masih kalah dengan Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi sebesar 72,14. Jika melihat target capaian RPJMD Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 sebesar 65.48 angka tersebut kemungkinan besar tercapai.
3	Tingginya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka 2019-2021	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bangkalan tertinggi di madura yaitu pada tahun 2020 sebesar 8,77 dan tahun 2021 sebesar 8,07. Jika dibandingkan dengan dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi Jatim maka masih jauh yautu di angka 5,74.
4	Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan 2019-2021	Tingkat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2021 masuk kategori terendah dibandingkan dengan 4 kabupaten lainnya di pulau Madura yaitu sebesar -2,07. Bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sangat jauh yaitu di angka 3,57
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Indeks RB Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 terendah jika dibandingkan dengan empat Kabupaten di Madura dengan nilai 55.28 atau predikat CC. Kabupaten Sumenep dan Pamekasan satusnya B.

NO	PERMASALAHAN	KINERJA DAERAH	ANALISA
6	Ketimpangan meningkat	Indeks Gini Kabupaten Bangkalan moderat	Ketimpangan Kabupaten Bangkalan sudah masuk kategori rendah (0,30 thn 2021) dan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jatim, tetapi jika dibandingkan dengan empat kabupaten di Madura kabupaten Bangkalan secara angka berada dibawah Sampang dan Sumenep (peringkat ke-3)
7	Laju Inflasi	Tingkat Inflasi Daerah semakin menurun	Tahun 2021, laju Inflasi daerah di Kabupaten Bangkalan tertinggi dibandingkan dengan 4 Kabupaten lainnya di Madura. jika dibandingkan dengan laju inflasi di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan sangat jauh
8	PDRB Perkapita	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bangkalan 2019-2021	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bangkalan tahun 2021 jika dibandingkan dengan 4 kabupaten lainnya di Madura masih kalah dengan Kabupaten Sumenep

Sumber: data Diolah

4.1.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Secara makro, permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangkalan antara lain: ***pertama***, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bangkalan sempat mengalami penurunan namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup drastis walaupun di tahun berikutnya mengalami penurunan. Hal itu bisa dilihat dari pergerakan persentase tingkat kemiskinan dari tahun 2013 yang menginjak di angka 23,23% dan menjadi 19,59% di tahun 2017 dan kemudian turun lagi menjadi 18,90% di tahun 2019, terkecuali di tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan. Kemudian di tahun 2021 persentase kemiskinan di Kabupaten Bangkalan sebesar 21,57%, masih cukup jauh dari target sampai dengan tahun terakhir RPJMD yaitu di tahun 2023 yang ditargetkan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 17,59%.

Oleh karena itu, penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih menjadi permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangkalan.

Selain itu juga, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan dibandingkan dengan provinsi maupun nasional masih lebih tinggi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Sementara berdasarkan urutan kemiskinan se-Jawa Timur Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten termiskin di Jawa Timur kedua (setelah Kabupaten Sampang). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih menjadi permasalahan yang serius untuk ditangani dan harus menjadi prioritas pembangunan daerah.

Permasalahan ***kedua*** yakni indeks pembangunan manusia masih relatif rendah, karena di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2017 – 2021. Nilai IPM Kabupaten Bangkalan di tahun 2021 mencapai 64,36 dan telah mendekati target IPM di tahun akhir RPJMD, yaitu tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 65,7. Namun demikian, IPM Kabupaten Bangkalan masih dibawah rata-rata Nasional dan Jawa Timur. Rata-rata IPM di provinsi Jawa Timur adalah di atas 70. secara umum terdapat tiga Faktor penyebab rendahnya IPM Kab. Bangkalan yaitu (1) Angka Harapan Hidup, (2) ANgka Harapan Lama Sekolah, dan (3) Pengeluaran per Kapita per Tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) yang dapat mencerminkan "lama hidup" sekaligus "status kesehatan" Kabupaten Bangkalan masih berada di bawah Jawa Timur dan Nasional. Angka Harapan hidup tersebut salah satunya dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah. Kondisi Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Bangkalan juga tidak jauh berbeda yaitu berada di bawah Jawa Timur dan Nasional. Demian Juga untuk Pengeluaran per Kapita per Tahun kondisinya masih dibawah jawa Timur dan Nasional. Adapun Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 sebesar Rp. 8.610.000,-.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya IPM di Kabupaten Bangkalan pada masing-masing aspek diantaranya:

a. Pendidikan

Rendahnya pemenuhan sarana prasarana pendidikan (khususnya sekolah negeri), kosongnya posisi sekolah Kepala Sekolah, dan belum optimalnya honorarium GTT/PTT/Operator sekolah.

b. Kesehatan

Tingkat Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih rendah, Kondisi geografis wilayah pelayanan yang jauh dan sebagian besar masih ada di perbukitan, dan belum maksimalnya sarana dan prasarana kesehatan di wilayah pedesaan.

c. Perekonomian

Tingkat kemiskinan Ekstrem sebesar 12,44% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa, banyaknya PMKS dari luar Kabupaten, masih tingginya jumlah pengangguran, dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan masyarakat, serta Perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif.

Dengan adanya permasalahan diatas memaksa daerah agar melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar ada akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan yang lebih masif agar terjadi percepatan peningkatan IPM.

Ketiga, masih relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang menganggur atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPT mengindikasikan semakin kurangnya kesempatan kerja di wilayah tersebut. Rata-rata TPT Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sebesar 5,84%. Hal ini berarti bahwa 5 hingga 6 dari 100 orang penduduk Kabupaten Bangkalan sedang menganggur. Angka ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Timur yaitu sekitar 3 hingga 4 dari 100 orang yang menganggur (3,94%). Kondisi tahun terakhir TPT di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 terlihat bahwa 8 hingga 9 orang dari 100 orang menganggur. Kenaikan drastis TPT di tahun 2020 tidak bisa terelakkan. Kenaikan angka pengangguran tersebut, seperti

yang telah dijelaskan bahwa adanya Covid-19 yang bermula di awal 2020 (Februari-Maret) membawa dampak yang sangat tinggi terhadap kondisi perekonomian negara. Namun demikian di tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka mulai turun kembali, meskipun belum bisa seperti kondisi awal (tahun 2019).

Keempat, Lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dan 2021 jika dibandingkan menurun drastis. Data pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 3,53%, tahun 2018 adalah 4,22%, dan tahun 2019 sebesar 1,03%. Sedangkan pada tahun 2020 pergerakan pertumbuhan ekonomi melambat hingga berada di angka -5,59% dan di tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi masih negatif yaitu sebesar -2,07. Penurunan yang cukup tajam dikarenakan adanya *shock* dari musibah global berupa serangan Covid-19. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 juga dapat menyebabkan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, sebagai tahun terakhir RPJMD, yang ditargetkan sebesar 4,63% relatif cukup berat. Namun, jika dilihat dari rasio indeks gini, pencapaian indeks gini di Kabupaten Bangkalan relatif lebih baik dibandingkan dengan pencapaian indeks gini Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan perlu adanya akselerasi yang lebih besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap menjaga pemerataan pembangunan yang lebih baik.

Selain perkembangan indikator ekonomi makro dan sosial di atas, Kabupaten Bangkalan memiliki permasalahan pada kondisi kualitas birokrasi. Sehingga permasalahan daerah yang ***kelima*** adalah belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat. Kondisi birokrasi akan memberikan dukungan yang cukup besar dalam pembangunan daerah. Realisasi indeks reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih jauh dari kondisi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 realisasi indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar 55,85, relatif masih jauh dari target indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 77,25.

Permasalahan ***keenam*** yaitu keterbatasan layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan secara merata. Akselerasi pembangunan juga perlu adanya dukungan dari tingginya kualitas layanan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan sampai dengan akhir tahun RPJMD, pada tahun 2023, masih ditargetkan sebesar 60,10%. Hal ini tentu menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk dapat meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan.

Ketujuh, Terbatasnya ketersediaan air, penyusutan lahan pertanian dan pemberdayaan petani. Berkurangnya debit air pada sumber utama air (sumber pocong) akibat banyaknya pemanfaatan sumber air tersebut oleh sektor lainnya. Ditambah lagi dengan kondisi permintaan dan supply air yang tidak seimbang. Permintaan air bersih terus meningkat dan lebih besar daripada supply.

Kedelapan, permasalahan keterbatasan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan. Kondisi sumber daya manusia ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Selain itu, fokus sumber daya manusia juga dapat diketahui dari tingkat ketergantungan. Berdasarkan data pencari kerja, jumlah sarjana di Kabupaten Bangkalan masih relatif rendah. Berdasarkan data tingkat ketergantungan, dapat diketahui bahwa angka beban ketergantungan Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar beban usia produktif untuk menanggung usia tidak produktif atau belum produktif.

Kesembilan, permasalahan rendahnya kemandirian keuangan daerah. Masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah (sekitar di bawah 10%) juga dapat mempengaruhi pendanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Untuk itu, kinerja investasi daerah juga perlu didorong semakin besar ke Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui pihak swasta.

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dapat dipetakan menjadi urusan-urusan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu:

a. Kurangnya kualitas tenaga kependidikan;
b. Belum meratanya sebaran tenaga kependidikan;
c. Kurangnya prasarana dan sarana Pendidikan, terutama untuk mendukung minat dan bakat siswa;
d. Masih adanya kendala administrasi yang kurang lancar dan tepat waktu.

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, yaitu:

a. Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tuberculosis Belum Optimal;
b. Sarana dan prasarana pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit DBD masih kurang;
c. Balita gizi buruk, Balita stunting, Cakupan TTD Rematri, Asi eksklusif rendah (cakupan);
d. Pemahaman skrining P3 dan pelaksanaannya kurang maksimal;
e. Belum terjangkaunya sarana PIRT di daerah terpencil karena terkendala transportasi.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu:

a. Persentase infrastruktur PUPR hanya mampu melayani sebesar 63,35% pada tahun 2022, sehingga tingkat kerusakan jalan (kategori rusak dan rusak berat) relatif besar yaitu 35%. Kondisi kemantapan jalan dibawah

65%. Seharusnya kondisi seperti ini dibantu pembiayaan karena adanya keterbatasan anggaran.

b. Banyaknya permukiman di sempadan sungai, adanya sedimentasi di sungai dan kurangnya drainase menyebabkan terjadinya banjir. Maka dari itu perlu pembangunan drainase di ibu kota kabupaten.

c. Normalisasi/rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang kurang optimal akibat kurangnya daya dukung anggaran dan kesadaran pemeliharaan oleh petani yang rendah;

d. Banyaknya sampah dan sedimen di sungai yang mengakibatkan genangan air (pendangkalan) menyebabkan kualitas air mengalami penurunan;

e. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

f. Pelaksanaan perpres 80 seperti pendukung dokumen perencaanaan

g. Belum tercapai luasan RTH perkotaan dari luasan RTRW Kabupaten, yang diakibatkan kurangnya luasan lahan eksisting dan rencana untuk ruang hijau perkotaan;

h. Banyaknya utilitas di bahu jalan (untuk pelebaran, material longsoran) yang membutuhkan waktu untuk koordinasi dengan instansi terkait.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu:

a. Penanganan layanan sanitasi mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir (2019-2020) dikarenakan pandemi covid-19. angka pelayanan sanitasi masih rendah sebesar 28,63%, maka dari itu perlu peningkatan layanan sanitasi.

b. Persentase layanan air minum meningkat dari 42% (tahun 2018) menjadi 44,74% (2022). angka ini menunjukkan bahwa perlunya penyediaan layanan air minum.

c. Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan;
d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih;
e. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya;
f. Pembangunan infrastruktur pemukiman belum tersebar secara merata.
g. B elum optimalnya kondisi sanitasi lingkungan meliputi sektor drainase, limbah domestik, dan persampahan.

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:

a. Belum optimalnya penegakan PERDA;
b. Belum optimalnya anggota Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Belum optimalnya peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
d. Penyediaan dana BTT masih minim sehingga rehabilitasi rumah korban bencana kurang maksimal serta kurangnya dokumen perencanaan tentang bencana.

6) Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial, yaitu:

a. Penanganan PMKS yang belum optimal (ditandai dengan masih banyaknya jumlah PMKS);
b. Masih rendahnya pemberdayaan lembaga sosial masyarakat;
c. Masih banyak PMKS yang belum masuk DTKS.

Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:

7) Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, yaitu:

a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka;
b. Upaya pembangunan perlindungan terhadap tenaga kerja masih belum dapat dievaluasi dengan baik. Oleh karena itu diperlukan pengembangan indikator yang dapat memicu penyajian data yang dapat menggambarkan kinerja perlindungan terhadap tenaga kerja/buruh.

8) Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan, yaitu:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan kosong;
b. Produksi pangan lokal belum mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk.

9) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu:

a. Pengelolaan sampah belum optimal karena TPA sudah *overload*;
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
c. Belum maksimalnya instalasi pengolah sampah berbasis teknologi *(sanitary landfill*).

10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil, yaitu:

a. Masih kurangnya SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Perlengkapan perekaman KTP Elektronik mobile terbatas sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan perekaman dari desa ke desa.

11) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu:

a. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat di pedesaan;
c. Kurangnya Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
d. Belum Optimalnya produktivitas dan pemasaran produk lokal desa.

12) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

a. Partisipasi untuk perempuan IPG tidak tercapai sesuai yang diharapkan;
b. Masih minimnya SDM yg sensitif gender, yaitu mudah merasa & mengetahui kesenjangan gender yg terjadi di sekelilingnya & memahami PUG serta terampil dalam melakukan analisis gender;
c. Semakin maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan.

13) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

a. Belum terbina nya SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) yang sampai saat ini di Kabupaten Bangkalan masih mempunyai 1 SSK dan Kurang adanya Pembinaan;
b. Pemakaian alat kontrasepsi Jangka Panjang (MOW, MOP, IUD dan Implan) masih rendah;
d. Belum tersusunnya *Grand Design* Kependudukan di Kabupaten Bangkalan.

14) Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan, yaitu:

a. Kurangnya perlengkapan jalan yang memadai;
b. Penurunan jumlah kendaraan wajib uji. Hal ini disebabkan adanya dampak pandemi Covid-19 sehingga data menunjukkan penurunan pelaku usaha transportasi yang melakukan uji kendaraan.

15) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informatika, yaitu:

a. Keterbatasan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
b. kesenjangan informasi dan komunikasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain terjadi karena adanya kondisi geografis serta ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan menjadi kendala yang perlu diupayakan pemecahannya secara optimal.

16) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, yaitu:

a. Rendahnya keterampilan dan pengetahuan/SDM pelaku usaha sehingga kualitas produk dan kemasan masih kalah bersaing dengan produk dari Kabupaten/Kota lain dalam event pameran;
b. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ingin mendapatkan bantuan dana bergulir sebagai tambahan modal usahanya;
c. Masih rendahnya SDM pengurus yang masih belum mengerti arti prinsip-prinsip perkoperasian dan jadi diri berkoperasi;
d. Kerjasama Kemitraan antar koperasi dan pihak lainnya sangat terbatas;
e. Ketersediaan pupuk yang terbatas saat dibutuhkan oleh petani;
f. Jumlah *kompetitor ritel* koperasi perkembangannya cepat (indomart dan alfamart) sehingga usaha ritel koperasi kalah bersaing;

g. Kesadaran anggota dalam membayar simpanan masih rendah, terbatasnya kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

17) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal, yaitu:

a. Investasi Daerah Kabupaten Bangkalan masih seputar Penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) dan belum memiliki Penanaman Modal Asing (PMA);
b. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian;
c. Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan DPMPTSP kepada masyarakat;
d. Masih adanya pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan dan non perijinan sehingga untuk menanganinya perlu adanya unit penanganan pengaduan yang komprehensif dengan dukungan keterlibatan OPD teknis terkait dan data akurat;
e. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perijinan dan non perijinan;
f. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan non perizinan yang ada di DPMPTSP yang komprehensif dan aman;
g. Belum efektifnya tim teknis DPMPTSP dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan DPMPTSP.

18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu:

a. Kurang memadainya sarana dan prasarana olahraga;
c. Masih rendahnya pembinaan terhadap kepemudaan dan olahraga;
d. Belum optimalnya partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan.

19) Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan, yaitu:

a. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan;
b. Belum tersedianya tenaga pustakawan daerah yang memadai.

20) Urusan Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan, yaitu:

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan;
b. Belum tersedianya tenaga kearsipan daerah/arsiparis.

21) Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, yaitu:

a. Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya daerah;
b. b.Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya;
c. Belum optimal dan efektifnya promosi dan pemasaran budaya daerah.

22) Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik, yaitu:

a. Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap unit kerja;
b. Ketersediaan data yang sering tidak sesuai dengan harapan yaitu data yang valid, akurat, continue/berkelanjutan, terbakukan, akuntabel, dan terpadu.

Urusan Pilihan:

23) Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian, yaitu:

a. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana;
b. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas;
c. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani;

d. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian;
e. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai;
f. Belum tertanganinya lahan kritis dalam upaya konservasi dan rehabilitasi.

24) Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan, yaitu :

a. Efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan penting masyarakat melalui pengebangan sarana dan prasarana perdagangan, perkuat kelembagaan usaha perdagangan, pengembangan jaringan informasi produk, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat;
b. Kurang optimalnya evaluasi/pengelolaan PAD;
c. Meningkatkan tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
d. Penataan pedagang kaki lima dan asongan dengan memfasilitasi lokasi usaha yang nyaman dan aman tertib dan indah.

25) Urusan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata, yaitu:

a. Pengembangan objek wisata, SDM kepariwisataan, sarana promosi dan informasi pariwisata, pengelolaan usaha jasa pariwisata masih rendah;
b. Pemberdayaan pengelola objek wisata rendah;
c. Pengembangan dan penguatan 10 kawasan pariwisata termasuk 4 (Kawasan Ekonomi Khusus) KEK pariwisata dan destinasi unggulan masih rendah;
d. Peningkatan promosi dan kerjasama sektor kepariwisataan masih rendah.

26) Urusan Industri

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan industri, yaitu:

a. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha IKM, tingginya pengangguran;

b. Sektor industri pengolahan masih sangat terpengaruh dengan faktor-faktor eksternal. Hal tersebut berdampak pada kestabilan pertumbuhan industri. Sehingga akan berdampak pada stabilitas perekonomian yang dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi.

Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan:

27) Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Belum optimalnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan;
b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan;
c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstra, RKPD maupun Renja dalam merencanakan kegiatan;
d. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, baik melalui penataan ulang kelembagaan maupun sumber daya manusia, peningkatan sinergisitas di bidang perencanaan baik antar SKPD maupun antar tingkat pemerintahan, serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

28) Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:

a. Kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur;
b. Penurunan indeks profesionalitas aparatur.

29) Urusan Penunjang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang keuangan, yaitu belum sebandingnya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pusat dan pendapatan asli daerah dengan pembiayaan yang harus dikeluarkan daerah.

30) Urusan Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang pengawasan, yaitu belum optimalnya pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

31) Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan dan Kecamatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang administrasi pemerintahan dan kecamatan, yaitu:

a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
b. Kinerja pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan terutama dalam pelayanan publik.

4.2. Isu–Isu Strategis Kabupaten Bangkalan

Isu strategis pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 merupakan aspek dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a) Permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa kinerja pemerintahan;
b) Prioritas dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025;
c) Agenda Pembangunan, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan *Major Projects* dalam RPJMN 2020-2024, serta;
d) Isu-isu aktual diantaranya pandemi COVID-19 dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal diatas, telah terumuskan beberapa isu strategis pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, yaitu:

A. Isu Strategis Berdasarkan Hasil Analisis Kinerja Pemerintahan dan Prioritas serta Arah Kebijakan RPJPD

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Bangkalan masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, setidaknya dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur bahkan rata-rata nasional. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bangkalan sudah cukup turun drastis, dari 23,23% di tahun 2013 menjadi hanya 19,59% di tahun 2017 dan kemudian turun lagi menjadi 18,90% di tahun 2019, terkecuali di tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan. Kemudian di tahun 2021 persentase kemiskinan di Kabupaten Bangkalan sebesar 21,57%, masih cukup jauh dari target terakhir RPJMD yaitu di tahun 2023 yang ditargetkan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 17,59%. Oleh karena itu, penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih menjadi permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan jika dibandingkan dengan provinsi maupun nasional masih lebih tinggi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Sementara berdasarkan urutan kemiskinan se-Jawa Timur Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten dengan persentase penduduk termiskin di Jawa Timur kedua di Jawa Timur (setelah Kabupaten Sampang). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih menjadi permasalahan yang serius untuk ditangani dan harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Penurunan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim harus menjadi prioritas pembangunan ke depan, apalagi telah ada ketetapan nasional bahwa kemiskinan ekstrim harus dihapuskan (bernilai nol) pada tahun 2024.

Kesejahteraan masyarakat Bangkalan yang masih relatif rendah juga tergambar dari kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun beberapa indikator kinerja pembangunan sosial lainnya yang relatif rendah. Indeks

pembangunan manusia masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Rata-rata IPM di provinsi Jawa Timur adalah di atas 70. Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2017 – 2021. Nilai IPM Kabupaten Bangkalan di tahun 2021 mencapai 64,36 dan telah mendekati target IPM di tahun akhir RPJMD, yaitu tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 65,7. Namun demikian, IPM Kabupaten Bangkalan masih dibawah rata-rata Nasional dan Jawa Timur. Perlu peningkatan akses / pemerataan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan kawasan permukiman, dan sosial.

2. *Good and Clean Government* serta Transformasi Pelayanan Publik.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance and clean government)* adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *good governance and clean government*, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Salah satu cara mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance and clean government)* adalah dengan reformasi birokrasi sebagai jalan utama. Secara tegas pelaksanaa reformasi birokrasi diatur memalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 berikut regulasi teknis turunannya. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi

terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga, serta pengawasan secara *whistleblowing* oleh para pemangku kepentingan terkait terutama masyarakat, dengan prinsip kolaborasi.

3. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan digambarkan berdasarkan indikator masalah ekonomi secara makro dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan IPM. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dan 2021 jika dibandingkan menurun drastis. Data pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 3,53%, tahun 2018 adalah 4,22%, dan tahun 2019 sebesar 1,03%. Sedangkan pada tahun 2020 pergerakan ekonomi melambat sampai dengan -5,59% dan di tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi masih negatif yaitu -2,07. Penurunan yang cukup tajam dikarenakan adanya *shock* dari musibah global berupa serangan Covid-19. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 juga dapat menyebabkan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, sebagai tahun terakhir RPJMD, yang ditargetkan sebesar 4,63% relatif cukup berat. Namun, jika dibandingkan dengan pencapaian rasio gini di Kabupaten Bangkalan relatif lebih baik dibandingkan dengan pencapaian rasio gini Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan perlu adanya akselerasi yang lebih besar untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap menjaga pemerataan pembangunan yang lebih baik.

Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat adalah tuntutan klasik. Dalam upaya pencapaiannya, diperlukan dorongan dari berbagai instrumen diantaranya pengurangan ketimpangan ekonomi melalui penurunan tingkat kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, ketahanan pangan serta peningkatan industri kreatif yang berdaya saing.

Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah masih relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang menganggur atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPT mengindikasikan semakin kurangnya kesempatan kerja di wilayah tersebut. Rata-rata TPT Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sebesar 5,84%. Hal ini berarti bahwa 5 hingga 6 dari 100 orang penduduk Kabupaten Bangkalan sedang menganggur. Angka ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Timur yaitu sekitar 3 hingga 4 dari 100 orang yang menganggur (3,94%). Kondisi tahun terakhir TPT di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 mencapai 8 hingga 9 orang dari 100 orang menganggur. Kenaikan drastis TPT di tahun 2020 tidak bisa terelakkan. Kenaikan angka pengangguran tersebut, seperti yang telah dijelaskan bahwa adanya Covid-19 yang bermula di awal 2020 (Februari-Maret) membawa dampak yang sangat tinggi terhadap kondisi perekonomian negara. Namun demikian di tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka mulai turun kembali, meskipun belum bisa seperti kondisi awal (tahun 2019).

4. Penguatan *Local Taxing Power* dan Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

Pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

setidaknya memuat 2 aspek penting yaitu: (1) Pengaturan Pajak Daerah & Retribusi Daerah; dan (2) Peningkatan Kualitas Belanja Daerah. Secara konseptual **aspek pertama** bertujuan untuk (1) Menurunkan *Administration* dan *Compliance Cost,* melalui Restrukturisasi Jenis Pajak Fokus belanja daerah untuk layanan dasar publik guna pencapaian SPM. Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) *Serta* (2) Memperluas Basis Pajak dengan cara opsi Pajak Provinsi dan Kab/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP serta perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Daerah (valet parkir, objek rekreasi, dsb). Pada aspek pertama ini, pemerintah Kabupaten Bangkalan harus segera melakukan penyesuaian salah satunya dengan merevisi perda tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Sedangkan **aspek kedua, terdapat 5** tujuan dari peningkatan kualitas belanja daerah yaitu;

a) **Fokus Belanja**: Fokus belanja daerah untuk layanan dasar publik guna pencapaian SPM.
b) ***Mandatory Spending***: Disiplin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundangan, seperti pendidikan dan kesehatan.
c) **Pengendalian Belanja Pegawai**: Batasan besaran belanja pegawai (maksimal 30% dr APBD tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD). Tantangan dari pengendalian belanja pegawai ini karena besaran proporsi belanja pegawai di Kabupaten bangkalan masih diatas 30%, walaupun masih diberikan kelonggaran penyesuaian porsi belanja pegawai selama 5 tahun dengan Berkoordinasi dengan kementerian dalam Negeri dan KEMEPAN-RB.
d) **Penguatan Belanja Infrastruktur:** Batasan besaran belanja infrastruktur pelayanan publik (minimal 40% dr APBD di luar transfer ke daerah bawahan dan desa)

e) **SiLPA Berbasis Kinerja:** Optimalisasi penggunaan SiLPA *non-earmarked* untuk belanja daerah berdasarkan kinerja layanan publik daerah.

Sementara itu, dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 telah menetapkan arah kebijakan pembangunan, termasuk pada tahap IV yang menjadi acuan pembangunan pada periode 2024-2026. Skala prioritas arah kebijakan pembangunan jangka panjang tahap keempat, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada:

(i) Tersedianya kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kesalehan individu dan kesalehan sosial, berpendidikan serta berpola hidup sehat disertai kemampuan yang memadai sebagai pelaku pembangunan.

(ii) Kemajuan dan Kekokohan struktur perekonomian yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa, serta keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan Iptek yang mendorong perekonomian yang efisien dan produktif.

(iii) Ketersediaan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat, pengembangan infrastruktur perdesaan; pemenuhan kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat; serta terwujudnya kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh.

(iv) Perwujudan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta mandiri dalam konstelasi global.

B. Isu Strategis Kabupaten Bangkalan terkait Isu Strategis Regional (Jawa Timur)

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan Kabupaten Bangkalan ke depan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, diharapkan juga dapat mempercepat kemajuan ekonomi daerah dengan menekan semua permasalahan terutama terkait kemajuan ekonomi. Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu pintu masuk/keluar kota Surabaya mempunyai peluang antara lain: (a) menjadikan simpul jaringan transportasi di Surabaya sebagai pintu keluar/masuk potensial mobilitas barang/jasa/manusia Kabupaten Bangkalan untuk pembangunan ekonomi wilayah. Kabupaten Bangkalan harus memastikan pembangunan infrastruktur transportasi penghubung Bangkalan dengan Kota Surabaya (terminal maupun pelabuhan) sehingga Kabupaten Bangkalan dapat pula memanfaatkan dampak positif jaringan surabaya; (b) dapat memanfaatkan tetesan ke bawah atau *spread effect* pembangunan di Kota Surabaya; (c) Bangkalan merupakan lokasi alternatif "pemekaran" pembangunan Surabaya. Jika demikian, maka dimasa mendatang, peluang Investasi di Kabupaten Bangkalan seharusnya sangat tinggi.

Sementara itu, tantangan pembangunan Kabupaten Bangkalan terhadap kebijakan pemerintah Kota Surabaya antara lain: (a) mobilitas barang/jasa/manusia "keluar" dari Kabupaten Bangkalan bisa saja lebih besar dari mobilitas "masuk" (justru terjadi pengurasan sumberdaya Bangkalan ke surabaya); (b) daya saing barang/jasa/manusia kota Surabaya relatif lebih tinggi; (c) kondisi yang belum kondusif untuk berinvestasi.

Kebijakan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025 yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Bangkalan adalah terkait pembangunan infrastruktur, khususnya sarana prasarana transportasi. Dalam misi kelima dari RPJPD Provinsi

Jawa Timur tersebut, yaitu mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi, terdapat satu arah kebijakan yang terkait dengan Kabupaten Bangkalan. Disebutkan bahwa pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Dalam arah pembangunan ini terdapat agenda: (1) Mempertahankan kemantapan jaringan jalan; (2) peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan; dan (3) Pemeliharaan, peningkatan, pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermodal. Salah satu lokasi pelaksanaan agenda tersebut adalah di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi pengembangan Kabupaten Bangkalan, khususnya dalam rencana pengembangan sarana-prasarana transportasi titik-titik tertentu di Kabupaten Bangkalan dengan titik di kawasan kaki jembatan Suramadu Sisi Madura. Isu ini cukup strategis mengingat salah satu bagian isu strategis urusan perhubungan di Kabupaten Bangkalan adalah belum tersedianya layanan transportasi umum hingga ke kaki Jembatan Suramadu. Dengan demikian, terdapat peluang kerjasama dengan provinsi Jawa Timur untuk menjawab isu tersebut.

Sementara itu, dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 terdapat rencana pembangunan kewilayahan berbasis kluster. Terdapat 8 kluster yang akan menjadi prioritas pembangunan kewilayahan Jawa Timur, di mana dua di antaranya terkait dengan Kabupaten Bangkalan. Kedua cluster yang dimaksud adalah Klaster Agropolitan Madura dan Kluster Metropolitan.

Terkait Kluster Agropolitan Madura, dalam RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031, Pulau Madura ditetapkan sebagai (1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Madura (terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep); dan (2) Kawasan Tertinggal (terdiri dari Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bangkalan). Pada RPJMD Jawa Timur periode 2019-2024, kebijakan pembangunan terkait pengembangan kawasan Madura diarahkan pada

pengembangan Klaster Agropolitan Madura, dengan lokasi cluster di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Arahan rinci kebijakan pengembangan cluster agropolitan Madura adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan agribisnis pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai sektor utama menuju pasar regional dengan komoditas unggulan tembakau, sapi, tebu, tepung cassava, jambu mete, sorghum, jagung, dan garam;

b) Pengembangan infrastruktur dengan fokus pendukung produksi, distribusi, maupun pemasaran komoditas unggulan dengan upaya mewujudkan keterkaitan produksi dengan pasar regional dan membuka akses;

c) Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengurangi tingkat kemiskinan; dan

d) Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah di Madura mendukung pengembangan Agropolitan yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, dan stabilitas sosial.

Sementara itu, terkait Klaster Metropolitan, arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai berikut:

1. Rencana sistem perkotaan yang ditetapkan sebaga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau beberapa provinsi meliputi (1) Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila) dan (2) Kota Malang; dan
2. Kawasan Strategis Provinsi Sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan Metropolitan yang berfokus pada pemantapan sektor industri, perdagangan, dan jasa komersial yang terdiri dari koridor Metropolitan yang meliputi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines

District/CBD) Surabaya, High Tech Industrial Park (HTIP) di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial di Lawang Kabupaten Malang, Kawasan Pusat Bisnis Kota Malang, dan Pusat Pariwisata Batu).

Berdasarkan arahan sistem perkotaan dan penetapan kawasan strategis metropolitan, maka Klaster Metropolitan ditetapkan pada Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan infrastruktur wilayah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan simpul Kawasan Timur Indonesia (KTI);
2. Pengembangan permukiman dan perdagangan-jasa sebagai pusat perkotaan didukung sektor industri di sekitarnya;
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan UKM untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran perkotaan; dan
4. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana.

Lebih jauh lagi, terdapat dua program unggulan Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan Wilayah Madura, seperti tertuang dalam RPJMD Jawa Timur, khususnya pada bab VII, di Misi II yaitu;

1. Mengembangkan pembangunan dermaga/transportasi antar pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah kepulauan Madura dan pulau-pulau lainnya;
2. Meningkatkan harmonisasi kerjasama pemanfaatan barang milik negara dan daerah dalam mengembangkan kawasan Suramadu bersama Pemerintah Kabupaten se-Madura, Pemerintah Kota Surabaya serta optimalisasi kerjasama pemanfaatan barang milik daerah pada area reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang diproyeksikan sebagai kawasan pergudangan.

Dengan demikian, hal-hal tersebut di atas adalah peluang bagi Kabupaten Bangkalan untuk pembangunan di tiga tahun mendatang. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan untuk menjajaki peluang kerja sama yang saling menguntungkan untuk merealisasikan pembangunan Kabupaten Bangkalan maupun Jawa Timur.

C. Isu Strategis Kabupaten Bangkalan terkait Isu Strategis Nasional

Kondisi eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Bangkalan di masa mendatang adalah amanah kebijakan-kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan nasional tersebut harus ditelaah untuk selanjutnya menjadi pertimbangan/diperhatikan saat menyusun isu strategis, tujuan, sasaran hingga program/kegiatan pembangunan ke depan.

Telaah terhadap RPJMN tahun 2020-2024 menghasilkan isu-isu tingkat nasional yang harus dipertimbangkan dan selaras dengan kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026. Isu-isu strategis dalam RPJMN antara lain: (1) Urgensi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan; (2) Permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi. Regulasi pemerintah di bidang ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Keteganakerjaan dan Undang-Undang Cipta Karya menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di seluruh daerah di Indonesia. Pun demikian dengan regulasi investasi dan perdagangan yang menuntut debirokratisasi akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam pengimlementasiannya; (3) Penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya akses dan kualitas pendidikan, capaian indikator kesehatan Indonesia yang masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara sebanding, serta permasalahan karakter bangsa; (4)

Infrastruktur masih terbatas yang diindikasikan oleh penurunan stok infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto, stok infrastruktur di bawah rata-rata internasional, tingginya biasa logistik serta kinerja infrastruktur logistik yang rendah; (5) berbagai isu kewilayahan di Indonesia, seperti ketimpangan antar wilayah, konektivitas yang belum optimal, akses dan kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas; ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi, proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, lemahnya pengelolaan urbanisasi, pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan peruntukannya, kepastian hukum dan penguasaan/pemanfaatan atas tanah yang timpang, serta dominannya wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya gap dengan daerah lain di Indonesia; (6) Isu lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana; serta (7) isu politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang meliputi belum kokohnya kelembagaan demokrasi, belum optimalnya pelaksanaan kebijakan luar negeri, penegakan hukum, serta kinerja kelembagaan birokrasi dan pelayanan publik.

Seiring dengan isu strategis tersebut, maka agenda nasional dalam RPJMN yang juga harus diselaraskan dengan pembangunan daerah adalah:

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
c. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan

pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
e. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/perubahan. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Terbitnya kebijakan yang tidak jelas akan mempengaruhi ketidakjelasan pembangunan di daerah. Termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana banyak kewenangan yang mana obyek pembangunan adalah masyarakat di daerah ditarik oleh Pusat dan Provinsi. Hal ini tentu akan membuat masyarakat dan pemerintah daerah menjadi bingung, tidak dilaksanakan karena bukan kewenangan, namun apabila dilaksanakan menyalahi aturan.

Kebijakan Fiskal atau Keuangan Pemerintah Pusat yang menyebabkan ketidakpastian kapasitas fiskal daerah, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Undang-undang (UU) ini merupakan pengganti UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Melalui UU ini, dilakukan pemutakhiran kebijakan Transfer Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Bagi pemerintah daerah akan menjadi tantangan tersendiri untuk

menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah sehingga tujuan dari UU benar-benar bisa terealisasi.

D. Isu Strategis Kabupaten Bangkalan terkait Isu Strategis Internasional

1. Komitmen internasional untuk mencapai SDGs

Berbagai dampak negatif yang telah ditimbulkan oleh aktivitas manusia (dalam dalaih pembangunan) telah mengancam keberlanjutan kehidupan manusia. Dampaknya adalah adanya pemanasan global yang telah menyebabkan perubahan iklim dan selanjutnya berimplikasi pada frekuensi bencana alam yang semakin tinggi. Kebijakan yang berpihak menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan negara, ketidaksetaraan gender yang tinggi dan semakin dalam. Kesadaran masyarakat internasional pun muncul untuk mewujudkan pembangunan yang hasilnya tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini namun juga untuk generasi-generasi berikutnya. Paradigma pembangunan berkelanjutan pun muncul dan hampir seluruh negara di dunia menyepakati untuk melaksanakannya. Melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 21 Oktober 2015 berbagai negara di dunia telah sepakat untuk melaksanakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs).* Untuk mencapai tujuan pembangunan bersama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, SDGs ditetapkan melalui 17 tujuan dan 169 target pembangunan yang bersifat secara global sampai tahun 2030. Program ini menggantikan program sebelumnya yakni MDGs *(Millennium Development Goals)*, program pembangunan berkelanjutan serupa yang berakhir di tahun 2015. Dengan demikian, proses pembangunan berkelanjutan senantiasa dilakukan setiap saat.

Mengingat pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan ekonomi, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam program tersebut. Melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Indonesia konsisten dalam upaya melaksanakan program SDGs. Hal ini disebabkan karena pembangunan berkelanjutan merupakan isu global yang penyelesaiannya harus dilakukan secara partisipatif oleh semua pemangku kebijakan dan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dan target SDGs tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peran aktif dari setiap lapisan masyarakat.

Secara garis besar, 17 tujuan SDGs dapat dikelompokkan dalam empat pilar utama yakni pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan manusia, pilar pembangunan lingkungan hidup, dan pilar pemerintahan. Adapun tujuan SDGs dalam pilar pembangunan ekonomi yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat, pembangunan infrastruktur untuk memudahkan aktivitas ekonomi, mempromosikan industrialisasi yang berkesinambungan untuk mendorong inovasi, serta pemukiman manusia yang aman dan nyaman. Tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar pembangunan manusia adalah untuk menghilangkan kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan pelayanan dasar. Pada pilar pembangunan lingkungan hidup, pembangunan ditujukan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan. Sementara itu, pada pilar pemerintahan, pembangunan ditujukan untuk menjamin kedamaian masyarakat, kesamaan akses dan keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif, serta Penguatan sarana dan pelaksanaan kemitraan global.

Tujuan pembangunan berkelanjutan ini sangat relevan dengan permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi Kabupaten Bangkalan. Bukti kerelevanan bidang tujuan pembangunan berkelanjutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada Tabel 4.1 Seperti telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Bangkalan sedang menghadapi permasalahan

pembangunan berupa masih rendahnya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang masih relatif rendah, serta permasalahan keterbatasan tata kelola pemerintahan. Keempat pilar pembangunan dalam SDGs seharusnya sejalan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan, sehingga berbagai program pembangunan pun akan sejalan dengan program pembangunan internasional dan nasional dalam rangka pencapaian SDGs. Dengan demikian, Kabupaten Bangkalan memiliki peluang untuk akses terhadap program-program tersebut, termasuk di dalamnya mendapatkan pendanaan program/kegiatan yang selaras. Pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Bangkalan memiliki peluang yang sama untuk mengajukan dan mendapatkan kerjasama dari pemerintah provinsi, nasional serta lembaga internasional lainnya untuk menjalankan program-program terkait SDGs yang sedang ditawarkan. Bagaimanapun, dengan kondisi keuangan daerah yang masih sangat terbatas, bantuan pelaksanaan program/kegiatan dari pihak di luar Kabupaten Bangkalan akan mempercepat upaya pencapaian pembangunan Kabupaten Bangkalan.

2. Isu globalisasi Ekonomi, baik di ASEAN, Asia, bahkan dunia.

Salah satu isu globalisasi ekonomi terdekat adalah Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan. Dalam hal ini resiko akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan

ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para risk professional diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan,

infrastruktur baik secara fisik dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun tahun kedepan.

3. Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah memunculkan revolusi industri 4.0 di dunia

Tuntutan pemanfaatan TIK dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan publik, semakin tinggi dan harus diakomodasi oleh pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya.

4. Isu Resesi Ekonomi Global

Perekonomian negara Amerika Serikat, Uni Eropa dan China melambat sejak adanya perang di Ukraina di awal tahun 2022, kenaikan harga-harga, suku bunga yang naik, dan penyebaran Covid-19 di China juga membebani ekonomi global. Dana Moneter Internasional memprediksi bahwa sepertiga negara di dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia pun memproyeksikan bahwa resesi ekonomi global tersebut akan berdampak pula pada perekonomian Indonesia, meskipun diharapkan tidak menimbulkan resesi ekonomi di Indonesia.

Beberapa dampak resesi perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia antara lain pada perdagangan luar negeri. Saat ekspor komoditi unggulan Indonesia terkendala oleh turunnya permintaan global akibat resesi ekonomi, maka neraca perdagangan akan defisit. Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari ekspor-pun menurun sehingga menurunkan pendapatan negara secara keseluruhan. Nilai tukar rupiah yang semakin merosot seiring melemahnya perekonomian negara-negara besar juga berdampak pada nilai impor yang semakin besar dan memberatkan Indonesia, sehingga defisit neraca perdagangan juga semakin besar. Neraca yang defisit akan mengurangi Pendapatan Nasional secara keseluruhan. Bagi pemerintah daerah, resesi global akan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung. Bagi daerah yang perekonomian daerahnya terkait langsung dengan

perdagangan luar negeri, tentu akan terpengaruh langsung, sebagaimana uraian sebelumnya. Sementara itu, dampak tidak langsungnya adalah implikasi dari menurunnya penerimaan negara dan/atau meningkatnya pengeluaran negara untuk mengurangi dampak resesi dunia terhadap Indonesia. Daerah yang tingkat kemandiriannya rendah, di mana sumber utama penerimaan daerahnya adalah dana transfer, maka sedikit banyak akan terpengaruh. Saat alokasi dana negara untuk transfer ke daerah berkurang karena penerimaan negara berkurang, maka penerimaan daerah bersumber dari dana transfer pun akan menurun. Saat hal ini tidak diimbangi dengan sepadan oleh peningkatan sumber penerimaan daerah yang lain, maka penerimaan total daerah juga akan menurun. Implikasi berikutnya adalah kapasitas fiskal daerah pun dalam membiayai proses pembangunan daerah juga akan menurun.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini disusun saat masa jabatan kepala daerah akan berakhir di tahun 2023, namun pemilihan kepala daerah serentak akan dilakukan tahun 2024. Implikasinya adalah tidak ada visi dan misi maupun janji politik kepala daerah yang harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapainya. Walaupun demikian, mengingat manajemen perencanaan pembangunan daerah, khususnya perencanaan menengah dan tahunan hingga terpilihnya kepala daerah serta terselesaikannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah-nya, maka penentuan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang (tahun 2024-2026) hanya dirumuskan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten pada periode tersebut.

Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan bahwa penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat, dan isu strategis aktual. Karenanya, selain berdasarkan isu strategis pembangunan yang telah tertuang dalam Bab IV, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 harus mengacu pada visi, misi, sasaran serta arah kebijakan pembangunan tahap keempat dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025. Harapannya, akan terdapat keberlanjutan pembangunan selama empat tahun mendatang.

5.1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan

RPJPD Kabupaten Bangkalan menguraikan Visi pemerintah Kabupaten Bangkalan periode 2005-2025, sebagai berikut:

"Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, Dan Jasa Yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani."

Terdapat empat kata kunci visi pembangunan Kabupaten Bangkalan, yaitu "Industri, "Perdagangan", "Jasa", dan "Masyarakat Madani" yang masing-masing memiliki makna kondisi yang diharapkan tercapai di tahun 2025. Tiga kata kunci pertama bermakna tiga sektor perekonomian yang akan menjadi tumpuan aktifitas dan kehidupan masyarakat. Di tahun 2025 diharapkan Bangkalan menjadi Kabupaten Industri dengan kawasan industri terpadu sebagai ujung tombak pengembangan kawasan kepulauan Madura serta mempersiapkan diri sebagai wilayah penyangga Surabaya. Bangkalan diharapkan pula menjadi Kabupaten Perdagangan, dengan kegiatan perdagangan dengan daya saing lokal, regional, nasional, serta internasional. Perekonomian Bangkalan pun diharapkan bertransformasi dari dominasi sektor pertanian ke sektor Jasa yang identik dengan nilai tambah atau penghasilan yang lebih tinggi. Walaupun demikian, peningkatan perekonomian harus tetap melestarikan nilai-nilai agama dan budaya daerah, sehingga terwujud Masyarakat Madani, yaitu masyarakat dengan sistem sosial yang berlandaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat, yang tercermin dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai *civil security, civil responsibility* dan *civil resilience*.

Dengan demikian, visi Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 adalah Bangkalan yang tangguh dengan perekonomian yang bertumpu pada sektor Industri, Perdagangan dan Jasa, namun tetap tetap mengacu pada nilai-nilai dasar agama dan budaya lokal. Harapannya, mampu menciptakan masyarakat

madani serta Bangkalan yang berdaya saing di tingkat regional, nasional dan internasional.

5.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan

Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut, pemerintah Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan misi berikut pada periode 2005-2025:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia yang optimal melalui pembangunan kehidupan beragama, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olah Raga. Dengan kata lain, misi ini mencerminkan penyelenggaraan pembangunan sumberdaya manusia dan sosial
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Penguatan Struktur Industri, Perdagangan dan Jasa, Pengembangan Sumber Daya Pertanian (dalam arti luas), Pengelolaan Kawasan Pertambangan, Pengembangan Pariwisata, Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dengan kata lain, misi ini mencerminkan penyelenggaraan pembangunan ekonomi dan sosial
3. Membangun Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah. Misi ini diselenggarakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Wilayah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dengan kata lain, misi ini mencerminkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur wilayah berwawasan lingkungan

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Misi ini diselenggarakan untuk mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good government) melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Hukum, Pembangunan keamanan dan ketertiban, Pembangunan Politik dan Pembangunan Komunikasi dan Informasi. Dengan kata lain, misi ini mencerminkan penyelenggaraan pembangunan tata kelola pemerintahan

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan 2005-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Bangkalan sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang tangguh, sehingga mewujudkan tatanan masyarakat madani dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mencapai tujuan, menyelenggarakan misi untuk mencapai visi Bangkalan Tahun 2025 tersebut, RPJPD Kabupaten Bangkalan juga telah menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk setiap penyelenggaraan misi dan setiap tahap selama periode pembangunan jangka panjang. Arah pembangunan setiap tahap disebut sebagai agenda pembangunan, sehingga dalam RPJPD akan terdapat empat agenda pembangunan.

Arah pembangunan Kabupaten Bangkalan difokuskan pada arah penyelenggaraan keempat misi pembangunan tersebut di atas serta arah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mendukung misi bersangkutan. Berikut ini adalah arah kebijakan pembangunan jangka panjang pembangunan Kabupaten Bangkalan:

1. Arah Kebijakan sesuai Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia difokuskan pada agenda:
   (i) pembangunan kehidupan beragama yang diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika bagi masyarakat serta membentuk ahlak mulia dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya;

(ii) pembangunan pendidikan yang diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran pendidikan sebagai peningkatan sumber daya manusia serta membentuk kapasitas dalam kompetensi era globalisasi,

(iii) pembangunan kesehatan yang diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia

(iv) pembangunan kependudukan yang diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk

(v) pembangunan ketenagakerjaan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pekerja dan pencari kerja untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan pekerja

(vi) pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan, memberi dan menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap anak

(vii) pembangunan kebudayaan yang diarahkan pada upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat

(viii) pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada peningkatan sumberdaya manusia di bidang olah raga yang memiliki karakter kebangsaan serta memiliki wawasan kebangsaan

2. Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

(i) Pemberdayaan koperasi dan UMKM yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi koperasi sebagai sokoguru ekonomi dan daya saing UMKM

(ii) Penguatan sektor industri, perdagangan dan jasa yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi perindustrian dalam menopang sektor perdagangan dan jasa untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif

(iii) Pengembangan sumberdaya pertanian (dalam arti luas) yang diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan

(iv) Pengelolaan kawasan pertambangan yang diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

(v) Pengembangan Pariwisata yang diarahkan pada pengelolaan potensi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

(vi) Penanggulanagn kemiskinan yang diarahkan pada upaya menurunkan angka kemiskinan absolut

(vii) Pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

3. Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah

(i) Pengembangan sarana-orasarana transporyasi jalan yang diarahkan pada upaya penanganan infrastruktur transportasi guna menggerakkan roda perekonomian

(ii) Pengelolaan sumberdaya air dan energy yang diarahkan pada upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan energi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat

(iii) Pembangunan perumahan dan permukiman yang diarahkan pada upaya pemenuhan perumahan yang sehat bagi masyarakat dan terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman guna pemerataan dan penyebaran penduduk serta pembangunan

(iv) Pengembangan wilayah yang diarahkan pada upaya mewujudkan percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah

(v) Penyelenggaraan penataan ruang yang diarahkan pada upaya mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bangkalan sesuai peruntukan

4. Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
   (i) Penyelenggaraan pemerintahn yang baik yang diarahkan pada upaya optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan
   (ii) Pembangunan hokum yang diarahkan pada upaya pemantapan fungsi dan peran pemerintah dalam penegakan supremasi hokum
   (iii) Pembangunan keamanan dan ketertiban yang diarahkan pada upaya optimalisasi peran dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan kondusivitas lingkungan masyarakat
   (iv) pembangunan politik yang diarahkan pada upaya menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis
   (v) pembangunan informasi dan komunikasi yang diarahkan pada upaya mewujudkan masyarakat sadar informasi dan transparansi

RPJPD Kabupaten Bangkalan telah mengarahkan pembangunan sebagaimana uraian di atas, namun skala prioritas berbeda sesuai tahapan atau periode pembangunan. RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 diharuskan mengacu pada arahan kebijakan pembangunan jangka panjang tahap keempat, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada:

(i) Tersedianya kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kesalehan individu dan kesalehan sosial, berpendidikan serta berpola hidup sehat disertai kemampuan yang memadai sebagai pelaku pembangunan.

(ii) Kemajuan dan Kekokohan struktur perekonomian yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa, serta keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan Iptek yang mendorong perekonomian yang efisien dan produktif.

(iii) Ketersediaan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang ditandai oleh berkembangnya jaringan

infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat, pengembangan infrastruktur perdesaan; pemenuhan kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat; serta terwujudnya kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh.

(iv) Perwujudan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta mandiri dalam konstelasi global.

5.3. Tujuan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

Tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dirumuskan dari arah kebijakan pembangunan jangka panjangnya di atas. Tujuan pembangunan pun dirumuskan sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan isu strategi yang harus dijawab di masa tiga tahun mendatang, sebagaimana tertuang dalam Bab IV dokumen RPD ini. Tabel 5.1. dan 5.2. memperlihat keselarasan arah kebijakan pembangunan jangka panjang serta isu strategis dengan Rumusan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

Tabel 5.1 Keselarasan Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026 dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Tahap IV Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangkalan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD	PRIORITAS KEBIJAKAN TAHAP IV RPJPD	RUMUSAN TUJUAN RPD TAHUN 2024-2026
I-1. pembangunan kehidupan beragama yang diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika bagi masyarakat serta membentuk ahlak mulia dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya;	Tersedianya kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kesalehan individu dan kesalehan sosial, berpendidikan serta berpola hidup sehat disertai kemampuan yang memadai sebagai pelaku pembangunan.	(1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
I-2. pembangunan pendidikan yang diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran pendidikan sebagai peningkatan sumber daya manusia serta membentuk kapasitas dalam kompetensi era globalisasi,		
I-3. pembangunan kesehatan yang diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia		
I-4. pembangunan kependudukan yang diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk		
I-6. pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan, memberi dan menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap anak		
I-7. pembangunan kebudayaan yang diarahkan pada upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat		
I-8. pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada peningkatan sumberdaya manusia di bidang olah raga yang memiliki karakter kebangsaan serta memiliki wawasan kebangsaan		

ARAH KEBIJAKAN RPJPD	PRIORITAS KEBIJAKAN TAHAP IV RPJPD	RUMUSAN TUJUAN RPD TAHUN 2024-2026
I-5. pembangunan ketenagakerjaan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pekerja dan pencari kerja untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan pekerja		(2) Menurunkan angka kemiskinan
II-6. Penanggulanagn kemiskinan yang diarahkan pada upaya menurunkan angka kemiskinan absolut		
II-7. Pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		
II-1. Pemberdayaan koperasi dan UMKM yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi koperasi sebagai sokoguru ekonomi dan daya saing UMKM	Kemajuan dan Kekokohan struktur perekonomian yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa, serta keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan Iptek yang mendorong perekonomian yang efisien dan produktif.	(3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan
II.2. Penguatan sektor industri, perdagangan dan jasa yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi perindustrian dalam menopang sektor perdagangan dan jasa untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif		
II-3. Pengembangan sumberdaya pertanian (dalam arti luas) yang diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan		
II.4. Pengelolaan kawasan pertambangan yang diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		
II-5. Pengembangan Pariwisata yang diarahkan pada pengelolaan potensi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
III-1. Pengembangan sarana-prasarana transportasi jalan yang diarahkan pada upaya penanganan infrastruktur transportasi guna menggerakkan roda perekonomian	Ketersediaan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang ditandai	

ARAH KEBIJAKAN RPJPD	PRIORITAS KEBIJAKAN TAHAP IV RPJPD	RUMUSAN TUJUAN RPD TAHUN 2024-2026
III-2. Pengelolaan sumberdaya air dan energy yang diarahkan pada upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan energi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat	oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat, pengembangan infrastruktur perdesaan; pemenuhan kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat; serta terwujudnya kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh.	
III-3. Pembangunan perumahan dan permukiman yang diarahkan pada upaya pemenuhan perumahan yang sehat bagi masyarakat dan terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman guna pemerataan dan penyebaran penduduk serta pembangunan		
III-4. Pengembangan wilayah yang diarahkan pada upaya mewujudkan percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah		
Penyelenggaraan penataan ruang yang diarahkan pada upaya mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bangkalan sesuai peruntukan		
IV-1. Penyelenggaraan pemerintahn yang baik yang diarahkan pada upaya optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan	Perwujudan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta mandiri dalam konstelasi global.	(4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
IV.2. Pembangunan hukum yang diarahkan pada upaya pemantapan fungsi dan peran pemerintah dalam penegakan supremasi hokum		
IV.3. Pembangunan keamanan dan ketertiban yang diarahkan pada upaya optimalisasi peran dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan kondusivitas lingkungan masyarakat		
IV.4. pembangunan politik yang diarahkan pada upaya menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis		
IV.5. pembangunan informasi dan komunikasi yang diarahkan pada upaya mewujudkan masyarakat sadar informasi dan transparansi		

Dalam proses perumusan tujuan pembangunan, terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang tidak menjadi pertimbangan, mengingat arah kebijakan tersebut merujuk pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat (urusan absolut). Arah kebijakan yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan agama (I-1) dan urusan hukum (IV-2). Selain itu, tanpa mengurangi arah kebijakan yang lain, beberapa arah kebijakan dikelompokkan kembali untuk merumuskan tujuan yang sejalan. Tabel 5.1. memperlihatkan bahwa terdapat 4 tujuan pembangunan yang dirumuskan dan masing-masing tujuan diharapkan mampu menjawab arah kebijakan maupu prioritas tahap IV pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan yang bersesuaian/selaras.

Tabel 5.2. Keselarasan Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026 dengan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

Isu Strategis	Rumusan Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026
ISU STRATEGIS TERKAIT PERMASALAHAN DAERAH	
1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui :	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Tujuan 2: Menurunkan angka kemiskinan
a. Penurunan tingkat kemiskinan	
b. peningkatan akses / pemerataan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat	
2. Good and Clean Government serta Transformasi Pelayanan Publik	Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Penguatan Local Taxing Power dan Peningkatan Kualitas Belanja Daerah	
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Bangkalan	Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan
ISU STRATEGIS REGIONAL	
Percepatan Pembangunan Jawa Timur, tidak terkecuali di Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tertuang dalam Perpres 80 Tahun 2019	Tujuan 2, 3, 4

Isu Strategis	Rumusan Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026
Persaingan wilayah perbatasan (khususnya dengan Surabaya) agar terjadi *trickle-down* atau *spread effect* dan bukannya *backwash effect*	Tujuan 1, 2, 3, 4
Pengembangan program kewilayahan berbasis kluster serta Kawasan strategis untuk percepatan pembangunan Jawa Timur	
ISU STRATEGIS NASIONAL	
Tujuh Agenda Nasional (dalam RPJMN 2020-2024)	Semua tujuan
Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom serta Hubungan Keuangan antara keduanya	Tujuan 4
ISU STRATEGIS INTERNASIONAL	
Ratifikasi SDGs (17 tujuan pembangunan berkelanjutan)	Semua tujuan
Perdagangan bebas Asean, Asia, Dunia	Tujuan 3
Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Revolusi Industri 4.0	Tujuan 4, Tujuan 1
Resesi Ekonomi Dunia	Tujuan 3, Tujuan 4

Tabel 5.2 memperlihatkan bahwa empat tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 juga diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis pembangunan actual, baik yang diidentifikasi di Kabipaten Bangkalan, Provinsi (Regional), Nasional maupun Internasional. Tujuan pembangunan yang dirumuskan telah komprehensif, selaras/sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka panjang maupun isu stratgeis pembangunan aktual Kabupaten Bangkalan.

Uraian masing-masing tujuan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia**

   Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin meningkatkan dan memantapkan penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Tujuan ini pun menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, yaitu peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui penyediaan layanan dasar masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, dalam pembangunan. Ukuran keberhasilan (Indikator) tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Kesalehan Sosial yang semakin membaik antar waktu.

Sasaran atau kondisi yang diharapkan saat tujuan ini tercapai adalah:

1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup yang semakin tinggi

1.2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan yang diukur melalui Indeks Pendidikan yang semakin tinggi

1.3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang semakin meningkat

1.4. Meningkatkan kualitas Pembangunan Pemuda dan Prestasi Olahraga dengan Indeks Pembangunan Pemudayang meningkat setiap tahun

1.5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk yang diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang semakin membaik serta laju pertumbuhan yang terkendali.

1.6. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pencegahan dan penanganan konflik SARA / Politik/ bela negara dan upaya untuk menurunkan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum serra pelanggaran Perda/Perkada.

2. Tujuan 2: Menurunkan angka kemiskinan

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin terus meningkatkan dan memantapkan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan, social dan pembangunan masyarakat dan desa. Tujuan ini pun menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, yaitu peningkatan kesejateraam masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan. Ukuran keberhasilan (Indikator) tujuan ini adalah tingkat

pengangguran terbuka maupun persentase (tingkat) kemiskinan yang semakin menurun antar waktu, serta nilai indeks desa membangun yang semakin meningkat.

Sasaran atau kondisi yang diharapkan saat tujuan ini tercapai adalah:

2.1. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosisal (PPKS) yang terentaskan yang diukur melalui Persentase PPKS yang terentaskan yang semakin meningkat.

2.2. Meningkatnya Status Kemandirian Desa dengan ukuran Persentase Desa yang Meningkat Statusnya yang semakin tinggi

2.3. Menurunnya pengangguran yang ditandai dengan perubahan jumlah pengangguran (%).

3. Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan.

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin memantapkan pembangunan sektor-sektor ekonomi potensial lokal Kabupaten Bangkalan yang mencakup pertanian (dalam arti luas), perdagangan, industri, pariwisata dan usaha mikro-koperasi yang didukung oleh investasi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang semakin meningkat kualitasnya. Tujuan ini diharapkan dapat menjawa isu strategis peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian wilayah. Indikator kinerja tujuan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung meningkat dan stabil, gini rasio yang semakin menurun, dan rata-rata kualitas infrastruktur yang terus meningkat, serta indeks resiko bencana yang semakin menurun.

Sasaran-sasaran pembangunan dari tujuan ini adalah:

3.1. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dalam arti luas yang terukur dari semakin meningkatnya nilai indikator Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan,

Hortikultura, dan Perkebunan), peternakan (besar, sedang, dan ungags), dan perikanan

3.2. Meningkatnya realisasi investasi daerah dengan indikator pertumbuhan reallisasi investasi daerah yang semakin meningkat dan stabil.

3.3. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan yang diukur melalui indikator pertumbuhan Pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan

3.4. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan yang diukur melalui pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan yang cenderung meningkat dan stabil.

3.5. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata yang diukur melalui pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat dan stabil

3.6. Meningkatnya produktifitas usaha ekonomi rakyat yang ditandai dengan indikator pertumbuhan omset usaha mikro dan koperasi yang cenderung meningkat dan stabil

3.7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator kinerja skor pola pangan harapan yang juga meningkat

3.8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman yang diukur melalui tiga indikator, yaitu Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik, Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik, dan Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik. Sasaran dikatakan berhasil jika nilai ketiga indikator tersebut semakin meningkat di setiap tahunnya.

3.9. Terjaganya kualitas lingkungan yang juga diukur melalui indikator, yaitu indeks kualitas lingkungan hidup yang meningkat setiap tahunnya.

3.10. Optimalnya penanganan bencana yang diukur Persentase Penangangan Bencana yang optimal, mendekati atau sama dengan 100%

4. Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan pembangunan yang ingin memantapkan upaya-upaya penciptaan reformasi birokasi di Kabupaten Bangkalan, mencakup akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, profesionalitas aparatur sipili negara, maupun pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tujuan ini diarahkan untuk juga meningkatkan dan memantapkan upaya penciptaan ketentramana, ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat. Tujuan ini pun diharapkan mampu menjawab isu strategis peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan atas tuntutan *clean and good governance* serta peningkatan pelayaan publik. Ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang semakin lama semakin meningkat.

Sementara itu, sasaran atau kondisi yang terjadi saat tujuan tercapai adalah:

4.1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik yang prima. Terdapat Sembilan (9) indikator kinerja sasaran ini, yaitu Nilai SAKIP, Status Kinerja LPPD, Opini BPK terhadap LKPD, level maturitas SPIP, indeks inovasi daerah, Rata-rata Konsistensi Program Perencanaan dengan Penganggaran Daerah, Kualitas Pengelolaan Arsip, Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai indicator yang diharapkan adalah meningkat di setiap tahunnya.

4.2. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang diukur melalui indeks profesionalitas aparatur yang tinggi

4.3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi yang diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang juga meningkat

4.4. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah yang diukur melalui pertumbuhan penghasilan asli daerah (PAD) yang semakin meningkat dan stabil.

Indikator tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Tahun 2024-2026. Capaian IKU akan menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangkalan selama periode tersebuut. Sementara itu, indikator sasaran pembangunan daerah akan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tanggung jawab pencapaiannya dibagi kepada pimpinan perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pembagian atau cascading tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, indikator kinerja dan target capaiannya, beserta perangkat daerah penanggung jawabnya dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 dan Targetnya

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah Pendukung
								P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
				2019	2020	2021	2022	*2023*	2024	2025	2026	
(1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	**(1) Indeks Pembangunan Manusia**			**63,79**	**64,11**	**64,36**	**65,05**	***65,7***	**65,8 - 66,2**	**66,1 - 66,7**	**66,5 - 67,2**	
		(1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	(1) Angka Harapan Hidup	71,34 tahun	70,18 tahun	70,22 tahun	70,54 tahun	*71,89 tahun*	71,00 tahun	71,33 tahun	71,50 tahun	Dinas Kesehatan
		(2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan	(1) Indeks Pendidikan;	0,51	0,52	0,52	0,54***	*0,54*	0,55	0,56	0,57	Dinas Pendidikan
		(3) Meningkatnya budaya literasi masyarakat	(1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	6,03	5,8	6,4	*6,1*	6,8	7	7,4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		(4) Meningkatkan kualitas Pembangunan Pemuda dan Prestasi Olahraga	(1) Indeks Pembangunan Pemuda	NA	NA	NA	NA	*NA*	44,64	47,65	50,60	Dinas Pemuda dan Olahraga
	(2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)			**86,93**	**86,88**	**86,95**	**87,35**	***87,15***	**87,16 - 88,15**	**88,16 - 88,55**	**88,56 - 88,95**	
		(1) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk	(1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,71	58,54	60,03	62,75	*65,8*	65	68	70	Dinas KBPPPA
			(2) Laju pertumbuhan penduduk	0,91	1,54	1,2	1,1	*1*	0,9	0,8	0,7	Dinas KBPPPA
	(3) Indeks Kesalehan Sosial (IKS)			**63,8**	**69,35**	**69,69**	**80,47**	***70,4***	**82,00-84,99**	**85,00 - 86,99**	**87,00 - 87,99**	
		(5) Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat	(1) Persentase penurunan pelanggaran Trantibum dan Perda /Perkada	NA	NA	NA	2.17%	*NA*	2.22%	2.27%	2.32%	Satpol PP
			(2) Rata-rata Persentase Pencegahan dan Penanganan	100%	100%	100%	100%	*100%*	100%	100%	100%	Satpol PP

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah Pendukung
								P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
				2019	2020	2021	2022	*2023*	2024	2025	2026	
			Konflik SARA/politik/bela Negara									
(2) Menurunkan angka kemiskinan	**(1) Tingkat kemiskinan**			**18,90%**	**20,56%**	**21,57%**	**19,44%**	***17,59%***	**17,94 - 17,60%**	**17,59 - 16,74%**	**16,73 - 15,24%**	
		(1) Meningkatnya PPKS yang tertangani	(1) Persentase PPKS yang ditangani	NA	NA	1,26%	6,22%	*4,75%*	6,22%	7,69%	9,16%	Dinas Sosial
	(2) Indeks Desa Membangun			**0,6421**	**0,6545**	**0,662**	**0,688**	***NA***	**0,7104 - 0,7254**	**0,7179 - 0,7329**	**0,7254 - 0,7404**	
		(2) Meningkatnya Status Kemandirian Desa	(1) Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	5,13	6,96	9,89	20,15	*21,98*	24,18	26,37	29,3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	(3) Tingkat pengangguran Terbuka			**5,84%**	**8,77%**	**8,07%**	**8,05%**	***6,70%***	**6,50 % - 5,90%**	**5,85% - 5,70%**	**5,65% - 5,60**	
		(1) Menurunnya pengangguran	(1) Persentase Penurunan Jumlah Pengangguran	-2,96%	- 39,02%	2,48%	2,98%	*3,48%*	3,98%	4,48%	4,98%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan	**(1) Pertumbuhan ekonomi**			**1,03%**	**-5,59%**	**-2,07%**	**-1,12%**	***4,63%***	**2,25% - 3,95%**	**3,1% - 4,8%**	**3,95% - 5,65%**	
		(1) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dalam arti luas	(1) Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	NA	NA	NA	0,40	*NA*	0,40	0,52	0,6	Dinas Pertanian TPHP
			(2) Peningkatan Produktifitas Sektor Peternakan (Besar, Kecil, dan Unggas)	NA	1,51	1,22	0,93	*NA*	1,00%	1,02%	1,03%	Dinas Peternakan
			(3) Peningkatan Produktifitas Sektor Perikanan	4,7	5,83	NA	5,21	*5,94*	5,10	5,11	5,12	Dinas Perikanan

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah Pendukung
								P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
				2019	2020	2021	2022	*2023*	2024	2025	2026	
		(2) Meningkatnya realisasi investasi daerah	(1) Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	318%	-74,64%	17,18%	#######	*4,41%*	5,00%	5,50%	6,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		(3) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	(1) Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	1,78	-13,74	12,31	1,00	*1,02*	1,03	1,04	1,06	Dinas Perdagangan
		(4) Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	(1) Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	3,64	-9,69	2,66	9,86	*NA*	1,65	1,8	2,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		(5) Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata	(1) Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	3,85	-88,33	-16,18	1267,1	*13,88*	14,92	15,35	16,68	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	(2) Gini Rasio			**0,31**	**0,322**	**0,303**	**0,306**	***0,29***	**0,29 - 0,28**	**0,28 - 0,27**	**0,27 - 0,26**	
		(1) Meningkatnya produktifitas usaha ekonomi rakyat	(1) Pertumbuhan omset Usaha Mikro dan Koperasi	1,43	0,02	-24,67	4.63	*0,07*	0,1	0,03	0,16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		(2) Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	71,12	74,21	74,04	70,59	*74,25*	75	79	83	Dinas Ketahanan Pangan
	(3) Rata-rata kualitas infrastruktur			**54,21%**	**54,28%**	**58,53%**	**59,18%**	**61,20%**	**62,42% - 63,43%**	**63,50% - 64,75%**	**64,80% - 65,75%**	
		(1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman	(1) Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik	62,26%	61,42%	62,80%	63,35%	63,75%	64,00%	64.25%	64,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			(2) Persentase infrastruktur dasar perumahan dan	32,37%	35,73%	36,04%	36,18%	39,84%	39,84%	41,49%	43,34%	Dinas Perumahan Rakyat dan

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah Pendukung
								P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
				2019	2020	2021	2022	*2023*	2024	2025	2026	
			permukiman dalam kondisi baik									Kawasan Permukiman
			(3) Persentase Infrastruktur Perhubungan yang berfungsi dengan baik	68,00%	60,00%	77,00%	78,00%	80,00%	83.43%	86.53%	88,07%	Dinas Perhubungan
		(2) Terjaganya Kualitas Lingkungan	(4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,58	58,29	55,36	56,84	*55,44*	56,90 - 56,92	56,93 - 56,95	56,96 - 57,00	Dinas Lingkungan Hidup
	(5) Indeks Resiko Bencana			**129,50**	**118,71**	**121,00**	**102,00**	**101,9 - 100**	**99,9 - 98,00**	**97,9 - 96,00**	**95,9 - 94,00**	
		(1) Optimalnya penanganan bencana	(1) Indeks Ketahanan Daerah	0,40	0,51	0,56	0,58**	*NA*	0,59 - 0,60	0,61- 0,62	0,63 - 0,64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**(1) Indeks Reformasi Birokrasi**			**54,38**	**55,28**	**56,51**	**53,74**	***55,85***	**57,01 - 58,00**	**58,30 - 59,00**	**59,20 - 61,00**	
		(1) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik	(1) Nilai SAKIP	(B) 61,25	(B) 61,96	(B) 61,18	(B) 63,01	*(BB) 70.23*	(BB) 70.23	(BB) 71.23	(BB) 72.25	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi), Inspektorat, dan Bappeda
			(2) Status Kinerja LPPD;	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)*	Sangat Tinggi (ST)*	Sangat Tinggi (ST)*	*Sangat Tinggi (ST)*	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sekretariat Daerah (Bag. Adpum & Otoda), Inspektorat, dan Semua PD
			(3) Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	*WTP*	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat
			(4) Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	*Level 3*	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
			(5) Indeks Kualitas Perencanaan	NA	NA	NA	83,36%	*NA*	85%	87%	89%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah Pendukung
								P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
				2019	2020	2021	2022	*2023*	2024	2025	2026	
			(6) Indeks Inovasi Daerah	NA	NA	57,46	52,68	*53,00*	54,00	55,00	56,00	Badan Penelitian dan Pengembangan
			(7) Kualitas Pengelolaan Arsip	0%	0%	25%	30%	*40%*	50%	55%	60%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			(8) Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	68,00%	63,30%	60,10%	88,60%	*90,00%*	91,50%	92,00%	92,50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			(9) Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80,75	83,92	80,95	82,78	*84,32*	84,45	84,55	84,65	Sekretariat Daerah (Koordinator) dan Semua Perangkat Daerah
		(2) Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangkalan	(1) Indeks Profesionalitas ASN	54,52	51,03	52,85	55,03	*60*	62	64	66	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur
		(3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	(1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,3	2,6	1,62	1,89	*2,00 - 2,20*	2,20 - 2,35	2,35 - 2,55	2,55 - 2,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
		(4) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	(1) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,2%	10,9%	11,9%	12,7%	*13,3%*	14,4%	15,5%	16,7%	Badan Pendapatan Daerah

** data capaian dari BPBD Provinsi belum release dari pusat

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program prioritas Kabupaten Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program ini selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam perencanaan pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memegang prinsip dan komitmen untuk mewujudkan tujuannya.

Penyusunan strategi berpijak pada bagaimana agar Tujuan-Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 dapat tercapai secara optimal, efektif, dan efisien. Tujuan yang menjadi dasar dalam penyusunan startegi antara lain:

(1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
(2) Menurunkan angka kemiskinan
(3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan, dan
(4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berdasarkan tujuan tersebut, Maka di susun strategi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi
1	**Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia**		
	Indikator Tujuan 1: Indeks Pembangunan Manusia	Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana prasarana, dan system layanan kesehatan kepada masyarakat.
			2) Meningkatkan keberlanjutan dan pelayanan *Universal Health Coverage* (UHC)
			3) Percepatan pencegahan dan penanganan anak kerdil (*stunting*) melalui pendampingan dan pendidikan kesejahteraan keluarga, fasilitasi peningkatan gizi serta perbaikan sanitasi.
			4) Aktivasi peran kader PKK dan Dasawisma sebagai ujung tombak/ garda terdepan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
			5) Pendampingan dan pelayanan kesehatan pada lembaga pendidikan informal khususnya di madrasah/ pesantren.
			6) Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses, layanan, dan perbaikan sistem peningkatan kesehatan masyarakat.
		Sasaran 2: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan	1) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP.
			2) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan baik fisik, sistem, serta teknologi.
			3) Pengembangan pendidikan formal pada lembaga lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dalam bentuk *boarding school* atau program kejar paket.

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi
			4) Meningkatkan ketepatan sasaran penerima/ pemanfaat Program Indonesia Pintar (PIP), serta penerima manfaat beasiswa.
			5) Mengembangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kapasitas pendidikan misalkan dalam bentuk Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
		Sasaran 3 Meningkatnya budaya literasi masyarakat	1) Memaksimalkan fungsi perpustakaan sekolah melalui stimulasi kegiatan perlombaan literasi perpustakaan.
			2) Mengaktivasi peran komunitas dan pegiat literasi dalam mengembangkan inisiasi dan inovasi dibidang literasi.
			3) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi/ digital untuk penyediaan layanan perpustakaan/ literasi.
		Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1) Meningkatkan even produktif dan kreatif sebagai media aktualisasi prestasi, kemampuan, minat dan bakat pemuda.
			2) Meningkatkan fasilitasi pemuda untuk mengikuti even atau kompetisi di level regional, nasional, maupun internasional.
			3) Meningkatkan fasilitasi pemuda untuk bergerak dibidang wirausaha dan enterpreneur dan start up.
	Indikator Tujuan 2: Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Sasaran 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan perempuan, anak dan pengendalian penduduk	1) Meningkatkan kampanye, edukasi, dan fasilitasi pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).
			2) Pengembangan program pemberdayaan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan untuk penguatan kapasitas, peningkatan akses ekonomi dan kesejahteraan.

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi
			3) Pengembangan program wirausaha berbasis perempuan.
			4) Peningkatan fasilitasi peran perempuan dan atau organisasi perempuan di sektor publik
			5) Peningkatan program preventif dan mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2	**Tujuan 2: Menurunkan angka kemiskinan**		
	Indikator Tujuan 1: Tingkat Kemiskinan	Sasaran : menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin, menurunnya indeks kedalaman kemiskinan, menurunnya Indeks keparahan kemiskinan, dan menurunnya Gini ratio	1) Aktivasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran database kemiskinan serta meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran implementasi program/ bantuan/ stimulan dalam rangka penurunan kemiskinan.
			2) Meningkatkan sinkronisasi program penurunan kemiskinan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pemerintah desa.
			3) Meningkatkan efektivitas program penurunan kemiskinan berdasarkan kondisi riil indikator kemiskinan dengan dukungan pendampingan.
			4) Peningkatan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan pemutakhiran data yang lengkap dan akurat.
			5) Peningkatan kolaborasi pentahelix antar organisasi perangkat daerah dan atau dengan berbagai elemen seperti *civil society*, swasta, perguruan tinggi dalam menurunkan angka kemiskinan

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi
		Sasaran 2 : Meningkatnya Status Kemandirian Desa	1) Mendorong dan meningkatkan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat di pedesaan.
			2) Meningkatkan infrastruktur jalan, saluran irigasi, air bersih, serta fasilitas umum yang berdampak langsung bagi masyarakat dan status Indeks Desa Membangun (IDM).
			3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat.
	Indikator Tujuan 2 : Tingkat pengangguran Terbuka	Sasaran 1: Menurunnya pengangguran	1) Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja .
			2) Meningkatkan layanan dan akses bursa kerja secara offline maupun online
			3) Meningkatkan jumlah wirausaha kreatif dan atau start up melalui program inkubasi.
			4) Mengembangkan *Bangkalan Creativ Space (BCS)* yang terintegrasi dengan *co working space*, inkubasi, dan ruang pamer / fasilitas pemasaran.
3	**Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan**		
	Indikator Tujuan 1 : Pertumbuhan ekonomi	Sasaran 1: Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dalam arti luas	1) Peningkatan produktivitas dan Daya Saing usaha komoditas strategis Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan kehutanan.
			2) Meningkatkan infrastruktur pendukung pertanian
			3) Meningkatkan penumbuhan wirausaha muda pertanian.

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi
			4) Peningkatan nilai tambah pertanian melalui agroindustri dan agrobisnis.
			5) Pengembangan pertanian berbasis kawasan agropolitan dan minapolitan.
		Sasaran 2: Meningkatnya realisasi investasi daerah	1) Peningkatan pelayanan pada bidang investasi dan perizinan secara mudah, transparan, dan akuntabel.
			2) Meningkatkan promosi potensi investasi daerah.
		Sasaran 3: Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	1) Meningkatkan kawasan infrastruktur pusat perdagangan.
			2) Mengembangkan promosi dan ekosistem perdagangan melalui misi dagang daerah.
		Sasaran 4: Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	1) Penguatan Daya Saing dan Peningkatan produktivitas industri pengolahan agro dan non agro
			2) Meningkatkan fasilitasi teknologi dan mesin peralatan industri pengolahan
		Sasaran 5: Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata	1) Mengembangkan potensi Kawasan religi serta seni dan budaya sebagai obyek daya tarik wisata (ODTW)
			2) Meningkatkan interkoneksi antar kawasan dan lokasi wisata
			3) Mengembangkan jejaring pelaku dan pengelola wisata dilingkup kabupaten, swasta, lembaga, serta pemerintah desa/ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi
			4) Peningkatan layanan promosi dan informasi pariwisata.
			5) Mengintegrasikan sumberdaya wisata dengan potensi ekonomi kreatif.
	Indikator tujuan 2 Gini Rasio	Sasaran 1: Meningkatnya produktifitas usaha ekonomi rakyat	1) Menumbuh kembangkan kewirausahaan koperasi
			2) Menumbuh kembangkan kewirausahaan Usaha Mikro.
			3) Memfasilitasi layanan inkubasi bisnis, co working space, dan start up
		Sasaran 2: Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1) Pengembangan sumber pangan alternatif berbasis potensi lokal
			2) Mengembangkan sistem rumah pangan lestari dan pemanfaatan pekarangan sebagai penyangga kebutuhan pangan keluarga.
	Indikator tujuan 3: Rata-rata kualitas infrastruktur	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman	1) Mengembangkan tata kota yang cerdas, inspiratif, nyaman, aman dan berkeadila
			2) Mengembangkan infrastruktur berbasis kawasan
			3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan
			4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana daerah aliran sungai (DAS) dan jaringan drainase
			5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi
			6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infratruktur perumahan dan Permukiman

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi
			7) Meningkatkan Sistem Penyediaan Air Bersih Dan Air Minum (SPAM)
	Indikator Tujuan 4: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sasaran 1: Terjaganya kualitas lingkungan	1) Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
			2) Mengembangkan program pengelolaan persampahan
			3) Meningkatkan kualitas sumberdaya lingkungan melalui pelayanan tata lingkungan dan pengelolaan sumber- sumber polusi lingkungan
	indikator Tujuan 5 : Indeks Resiko Bencana	Sasaran 1: Optimalnya penanganan bencana	1) Meningkatkan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana.
			2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya preventif dan mitigasi terhadap bencana
			3) Meningkatkan kapasitas dan kesiapan Tagana dalam upaya preventif dan mitigasi bencana
4	**Tujuan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**		
	1ndikator Tujuan 1: Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 1: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik	1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
			2) Meningkatkan layanan masukan (input), umpan balik, dan keterbukaan informasi publik
			3) Meningkatkan pengelolaan dan administrasi asset daerah

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi
		Sasaran 2: Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangkalan	1) Mengembangkan dan mengimplementasikan *road map* reformasi birokrasi dan pelayanan publik
			2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas upaya peningkatan kompetensi sumber daya ASN dalam menjalankan tugasnya
		Sasaran 3: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	1) Mempercepat pemanfaatan ICT dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan (e-gov)
		Sasaran 4: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	1) Meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, pajak daerah, dan retribusi daerah.
			2) Meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi Kinerja Usaha BUMD untuk mendorong peran dalam pengembangan perekonomian daerah dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.
		Sasaran 5: Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat	1) Optimalisasi Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat.
			2) Penguatan nilai religi, seni dan budaya lokal sebagai spirit penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan modal sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan 2024 -2026 dirumuskan untuk menentukan tahapan pembangunan selama tiga tahun guna mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan.

6.2.1. Kebijakan dalam RPJMN 2020-2024

Amanah pembangunan nasional tahun 2020-2024 untuk Kabupaten Bangkalan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Lampiran terkait Arah Pembangunan Wilayah tersebut menjabarkan Target Pembangunan, Prioritas Pembangunan, dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada masing-masing wilayah secara umum untuk wilayah Jawa Timur. Secara eksplisit dijabarkan Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang mencakup 3 (tiga) kegiatan prioritas beserta proyek prioritas nasional yang berada di Jawa Timur (khususnya di Kabupaten Bangkalan) sebagaimana table 4.3. berikut ini.

Tabel 6.2. Matrik Pembangunan Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur Dalam RPJMN 2020-2024

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
Peningkatan Kualitas Wilayah **Metropolitan Surabaya** **(Gerbangkertosusila)**				Kab. Gresik, **Kab. Bangkalan**, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	7	70		Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		331,70	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		2.363,85	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Lamongan, Kota Surabaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PERDESAAN, DAN TRANSMIGRASI	**1. Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri** **2. Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)** **3. Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)** **4. Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi**		**197 desa berkembang; 2893 desa mandiri** **12,06%**			
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	68,53	1.188,78	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo,	1. **Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** 2. **Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT** **2. Kementerian Dalam Negeri**

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
				Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	281	156,28	**Bangkalan,** Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi	1	0,51	**Bangkalan**, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber	Jumlah provinsi yang mengembangkan		0,27	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik,	Pembangunan dan Permberdayaan	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat			Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Masyarakat Desa	
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo,	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
				Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	281	290,77	**Bangkalan**, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	2.533	707,39	**Bangkalan**, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi	Jumlah kab/kota yang desanya tertib	3	0,56	**Bangkalan**, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik,	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
Pengelolaan Aset Desa	administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)			Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	**Bangkalan**, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		1,28	**Bangkalan,** Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep,	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
				Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	12	1,81	Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kediri	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	240,076	315,60	Jawa Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,60				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	77,43				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	129				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	129				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	11,658				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	129				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	12				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah**	**3.495**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Timur	**termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**					
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	**Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik**	**5**	**0,56**	**Pusat (alokasi Kementerian)**	**Program Bina Administrasi Kewilayahan**	**Kementerian Dalam Negeri**
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		62,67	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		23,54	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah			Pusat (alokasi Kementerian)		

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
	Administrasi					
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	**100**	**0,32**	Pusat (alokasi Kementerian)	**Program Bina Otonomi Daerah**	**Kementerian Dalam Negeri**
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka	39	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
	memberikan kemudahan investasi					
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan **daerah dan pusat dalam satu lokasi yang** **dekat dengan pusat kegiatan ekonomi** **masyarakat dalam bentuk mall** **pelayanan publik.**	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	39	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
	daerah					
Program optimalisasi SIPD: e-database, e- planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan	2	5,52			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
	Perjanjian Kerja Sama					
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
	minum, serta sampah dan limbah)					
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
	pelaksanaannya (%)					
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	**2,18**			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	39	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	39	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	39	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	39	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada	39	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
diwujudkan dengan pemenuhan SPM	pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM					
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	39	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Pusat (alokasi Kementerian)	
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	92	1,21			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek- Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	39	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,60	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah	39	0,97			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
	yang penerimaan daerahnya meningkat					
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	38	0,55	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	39	1,54	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau	39	0,45	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
	KPBU)					
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	39	0,45			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	39	0,45	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	39	0,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**39**	**0,45**			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	39	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
	proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar- kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	13,58	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran						
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan	Jumlah aparatur yang	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan	Kementerian Dalam

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)				Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan				**Pusat (alokasi Kementerian)**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri**	**Kementerian Dalam Negeri**
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	240,076	315,60	Jawa Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	521,86	4,30	Jawa Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	40	32,10	Jawa Timur	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR		2,00	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	9	3,25	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp.Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	9	8,36	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,74	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2020-2024

Arah kebijakan pembangunan 2024-2026 merupakan bagian integral dari Visi yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu "Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, Dan Jasa Yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani." Disamping itu arah kebijakan pembangunan juga menjadi rangkaian tidak terpisahkan dari arah pembangunan sebelumnya yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Bangkalan 2019-2023. Penentuan arah kebijakan pembangunan memperhatikan hasil analisis kondisi permasalahan dan isu strategis, penetapan tujuan sasaran RPD, serta strategi umum dan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran.

6.2.2. Kebijakan dalam RPJPD Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 adalah *"**Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, Dan Jasa Yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani**."* Visi tersebut diwujudkan dengan 4 (empat) misi yaitu: Misi 1, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; Misi 2, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; Misi 3, Membangun Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah; dan Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Prioritas pembangunan RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 pada periode 2021-2025 (tahap V) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada tersedianya kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kesalehan individu dan kesalehan sosial, berpendidikan serta berpola hidup sehat disertai kemampuan yang memadai sebagai pelaku pembangunan. Pada tahap ini struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Struktur perekonomian telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang

makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi ini diharapkan dapat semakin mendorong terwujudnya kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh. Ketersediaan infrastruktur juga mendukung perpres 80 tahun 2019 yaitu penyusunan dokumen perencanaan terkait study trase jalan lintas selatan, sarana prasarana yang mendukung IISP (Indonesia Islamic Science Park)

Pada tahap ini, pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan SDM dalam fasilitasi masyarakat sebagai agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum. Dalam bidang kelembagaan politik dan hukum telah kondusif yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam pelbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi global. Pembangunan pada periode tersebut kemudian tertuang dalam arah kebijakan seperti tabel berikut:

Tabel 6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Menurut RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2025

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	a) Pembangunan Kehidupan Beragama	1. Peningkatan pemahaman ajaran agama melalui

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
(SDM)		pendidikan agama dan dakwah keagamaan; 2. Pemantapan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan sesama umat beragama maupun antar umat bergama; 3. Pelestarian pelayanan keagamaan baik fisik maupun non fisik serta partisipasi umat beragama dalam pembangunan daerah; 4. Peningkatan pengamalan ajaran agama secara utuh sehingga terwujud kesalehan individu dan kesalehan sosial.
	b) Pembangunan Pendidikan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; 2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, terutama kelompok masyarakat miskin dan pedesaan; 3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan-pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik teknis maupun non teknis agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya; 5. Peningkatan peran serta masyarakat, orang tua, dan

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
		swasta dalam pembangunan pendidikan.
	c) Pembangunan Kesehatan	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; 3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan; 4. Peningkatan pelayanan prima kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas; 5. Peningkatan pembiayaan kesehatan masyarakat; 6. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan. 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan; 8. Pemantapan pola hidup sehat masyarakat.
	d) Pembangunan Kependudukan	1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 2. Peningkatan tertib administrasi kependudukan; 3. Peningkatan pembinaan calon transmigran; 4. Pengembangan kualitas penduduk.
	Pembangunan Ketenagakerjaan	

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
		1. Peningkatan keterampilan pencari kerja; 2. Perluasan lapangan kerja, baik sektor formal maupun sektor informal; 3. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis; 5. Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha; 6. Peningkatan sarana dan prasarana ketenaga kerjaan. 7. Pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan; 8. Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja; 9. Penanganan pengangguran melalui padat karya.
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; 2. Peningkatan peran serta perempuan di berbagai bidang pembangunan daerah; 3. Pencegahan *trafficking* dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 4. Pemantapan kelembagaan gender, Peningkatan kualitas hidup dan Pemberdayaan ekonomi perempuan.

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
	Pembangunan Kebudayaan	1. Pelestarian budaya lokal dan tradisional; 2. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat khususnya generasi muda; 3. Pemberdayaan dan pengembangan budaya lokal dan tradisional; 4. Pengembangan budaya yang menumbuhkan kreatifitas mayarakat; 5. Pengembangan publikasi, sosialisasi apresiasi seni budaya.
	Pembangunan Pemuda dan Olah Raga	1. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; 3. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda; 4. Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan; 5. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga; 6. Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	1. Peningkatan Usaha yang kondusif; 2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM yang berbasis IPTEK;

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
		3. Pengembangan kerjasama ekonomi yang sinergis dan saling memperkuat antar wilayah Bangkalan dengan wilayah lain; 4. Pemantapan wirausaha; 5. Pengembangan dan penguatan UKM untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
	Penguatan Struktur Industri, Perdagangan dan Jasa	1. Pemantapan pelayanan perijinan terpadu berbasis teknologi informasi; 2. Pemantapan struktur industri berbasis industri kecil dan menengah; 3. Pemantapan sistem informasi pasar; 4. Pemantapan promosi dan investasi daerah; 5. Pemantapan kemitraan usaha ekonomi lokal dengan regional;
	Pengembangan Sumber Daya Pertanian (dalam arti luas)	1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian; 2. Peningkatan kapasitas penyuluh dan lembaga pendukungnya; 3. Peningkatan produktivitas bahan pangan; 4. Peningkatan aksesibilitas pertanian; 5. Peningkatan diversifikasi usaha dalam mendukung produksi pangan.
	Pengelolaan Kawasan Pertambangan	1. Penyusunan regulasi pertambangan;

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
		2. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan; 3. Peningkatan pembinaan usaha tambang; 4. Pemeliharaan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.
	Pengembangan Pariwisata	1. Peningkatan potensi pariwisata; 2. Peningkatan sumber daya manusia; 3. Peningkatan obyek wisata; 4. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan; 5. Peningkatan promosi pariwisata; 6. Peningkatan kemitraan dunia usaha kepariwisataan.
	Penanggulangan Kemiskinan	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat; 2. Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin; 3. Pemantapan ketrampilan kelembagaan masyarakat miskin dalam kemampuan berusaha; 4. Pemantapan Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.
	Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1. Pemantapan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan dasar; 2. Pemantapan keberdayaan sosial berbasis masyarakat;

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
		3. Pemantapan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial; 4. Pemantapan pembiayaan Jamsosda dan perlindungan sosial.
Mewujudkan Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan	1. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan; 2. Pemeliharaan, peningkatan dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi; 3. Peningkatan jalan desa dan lingkungan; 4. Pemantapan sistem transportasi yang terintegrasi antar dan intermodal.
	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi	1. Pemantapan Konservasi Sumber daya air untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air; 2. Pemantapan Pemanfaatan sumber daya alam buatan; 3. Pemantapan Pemahaman masyarakat terhadap kelestarian lingkungan; 4. Penguatan sarana dan prasarana sumber daya air; 5. Pemanfaatan teknologi guna mencari sumber energi untuk pemenuhan industri.
	Perumahan dan Permukiman	1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan serta mendukung pengembangan perekonomian wilayah;

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
		2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan persampahan; 3. Pengembangan lingkungan permukiman sehat; 4. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara; 5. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Permukiman.
	Pengembangan Wilayah	1. Pengembangan kawasan strategis, agropolitan dan kawasan tertinggal; 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis 3. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 4. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat.
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis; 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang; 3. Pengendalian pemanfaatan ruang.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	1. Optimalisasi Standart Pelayanan Minimal (SPM); 2. Peningkatan kualitas teknologi informasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan tepat; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
		4. Peningkatan kinerja dan pengawasan birokrasi berbasis kompetensi.
	Pembangunan Hukum	1. Penataan produk hukum sesuai hierarkhi per undang-undangan dan kearifan lokal; 2. Pemantapan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum; 3. Peningkatan budaya masyarakat yang sadar hukum; 4. Penegakan supremasi hukum.
	Pembangunan keamanan dan ketertiban	1. Pemantapan kelembagaan dan profesionalisme satuan Polisi Pamong Praja; 2. Pengembangan kerjasama dengan kepolisian; 3. Pengamanan aset-aset Pemerintah Daerah; 4. Pemantapan sistem keamanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; 5. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
	Pembangunan Politik	1. Pemantapan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya; 2. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan politik;

VISI	ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA 2021-2025
		3. Pemantapan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik.
	Pembangunan Komunikasi dan Informasi	1. Pemantapan layanan Informasi multimedia yang berkualitas; 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi; 3. Fasilitasi masyarakat sadar informasi.

Sumber: RPJP Kab. Bangkalan 2005-2025

Berdasarkan pertimbangan tersebut, secara obyektif menunjukkan bahwa pada tahun 2025, visi RPJPD belum dapat tercapai secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain kondisi sumberdaya manusia, tingkat kesejahteraan, kondisi ekonomi, serta infrastruktur yang masih menjadi permasalahan untuk dapat mencapai terwujudnya Kabupaten Industri, perdagangan, dan Jasa Yang Tangguh pada tahun 2025. Kejadian luar biasa yaitu Pandemi Covid 19 mulai tahun 2020 memberikan dampak yang luar biasa, sehingga fokus pembangunan Kabupaten Bangkalan mulai 2020 sampai dengan 2022 memprioritaskan pada upaya penanganan Covid 19 beserta usaha untuk pemulihan (*recovery*) di segala bidang. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 sudah mulai Kembali berorientasi pada capaian RPJPD yaitu Pembangunan Pemantapan Kemandirian Ekonomi berbasis Agribisnis Dan Didukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Sektor jasa. Sehingga dalam penyusunan Arah Kebijakan 2024 - 2026 merupakan upaya keberlanjutan dan peningkatan dengan tetap mengacu pada empat tujuan dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024 -2026.

6.2.3. Kebijakan dalam RPD Kabupaten BangkalanTahun 2024-2026

Arah kebijakan Kabupaten Bangkalan mempertimbangkan keunggulan komparatif yang dimiliki yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi keunggulan kompetititif. Disamping itu juga memperhatikan struktur ruang dan rencana tata ruang wilayah yang akan dikembangkan sebagai acuan pembangunan berdasarkan aspek kewilayahan. Beberapa keunggulan komparatif yang dimiliki antara lain ruang wilayah strategis yang dimiliki seperti pintu gerbang utama masuk madura, pelabuhan, daerah pesisir, dan area suramadu yang berpotensi berkembang menjadi kawasan perdagangan, industri, jasa, hunian penyangga Kota Surabaya, dan wisata. Disamping itu potensi sumberdaya alam yang dimilki seperti potensi migas dan geografis wilayah yang masih luas berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan pertanian dengan dukungan infrastruktur yang baik seperti embung dan irigasi.

Memperhatikan berbagai aspek dan pemikiran di atas maka tema Arah dan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan 2024 – 2026 sebagai berikut.

Gambar 6.1
Arah Kebijakan Umum Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan 2024 – 2026

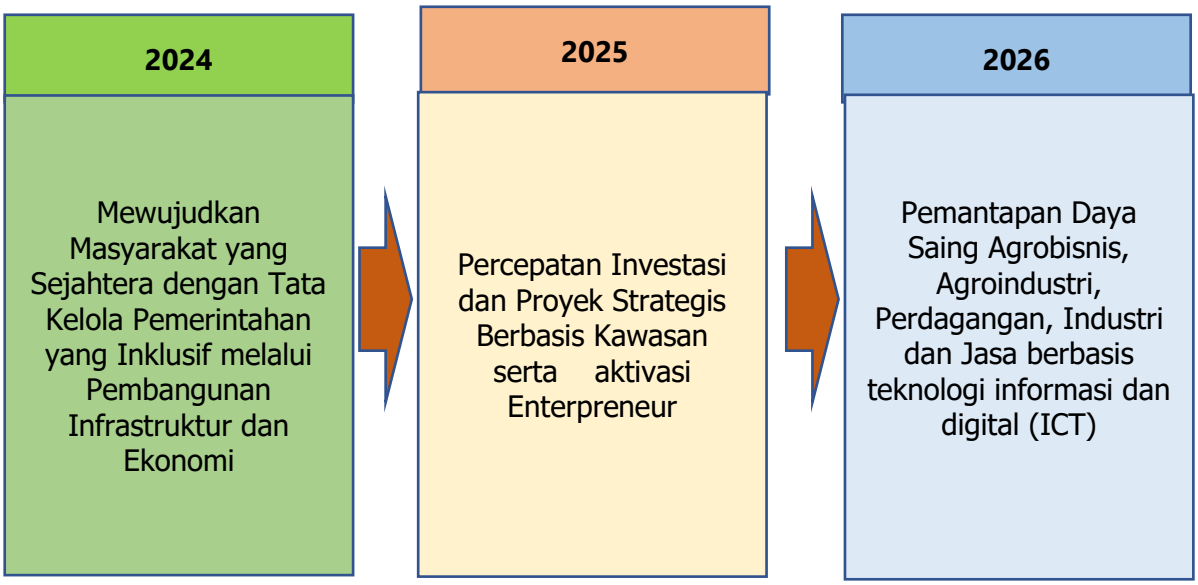

1. Arah Kebijakan Tahun 2024

Arah Kebijakan tahun 2024 adalah Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif melalui Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi. Arah kebijakan pembangunan ini memberikan titik tekan pada pemerintahan yang inklusif dalam arti pemerintahan yang mampu meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*" atau pemerintahan menyelenggarakan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat miskin. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi menjadi tema pokok sebagai modal utama dalam melakukan pengembangan pembangunan di sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka penurunan kemiskinan, penguatan modal sosial menjadi bagian dari arah kebijakan untuk di kembangkan dalam setiap program maupun sendi kehidupan masyarakat.

2. Arah kebijakan Tahun 2025

Arah Kebijakan Tahun 2025 adalah Percepatan Investasi dan Proyek Strategis Berbasis Kawasan serta aktivasi Enterpreneur. Arah kebijakan untuk melakukan Percepatan realisasi investasi dan proyek-proyek strategis di Kabupaten Bangkalan terutama proyek-proyek yang masuk dalam Perpres No 80 Tahun 2019 serta berbagai proyek strategis lain. Sebagai kesiapan masyarakat,arah kebijakannya adalah penyiapan sumberdaya manusia secara massif untuk meningkatkan tumbuhkembangnya wirausahaan *(entrepreneur*). Meningkatnya wirausaha disertai dengan keberlanjutan program penurunan kemiskinan akan mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan.

3. Arah kebijakan Tahun 2026

Arah kebijakan tahun 2026 adalah Pemantapan Daya Saing Agrobisnis, Agroindustri, Perdagangan, Industri dan Jasa berbasis teknologi informasi dan digital (ICT). Kesiapan infrastruktur, peningkatan investasi, realisasi proyek strategis, serta kesiapan masyarakat untuk menjadi wirausaha akan memantapkan Kabupaten Bangkalan sebagai Kabupaten yang memiliki daya

saing di Agrobisnis, Agroindustri, Perdagangan, Industri dan Jasa. Peran *Information and Communication Technology* (ICT) sangat mendukung Peningkatan daya saing baik di level regional, nasional, maupun global.

Tema Arah Kebijakan dan arah kebijakan di atas yang merupakan manifestasi dari Tujuan, sasaran dan strategi, sehingga dapat dijadikan sebagai milestone pembangunan Kabupaten Bangkalan 2024-2026 . Milestone yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan arah kebijakan 2024-2026 secara sistematis diselaraskan dengan Tujuan Sasaran dan Strategi 2024-2026 sebagai berikut.

Tabel 6.4 Keselarasan Arah kebijakan 2024 -2026 dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
	Indikator Tujuan		Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
1	**TUJUAN 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia**						
	Indikator Tujuan 1: Indeks Pembangungan Manusia	Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana prasarana, dan system layanan kesehatan kepada masyarakat.	Analisis dan penyiapan Penambahan Rumah Sakit Tipe C dan Fasilitas Kesehatan tingkat 1 dan 2	Penambahan Rumah Sakit Tipe C dan Fasilitas Kesehatan tingkat 1 dan 2 serta penyediaan fasilitas kesehatan berdasarkan analisis kebutuhan	Penambahan Rumah Sakit Tipe C dan Fasilitas Kesehatan tingkat 1 dan 2 serta penyediaan fasilitas dan alat kesehatan prioritas
			2	Meningkatkan keberlanjutan dan pelayanan Universal Health Coverage (UHC)	Peningkatan efektifitas dan keberlanjutan pelayanan UHC	Peningkatan keberlanjutan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan UHC	Keberlanjutan pelayanan UHC prima
			3	Percepatan pencegahan dan penanganan anak stunting melalui pendampingan dan pendidikan kesejahteraan keluarga, fasilitasi peningkatan gizi serta perbaikan sanitasi.	Peningkatan akurasi dan kecepatan deteksi, intervensi dan efektifitas penanganan stunting	Peningkatan program preventif stunting dan penanganan stunting berkelanjutan	Peningkatan program preventif stunting dan penanganan stunting berkelanjutan
			4	Aktivasi peran kader PKK dan Dasawisma sebagai ujung tombak/ garda terdepan pemberdayaan	Pemetaan dan perancangan strategi aktivasi PKK di tingkat	Peningkatan fasilitasi kolaborasi PKK dan Dasawisma sebagai ujung	Peningkatan fasilitasi kolaborasi PKK dan Dasawisma sebagai ujung

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
			Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
				kesejahteraan keluarga.	Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	tombak pengembangan ekonomi dan kesehatan keluarga	tombak pengembangan ekonomi dan kesehatan keluarga
			5	Pendampingan dan pelayanan kesehatan pada lembaga pendidikan informal khususnya di madrasah/ pesantren.	Pemetaan kondisi kesehatan pada lingkungan pendidikan informal	Peningkatan fasilitasi dan SDM Lembaga informal di bidang kesehatan	Peningkatan fasilitasi dan SDM Lembaga informal di bidang kesehatan
			6	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses, layanan, dan perbaikan sistem peningkatan kesehatan masyarakat.	Pengembangan ICT dalam bidang akses dan layanan kesehatan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan ICT dalam bidang akses dan layanan kesehatan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan ICT dalam bidang akses dan layanan kesehatan
		Sasaran 2: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan	1	Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP.	Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kompetensi dan kesejahteraan guru	Pengembangan inovasi program peningkatan kesejahteraan kompetitif berbasis kualitas	Pengembangan inovasi program peningkatan kesejahteraan kompetitif berbasis kualitas
			2	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan baik fisik, sistem, serta teknologi.	Peningkatan sarana dan prasarana dasar pendidikan secara merata	Peningkatan sarana prasarana pendidikan berbasis kreatif dan teknologi	Peningkatan sarana prasarana pendidikan berbasis kreatif dan teknologi
			3	Pengembangan pendidikan formal pada lembaga lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dalam bentuk *boarding school* atau	Pemetaan dan pengembangan model pengembangan pendidikan formal *boarding*	Perluasan pendidikan formal dalam bentuk *boarding*	Perluasan pendidikan formal dalam bentuk *boarding*

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
			Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
				program kejar paket.	*school* dan kejar paket di Lembaga pesantren	*school* atau program kejar paket di Lembaga Pesantren	*school* atau program kejar paket di Lembaga Pesantren
			4	Meningkatkan ketepatan sasaran penerima/ pemanfaat Program Indonesia Pintar (PIP), serta penerima manfaat beasiswa.	Peningkatan kualitas data, ketepatan sasaran, serta kualitas pemanfatan PIP dan beasiswa	Peningkatan keberlanjutan kualitas data, ketepatan sasaran, serta kualitas pemanfatan PIP dan beasiswa	Peningkatan keberlanjutan kualitas data, ketepatan sasaran, serta kualitas pemanfatan PIP dan beasiswa
			5	Mengembangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kapasitas pendidikan misalkan dalam bentuk Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).	Peningkatan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan khususnya dalam pemanfatan ICT, pengembangan prestasi, dan penyelesaian buta aksara	Peningkatan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan khususnya dalam pemanfatan ICT, pengembangan prestasi, dan penyelesaian buta aksara	Peningkatan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan khususnya dalam pemanfatan ICT, pengembangan prestasi, dan penyelesaian buta aksara
		Sasaran 3 Meningkatnya budaya literasi masyarakat	1	Memaksimalkan fungsi perpustakaan sekolah melalui stimulasi kegiatan perlombaan literasi perpustakaan.	Peningkatan program lomba kreatif dan inovatif di bidang literasi dan perpustakaan	Peningkatan program lomba kreatif dan inovatif di bidang literasi dan perpustakaan	Peningkatan program lomba kreatif dan inovatif di bidang literasi dan perpustakaan
			2	Mengaktivasi peran komunitas dan pegiat literasi dalam mengembangkan inisiasi dan inovasi dibidang literasi.	Pengembangan kolaborasi dengan komunitas literasi	Pengembangan fasilitasi kolaborasi komunitas literasi dengan jejaring komunitas literasi lebih luas	Pengembangan fasilitasi kolaborasi komunitas literasi dengan jejaring komunitas literasi lebih luas

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI: Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		ARAH KEBIJAKAN: 2024	2025	2026
			3	Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi/ digital untuk penyediaan layanan perpustakaan/ literasi.	Peningkatan pengembangan ICT di bidang perpustakaan dan literasi	Pengembangan kolaborasi ICT di bidang perpustakaan dengan komunitas budaya, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga penelitian	Pengembangan kolaborasi ICT di bidang perpustakaan dengan komunitas budaya, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga penelitian
		Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Meningkatkan even produktif dan kreatif sebagai media aktualisasi prestasi, kemampuan, minat dan bakat pemuda.	Peningkatan event kreatif dalam pengembangan pemuda	Mengaktivasi jejaring pemuda untuk mengembangkan event kreatif berbasis karakteristik lokal	Mengaktivasi jejaring pemuda untuk mengembangkan event kreatif berbasis karakteristik lokal
			2	Meningkatkan fasilitasi pemuda untuk mengikuti even atau kompetisi di level regional, nasional, maupun internasional.	Peningkatan akses dan fasilitasi pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing pada kegiatan event dan kompetisi	Peningkatan akses dan fasilitasi pemuda pada kegiatan event dan kompetisi	Peningkatan akses dan fasilitasi pemuda pada kegiatan event dan kompetisi
			3	Meningkatkan fasilitasi pemuda untuk bergerak dibidang wirausaha dan enterpreneur dan start up.	Pengembangan pemuda pelopor, penggerak dan aktivis wirausaha	Peningkatan fasilitasi dan jejaring untuk pemuda pelopor, penggerak dan aktivis wirausaha	Peningkatan fasilitasi dan jejaring untuk pemuda pelopor, penggerak dan aktivis wirausaha
	Indikator Tujuan 2:	Sasaran 1: Meningkatnya Kesejahteraan	1	Meningkatkan kampanye, edukasi, dan fasilitasi pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).	Pengembangan program kreatif dan adaptif untuk sosialisasi dan kampanye KB	Pengembangan program kreatif dan adaptif untuk sosialisasi dan kampanye KB	Pengembangan program kreatif dan adaptif untuk sosialisasi dan kampanye KB

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
			Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Masyarakat melalui pemberdayaan perempuan, anak dan pengendalian penduduk	2	Pengembangan program pemberdayaan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan untuk penguatan kapasitas, peningkatan akses ekonomi dan kesejahteraan.	Peningkatan fasilitasi dan pendampingan ekonomi dan kesejahteraan keluarga pada Kepala Rumah Tangga Perempuan	Peningkatan fasilitasi dan pendampingan ekonomi dan kesejahteraan keluarga pada Kepala Rumah Tangga Perempuan	Peningkatan fasilitasi dan pendampingan ekonomi dan kesejahteraan keluarga pada Kepala Rumah Tangga Perempuan
			3	Pengembangan program wirausaha berbasis perempuan.	Peningkatan tumbuh kembang wirausaha berbasis kelompok perempuan	Peningkatan tumbuh kembang wirausaha berbasis kelompok perempuan	Peningkatan tumbuh kembang wirausaha berbasis kelompok perempuan
			4	Peningkatan fasilitasi peran perempuan dan atau organisasi perempuan di sektor publik	Peningkatan kapasitas perempuan dalam organisasi publik	Peningkatan fasilitasi perempuan dalam partisipasi di kebijakan dan organisasi publik	Peningkatan fasilitasi perempuan dalam partisipasi di kebijakan dan organisasi publik
			5	Peningkatan program preventif dan mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Peningkatan efektifitas rumah aman dan pendampingan perempuan anak terhadap kekerasan	Peningkatan efektifitas rumah aman dan pendampingan perempuan anak terhadap kekerasan	Peningkatan efektifitas rumah aman dan pendampingan perempuan anak terhadap kekerasan
2	**Tujuan 2: Menurunkan angka kemiskinan**						
	Indikator Tujuan 1:	Sasaran : menurunnya jumlah dan persentase	1	Aktivasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) *untuk* meningkatkan kualitas pemutakhiran database kemiskinan serta meningkatkan efektivitas	Pengembangan Keberlanjutan SLRT dalam peningkatan kualitas database dan implementasi program penurunan kemiskinan	Pengembangan Keberlanjutan SLRT dalam peningkatan kualitas database dan implementasi	Pengembangan Keberlanjutan SLRT dalam peningkatan kualitas database dan implementasi

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
			Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
	Tingkat Kemiskinan	penduduk miskin, menurunnya indeks kedalaman kemiskinan, menurunnya Indeks keparahan kemiskinan, dan menurunnya Gini ratio		ketepatan sasaran implementasi program/ bantuan/ stimulan dalam rangka penurunan kemiskinan.		program penurunan kemiskinan	program penurunan kemiskinan
			2	Meningkatkan sinkronisasi program penurunan kemiskinan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pemerintah desa.	Peningkatan pemanfaatan ICT untuk akses program dan efektifitas sinkronisasi program penurunan kemiskinan	Peningkatan pemanfaatan ICT untuk akses program dan efektifitas sinkronisasi program penurunan kemiskinan	Peningkatan pemanfaatan ICT untuk akses program dan efektifitas sinkronisasi program penurunan kemiskinan
			3	Meningkatkan efektivitas program penurunan kemiskinan berdasarkan kondisi riil indikator kemiskinan dengan dukungan pendampingan.	Peningkatan implementasi Pendampingan program penurunan kemiskinan	Peningkatan implementasi Pendampingan program penurunan kemiskinan	Peningkatan implementasi Pendampingan program penurunan kemiskinan
			4	Peningkatan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan pemutakhiran data yang lengkap dan akurat.	Peningkatan perlindungan dan akses produktif bagi PPKS	Pengembangan pendampingan PPKS berbasis usaha kreatif dan produktif	Pengembangan pendampingan PPKS berbasis usaha kreatif dan produktif

No	Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
	Indikator Tujuan		Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
			5	Peningkatan kolaborasi pentahelix antar organisasi perangkat daerah dan atau dengan berbagai elemen seperti *civil society*, swasta, perguruan tinggi dalam menurunkan angka kemiskinan	Peningkatan Kerjasama *pentahelix* dalam penurunan kemiskinan	Pengembangan implementasi Kerjasama pentahelix dalam rangka pendampingan penurunan kemiskinan	Pengembangan implementasi Kerjasama pentahelix dalam rangka pendampingan penurunan kemiskinan
		Sasaran 2 : Meningkatnya Status Kemandirian Desa	1	Mendorong dan meningkatkan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat di pedesaan.	Pengembangan model program kompetitif dalam bidang inovasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	Pengembangan model program kompetitif dalam bidang inovasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	Pengembangan Desa Unggulan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
			2	Meningkatkan infrastruktur jalan, saluran irigasi, air bersih, serta fasilitas umum yang berdampak langsung bagi masyarakat dan status Indeks Desa Membangun (IDM).	Peningkatan IDM melalui pembangunan infrastruktur yang efektif	Peningkatan IDM melalui pembangunan sumberdaya manusia, infrastruktur, dan ekonomi berkelanjutan	Peningkatan IDM melalui pembangunan sumberdaya manusia, infrastruktur, dan ekonomi berkelanjutan
			3	Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat.	Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pembangunan, pelayanan, ICT, dan administrasi	Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pembangunan, pelayanan, ICT, dan administrasi	Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pembangunan, pelayanan, ICT, dan administrasi

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI: Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		ARAH KEBIJAKAN: 2024	2025	2026
	Indikator Tujuan 2 : Tingkat pengangguran Terbuka	Sasaran 1: Menurunnya pengangguran	1	Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan fasilitas layanan dan sumberdaya yang mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja	Mengembangkan sistem layanan peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis ICT	Mengembangkan sistem layanan peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis ICT
			2	Meningkatkan layanan dan akses bursa kerja secara offline maupun online	Meningkatkan jejaring dan fasilitasi bursa kerja khususnya bagi angkatan kerja muda	Menyelenggarakan event bursa kerja secara berkelanjutan	Menyelenggarakan event bursa kerja secara berkelanjutan
			3	Meningkatkan jumlah wirausaha kreatif dan atau start up melalui program inkubasi.	Mengembangkan sarana prasarana pendukung tumbuhkembangnya wirausaha kreatif dan *start up*	Membangun ekosistem yang menumbuhkan bibit wirausaha kreatif dan *start up*	Mengembangkan jejaring untuk meningkatkan akses wirausaha kreatif dan *start up*
			4	Mengembangkan *Bangkalan Creativ Space* yang terintegrasi dengan *co working space*, inkubasi, dan ruang pamer / fasilitas pemasaran baik fisik maupun virtual	Menginisiasi *Bangkalan Creatif Space* sebagai media inkubasi dan *co working space*	Meningkatkan layanan *Bangkalan Creatif Space* sebagai media inkubasi dan *co working space*	Mengembangkan jejaring *Bangkalan Creatif Space*
3	**Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan**						

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI: Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		ARAH KEBIJAKAN: 2024	2025	2026
	Indikator Tujuan 1 : Pertumbuhan ekonomi	Sasaran 1: Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dalam arti luas	1	Peningkatan produktivitas dan Daya Saing usaha komoditas strategis Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan kehutanan.	Meningkatkan dukungan pada ketersediaan sarana produksi (Saprodi) pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan kehutanan	Meningkatkan dukungan Saprodi dan pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berbasis teknologi	Meningkatkan dukungan Saprodi dan pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berbasis teknologi
			2	Meningkatkan infrastruktur pendukung pertanian	Meningkatkan usaha pembangunan sarana prasarana embung, irigasi, serta akses yang mendukung pengembangan pertanian	Meningkatkan usaha pembangunan sarana prasarana embung, irigasi, serta akses yang mendukung pengembangan pertanian	Mengembangkan sumberdaya dan manajemen layanan sarana prasarana pertanian
			3	Meningkatkan penumbuhan wirausaha muda pertanian.	Meningkatkan usaha untuk memfasilitasi petani, peternak, petani ikan muda berbasis inovasi, teknologi dan korporasi	Mengembangkan insentif dan fasilitasi pada petani, peternak, petani ikan muda berbasis inovasi, teknologi dan korporasi	Mengembangkan insentif dan fasilitasi pada petani, peternak, petani ikan muda berbasis inovasi, teknologi dan korporasi
			4	Peningkatan nilai tambah pertanian melalui agroindustri dan agrobisnis.	Memetakan potensi model *one village one factory* berbasis potensi agro *(dalam arti luas)* dan atau mengintensifkan hilirisasi pertanian	Mengembangkan model *one village one factory* berbasis potensi agro *(dalam arti luas)* dan atau mengintensifkan hilirisasi pertanian	Mengembangkan model *one village one factory* berbasis potensi agro *(dalam arti luas)* dan atau mengintensifkan hilirisasi pertanian

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
			Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
			5	Pengembangan pertanian berbasis kawasan agropolitan dan minapolitan.	Mempercepat pembangunan kawasan agropolitan dan minapolitan	Mempercepat pembangunan kawasan agropolitan dan minapolitan	Mengembangkan insentif program untuk manajemen kawasan agropolitan dan minapolitan berkelanjutan
		Sasaran 2: Meningkatnya realisasi investasi daerah	1	Peningkatan pelayanan pada bidang investasi dan perizinan secara mudah, transparan, dan akuntabel	Meningkatkan inovasi layanan mobile dan digital untuk kemudahan investasi dan perizinan	Meningkatkan inovasi layanan mobile dan digital untuk kemudahan investasi dan perizinan	Meningkatkan inovasi layanan mobile dan digital untuk kemudahan investasi dan perizinan
			2	Meningkatkan promosi potensi investasi daerah.	Menggiatkan usaha untuk peningkatan media promosi dan investasi daerah	Menggiatkan usaha untuk peningkatan media promosi dan investasi daerah	Menggiatkan usaha untuk peningkatan media promosi dan investasi daerah
		Sasaran 3: Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	1	Meningkatkan kawasan infrastruktur pusat perdagangan.	Melakukan percepatan pembangunan kawasan strategis sebagai pusat perdagangan	Melakukan percepatan pembangunan kawasan strategis sebagai pusat perdagangan	Mengembangkan layanan sumberdaya dan manajemen pengelolaan kawasan strategis sebagai pusat perdagangan
			2	Mengembangkan promosi dan ekosistem perdagangan melalui misi dagang daerah.	Meningkatkan usaha promosi dan misi dagang	Meningkatkan usaha promosi dan misi dagang	Meningkatkan usaha promosi dan misi dagang
		Sasaran 4: Meningkatnya Nilai Tambah	1	Penguatan Daya Saing dan Peningkatan produktivitas industri pengolahan agro dan non agro	Meningkatkan dukungan industri mikro dan kecil yang	Meningkatkan jejaring industri mikro dan kecil yang	Meningkatkan jejaring industri mikro dan kecil yang bergerak di

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
			Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
		Produksi Industri Pengolahan			bergerak di pengolahan agro dan non agro	bergerak di pengolahan agro dan non agro	pengolahan agro dan non agro
			2	Meningkatkan fasilitasi teknologi dan mesin peralatan industri pengolahan	Meningkatkan fasilitasi dan replikasi hasil inovasi teknologi untuk pengembangan indstri skala mikro dan kecil	Mengembangkan insentif dalam rangka replikasi hasil inovasi teknologi untuk pengembangan indstri skala mikro dan kecil	Mengembangkan insentif dalam rangka replikasi hasil inovasi teknologi untuk pengembangan indstri skala mikro dan kecil
		Sasaran 5: Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata	1	Mengembangkan potensi Kawasan religi serta seni dan budaya sebagai obyek daya tarik wisata (ODTW)	Meningkatkan promosi, sarana prasarana dan manajemen dukungan potensi wisata berbasis religi dan seni budaya	Mengembangkan inovasi dan event dalam rangka mendukung potensi wisata berbasis religi dan seni budaya	Mengembangkan inovasi dan event dalam rangka mendukung potensi wisata berbasis religi dan seni budaya
			2	Meningkatkan interkoneksi antar kawasan dan lokasi wisata	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung konektivitas antar lokasi dan Kawasan wisata	Meningkatkan kualitas layanan dan manajemen konektivitas antara lokasi dn kawasan wisata	Mengembangkan event berbasis konektifitas antar lokasi/ kawasan wisata
			3	Mengembangkan jejaring pelaku dan pengelola wisata dilingkup kabupaten, swasta, lembaga, serta pemerintah desa/ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Menginisiasi dan menguatkan jejaring pelaku dan atau pengelola wisata	Meningkatkan inovasi kreatif dan terpadu antar pelaku/ pengelola wisata	Meningkatkan inovasi kreatif dan terpadu antar pelaku/ pengelola wisata

No	Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
	Indikator Tujuan		Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
			4	Peningkatan layanan promosi dan informasi pariwisata.	Meningkatkan fasilitasi promosi wisata menggunakan media dan ICT	Meningkatkan fasilitasi promosi wisata berbasis event, media dan ICT	Meningkatkan fasilitasi promosi wisata berbasis event, media dan ICT
			5	Mengintegrasikan sumberdaya wisata dengan potensi ekonomi kreatif.	Meningkatkan fasilitas sarana prasarana untuk display ekonomi kreatif pada lokasi wisata	Mengembangkan digitalisasi ekonomi kreatif terintegrasi dengan potensi wisata	Mengembangkan digitalisasi ekonomi kreatif terintegrasi dengan potensi wisata
	Indikator tujuan 2 Pengembangan usaha ekonomi rakyat dan ketahanan pangan	Sasaran 1: Meningkatnya produktifitas usaha ekonomi rakyat	1	Menumbuh kembangkan kewirausahaan koperasi	Meningkatkan Pendampingan pemetaan koperasi berdasarkan kondisi kesehatan	Meningkatkan Pendampingan kewirausahaan dalam manajemen dan pengembangan usaha koperasi	Meningkatkan Pendampingan kewirausahaan dalam manajemen dan pengembangan usaha koperasi
			2	Menumbuh kembangkan kewirausahaan Usaha Mikro	Meningkatkan pendampingan usaha mikro dalam inovasi produk, manajemen dan pemasaran	Meningkatkan pendampingan usaha mikro dalam inovasi produk, manajemen dan pemasaran	Meningkatkan pendampingan usaha mikro dalam inovasi produk, manajemen dan pemasaran

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI: Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		ARAH KEBIJAKAN: 2024	2025	2026
			3	Memfasilitasi layanan inkubasi bisnis, co working space, dan start up	Mengembangkan model pendampingan pelaku usaha dalam bentuk inkubasi bisnis, *co working space, dan start up*	Mengembangkan model pendampingan pelaku usaha dalam bentuk inkubasi bisnis, *co working space, dan start up*	Meningkatkan jejaring pengembangan *co working space, dan start up*
		Sasaran 2: Meningkatkan ketahanan pangan	1	Pengembangan sumber pangan alternatif berbasis potensi lokal	Meningkatkan pendampingan ketahanan pangan melalui sumber pangan alternatif dan rumah pangan lestari	Mengembangkan *teaching factory* pada sumber pangan alternatif berbahan baku lokal serta intensifikasi rumah pangan lestari	Mengembangkan *teaching factory* pada sumber pangan alternatif berbahan baku lokal serta intensifikasi rumah pangan lestari
			2	Mengembangkan sistem rumah pangan lestari dan pemanfaatan pekarangan sebagai penyangga kebutuhan pangan keluarga.			
	Indikator tujuan 3: Rata-rata kualitas infrastruktur	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman	1	Mengembangkan tata kota yang cerdas, inspiratif, nyaman, aman dan berkeadilan	Mengembangkan review tata kota dan Kawasan pendukung menggunakan model kota cerdas dan berkeadilan	Meningkatkan pengelolaaan kota berbasis ICT dengan memprioritaskan optimalisasi ruang edukasi berbasis budaya dan inovasi kreatif	Meningkatkan pengelolaaan kota berbasis ICT dengan memprioritaskan optimalisasi ruang edukasi berbasis budaya dan inovasi kreatif

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
			Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
			2	Mengembangkan infrastruktur berbasis kawasan	Meningkatkan pengembangan infrastruktur prioritas sesuai Perpres 80 tahun 2019 berbasis pemetaan pengembangan kawasan ekonomi dan wisata serta berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu dokumen perencanaan mengenai infrastruktur Jalan Lintas Selatan dan pembebasan lahan untuk mendukung infrastruktur di Kawasan Industri (KI) PT MISI.	Meningkatkan pengembangan infrastruktur prioritas sesuai Perpres 80 tahun 2019 berbasis pemetaan pengembangan kawasan ekonomi dan wisata serta berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu pembebasan lahan untuk mendukung infrastruktur di Kawasan Industri (KI) PT MISI.	Meningkatkan pengembangan infrastruktur prioritas sesuai Perpres 80 tahun 2019 berbasis pemetaan pengembangan kawasan ekonomi dan wisata serta berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu pembebasan lahan untuk mendukung infrastruktur di Kawasan Industri (KI) PT MISI.
			3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Meningkatkan layanan peningkatan dan perawatan Jalan Jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten	Meningkatkan layanan peningkatan dan perawatan Jalan Jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten	Meningkatkan layanan peningkatan dan perawatan Jalan Jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten
			4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana daerah aliran sungai (DAS) dan jaringan drainase	Meningkatkan ketahanan DAS dan drainase yang rawan bencana	Meningkatkan ketahanan DAS dan drainase yang rawan bencana dan pengembangan kawasan sekitar DAS yang tangguh produktif	Meningkatkan ketahanan DAS dan drainase yang rawan bencana dan pengembangan kawasan sekitar DAS yang tangguh produktif

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
			Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
			5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi	Meningkatkan akses dan sarana prasarana pendukung transportasi publik	Meningkatkan investasi sarana dan prasarana transportasi publik	Meningkatkan investasi sarana dan prasarana transportasi publik
			6	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur perumahan dan Permukiman	Meningkatkan dukungan tata ruang dan infrastruktur dalam rangka pengembangan perumahan dan pemukiman yang sehat dan cerdas termasuk mendukung Proyek Strategis Nasional dalam. Dokumen Perencanaan Infrastruktur kawasan Indonesia Islamic Science Park (IISP) sesuai yang tertera dalam Perpres 80 Tahun 2019	Meningkatkan dukungan tata ruang dan infrastruktur dalam rangka pengembangan perumahan dan pemukiman yang sehat dan cerdas termasuk mendukung Proyek Strategis Nasional dalam. Penyediaan Infrastruktur kawasan Indonesia Islamic Science Park (IISP) sesuai yang tertera dalam Perpres 80 Tahun 2019	Meningkatkan dukungan tata ruang dan infrastruktur dalam rangka pengembangan perumahan dan pemukiman yang sehat dan cerdas termasuk mendukung Proyek Strategis Nasional dalam. Penyediaan Infrastruktur kawasan Indonesia Islamic Science Park (IISP) sesuai yang tertera dalam Perpres 80 Tahun 2019
			7	Meningkatkan Sistem Penyediaan Air Bersih Dan Air Minum (SPAM)	Menyusun dokumen pengembangan SPAM yang mendukung Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 80 Tahun 2019 termasuk dalam kawasan Indonesia Islamic Science Park (IISP)	Memfasilitasi pengembangan SPAM yang mendukung Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 80 Tahun 2019 termasuk dalam kawasan Indonesia Islamic Science Park (IISP)	Memfasilitasi pengembangan SPAM yang mendukung Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 80 Tahun 2019 termasuk dalam kawasan Indonesia Islamic Science Park (IISP)

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI: Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		ARAH KEBIJAKAN: 2024	2025	2026
	Indikator Tujuan 4: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sasaran 1: Terjaganya kualitas lingkungan	1	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan aspek lingkungan pada aktivitas pembangunan	Meningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan aspek lingkungan pada aktivitas pembangunan	Meningkatkan efektifitas pembangunan yang berwawasan lingkungan
			2	Mengembangkan program pengelolaan persampahan	Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat antara lain : persampahan, kebersihan lingkungan, dan polusi	Meningkatkan efektifitas pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam aspek kebersihan, persampahan, dan meminimalisir polusi	Meningkatkan efektifitas pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam aspek kebersihan, persampahan, dan meminimalisir polusi
			3	Meningkatkan kualitas sumberdaya lingkungan melalui pelayanan tata lingkungan dan pengelolaan sumber-sumber polusi lingkungan			
	indikator Tujuan 5 : Indeks Resiko Bencana	Sasaran 1: Optimalnya penanganan bencana	1	Meningkatkan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana.	Meningkatkan upaya preventif, mitigasi, dan penanganan bencana melalui infrastruktur, sumberdaya manusia tanggap bencana, dan kesadaran masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, pengembangan kampung/ desa tangguh bencana, serta pengembangan kesiapan tagana berbasis teknologi	Meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, pengembangan kampung/ desa tangguh bencana, serta pengembangan kesiapan tagana berbasis teknologi
			2	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya preventif dan mitigasi terhadap bencana			

No	Tujuan Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		ARAH KEBIJAKAN 2024	2025	2026
			3	Meningkatkan kapasitas dan kesiapan Tagana dalam upaya preventif dan mitigasi bencana			
	TUJUAN 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK						
	1ndikator Tujuan 1: Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 1: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik	1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Mengembangkan perencanaan, pendampingan pelaksanaan, dan monitoring evaluasi berbasis spasial dan sektoral	Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi keuangan dan asset daerah berbasis data yang akurat dan produktif	Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi keuangan dan asset daerah berbasis data yang akurat dan produktif
			2	Meningkatkan layanan masukan (input), umpan balik, dan akses informasi publik	Meningkatkan pelayanan PPID dalam keterbukaan informasi publik	Mengembangkan pelayanan PPID dan keterbukaan informasi yang produktif dan konstruktif	Mengembangkan pelayanan PPID dan keterbukaan informasi yang produktif dan konstruktif
			3	Meningkatkan pengelolaan dan administrasi aset daerah	Meningkatkan inventarisasi, sertifikasi dan pemanfaatan aset daerah	Meningkatkan inventarisasi, sertifikasi dan pemanfaatan aset daerah	Mengoptimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI: Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		ARAH KEBIJAKAN: 2024	2025	2026
		Sasaran 2: Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangkalan	1	Mengembangkan dan mengimplementasikan Road Map reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan komitmen birokrasi dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan pelayanan publik	Mengembangkan implementasi *entrepreneurship Government* dalam reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan pelayanan publik	Mengembangkan implementasi *entrepreneurship Government* dalam reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan pelayanan publik
			2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas upaya peningkatan kompetensi sumber daya ASN dalam menjalankan tugasnya			
		Sasaran 3: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	1	Mempercepat pemanfaatan ICT dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan	Mengoptimalkan implementasi kelengkapan ICT yang dimiliki baik dari pusat, provinsi, maupun Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan	Mengintegrasikan proses perencanaan sampai monitoring evaluasi berbasis data yang update dan akurat dengan mengoptimalkan ICT	Mengintegrasikan proses perencanaan sampai monitoring evaluasi berbasis data yang update dan akurat dengan mengoptimalkan ICT

No	Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
	Indikator Tujuan		Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
		Sasaran 4: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	1	Meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, pajak daerah, dan retribusi daerah	Meningkatkan pemetaan dan pengelolaan potensi PAD pada pengelolaan SDA, pajak daerah, dan retribusi daerah secara rinci dan berkeadilan	Meningkatkan akuntabilitas dalam pengembangan dan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan ICT	Meningkatkan akuntabilitas dalam pengembangan dan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan ICT

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
			Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		2024	2025	2026
			2	Meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi Kinerja Usaha BUMD untuk mendorong peran dalam pengembangan perekonomian daerah dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.	- Mendorong Rencana Bisnis PT. Sumberdaya Bangkalan dalam rangka restrukturisasi keuangan dan aset, percepatan realisasi *Partisipating Interest* (PI), dan pengembangan ekspansi bisnis yang feasible. - Mendorong inovasi pengembangan Produk Simpanan dan Kredit Perumda BPR Bangkalan, perluasan pasar di UMKM, serta kesiapan transformasi digital. - Mendorong peningkatan dan perluasan layanan Perumda Sumber Sejahtera dari aspek produksi, peningkatan konsumen, dan inovasi layanan	- Mendorong transformasi ekspansi bisnis strategis PT. Sumber Daya Bangkalan di bidang Migas, jasa, Usaha perdagangan dan investasi berbasis pada prinsip *Good Corporate Governance.* - Mendorong perluasan pemasaran hasil inovasi produk Simpanan dan Kredit secara konvensional dan hasil inovasi digital dengan tata kelola manajemen yang efisien dan produktif - Mendorong penerapan *Good Corporate Governance* dan sertifikasi standarisasi produk dan layanan Perumda Sumber Sejahtera	- Meningkatkan peran dan kontribusi PT. Sumber Daya Bangkalan dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis sektor strategis baik di sektor riil maupun jasa, start up dan usaha keratif dengan kontribusi PAD yang signifikan. - Mendorong transformasi Perumda BPR bangkalan sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa layanan keuangan yang unggul, bersaing, dan memberikan kontribusi PAD signifikan. - Mendorong ekspansi usaha dan difersifikasi produk berbasis air bersih Perumda Sumber Sejahtera dalam rangka peningkatan layanan dan PAD.

No	Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	STRATEGI: Strategi Berdasarkan Tujuan dan sasaran		ARAH KEBIJAKAN: 2024	2025	2026
		Sasaran 5: Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat	1	Optimalisasi Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat.	Peningkatan ruang budaya dan sosial sebagai upaya persuasif dan untuk mendeteksi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat	Peningkatan ruang budaya dan sosial sebagai upaya persuasif dan untuk mendeteksi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat	Peningkatan ruang budaya dan sosial sebagai upaya persuasif dan untuk mendeteksi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat
			2	Penguatan nilai religi, seni dan budaya lokal sebagai spirit penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan modal sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.	Meningkatkan dan memperluas agenda-agenda yang memupuk modal sosial berbasis nilai religi, seni dan budaya lokal	Meningkatkan dan memperluas agenda-agenda yang memupuk modal sosial berbasis nilai religi, seni dan budaya lokal	Meningkatkan dan memperluas agenda-agenda yang memupuk modal sosial berbasis nilai religi, seni dan budaya lokal

6.3. PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun ke depan yaitu tahun 2024-2026.

6.3.1. Program Prioritas Berdasarkan Tujuan

Program prioritas dikelompokan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didukung, serta diintegrasikan dengan rumusan Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana table berikut.

Tabel 6.5
Program Prioritas Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1															
		TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	**Indeks Pembangungan Manusia**	**Indeks**	**65,05**	**65,7**	**65,8 - 66,2**		**66,1 - 66,7**		**66,5 - 67,2**		**66,5 - 67,2**		
		Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,54 tahun	71,89 tahun	71,00 tahun		71,33 tahun		71,50 tahun		71,50 tahun		
	1.02.01.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diBina	Persentase	85,00%	85,00%	85,00 %	475.547.000,00	90%	476.498.244,00	100%	475.547.000,00	100%	1.427.592.244,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	-	4,4	4,4	425.000.000,00	4,2	426.902.488,00	4	525.000.000,00	3,9	1.376.902.488,00	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	-	32,33	32,33	450.000.000,00	31,33	450.951.244,00	31	597.681.100,00	30,33	1.498.632.344,00	Dinas Kesehatan
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	9.908.000.000,00	100,00 %	10.132.000.000,00	100,00 %	10.140.910.000,00	100,00 %	30.180.910.000,00	RSUD

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
			Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart	Persentase	-%	-%	70,00 %	16.922.664.500,00	80,00%	16.958.181.699,00	100,00 %	17.215.179.150,00	100,00 %	51.096.025.349,00	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting	Persentase	26,40%	18,00%	14,00 %	5.072.426.990,00	12,00%	5.094.924.404,00	11,00%	5.206.090.790,00	10,00%	15.373.442.184,00	Dinas Kesehatan
			Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	19.715.437.010,00	100,00 %	19.818.894.422,00	100,00 %	19.967.047.300,00	100,00 %	59.501.378.732,00	Dinas Kesehatan
			Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase	94,00%	96,00%	100,00 %	51.272.323.000,00	100,00 %	51.272.323.000,00	100,00 %	52.392.323.000,00	100,00 %	154.936.969.000,00	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	3.762.326.500,00	100,00 %	3.789.548.652,00	100,00 %	4.105.463.350,00	100,00 %	11.657.338.502,00	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	222.025.000,00	100,00 %	225.829.976,00	100,00 %	222.025.000,00	100,00 %	669.879.976,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP)	Persentase	70,00%	70,00%	70,00 %	10.000.000,00	80,00%	10.000.000,00	90,00%	60.000.000,00	90,00%	80.000.000,00	Dinas Kesehatan
			Persentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (RSUD)	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	1.996.500.000,00	100,00 %	2.004.500.000,00	100,00 %	2.004.500.000,00	100,00 %	6.005.500.000,00	RSUD

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	1.02.04.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) serta Industri Rumah Tangga (IRT) yang telah Tervalidasi Perijinan	Persentase	92,00%	92,00%	92,00 %	466.118.000,00	95,00%	469.093.054,00	98,00%	470.175.710,00	98,00%	1.405.386.764,00	Dinas Kesehatan
		Sasaran 2: Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan;	Indeks	0,54***	0,54	0,55		0,56		0,57		0,57		
	1.01.02.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	Persentase	5,00%	7,00%	7,00%	205.042.158.700,00	10,00%	206.182.422.590,00	13,00%	206.917.526.500,00	13,00%	618.142.107.790,00	Dinas Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	Persentase	85,50%	85,50%	87,85 %		88,98%		89,92%		89,92%		Dinas Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A	Persentase	20,00%	20,00%	30,00 %		40,00%		50,00%		50,00%		Dinas Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	Persentase	10,33%	25,33%	25,33 %		40,33%		55,33%		55,33%		Dinas Pendidikan
	1.01.04.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persentase	73,00%	73,00%	80,00 %	2.000.000,00	85,00%	2.000.000,00	90,00%	2.000.000,00	90,00%	6.000.000,00	Dinas Pendidikan
			Persentase Tenaga Pendidik yang telah lulus Sertifikasi Pendidik	Persentase	38,00%	38,00%	45,00 %		50,00%		55,00%		55,00%		Dinas Pendidikan

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Sasaran 3: Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	6,4	6,1	6,8		7		7,4		7,4		
	2.23.2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase	9,96%	9,96%	20,00 %	85.290.150,00	25,00%	118.290.150,00	30,00%	137.290.150,00	30,00%	340.870.450,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Persentase perpustakaan yang dibina	Persentase	85,66%	85,66%	90,00 %	23.468.200,00	93,00%	33.468.200,00	95,00%	33.468.200,00	95,00%	90.404.600,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	NA	NA	44,64		47,65		50,60		50,60		
	2.19.02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	8,00%	8,00%	9,00%	128.156.700,00	10,00%	142.400.000,00	11,00%	160.000.000,00	11,00%	430.556.700,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	2.19.04.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Persentase	7,0%	7,3%	7,6%	100.000.000,00	8,1%	100.000.000,00	8,4%	100.000.000,00	8,4%	300.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	2.19.03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet muda yang berprestasi	Persentase	33,00%	33,00%	25,00 %	4.507.500.000,00	25,00%	4.521.613.300,00	25,00%	4.633.000.000,00	25,00%	13.662.113.300,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Persentase atlit muda olah raga rekreasi yg berprestasi	Persentase	NA	NA	4,00%	15.000.000,00	4,00%	15.000.000,00	4,00%	15.000.000,00	4,00%	45.000.000,00	
		TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**Indeks**	**87,35**	**87,15**	**87,16 - 88,15**		**88,16 - 88,55**		**88,56 - 88,95**		**87,45**		

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Sasaran 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,75	65,8	65,00		68,00		70,00		70,00		
	2.08.2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Tingkat Capaian PUG	Persentase	71%	71%	72%	50.000.000,00	73%	50.000.000,00	74%	50.000.000,00	74%	150.000.000,00	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.3.	Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perlindungan perempuan yang terlayani	Persentase	50,22%	50,22%	50,22 %	15.000.000,00	50,70%	15.000.000,00	51,93%	15.000.000,00	70%	45.000.000,00	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Sasaran 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Persentase	1,1	1	0,90		0,80		0,70		0,70		
	2.14.02.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pengendalian Kuantitas Penduduk pada Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	Persentase	2,00%	2,00%	2,17%	1.351.200.000,00	2,16%	1.351.200.000,00	2,15%	1.351.200.000,00	2,15%	4.053.600.000,00	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.03.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase capaian peserta kb aktif	Persentase	64,00%	64,00%	65,00 %	5.453.311.000,00	65,30%	5.484.995.030,00	65,50%	5.436.712.400,00	65,50%	16.375.018.430,00	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	2.14.04.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Anggota Keluarga Tribina, UPPKS dan PIK R yang Aktif	Persentase	65,00%	70,00%	70,00 %	4.531.114.000,00	75,00%	4.580.895.595,00	80%	4.630.926.000,00	80%	13.742.935.595,00	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	**Indeks Kesalehan Sosial (IKS)**	**Indeks**	**80,47**	**70,4**	**82,00-84,99**		**85,00 - 86,99**		**87,00 - 87,99**		**0**		
		(5) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum dan Perda /Perkada	Persentase	2.17%	NA	2.22%		2.27%		2.32%		2.32%		
	1.05.02.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	2.525.060.250,00	100%	2.025.060.250,00	100%	1.979.060.250,00	100%	6.529.180.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		(5) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum dan Perda /Perkada	Persentase	2.17%	NA	2.22%		2.27%		2.32%		2.32%		
	8.01.02.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kebijakan yang ditindak lanjuti dalam kegiatan penguatan ideologi dan karakter kebangsaan	Persentase	0,07%	0,07%	0,07%	45.293.150,00	0,08%	34.000.000,00	0,09%	34.000.000,00	0,09%	113.293.150,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.05.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindak lanjuti	Persentase	0,07%	0,07%	0,07%	163.766.850,00	0,08%	140.766.850,00	0,08%	140.766.850,00	0,08%	445.300.550,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	8.01.03.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	101.330.018.000,00	100,00 %	3.531.000.000,00	100,00 %	3.531.000.000,00	100,00 %	108.392.018.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.04.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang diberdayakan	Persentase	57,40%	57,40%	57,40 %	41.500.000,00	71,84%	30.500.000,00	86,21%	30.500.000,00	86,21%	102.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.06.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	Persentase	63,00%	63,00%	63,00 %	408.000.000,00	46,00%	408.000.000,00	52,00%	408.000.000,00	52,00%	1.224.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2		**TUJUAN 2 : MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN**	**Indikator Tujuan 1: Tingkat Kemiskinan**	**Persentase**	**19,44%**	**0**	**17,94 - 17,60 %**		**17,59 - 16,74 %**		**16,73 - 15,24 %**		**15,24 %**		
		Sasaran 1: Meningkatnya PPKS Yang Tertangani	Persentase PPKS yang ditangani	Persentase	6,22%	4,75%	6,22%		7,69%		9,16%		9,16%		
	1.06.02.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	11,46%	13,00%	13,00 %	375.000.000,00	14,00%	375.000.000,00	15,00%	445.000.000,00	15,00%	1.195.000.000,00	Dinas Sosial

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	1.06.04.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	90,33%	100,00 %	100,00 %	1.200.000.000,00	100,00 %	1.250.000.000,00	100,00 %	1.600.000.000,00	100,00 %	4.050.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Persen	99,97%	100,00 %	100,00 %	722.814.000,00	100,00 %	822.814.000,00	100,00 %	972.814.000,00	100,00 %	2.518.442.000,00	Dinas Sosial
		TUJUAN 2 : MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN	**Indikator Tujuan 2: Indeks Desa Membangun**	**Indeks**	**0,6879**	**NA**	**0,7104 - 0,7254**		**0,7179 - 0,7329**		**0,7254 - 0,7404**				
		Sasaran 2: Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persentase	20,15	21,98	24,18		26,37		29,3		29,3		
	2.13.03.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kawasan Pedesaan Hasil Kerjasama Antar Desa yang dibina	Kawasan	0 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	26.000.000,00	1 kawasan	26.000.000,00	1 kawasan	24.000.000,00	3 kawasan	76.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	2.13.04.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dan aktif dalam pengelolaan lembaga pemerintahannya	Persentase	NA	18,68%	18,68 %	84.845.900,00	19,41%	98.537.900,00	20,14%	90.487.900,00	58,23%	273.871.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	2.13.05.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pembeerdayaan yang dibina dan aktif	Persentase	NA	17,00%	17,00 %	189.741.800,00	22,00%	544.061.800,00	25,00%	193.461.800,00	64,00%	927.265.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		TUJUAN 2 : MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN	**Indikator Tujuan 3: Tingkat pengangguran Terbuka**	**Persentase**	**8,05%**	**0**	**6,50 % - 5,90%**		**5,85% - 5,70%**		**5,65% - 5,60**		**5,60%**		
		Sasaran 1: Menurunnya Pengangguran	Persentase Penurunan Jumlah Pengangguran	Persentase	2,98%	3,48%	3,98%		4,48%		4,98%		4,98%		
	2.07.03.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencaker yang ditempatkan / Bekerja	Persentase	3,70%	3.7 %	56,67 %	85.000.000,00	56,67%	85.000.000,00	56,67%	85.000.000,00	56,67%	255.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	2.07.04.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Persentase	3,70%	3.7 %	45,16 %	91.000.000,00	45,16%	96.000.000,00	45,16%	96.000.000,00	45,16%	283.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	2.07.05.	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartit, Struktur sekala Upah dan terdapat peserta BPJS ketenagakerjaan	Persentase	51,39%	65 %	53,30 %	360.000.000,00	75,17%	360.000.000,00	75,17%	360.000.000,00	75,17%	1.080.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
3		**TUJUAN 3 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN**	**Pertumbuhan ekonomi**	**Persentase**	**-1,12%**	**4,63%**	**2,25% - 3,95%**		**3,1% - 4,8%**		**3,95% - 5,65%**		**4,75%**		
		Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian Dalam Arti Luas	Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Persentase	0,40	NA	0,40		0,52		0,6		0,6		Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
	3.27.02.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi (Dispertapahorbun)	Persentase	17%	17%	17%	2.604.864.700	19%	2.654.864.700	20%	2.604.864.700	20%	7.864.594.100	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
	3.27.03.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase kebutuhan prasarana pertanian yang terpenuhi	Persentase	24%	24%	24%	9.991.291.900	25%	10.191.291.900	26%	10.191.291.900	26%	30.373.875.700	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
	3.27.05.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase kebutuhan pengendalian dan penanganan bencana yang terpenuhi tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	225.000.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
	3.27.07.	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kebutuhan penyuluhan pertanian yang terpenuhi	Persentase	50%	50%	50%	1.114.283.000	50%	1.142.051.410	50%	1.169.958.600	50%	3.426.293.010	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
															Dan Perkebunan
		Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian Dalam Arti Luas	Peningkatan Produktifitas Sektor Peternakan (Besar, Kecil, dan Unggas)	Persentase	NA	NA	1,00%		1,02%		1,03%		1,03%		Dinas Peternakan
	3.27.02.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase penyediaan prasarana pertanian yang terpenuhi (Dinas Peternakan)	Persentase	100%	100%	100%	120.000.000	100%	2.136.600.000	100%	2.734.100.000	100%	4.990.700.000	Dinas Peternakan
	3.27.03.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi	Persentase	100%	100%	100%	5.631.000.000	100%	5.620.000.000	100%	5.626.000.000	100%	16.877.000.000	Dinas Peternakan
	3.27.04.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan kesehatan hewan	Persentase	100%	100%	100%	175.000.000	100%	210.000.000	100%	206.500.000	79,30%	591.500.000	Dinas Peternakan
	3.27.05.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Rekomendasi yang dikeluarkan	Persentase	100%	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	15.000.000	Dinas Peternakan
	3.27.07.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok usaha peternak yg bina / difasilitasi	Persentase	100%	100%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000	Dinas Peternakan
		Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian Dalam Arti Luas	Peningkatan Produktifitas Sektor Perikanan	Persentase	5,21	5,94	5,10		5,11		5,12		5,12		Dinas Perikanan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan													

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	3.25.03.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persentase	3,20%	3,20%	3,20%	30.000.000	3,30%	30.000.000	3,40%	30.000.000	3,40%	90.000.000	Dinas Perikanan
	3.25.04.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persentase	37,46%	37,46%	37,46 %	865.522.000	37,46%	893.750.235	37,46%	921.994.600	37,46%	2.681.266.835	Dinas Perikanan
	3.25.06.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah konsumsi ikan per kapita per tahun	kg/ kapita/ tahun	50,53	50,53	50,63	70.000.000	50,73	70.000.000	50,83	70.000.000	50,83	210.000.000	Dinas Perikanan
		Sasaran 2: Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	Persentase	391,99%	4,41%	5,00%		5,50%		6,00%		16,50%		
	2.18.03.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Daerah	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	52.000.000,00	100,00 %	77.000.000,00	100,00 %	102.000.000,00	100,00 %	231.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	211.700.000,00	100,00 %	231.700.000,00	100,00 %	211.700.000,00	100,00 %	655.100.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Penanaman Modal yang Dibina	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	347.518.000,00	100,00 %	349.255.590,00	100,00 %	351.001.800,00	100,00 %	1.047.775.390,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Sasaran 3: Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	Persentase	1,00	1,02	1,03		1,04		1,06		1,06		Dinas Perdagangan
	3.30.03.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase terpenuhinya Pelayanan pasar	Persentase	82,00%	100,00 %	100,00 %	1.029.946.250,00	100%	829.946.250,00	100%	829.946.250,00	100,00 %	2.689.838.750,00	Dinas Perdagangan

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	3.30.04.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	60.000.000,00	100,00 %	60.000.000,00	100,00 %	60.000.000,00	100,00 %	180.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.05.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor yang dilaksanakan	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	20.000.000,00	100,00 %	20.000.000,00	100,00 %	20.000.000,00	100,00 %	60.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.06.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	51.537.996,00	100,00 %	51.537.996,00	100,00 %	51.537.996,00	100,00 %	154.613.988,00	Dinas Perdagangan
		Sasaran 4: Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase	9,86	NA	1,65		1,8		2,00		2,00		
	3.31.02.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mandiri	Persentase	20,00%	20,00%	75,73 %	19.812.335.000,00	75,73%	19.982.915.992,00	75,73%	20.103.134.100,00	75,73%	59.898.385.092,00	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	3.31.03.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri	Persentase	100,00%	20,00%	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	30.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Sasaran 5: Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal Untuk Mendukung Pembangunan Pariwisata	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase	1267,08	13,88	14,92		15,35		16,68		16,68		
	2.22.02.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek budaya yang dikembangkan	Persentase	30,00%	30,00%	30,00 %	230.000.000,00	60,00%	230.000.000,00	100,00 %	230.000.000,00	100,00 %	690.000.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	2.22.06.	Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan / terkelola dengan baik	Persentase	1,59%	2,00%	2,25%	700.000.000,00	2,40%	703.500.000,00	2,60%	707.017.500,00	2,60%	2.110.517.500,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	3.26.02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan destinasi wisata yang dikembangkan	Persentase	4,00%	4,00%	5,66%	450.000.000,00	7,54%	250.000.000,00	9,42%	250.000.000,00	9,42%	950.000.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	3.26.03.	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase jenis media promosi yang digunakan	Persentase	50,00%	50,00%	50,00 %	150.000.000,00	50,00%	150.000.000,00	50,00%	150.000.000,00	50,00%	450.000.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	3.26.05.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Prosentase objek wisata yang berkembang/aktif	Persentase	39,28%	39,28%	39,28 %	127.000.000,00	39,28%	127.000.000,00	39,28%	127.000.000,00	39,28%	381.000.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	**Indikator tujuan 2 : Gini Rasio**		**30,60%**	**0,29**	**0,29 - 0,28**		**0,28 - 0,27**		**0,27 - 0,26**		**0,26**		
		Sasaran 1: Meningkatnya Produktifitas Usaha Ekonomi Rakyat	Pertumbuhan omset Usaha Mikro dan Koperasi	Persentase	4.63	0,07	0,1		0,03		0,16		0,16		
	2.17.02.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Persentase	14,00%	14,00%	14,00 %	45.000.000,00	14,00%	45.000.000,00	14,00%	45.000.000,00	14,00%	135.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
	2.17.03.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi	Persentase	55,00%	55,00%	55,00 %	25.000.000,00	55,00%	25.000.000,00	55,00%	25.000.000,00	55,00%	75.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
	2.17.04.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Persentase	40,00%	40,00%	40,00 %	20.000.000,00	40,00%	20.000.000,00	40,00%	20.000.000,00	40,00%	60.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
	2.17.05.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi (orang)	Persentase	94,00%	94,00%	94,00 %	427.285.000,00	94,00%	429.346.425,00	94,00%	431.418.100,00	94,00%	1.288.049.525,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	2.17.06.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas	Persentase	69,00%	69,00%	69,00 %	20.000.000,00	69,00%	20.000.000,00	69,00%	20.000.000,00	69,00%	60.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
	2.17.07.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan	Persentase	35,00%	35,00%	35,00 %	90.000.000,00	35,00%	90.000.000,00	35,00%	90.000.000,00	35,00%	270.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
	2.17.08.	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Dikembangkan	Persentase	5,00%	5,00%	5,00%	20.000.000,00	5,00%	20.000.000,00	5,00%	20.000.000,00	5,00%	60.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Sasaran 2: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	(1) Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	70,59	74,25	75		79		83		83		Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase	100%	100%	100%	609.000.000	100%	609.000.000	100%	609.000.000	100%	1.827.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase gapoktan yang mendapatkan pelayanan distribusi pangan	Persentase	100%	100%	100%	976.337.500	100%	995.481.687	100%	2.971.465.787	100%	4.943.284.974	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.04.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan yang tertangani menuju tahan pangan	Persentase	100%	100%	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	48.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN INFRASTRUKTU	**Indikator tujuan 3 : Rata-rata kualitas infrastruktur**	Persentase	**59,18%**	**61,20 %**	**62,42 % - 63,43 %**		**63,50 % - 64,75 %**		**64,80 % - 65,75 %**		**65,75 %**		

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		R BERWAWASAN LINGKUNGAN													
		Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Dan Permukiman	Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik	Persentase	63,35%	63,75%	64,00 %		64.25%		64,75%		64,75%		
	1.03.12.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	Persentase	90,98	90,98	90,98	200.000.000,00	90,98	200.000.000,00	90,98	200.000.000,00	90,98	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas sawah yang terlayani irigasi	Persentase	53,27	53.27%	63,27	4.448.814.000,00	87.58	10.961.472.919,00	60,63%	9.617.292.919,00	60,63%	25.027.579.838,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.11.	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Prosentase jasa konstruksi yang dilaksanakan	Persentase	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	1.03.10.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	Persentase	71	71	73	10.115.025.990,00	78	10.115.025.990,00	80	10.115.025.990,00	80	30.345.077.970,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Dan Permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	Persentase	36,18%	39,84%	39,84 %		41,49%		43,34%		43,34%		
	1.03.03.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)	Persentase	62	62	62	6.335.922.000,00	64	6.615.851.610,00	67	6.395.930.800,00	67	19.347.704.410,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.03.05.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak	Persentase	32	32	32	11.603.506.452,00	35	11.908.299.117,00	38	11.713.365.652,00	38	35.225.171.221,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.03.06.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap drainase permukiman	Persentase	32	32	32	8.100.000.000,00	35	5.993.550.154,00	38	5.993.550.154,00	38	20.087.100.308,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.03.08.	Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase bangunan gedung pemerintah yang dibangun dikembangkan dan memiliki SLF	Persentase	23,69	23,69	23,69	70.000.000,00	36,69	70.000.000,00	45,7	70.000.000,00	45,7	210.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	1.03.09.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan dan lingkungannya	Persentase	20	20	20	30.000.000,00	22	30.000.000,00	24	30.000.000,00	24	90.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik	Persentase	64,2	64.20	64,2	45.181.262.500,00	64,45	45.181.262.500,00	64,7	45.181.262.500,00	64,7	135.543.787.500,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU	Persentase	64.20	64.20	64.20	10.000.000,00	64.45	10.000.000,00	64.70	10.000.000,00	64.70	30.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.04.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan kawasan permukiman kumuh yang tertata dengan baik	Persentase	54.20	54.20	64.20	1.800.000.000,00	64.45	3.906.449.846,00	64.70	3.906.449.846,00	64.70	9.612.899.692,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yg terehabilitasi	Persentase	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Dan Permukiman	Persentase Infrastruktur Perhubungan yang berfungsi dengan baik	Persentase	78,00%	80,00%	83.43 %		86.53%		88,07%		88,07%		

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	2.15.02.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ & Keselamatan	Persentase	50,00%	50,00%	50,00 %	47.686.350,00	75,00%	37.686.350,00	85,00%	47.686.350,00	85,00%	133.059.050,00	Dinas Perhubungan
			Persentase Capaian Operasional dan ketertiban LLAJ	Persentase	60,00%	60,00%	60,00 %	2.845.750.500,00	80,00%	2.855.550.500,00	95,00%	2.865.550.500,00	95,00%	8.566.851.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase pemanfaatan Perlengkapan Jalan	Persentase	60,00%	60,00%	60,00 %	17.357.911.460,00	75,00%	17.357.911.460,00	95,00%	17.452.911.460,00	95,00%	52.168.734.380,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Sasaran 2: Terjaganya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	56,84	55,44	56,90 - 56,92		56,93 - 56,95		56,96 - 57,00		56,96 - 57,00		
	2.11.02.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	220.000.000,00	100,00 %	120.000.000,00	100,00 %	120.000.000,00	100%	460.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Unit Lingkungan Hidup yang terkendali pencemarannya	Persentase	13	13	13	223.000.000,00	13	223.000.000,00	13	223.000.000,00	13	669.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola sesuai ketentuan	Persentase	10	10	10	1.600.000.000,00	10	2.300.000.000,00	10	2.300.000.000,00	10	6.200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	2.11.05.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Unit Penyimpanan sementara Limbah B3 yang terkendali	Persentase	88,00%	89,00%	89,00 %	10.000.000,00	92,00%	10.000.000,00	95,00%	10.000.000,00	95,00%	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang terkendali lingkungannya	Persentase	100	100	100	114.000.000,00	100	114.000.000,00	100	114.000.000,00	100	342.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang di selesaikan	Persentase	100	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Persampahan yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Persentase	29,22%	29,22%	34,20 %	5.822.257.500,00	34,40%	5.413.757.500,00	35,00%	5.648.757.500,00	35,00%	16.884.772.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	**Indikator tujuan 4: Indeks Resiko Bencana**		**100,08 %**	**100,08**	**98,44 %**		**96,51 %**		**94,86 %**		**94,80 %**		
		Sasaran 1: Optimalnya Penanganan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Persentase	0,58**	NA	0,59 - 0,60		0,61- 0,62		0,63 - 0,64		0,63 - 0,64		
	1.05.03.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana yang tertangani	Persentase	80,00%	80,0%	80,0%	100.000.000,00	80,00%	125.000.000,00	80,00%	125.000.000,00	80,00%	350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
			Persentase pengurangan resiko bencana	Persentase	80,00%	80,0%	80,0%	150.000.000,00	80,00%	100.000.000,00	80,00%	150.000.000,00	80,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase	80,00%	80,0%	80,0%	100.000.000,00	80,00%	125.000.000,00	80,00%	125.000.000,00	80,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	Persen	100,00%	100%	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	90.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.06.06.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	85,00%	100,00 %	100,00 %	550.000.000,00	100,00 %	550.000.000,00	100,00 %	550.000.000,00	100,00 %	1.650.000.000,00	Dinas Sosial
4		**TUJUAN 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**	**Indikator Tujuan 1: Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**5374,00%**	**55,85**	**57,01 - 58,00**		**58,30 - 59,00**		**59,20 - 61,00**		**61**		
		Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Inovasi, Perencanaan Berkualitas Dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Persentase	(B) 63,01	(BB) 70.23	(BB) 70.23		(BB) 71.23		(BB) 72.25		(BB) 72.25		
			Status Kinerja LPPD;	Persentase	Sangat Tinggi (ST)*	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Sangat Tinggi (ST)		Sangat Tinggi (ST)		Sangat Tinggi (ST)		
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Persentase	82,78	84,32	84,45		84,55		84,65		84,65		

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	1.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	79	79	85	495.550.177.083,00	90	525.857.669.593,00	95	542.764.479.718,00	95	1.564.172.326.394,00	Dinas Pendidikan
	1.02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)	Indeks	75	75	80	142.022.270.417,00	8000%	148.335.868.583,00	8000%	155.478.291.169,00	80	445.836.430.169,00	Dinas Kesehatan
			Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	Indeks	75	75	80	202.651.056.553,00	8000%	225.750.535.593,00	8000%	253.652.611.113,00	80	682.054.203.259,00	RSUD
	1.03.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	indeks	77	77	77	12.534.902.499,00	7900,00%	12.821.544.927,00	8400,00%	12.664.902.499,00	8400,00%	38.021.349.925,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.04.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	7.184.200.270,00	10000,00%	7.184.200.270,00	10000,00%	7.351.210.470,00	10000,00%	21.719.611.010,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.05.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	12.563.933.166,00	100	12.616.433.167,00	100	12.672.433.167,00	100	37.852.799.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	1.05.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	86	90	90	1.844.055.731,00	92,00	1.907.555.731,00	94,00	1.868.555.731,00	9400,00 %	5.620.167.193,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.06.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	5.697.623.826,00	100,00	5.789.099.346,00	10000,00%	5.957.599.346,00	10000,00%		Dinas Sosial
	3.31.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	Indeks	100	100	6.433.832.316,00	100	6.569.412.999,00	100	6.608.332.316,00	100	19.611.577.631,00	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	2.14.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	85		86	6.340.447.225,00	87	6.481.949.925,00	88	6.545.449.925,00	88	19.367.847.075,00	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.09.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100,00	100,00	100,00	4.469.920.980,00	100,00	4.580.920.980,00	100,00	4.686.920.980,00	100,00	13.737.762.940,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.11.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100,00%	100,00 %	100,00 %	14.879.636.289,00	100,00 %	15.048.136.289,00	100,00 %	15.111.636.289,00	100,00 %	45.039.408.867,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	2.12.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	75	76	76	5.743.676.712,00	77	5.803.116.712,00	78	5.894.116.712,00	78	17.440.910.136,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100%	10000,00%	100%	5.602.992.769,00	10000 %	5.695.492.769,00	10000 %	5.822.042.769,00	10000 %	17.120.528.307,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	2.15.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	82	82,00	82.25	12.742.303.103,00	82.5	13.328.205.954,00	82.75	13.383.205.954,00	82.75	39.453.715.011,00	Dinas Perhubungan
	2.16.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	83	85,00	85	6.610.350.402,00	87,00	6.685.350.402,00	90,00	6.692.850.402,00	90,00	19.988.551.206,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.17.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	5.946.700.540,00	100	6.006.700.540,00	100	6.066.700.539,00	100	18.020.101.619,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
	2.18.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	4.992.257.079,00	100	5.120.444.330,00	100	5.181.944.330,00	100	15.294.645.739,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	2.19.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	nilai	76,77	7700,00 %	77	4.735.157.716,00	78,00	4.812.801.116,00	79,00	4.914.814.416,00	79,00	14.462.773.248,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	3.26.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase	100	100	100	4.290.687.810,00	100	4.506.687.750,00	100	4.622.687.750,00	100	13.420.063.310,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	2.23.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	78,42 Indeks	89 Indeks	89 Indeks	5.009.628.101,00	91 Indeks	5.082.628.101,00	93 Indeks	5.158.628.101,00	93 Indeks	15.250.884.303,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	3.25.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	5.376.629.445,00	100	5.545.129.445,00	100	5.608.629.445,00	100	16.530.388.335,00	Dinas Perikanan
	3.27.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	13.059.538.412,00	100	13.189.538.413,00	100	13.249.538.413,00	100	39.498.615.238,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan
	3.27.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	8.028.128.739,00	100	8.112.645.739,00	100	8.137.645.739,00	100	24.278.420.217,00	Dinas Peternakan

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	3.30.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100,00	100	33.054.108.444,00	100	33.216.008.444,00	100	33.218.508.444,00	100	99.488.625.332,00	Dinas Perdagangan
	5.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	85,44	86,00	86	7.040.662.401,00	87,00	7.338.338.801,00	88,0	7.475.612.401,00	88	21.854.613.603,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	80	80,00	82	37.573.641.069,00	83,00	37.901.171.114,00	85,00	38.009.868.514,00	85,00	113.484.680.697,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	5.2.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	78	7800,00 %	78,5	8.749.986.953,00	79,00	8.791.497.753,00	79,50	8.851.497.753,00	79,50	26.392.982.459,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.03.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	85	85,0	85	7.492.672.201,00	86,0	7.527.972.201,00	87,0	7.644.722.201,00	87,0	22.665.366.603,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
	5.05.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	82	8200,00 %	82,5	3.564.249.221,00	8300,00 %	3.675.249.221,00	8350,00 %	3.791.249.221,00	8350,00 %	11.030.747.663,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	6.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	83,16	83,16	86	11.239.808.044,00	88	10.146.808.044,00	90	10.181.808.044,00	90	31.568.424.132,00	Inspektorat
	8.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	75	7500,00 %	80	5.054.181.863,00	8500,00 %	6.220.673.781,00	9000,00 %	6.336.673.781,00	9000,00 %	17.611.529.425,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	4.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	80	80	100	31.357.471.398,00	100	31.899.742.460,00	100	31.936.242.460,00	100	95.193.456.318,00	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
			Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi	Persentase	100	100	100	200.876.000,00	100	255.876.000,00	100	258.376.000,00	100		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
			Persentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi	Persentase	100	100	100	222.506.000,00	100	277.506.000,00	100	280.006.000,00	100		Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
	4.01.02.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	Persentase	100	100	100	6.847.604.000,00	100	6.902.604.000,00	100	6.905.104.000,00	100	20.655.312.000,00	Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat)
			Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan, dan bantuan hukum yang diselesaikan	Persentase	100	100	100	159.113.000,00	100	214.113.000,00	100	216.613.000,00	100		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
			Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase	100	100	100	342.974.000,00	100	397.974.000,00	100	400.474.000,00	100		Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah)
	4.01.03.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ	Indeks	77	77	100	1.107.096.000,00	100	1.162.096.000,00	100	1.164.596.000,00	100	3.433.788.000,00	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)
			Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun	Persentase	80	80	80	83.453.000,00	80	138.453.000,00	80	140.953.000,00	80		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Mineral)
			Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	144.088.000,00	100	199.088.000,00	100	201.588.000,00	100		Sekretariat Daerah (Bagian Adm Pembangunan)
	4.02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	41.995.735.240,00	100	41.995.735.240,00	100	41.995.735.240,00	100		Sekretariat DPRD
	4.02.02.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase pembahasan penganggaran yang dibahas DPRD	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	5.491.181.550,00	100,00 %	5.741.181.550,00	100,00 %	5.741.181.550,00	100,00 %	16.973.544.650,00	Sekretariat DPRD
			Prosentase Produk Hukum yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	12.401.858.002,00	100,00 %	12.563.561.502,00	100,00 %	12.627.061.502,00	100,00 %	37.592.481.006,00	
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	95	2.472.009.098,00	98	2.497.509.098,00	100	2.556.009.098,00	95	7.525.527.294,00	Kecamatan Labang

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	3.500.000,00	95,00%	3.500.000,00	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	11.000.000,00	Kecamatan Labang
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	12.000.000,00	100,00 %	12.000.000,00	100,00 %	12.500.000,00	100,00 %	36.500.000,00	Kecamatan Labang
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	3.500.000,00	100,00 %	3.500.000,00	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	11.000.000,00	Kecamatan Labang
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	3.500.000,00	95,00%	3.500.000,00	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	11.000.000,00	Kecamatan Labang
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	72,92	72,92	74,23	2.797.113.487,00	75,69	2.815.113.487,00	76,94	2.859.613.487,00	76,94	8.471.840.461,00	Kecamatan Modung
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	7.000.000,00	95,00%	9.500.000,00	100,00 %	9.500.000,00	100,00 %	26.000.000,00	Kecamatan Modung
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	23.900.000,00	95,00%	28.500.000,00	100,00 %	38.500.000,00	100,00 %	90.900.000,00	Kecamatan Modung

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	6.000.000,00	95,00%	6.400.000,00	100,00 %	10.400.000,00	100,00 %	22.800.000,00	Kecamatan Modung
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	22.750.000,00	95,00%	22.750.000,00	100,00 %	24.750.000,00	100,00 %	70.250.000,00	Kecamatan Modung
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	96	96,5	100	2.484.587.532,00	100	2.300.087.532,00	100	2.360.587.532,00	100	7.145.262.596,00	Kecamatan Kokop
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	4.852.900,00	100,00 %	4.852.900,00	100,00 %	4.852.900,00	100,00 %	14.558.700,00	Kecamatan Kokop
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	13.106.700,00	100,00 %	13.106.700,00	100,00 %	13.106.700,00	100,00 %	39.320.100,00	Kecamatan Kokop
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	4.923.100,00	100,00 %	4.923.100,00	100,00 %	4.923.100,00	100,00 %	14.769.300,00	Kecamatan Kokop
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	3.345.800,00	100,00 %	3.345.800,00	100,00 %	3.345.800,00	100,00 %	10.037.400,00	Kecamatan Kokop

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	94	96	2.581.199.192,00	98	2.607.199.192,00	100	2.667.199.192,00	100	7.855.597.576,00	Kecamatan Konang
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	100,00 %	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	12.000.000,00	Kecamatan Konang
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	85,00%	100,00 %	100,00 %	13.500.000,00	100,00 %	13.500.000,00	100,00 %	14.000.000,00	100,00 %	41.000.000,00	Kecamatan Konang
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	85,00%	100,00 %	100,00 %	3.500.000,00	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	11.500.000,00	Kecamatan Konang
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85,00%	100,00 %	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	9.000.000,00	100,00 %	9.000.000,00	100,00 %	28.000.000,00	Kecamatan Konang
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	90	2.123.509.989,00	95	2.140.443.540,00	100	2.193.943.540,00	100	6.457.897.069,00	Kecamatan Geger
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	15.000.000,00	Kecamatan Geger

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	22.000.000,00	100,00 %	25.000.000,00	100,00 %	27.000.000,00	100,00 %	74.000.000,00	Kecamatan Geger
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	7.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	12.000.000,00	100,00 %	29.000.000,00	Kecamatan Geger
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	15.000.000,00	100,00 %	18.000.000,00	100,00 %	21.000.000,00	100,00 %	54.000.000,00	Kecamatan Geger
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	90	2.426.711.363,00	95	2.457.011.364,00	100	2.517.511.364,00	100	7.401.234.091,00	Kecamatan Kwanyar
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	85,00%	90 %	3.000.000,00	95%	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	9.000.000,00	Kecamatan Kwanyar
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	90,00%	90 %	12.263.150,00	95%	12.263.150,00	100%	12.263.150,00	100%	36.789.450,00	Kecamatan Kwanyar
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	90,00%	90 %	2.000.000,00	95%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	6.000.000,00	Kecamatan Kwanyar

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85,00%	85,00%	90 %	4.000.000,00	95,00%	4.000.000,00	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	12.000.000,00	Kecamatan Kwanyar
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	98	100	100	3.102.837.230,00	100	3.128.337.230,00	100	3.188.837.230,00	100	9.420.011.690,00	Kecamatan Socah
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	90%	90%	90%	4.500.000,00	95%	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00 %	13.500.000,00	Kecamatan Socah
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90%	90%	90%	13.500.000,00	95%	13.500.000,00	100%	13.500.000,00	100,00 %	40.500.000,00	Kecamatan Socah
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00 %	13.500.000,00	Kecamatan Socah
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90%	100%	90%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100,00 %	21.000.000,00	Kecamatan Socah
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	96,85	96,85	98	3.156.377.958,00	99	3.029.897.959,00	100	3.090.397.959,00	100	9.276.673.876,00	Kecamatan Galis

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	4.510.000,00	95,00%	4.510.000,00	100,00 %	4.510.000,00	100,00 %	13.530.000,00	Kecamatan Galis
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	18.890.000,00	100,00 %	19.250.000,00	100,00 %	19.250.000,00	100,00 %	57.390.000,00	Kecamatan Galis
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	2.500.000,00	100,00 %	2.500.000,00	100,00 %	2.500.000,00	100,00 %	7.500.000,00	Kecamatan Galis
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	5.250.000,00	95,00%	5.250.000,00	100,00 %	5.250.000,00	100,00 %	15.750.000,00	Kecamatan Galis
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	95	100	100	2.727.802.486,00	100	2.550.952.606,00	100	2.610.932.756,00	100	7.889.687.848,00	Kecamatan Tanjung Bumi
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	2.500.000,00	100,00 %	3.500.000,00	100,00 %	3.500.000,00	90,00%	9.500.000,00	Kecamatan Tanjung Bumi
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	15.000.000,00	100,00 %	15.000.000,00	100,00 %	17.000.000,00	100,00 %	47.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bumi

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	2.500.000,00	100,00 %	3.849.880,00	100,00 %	2.500.000,00	100,00 %	8.849.880,00	Kecamatan Tanjung Bumi
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	2.798.620,00	100,00 %	2.798.620,00	100,00 %	2.668.350,00	100,00 %	8.265.590,00	Kecamatan Tanjung Bumi
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	96,71	97	98	3.115.623.124,00	99	3.138.123.124,00	100	3.196.123.124,00	100	9.449.869.372,00	Kecamatan Blega
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	5.500.000,00	100,00 %	15.500.000,00	Kecamatan Blega
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	13.000.000,00	100,00 %	14.000.000,00	100,00 %	15.000.000,00	100,00 %	42.000.000,00	Kecamatan Blega
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	13.000.000,00	Kecamatan Blega
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	12.000.000,00	100,00 %	13.000.000,00	100,00 %	15.000.000,00	100,00 %	40.000.000,00	Kecamatan Blega

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	95	2.329.723.260,00	100	2.355.223.260,00	100	2.415.723.260,00	100	7.100.669.780,00	Kecamatan Tanah Merah
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	6.000.000,00	100,00 %	6.000.000,00	100,00 %	6.000.000,00	100,00 %	18.000.000,00	Kecamatan Tanah Merah
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	25.000.000,00	100,00 %	25.000.000,00	100,00 %	25.000.000,00	100,00 %	75.000.000,00	Kecamatan Tanah Merah
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	15.000.000,00	Kecamatan Tanah Merah
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	30.000.000,00	Kecamatan Tanah Merah
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	74,07	75	76,23	2.626.682.420,00	76,68	2.527.182.420,00	76,96	2.587.682.420,00	76,96	7.741.547.260,00	Kecamatan Tragah
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	3.500.000,00	95,00%	3.500.000,00	100,00 %	3.500.000,00	100,00 %	10.500.000,00	Kecamatan Tragah

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	15.500.000,00	100,00 %	15.500.000,00	100,00 %	15.500.000,00	100,00 %	46.500.000,00	Kecamatan Tragah
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	15.000.000,00	Kecamatan Tragah
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	8.000.000,00	100,00 %	8.000.000,00	100,00 %	8.000.000,00	100,00 %	24.000.000,00	Kecamatan Tragah
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	85	85	85	2.383.223.650,00	90	2.402.090.150,00	95	2.462.590.150,00	95	7.247.903.950,00	Kecamatan Klampis
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	100,00 %	100,00 %	4.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	14.000.000,00	Kecamatan Klampis
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	16.000.000,00	100,00 %	16.000.000,00	100,00 %	16.000.000,00	100,00 %	48.000.000,00	Kecamatan Klampis
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	3.366.500,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	13.366.500,00	Kecamatan Klampis

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90,00%	100,00 %	100,00 %	6.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	26.000.000,00	Kecamatan Klampis
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	90	2.653.184.689,00	93	2.678.684.689,00	96	2.739.184.689,00	96	8.071.054.067,00	Kecamatan Sepulu
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	90,00%	90,00%	100,00 %	12.000.000,00	100,00 %	12.000.000,00	100,00 %	12.000.000,00	100,00 %	36.000.000,00	Kecamatan Sepulu
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	90,00%	100,00 %	23.000.000,00	100,00 %	23.000.000,00	100,00 %	23.000.000,00	100,00 %	69.000.000,00	Kecamatan Sepulu
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	90,00%	100,00 %	18.000.000,00	100,00 %	18.000.000,00	100,00 %	18.000.000,00	100,00 %	54.000.000,00	Kecamatan Sepulu
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90,00%	90,00%	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	30.000.000,00	Kecamatan Sepulu
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	2.466.040.351,00	100	2.372.228.302,00	100	2.431.377.302,00	100	7.269.645.955,00	Kecamatan Arosbaya

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	5.000.000,00	100,00 %	14.955.200,00	100,00 %	16.306.200,00	100,00 %	36.261.400,00	Kecamatan Arosbaya
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	12.376.951,00	100,00 %	19.783.800,00	100,00 %	19.783.800,00	100,00 %	51.944.551,00	Kecamatan Arosbaya
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	5.103.900,00	100,00 %	5.103.900,00	100,00 %	5.103.900,00	100,00 %	15.311.700,00	Kecamatan Arosbaya
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00%	100,00 %	100,00 %	4.986.601,00	100,00 %	4.986.601,00	100,00 %	4.986.601,00	100,00 %	14.959.803,00	Kecamatan Arosbaya
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	11.148.690.454,00	100	11.267.870.904,00	100	11.313.370.904,00	100	33.729.932.262,00	Kecamatan Bangkalan
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85%	100%	100%	22.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	66.000.000,00	Kecamatan Bangkalan
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90%	100%	100%	2.861.122.051,00	100%	2.861.122.051,00	100%	2.861.622.051,00	100%	8.583.866.153,00	Kecamatan Bangkalan

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	80%	100%	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	57.000.000,00	Kecamatan Bangkalan
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90 %	100%	100%	47.000.000,00	100%	47.000.000,00	100%	48.000.000,00	100%	142.000.000,00	Kecamatan Bangkalan
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	3.489.436.904,00	100	3.517.136.904,00	100	3.577.636.904,00	100	10.584.210.712,00	Kecamatan Kamal
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	100%	100%	100%	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100%	3.600.000,00	Kecamatan Kamal
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90%	90%	100%	13.900.000,00	100%	13.900.000,00	100%	13.900.000,00	100%	41.700.000,00	Kecamatan Kamal
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90%	90%	100%	5.200.000,00	100%	5.200.000,00	100%	5.200.000,00	100%	15.600.000,00	Kecamatan Kamal
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90%	90%	100%	4.650.000,00	100%	4.650.000,00	100%	4.650.000,00	100%	13.950.000,00	Kecamatan Kamal

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	95	4.727.009.981,00	100	4.532.009.981,00	100	4.634.009.981,00	100	13.893.029.943,00	Kecamatan Burneh
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	90%	90%	90%	5.000.000,00	95%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	17.000.000,00	Kecamatan Burneh
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90%	90%	90%	316.280.000,00	95%	257.780.000,00	100%	220.280.000,00	100%	794.340.000,00	Kecamatan Burneh
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90%	90%	90%	20.000.000,00	95%	22.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	62.000.000,00	Kecamatan Burneh
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90%	90%	90%	30.000.000,00	95%	32.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	92.000.000,00	Kecamatan Burneh
		Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Inovasi, Perencanaan Berkualitas Dan Pelayanan Publik	Opini BPK terhadap LKPD	Persentase	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	5.02.02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	417.791.137.207,00	100,00 %	416.954.648.825,00	100,00 %	414.137.562.903,50	100,00 %	1.248.883.348.935,50	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	1.964.000.000,00	100,00 %	2.001.620.194,00	100,00 %	2.005.620.194,00	100,00 %	5.971.240.388,00	
	5.02.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	100,00%		100,00 %	940.120.194,00	100,00 %	1.471.069.955,00	100,00 %	1.476.169.955,00	100,00 %	3.887.360.104,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Inovasi, Perencanaan Berkualitas Dan Pelayanan Publik	Level Maturitas SPIP	Persentase	Level 2	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
	6.01.02.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi dari hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	93.65%	100,00 %	100,00 %	387.919.500,00	100%	387.919.500,00	100%	387.919.500,00	100%	1.163.758.500,00	Inspektorat
	6.01.03.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B	Persen	61,54%	63,46%	63,46 %	75.383.000,00	65,38%	155.383.000,00	67,31%	180.383.000,00	67,31%	411.149.000,00	Inspektorat
		Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Inovasi, Perencanaan Berkualitas Dan Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Perencanaan	Persentase	83,36%	NA	85%		87%		89%		89%		

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	5.01.02.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja program PD dengan capaian minimal 80%	Persentase	84,54%	86,00%	86,00 %	40.000.000,00	88,00%	40.000.000,00	90,00%	40.000.000,00	90,00%	120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase konsistensi Penganggaran dengan Perencanaan	Persentase	99,55%	100,00 %	100,00 %	1.464.000.000,00	100,00 %	1.464.000.000,00	100,00 %	1.464.000.000,00	100,00 %	4.392.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang Berkualitas Baik	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	141.500.000,00	100,00 %	148.000.000,00	100,00 %	141.500.000,00	100,00 %	431.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang Berkualitas Baik	Persentase	97,06%	100,00 %	100,00 %	193.000.000,00	100,00 %	199.000.000,00	100,00 %	193.000.000,00	100,00 %	585.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Berkualitas Baik	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	101.000.000,00	100,00 %	106.000.000,00	100,00 %	105.000.000,00	100,00 %	312.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Inovasi, Perencanaan Berkualitas Dan Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah	Persentase	52,68	53,00	54,00		55,00		56,00		56,00		
	5.05.02.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang termanfaatkan dalam pembangunan	Pesentase	0,00%	0,00%	30,00 %	100.860.000,00	30,00%	102.526.666,00	30,00%	102.526.666,00	80,00%	305.913.332,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang termanfaatkan dalam pembangunan	Persentase	0,00%	0,00%	30,00 %	50.860.000,00	30,00%	52.526.666,00	30,00%	52.526.666,00	30,00%	155.913.332,00	
			Persentase inovasi dan teknologi yang termanfaatkan dalam pembangunan	Persentase	0,00%	0,00%	84,00 %	50.860.000,00	85,00%	52.526.668,00	86,00%	52.526.668,00	86,00%	155.913.336,00	
		Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Inovasi, Perencanaan Berkualitas Dan Pelayanan Publik	Kualitas Pengelolaan Arsip	Persentase	30%	40%	50%		55%		60%		60%		

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	2.24.2.	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan kearsipan	Persentase	79,12%	70,00%	70,00 %	36.030.100,00	75,00%	36.030.100,00	80,00%	57.030.100,00	80,00%	129.090.300,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Inovasi, Perencanaan Berkualitas Dan Pelayanan Publik	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase	88,60%	90,00%	91,50 %		92,00%		92,50%		92,50%		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP El	Persentase	94,00%	99,50%	99,50 %	822.695.735,00	99,60%	852.695.735,00	99,70%	822.695.735,00	99,70%	2.498.087.205,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase kepemilikan KIA	Persentase	42,00%	51,00%	51,00 %	0	52,00%	0	53,00%	0	53,00%	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	Persentase	91,07%	91,07%	98,40 %	141.162.651,00	98,80%	161.162.651,00	99,20%	156.162.651,00	99,20%	458.487.953,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Persentase penerbitan akte perkawinan	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	0	100,00 %	0	100,00 %	0	100,00 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Persentase penerbitan akte perceraian	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	0	100,00 %	0	100,00 %	0	1001,00 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
			Persentase penerbitan akte kematian	Persentase	100,00%	100,00 %	100,00 %	0	100,00 %	0	100,00 %	0	100,00 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bangkalan	Indeks Profesionalitas ASN	Persentase	55,03	60	62		64		66		66		
	5.03.02.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Updating Data Kepegawaian	Persentase	90,00%	90,00%	91,00 %	305.000.000,00	93,00%	305.000.000,00	95,00%	305.000.000,00	95,00%	915.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase	95,00%	95,00%	95,00 %	245.000.000,00	96,00%	245.000.000,00	97,00%	245.000.000,00	97,00%	735.000.000,00	
			Persentase ASN yang memiliki Predikat Kinerja Baik	Persentase	64,00%	64,00%	64,00 %	70.000.000,00	66,00%	70.000.000,00	68,00%	70.000.000,00	68,00%	210.000.000,00	
			Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP	Persentase	10,00%	10,00%	15,00 %	725.000.000,00	20,00%	725.000.000,00	25,00%	725.000.000,00	25,00%	2.175.000.000,00	
	5.04.02.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase	10,00%	0,00%	15,00 %	1.495.000.000,00	20,00%	1.525.000.000,00	25,00%	1.615.000.000,00	33,00%	4.635.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Sasaran 3: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase	1,89	2,00 - 2,20	2,20 - 2,35		2,35 - 2,55		2,55 - 2,75		3.5 Sangat Baik		

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Informasi Komunikasi													
	2.16.02.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persentase	100	100	100	1.480.814.000,00	100	1.430.814.000,00	100	1.530.814.000,00	100	4.442.442.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	35	15	18	250.000.000,00	20	200.000.000,00	22	300.000.000,00	22	750.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	35	15	18	1.800.000.000,00	20	1.800.000.000,00	22	1.800.000.000,00	22	5.400.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.21.2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase	35	22	22	40.390.000,00	44	40.390.000,00	88	40.390.000,00	88	121.170.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		(4) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	12,7%	13,3%	14,4%		15,5%		16,7%		16,7%		
	5.2.04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi pajak dan retribusi I terhadap PAD	Persentase	6,40%	6,40%	7,00%	Rp195.000.000,00	6,60%	Rp195.000.000,00	6,30%	Rp195.000.000,00	6,30%	585.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
			Kontribusi pajak dan retribusi II terhadap PAD		13,50%	13,50%	12,60 %	Rp145.000.000,00	11,50%	Rp145.000.000,00	10,50%	Rp145.000.000,00	10,50%	435.000.000,00	

No	Kode	Tujuan RPD/ Sasaran RPD/Urusan/Tujuan PD/ Sasaran PD/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Tujuan PD/ Sasaran PD/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program Dan						Kondisi Akhir RPD		PD Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
			Persentase kesesuaian Realisasi dan Target PAD		100,00%	100,00 %	100,00 %	Rp260.000.000,00	100,00 %	Rp130.000.000,00	100,00 %	Rp130.000.000,00	100,00 %	520.000.000,00	

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM, diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut program yang mendukung SPM Tahun 2024-2026 di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 6.6
Program Prioritas Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Standar Pelayanan Minimum	Anggaran		
				2024	2025	2026
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN					
1	Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Dinas pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	19.360.148.000	19.450.825.740	19.541.956.800
	Jumlah warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs	Dinas pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	169.503.420.700	170.542.017.900	171.174.946.900
	Jumlah warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	16.178.590.000	16.189.578.950	16.200.622.800
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN					
2		Dinas kesehatan	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	97.842.203.000	98.037.555.885	100.760.985.400
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
3	a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DPUPR				
	b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
4	a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yg Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	DPRKP	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
	b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masy yang terkena Relokasi Program Kab.					
	Pengalihan SPM dari Dinas PUPR					
	b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masy yang terkena Relokasi Program Kab.					
	Pengalihan SPM dari Dinas PUPR					
	a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.335.922.000	6.615.851.610	6.395.930.800

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Standar Pelayanan Minimum	Anggaran		
				2024	2025	2026
	b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.603.506.452	11.908.299.117	11.713.365.652
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
5	a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.025.060.250	2.025.060.250	1.979.060.250
	b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	175.000.000	175.000.000	175.000.000
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL					
6	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.200.000.000	1.250.000.000	1.600.000.000
	b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					
	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					
	d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	722.814.000	822.814.000	972.814.000
	e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Kab.		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	550.000.000	550.000.000	550.000.000
	e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Kab.		Penyediaan Makanan			834,277,420
JUMLAH PAGU				**325.696.664.402**	**327.767.003.452**	**331.264.682.602**

Pengentasan Kemiskinan dan stunting masih menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tabel 6.7 dan Tabel 6.8 berikut ini akan menunjukkan Program dan alokasi pagu yang mendukung pengentasan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2024-2026.

Tabel 6.7
Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Alokasi Anggaran (Rp)*		
			2024	2025	2026
I	**MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN**		**308.344.691.350**	**309.844.492.155**	**313.913.483.800**
1.	**DINAS SOSIAL**		***2.847.814.000***	***2.997.814.000***	***3.497.814.000***
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 722.814.000	Rp 822.814.000	Rp 972.814.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 550.000.000	Rp 550.000.000	Rp 550.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 375.000.000	Rp 375.000.000	Rp 375.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 1.200.000.000	Rp 1.250.000.000	Rp 1.600.000.000
2	**DINAS KESEHATAN**		***97.842.203.000***	***98.037.555.885***	***100.760.985.400***
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 97.842.203.000	Rp 98.037.555.885	Rp 100.760.985.400
3	**DINAS PENDIDIKAN**		***205.470.974.350***	***206.618.738.240***	***207.457.583.000***
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 428.815.650	Rp 436.315.650	Rp 540.056.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 205.042.158.700	Rp 206.182.422.590	Rp 206.917.526.500
4	**DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		***2.183.700.000***	***2.190.384.030***	***2.197.101.400***
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Rp 2.183.700.000	Rp 2.190.384.030	Rp 2.197.101.400
II	**MENINGKATKAN PENDAPATAN**		**24.161.340.250**	**24.830.408.702**	**24.480.885.350**
1	**DINAS PMD**		***274.587.700***	***642.599.700***	***283.949.700***
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 84.845.900	Rp 98.537.900	Rp 90.487.900
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 189.741.800	Rp 544.061.800	Rp 193.461.800
2	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**		***85.000.000***	***85.000.000***	***85.000.000***
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	85.000.000	85.000.000	85.000.000
3	**DINAS PERIKANAN**		***895.522.000***	***923.750.235***	***951.994.600***

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Alokasi Anggaran (Rp)*		
			2024	2025	2026
I	**MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN**		**308.344.691.350**	**309.844.492.155**	**313.913.483.800**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 865.522.000	Rp 893.750.235	Rp 921.994.600
4	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**		***110.000.000***	***110.000.000***	***110.000.000***
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
5	**DINAS PERDAGANGAN**		***20.000.000***	***20.000.000***	***20.000.000***
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
6	**DINAS PETERNAKAN**		***5.631.000.000***	***5.620.000.000***	***5.626.000.000***
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 5.631.000.000	Rp 5.620.000.000	Rp 5.626.000.000
7	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**		***9.991.291.900***	***10.191.291.900***	***10.191.291.900***
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 9.991.291.900	Rp 10.191.291.900	Rp 10.191.291.900
8	**DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		***5.483.311.000***	***5.514.995.030***	***5.466.712.400***
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 5.453.311.000	Rp 5.484.995.030	Rp 5.436.712.400
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
9	**DINAS KETAHANAN PANGAN**		***1.585.337.500***	***1.604.481.687***	***1.608.646.600***
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 976.337.500	Rp 995.481.687	Rp 999.646.600
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp 609.000.000	Rp 609.000.000	Rp 609.000.000
10	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		***85.290.150***	***118.290.150***	***137.290.150***
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 85.290.150	Rp 118.290.150	Rp 137.290.150
III	**MEMINIMALKAN WILAYAH KANTONG KEMISKINAN**		**124.161.078.047**	**126.930.025.540**	**127.434.274.693**
1	**DINAS PMD**		***1.900.000***	***1.900.000***	***2.000.000***
		PROGRAM PENATAAN DESA	Rp 1.900.000	Rp 1.900.000	Rp 2.000.000

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Alokasi Anggaran (Rp)*		
			2024	2025	2026
I	**MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN**		**308.344.691.350**	**309.844.492.155**	**313.913.483.800**
2	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		***19.739.428.452***	***22.430.600.573***	***22.015.746.298***
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 6.335.922.000	Rp 6.615.851.610	Rp 6.395.930.800
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 1.800.000.000	Rp 3.906.449.846	Rp 3.906.449.846
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 11.603.506.452	Rp 11.908.299.117	Rp 11.713.365.652
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		***72.354.351.688***	***71.929.805.465***	***72.354.351.688***
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 72.354.351.688	Rp 71.929.805.465	Rp 72.354.351.688
5	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		***3.615.000.000***	***3.978.100.000***	***4.361.526.800***
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 3.615.000.000	Rp 3.978.100.000	Rp 4.361.526.800
6	**DINAS PERHUBUNGAN**		***17.352.911.460***	***17.352.911.460***	***17.352.911.460***
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 17.352.911.460	Rp 17.352.911.460	Rp 17.352.911.460
7	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		***6.566.372.447***	***6.655.812.447***	***6.716.812.447***
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.743.676.712	Rp 5.803.116.712	Rp 5.894.116.712
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 822.695.735	Rp 852.695.735	Rp 822.695.735
8	**DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		***4.531.114.000***	***4.580.895.595***	***4.630.926.000***
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp 4.531.114.000	Rp 4.580.895.595	Rp 4.630.926.000
TOTAL ANGGARAN			**456.667.109.647**	**461.604.926.397**	**465.828.643.843**

Tabel 6.8
Program Prioritas Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

NO	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG	ANGGARAN			AKSI KONVERGENSI
			2024	2024	2024	
1	**DINAS KESEHATAN**					
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp97.842.203.000	Rp98.037.555.885	Rp100.760.985.400	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp475.547.000	Rp476.498.244	Rp475.547.000	
JUMLAH			**Rp98.317.750.000**	**Rp98.514.054.129**	**Rp101.236.532.400**	
2	**DINAS PENDIDIKAN**					
		Program Pengelolaan Pendidikan	Rp205.042.158.700	Rp206.182.422.590	Rp206.917.526.500	
JUMLAH			**Rp205.042.158.700**	**Rp206.182.422.590**	**Rp206.917.526.500**	
3	**DINAS SOSIAL**					
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp722.814.000	Rp822.814.000	Rp972.814.000	
JUMLAH			**Rp722.814.000**	**Rp822.814.000**	**Rp972.814.000**	
4	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**					
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp866.377.500	Rp880.481.687	Rp874.646.600	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp609.000.000	Rp609.000.000	Rp609.000.000	
JUMLAH			**Rp1.491.377.500**	**Rp1.505.481.687**	**Rp1.499.646.600**	
5	**DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp2.183.700.000	Rp2.190.384.030	Rp2.197.101.400	

NO	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG	ANGGARAN			AKSI KONVERGENSI
			2024	2024	2024	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp4.531.114.000	Rp4.580.895.595	Rp4.630.926.000	
		Program Pengendalian Penduduk	Rp1.351.200.000	Rp1.351.200.000	Rp1.351.200.000	
JUMLAH			**Rp8.066.014.000**	**Rp8.122.479.625**	**Rp8.179.227.400**	
6	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**					
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 6.335.922.000	Rp 6.615.851.610	Rp 6.395.930.800	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp8.100.000.000	Rp5.993.550.154	Rp5.993.550.154	
JUMLAH			**Rp14.435.922.000**	**Rp12.609.401.764**	**Rp12.389.480.954**	
7	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp1.480.814.000	Rp1.430.814.000	Rp1.530.814.000	
JUMLAH			**Rp1.480.814.000**	**Rp1.430.814.000**	**Rp1.530.814.000**	
8	**DINAS PERDAGANGAN**					
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
JUMLAH			**Rp70.000.000**	**Rp70.000.000**	**Rp70.000.000**	
9	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**					
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp19.357.335.000	Rp19.452.496.675	Rp19.548.134.100	
JUMLAH			**Rp19.357.335.000**	**Rp19.452.496.675**	**Rp19.548.134.100**	
10	**DINAS PERIKANAN**					
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp865.522.000	Rp893.750.235	Rp921.994.600	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	
JUMLAH			**Rp925.522.000**	**Rp953.750.235**	**Rp981.994.600**	
11	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					

NO	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG	ANGGARAN			AKSI KONVERGENSI
			2024	2024	2024	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp435.500.000	Rp453.000.000	Rp439.500.000	
JUMLAH			**Rp435.500.000**	**Rp453.000.000**	**Rp439.500.000**	
12	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
		Program Pendaftaran Penduduk	Rp822.695.735	Rp852.695.735	Rp822.695.735	
		Program Pencatatan Sipil	Rp141.162.651	Rp161.162.651	Rp156.162.651	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp99.152.500	Rp99.152.500	Rp109.152.500	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp13.490.000	Rp13.490.000	Rp13.490.000	
JUMLAH			**Rp1.076.500.886**	**Rp1.126.500.886**	**Rp1.101.500.886**	
13	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**					
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	
JUMLAH			**Rp100.000.000**	**Rp100.000.000**	**Rp100.000.000**	
14	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**					
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp84.845.900	Rp98.537.900	Rp90.487.900	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat. Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp189.741.800	Rp544.061.800	Rp193.461.800	
JUMLAH			**Rp274.587.700**	**Rp642.599.700**	**Rp283.949.700**	
15	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**					
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
		Program Pengelolaan Persampahan	Rp5.822.257.500	Rp5.413.757.500	Rp5.648.757.500	
JUMLAH			**Rp5.832.257.500**	**Rp5.423.757.500**	**Rp5.658.757.500**	
T O T A L			**Rp357.628.553.286**	**Rp357.409.572.791**	**Rp360.909.878.640**	

Dalam rangka peningkatan Indeks Pembanguna Manusia (IPM). maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan memetakan Program-Program pada Perangkat Daerah yang mendukung. Adapun rincian program priorias peningkatan IPM terdapat pada tabel 6.9. di bawah ini

Tabel 6.9
Program Prioritas Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN		
			2024	2025	2026
1	**DINAS PENDIDIKAN**				
	Angka Partisipasi Kasar (APK). (APS) Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	205.042.158.700	206.182.422.590	206.917.526.500
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. (APM)				
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP. (APM)				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Program Pengembangan Kurikulum	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2	**DINAS KESEHATAN**				
	Jumlah bayi yang mendapat pelayanan KN1 sampai KN lengkap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	97.842.203.000	98.037.555.885	100.760.985.400
	Jumlah ibu hamil yang dilayani				
	Jumlah bayi yang mendapat pelayanan KN1 sampai KN lengkap				
	Jumlah balita yang dilayani				
	Gizi ibu dan anak				
3	**DINAS KOPERASI DAN UMKM**				
	SDM koperasi yang memperoleh pembinaan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	15.000.000	15.000.000	15.000.000

NO	INDIKATOR/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN		
			2024	2025	2026
	usaha mikro yang mengikuti pelatihan	Program Pengembangan UMKM	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Jumlah wirausaha baru				
4	**DISPERINAKER**				
	Fasilitasi promosi produk unggulan daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	19.357.335.000	19.452.496.675	19.548.134.100
JUMLAH PAGU			**322.283.696.700**	**323.714.475.150**	**327.268.646.000**

Pengangguran terbuka merupakan salah satu permasalahan di Kabupaten Bangkalan yang perlu segera dituntaskan. Untuk itu diperlukan Program Prioritas yang strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun Program dan alokasi pagu yang mendukung Penurunan Angka Pengangguran di Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2024-2026 ditampilkan pada table berikut.

Tabel 6.9
Program Prioritas Penurunan Angka Pengangguran di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN		
			2024	2025	2026
1	**Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja**				
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	85.000.000	85.000.000	85.000.000
		Program Penempatan Tenaga Kerja	91.000.000	96.000.000	96.000.000
2	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Program Promosi Penanaman Modal	52.000.000	77.000.000	102.000.000
		Program pelayanan penanaman modal	211.700.000	231.700.000	211.700.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	347.518.000	349.255.590	351.001.800
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3.000.000	5.000.000	5.000.000
3	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**				
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	189.741.800	544.001.800	193.461.800
TOTAL			**985.959.800**	**1.393.957.390**	**1.050.163.600**

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan masih tumbuh melambat pasca pandemic Covid-19 pada tahun 2020. Untuk itu diperlukan Langkah khusus untuk dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Adapun Program dan alokasi pagu yang mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2024-2026 ditampilkan pada table berikut.

Tabel 6.10
Program Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
			2024	2025	2026
1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	45.000.000	45.000.000	45.000.000
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		Program Pendidkan dan Latihan Perkoperasian	427.285.000	429.346.425	431.418.100
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	90.000.000	90.000.000	90.000.000
		Program Pengembangan UMKM	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
		JUMLAH	**647.285.000**	**649.346.425**	**651.418.100**
2	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU PINTU				
		Program Promosi Penanaman Modal	52.000.000	77.000.000	102.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	347.518.000	349.255.590	351.001.800
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	6.000.000	6.000.000	8.000.000
		JUMLAH	**405.518.000**	**432.255.590**	**461.001.800**

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
			2024	2025	2026
3	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	450.000.000	250.000.000	250.000.000
		Program Pemasaran Pariwisata	150.000.000	150.000.000	150.000.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	127.000.000	127.000.000	127.000.000
		JUMLAH	**727.000.000**	**527.000.000**	**527.000.000**
4	DINAS PERDAGANGAN				
		Program Pengembangan export	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	1.029.946.250	829.946.250	829.946.250
		JUMLAH	**1.049.946.250**	**849.946.250**	**849.946.250**
		T O T A L	**2.649.749.250**	**2.458.548.265**	**2.462.366.150**

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, bab ini memuat daftar program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Program yang dirumuskan dalam bab ini harus memiliki kesesuaian dengan program, rumusan indikator yang tercantum pada masing-masing renstra Perangkat Daerah. Sehingga, proses perumusan program dilakukansecara berkesinambungan dengan muatan renstra Perangkat Daerah. Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan perangkat daerah secara jelas dapat dilihat melalui keterkaitan antara program perangkat daerah beserta indikator kinerja yang menjadi landasan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan Amanah dalam RPD yang direpresentasikan dalam permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran hingga indikator sasaran strategis di RPD. Sehingga, dalam perumusan program perangkat daerah perlu di-drive oleh RPD agar program masing-masing perangkat daerah disusun dengan melihat tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program prioritas ini adalah daftar program perangkat daerah per urusan pemerintahan yang dianggap memiliki hubungan secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan pemenuhan urusan pemerintahan (wajib). Program prioritas ini memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat strategik dan operasional. Program prioritas yang bersifat strategik memiliki pengertian bahwa dalam hal pencapaian indikator kinerjanya, hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah saja, tetapi juga terdapat peran dari Kepala Daerah

pada level kebijakan. Hal tersebut dikarenakan program-program strategik tercipta sebagai bentuk respon dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan juga mengakomodir program unggulan.

Sementara itu, program-program prioritas yang bersifat operasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tetap dilakukan agar setiap urusan pemerintahan (wajib) dapat terpenuhi. Sehingga, dalam program prioritas ini tidak hanya dirumuskan program strategik tujuan dan sasaran pembangunan daerah, tetapi juga terdapat program-program operasional untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Setelah terrumuskannya program-program prioritas, maka disusunlah pagu indikatif dari masing-masing program tersebut. Tujuannya, untuk melihat ketersediaan dana untuk mendanai program tersebut secara makro. Hal tersebut bersifat makro dan non teknis, artinya tujuannya bukanlah untuk melihat jumlah nominal secara detail antara kondisi fiscal daerah untuk mendanai per program, tetapi tujuannya adalah untuk melihat kerangka pendanaan dari ketersediaan anggaran dan kebutuhan penganggarannya.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah. Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Proyeksi belanja Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 dirancang dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Belanja daerah tahun 2023-2026 dirancang defisit setiap tahunnya dan untuk menutup defisit tersebut melalui pembiayaan daerah. Tabel berikut menggambarkan pendapatan daerah dengan belanja daerah dan Pembiayaan Neto:

Tabel 7.1.
Gambaran Proyeksi APBD Kab. Bangkalan 2024 s/d 2026

URAIAN	TAHUN		
	2024	2025	2026
Pendapatan Daerah	2.283.643.532.219,00	2.329.593.088.673,00	2.382.130.628.069,00
Belanja Daerah	2.367.673.286.719,00	2.395.593.088.673,00	2.452.130.628.069,00
Surplus/defisit	**-84.029.754.500,00**	**-66.000.000.000,00**	**-70.000.000.000,00**
Penerimaan Pembiayaan	84.029.754.500,00	66.000.000.000,00	70.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	**84.029.754.500,00**	**66.000.000.000,00**	**70.000.000.000,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**0**	**0**

Sumber: Proyeksi APBD Kab. Bangkalan (data diolah)

7.2. Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada (1) Muatan program sesuai janji politik Bupati dan wakil Bupati, (2) Nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari

APBD Kabupaten Bangkalan, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel Program Perangkat Daerah hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan dan bersifat indikatif. Berikut ini pagu indikatif masing-masing perangkat daerah tahun 2024-2026 (tabel 7.3) beserta Program Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan 2024-2026:

Tabel 7.2.
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

NO	URUSAN DAN NAMA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
A.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**1.351.420.585.462,00**	**1.470.345.160.373,50**	**1.525.517.427.640,00**
	Pendidikan	**700.604.335.784,00**	**732.052.092.183,00**	**749.694.006.218,00**
1	Dinas Pendidikan	700.604.335.784,00	732.052.092.183,00	749.694.006.218,00
	Kesehatan	**455.371.694.970,00**	**485.216.051.358,50**	**522.512.844.682,00**
2	Dinas Kesehatan	240.816.138.417,00	247.329.015.765,50	256.714.823.569,00
3	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	214.555.556.553,00	237.887.035.593,00	265.798.021.113,00
	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	**88.818.176.513,00**	**145.848.930.641,00**	**145.730.344.824,00**
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88.818.176.513,00	145.848.930.641,00	145.730.344.823,50
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	**80.464.891.222,00**	**81.209.123.697,00**	**80.801.769.422,00**
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	80.464.891.222,00	81.209.123.697,00	80.801.769.422,00
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**17.488.049.147,00**	**17.104.049.148,00**	**17.125.049.148,00**
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.293.993.416,00	14.846.493.417,00	14.856.493.417,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.194.055.731,00	2.257.555.731,00	2.268.555.731,00
	Sosial	**8.673.437.826,00**	**8.914.913.346,00**	**9.653.413.346,00**
8	Dinas Sosial	8.673.437.826,00	8.914.913.346,00	9.653.413.346,00
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**	**131.027.579.962,00**	**133.340.833.591,50**	**134.507.081.663,00**
	Tenaga Kerja	**536.000.000,00**	**541.000.000,00**	**541.000.000,00**
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	536.000.000,00	541.000.000,00	541.000.000,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**145.000.000,00**	**145.000.000,00**	**145.000.000,00**
10	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00
	Pangan	**6.083.758.480,00**	**6.213.902.667,50**	**6.324.067.580,00**

NO	URUSAN DAN NAMA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
11	Dinas Ketahanan Pangan	6.083.758.480,00	6.213.902.667,50	6.324.067.580,00
	Lingkungan Hidup	**22.888.893.789,00**	**23.248.893.789,00**	**23.547.393.789,00**
12	Dinas Lingkungan Hidup	22.888.893.789,00	23.248.893.789,00	23.547.393.789,00
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**6.820.177.598,00**	**6.929.617.598,00**	**6.995.617.598,00**
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.820.177.598,00	6.929.617.598,00	6.995.617.598,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**5.905.480.469,00**	**6.365.992.469,00**	**6.131.992.469,00**
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.905.480.469,00	6.365.992.469,00	6.131.992.469,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**17.676.072.225,00**	**17.899.040.550,00**	**17.964.288.325,00**
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.676.072.225,00	17.899.040.550,00	17.964.288.325,00
	Perhubungan	**32.993.651.413,00**	**33.579.354.264,00**	**33.749.354.264,00**
15	Dinas Perhubungan	32.993.651.413,00	33.579.354.264,00	33.749.354.264,00
	Komunikasi dan Informatika	**10.141.164.402,00**	**10.116.164.402,00**	**10.323.664.402,00**
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.141.164.402,00	10.116.164.402,00	10.323.664.402,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**6.593.985.540,00**	**6.656.046.965,00**	**6.718.118.639,00**
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6.593.985.540,00	6.656.046.965,00	6.718.118.639,00
	Penanaman Modal	**5.612.475.079,00**	**5.789.399.920,00**	**5.859.646.130,00**
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.612.475.079,00	5.789.399.920,00	5.859.646.130,00
	Kepemudaan dan Olah Raga	**9.485.814.416,00**	**9.591.814.416,00**	**9.822.814.416,00**
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	9.485.814.416,00	9.591.814.416,00	9.822.814.416,00
	Statistik	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
	Persandian	**40.390.000,00**	**40.390.000,00**	**40.390.000,00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.390.000,00	40.390.000,00	40.390.000,00
	Kebudayaan	**930.000.000,00**	**933.500.000,00**	**937.017.500,00**
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	930.000.000,00	933.500.000,00	937.017.500,00
	Perpustakaan	**5.123.386.451,00**	**5.239.386.451,00**	**5.334.386.451,00**
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.123.386.451,00	5.239.386.451,00	5.334.386.451,00
	Kearsipan	**36.030.100,00**	**36.030.100,00**	**57.030.100,00**
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36.030.100,00	36.030.100,00	57.030.100,00

NO	URUSAN DAN NAMA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
C.	**URUSAN PILIHAN**	**112.745.706.012,00**	**115.759.381.273,00**	**116.776.670.253,00**
	Kelautan dan Perikanan	**6.342.151.445,00**	**6.538.879.680,00**	**6.630.624.045,00**
22	Dinas Perikanan	6.342.151.445,00	6.538.879.680,00	6.630.624.045,00
	Pariwisata	**5.017.687.810,00**	**5.033.687.750,00**	**5.149.687.750,00**
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.017.687.810,00	5.033.687.750,00	5.149.687.750,00
	Pertanian	**40.849.106.751,00**	**43.381.992.162,00**	**44.029.899.352,00**
23	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	26.844.978.012,00	27.252.746.423,00	27.290.653.613,00
24	Dinas Peternakan	14.004.128.739,00	16.129.245.739,00	16.739.245.739,00
	Perdagangan	**34.225.592.690,00**	**34.187.492.690,00**	**34.189.992.690,00**
25	Dinas Perdagangan	34.225.592.690,00	34.187.492.690,00	34.189.992.690,00
	Perindustrian	**26.311.167.316,00**	**26.617.328.991,00**	**26.776.466.416,00**
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	26.311.167.316,00	26.617.328.991,00	26.776.466.416,00
D.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**100.353.956.190,00**	**101.747.930.752,00**	**101.867.930.752,00**
	Sekretariat Daerah	**40.465.181.398,00**	**41.447.452.460,00**	**41.503.952.460,00**
26	Sekretariat Daerah	40.465.181.398,00	41.447.452.460,00	41.503.952.460,00
	Sekretariat DPRD	**59.888.774.792,00**	**60.300.478.292,00**	**60.363.978.292,00**
27	Sekretariat DPRD	59.888.774.792,00	60.300.478.292,00	60.363.978.292,00
E.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**490.698.549.246,00**	**491.166.148.064,00**	**488.973.383.142,50**
	Perencanaan	**8.980.162.401,00**	**9.295.338.801,00**	**9.419.112.401,00**
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.980.162.401,00	9.295.338.801,00	9.419.112.401,00
	Keuangan	**467.618.885.423,00**	**467.590.007.841,00**	**464.950.719.319,50**
29	Badan Pendapatan Daerah	9.349.986.953,00	9.261.497.753,00	9.321.497.753,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	458.268.898.470,00	458.328.510.088,00	455.629.221.566,50
	Kepegawaian	**8.837.672.201,00**	**8.872.972.201,00**	**8.989.722.201,00**
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	8.837.672.201,00	8.872.972.201,00	8.989.722.201,00
	Pendidikan dan Pelatihan	**1.495.000.000,00**	**1.525.000.000,00**	**1.615.000.000,00**
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1.495.000.000,00	1.525.000.000,00	1.615.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan	**3.766.829.221,00**	**3.882.829.221,00**	**3.998.829.221,00**
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.766.829.221,00	3.882.829.221,00	3.998.829.221,00

NO	URUSAN DAN NAMA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
F.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**11.703.110.544,00**	**10.690.110.544,00**	**10.750.110.544,00**
	Pengawasan	**11.703.110.544,00**	**10.690.110.544,00**	**10.750.110.544,00**
33	Inspektorat	11.703.110.544,00	10.690.110.544,00	10.750.110.544,00
G.	**URUSAN KEWILAYAHAN**	**62.681.039.441,00**	**62.178.583.444,00**	**63.257.083.444,00**
	Kecamatan	**62.681.039.441,00**	**62.178.583.444,00**	**63.257.083.444,00**
34	Kecamatan Bangkalan	14.096.812.505,00	14.215.992.955,00	14.265.992.955,00
35	Kecamatan Socah	3.132.337.230,00	3.157.837.230,00	3.218.337.230,00
36	Kecamatan Kamal	3.514.386.904,00	3.542.086.904,00	3.602.586.904,00
37	Kecamatan Labang	2.494.509.098,00	2.520.009.098,00	2.580.509.098,00
38	Kecamatan Modung	2.856.763.487,00	2.882.263.487,00	2.942.763.487,00
39	Kecamatan Kwanyar	2.447.974.513,00	2.478.274.514,00	2.538.774.514,00
40	Kecamatan Tragah	2.658.682.420,00	2.559.182.420,00	2.619.682.420,00
41	Kecamatan Blega	3.149.623.124,00	3.175.123.124,00	3.235.623.124,00
42	Kecamatan Konang	2.612.199.192,00	2.637.699.192,00	2.698.199.192,00
43	Kecamatan Galis	3.187.527.958,00	3.061.407.959,00	3.121.907.959,00
44	Kecamatan Tanah Merah	2.375.723.260,00	2.401.223.260,00	2.461.723.260,00
45	Kecamatan Burneh	5.098.289.981,00	4.849.789.981,00	4.910.289.981,00
46	Kecamatan Arosbaya	2.493.507.803,00	2.417.057.803,00	2.477.557.803,00
47	Kecamatan Geger	2.172.509.989,00	2.198.443.540,00	2.258.943.540,00
48	Kecamatan Klampis	2.412.590.150,00	2.438.090.150,00	2.498.590.150,00
49	Kecamatan Tanjung Bumi	2.750.601.106,00	2.576.101.106,00	2.636.601.106,00
50	Kecamatan Sepulu	2.716.184.689,00	2.741.684.689,00	2.802.184.689,00
51	Kecamatan Kokop	2.510.816.032,00	2.326.316.032,00	2.386.816.032,00
H.	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**107.042.759.862,00**	**10.364.940.631,00**	**10.480.940.631,00**
	Kesatuan Bangsa dan Politik	**107.042.759.862,00**	**10.364.940.631,00**	**10.480.940.631,00**
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	107.042.759.862,00	10.364.940.631,00	10.480.940.631,00
TOTAL PAGU		**2.367.673.286.719,00**	**2.395.593.088.673,00**	**2.452.130.628.069,00**

Tabel Program Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2024 – 2026 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 7.3.
Program Perangkat Daerah Disertai Pagu Indikatif

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1.01.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**													
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	79	79	85	495.550.177.083,00	90	525.857.669.593,00	95	542.764.479.718,00	95	1.564.172.326.394,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	Persentase	5,00%	7,00%	7,00 %	205.042.158.700,00	10,00 %	206.182.422.590,00	13,00 %	206.917.526.500,00	13,00 %	618.142.107.790,00	Dinas Pendidikan
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	Persentase	85,50%	85,50%	87,85 %		88,98 %		89,92 %		89,92 %		
		Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A	Persentase	20,00%	20,00%	30,00 %		40,00 %		50,00 %		50,00 %		
		Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	Persentase	10,33%	25,33%	25,33 %		40,33 %		55,33 %		55,33 %		
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang kesetaraan	Persentase	60,00%	60,00%	65,00 %	7.000.000,00	70,00 %	7.000.000,00	75,00 %	7.000.000,00	75,00 %	21.000.000,00	Dinas Pendidikan
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang PAUD	Persentase	74,00%	74,00%	76,00 %		78,00 %		80,00 %		80,00 %		
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SD	Persentase	50,00%	60,00%	60,00 %		70,00 %		80,00 %		80,00 %		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SMP	Persentase	45,00%	45,00%	50,00 %		55,00 %		60,00 %		60,00 %		
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP)	Persentase	57,25%	57,25%	62,75 %		68,25 %		73,75 %		73,75 %		
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persentase	73,00%	73,00%	80,00 %	2.000.000,00	85,00 %	2.000.000,00	90,00 %	2.000.000,00	90,00 %	6.000.000,00	Dinas Pendidikan
		Persentase Tenaga Pendidik yang telah lulus Sertifikasi Pendidik	Persentase	38,00%	38,00%	45,00 %		50,00 %		55,00 %		55,00 %		
1.01.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, PAUD dan Nonformal yang terfasilitasi perizinannya	Persentase	92,00%	92,00%	95,00 %	3.000.000,00	97,00 %	3.000.000,00	98,00 %	3.000.000,00	98,00 %	9.000.000,00	Dinas Pendidikan
							700.604.335.783,00		**732.052.092.183,00**		**749.694.006.218,00**		**2.182.350.434.184,00**	
1.02.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**													
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)	Indeks	75	75	80	142.022.270.417,00	80	148.335.868.583,00	80	155.478.291.169,00	80	445.836.430.169,00	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	Indeks	75	75	80	202.651.056.553,00	80	225.750.535.593,00	80	253.652.611.113,00	80	682.054.203.259,00	RSUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.02.01.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diBina	Persentase	85,00%	85,00%	85,00 %	475.547.000,00	90,00 %	476.498.244,00	100,00%	475.547.000,00	100,00%	1.427.592.244,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	-	4,4	4,4	425.000.000,00	4,2	426.902.488,00	4	525.000.000,00	3,9	1.376.902.488,00	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	-	32,33	32,33	450.000.000,00	31,33	450.951.244,00	31	597.681.100,00	30,33	1.498.632.344,00	Dinas Kesehatan
		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	9.908.000.000,00	100,00%	10.132.000.000,00	100,00%	10.140.910.000,00	100,00%	30.180.910.000,00	RSUD
		Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart	Persentase	-%	-%	70,00 %	16.922.664.500,00	80,00 %	16.958.181.699,00	100,00%	17.215.179.150,00	100,00%	51.096.025.349,00	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	Persentase	26,40%	18,00%	14,00 %	5.072.426.990,00	12,00 %	5.094.924.404,00	11,00 %	5.206.090.790,00	10,00 %	15.373.442.184,00	Dinas Kesehatan
		Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	19.715.437.010,00	100,00%	19.818.894.422,00	100,00%	19.967.047.300,00	100,00%	59.501.378.732,00	Dinas Kesehatan
		Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase	94,00%	96,00%	100,00%	51.272.323.000,00	100,00%	51.272.323.000,00	100,00%	52.392.323.000,00	100,00%	154.936.969.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	3.762.326.500,00	100,00%	3.789.548.652,00	100,00%	4.105.463.350,00	100,00%	11.657.338.502,00	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
		Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	222.025.000,00	100,00%	225.829.976,00	100,00%	222.025.000,00	100,00%	669.879.976,00	Dinas Kesehatan
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP)	Persentase	70,00%	70,00%	70,00 %	10.000.000,00	80,00 %	10.000.000,00	90,00 %	60.000.000,00	90,00 %	80.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Persentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (RSUD)	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	1.996.500.000,00	100,00%	2.004.500.000,00	100,00%	2.004.500.000,00	100,00%	6.005.500.000,00	RSUD
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) serta Industri Rumah Tangga (IRT) yang telah Tervalidasi Perijinan	Persentase	92,00%	92,00%	92,00 %	466.118.000,00	95,00 %	469.093.054,00	98,00 %	470.175.710,00	98,00 %	1.405.386.764,00	Dinas Kesehatan
							455.371.694.970,00		**485.216.051.359,00**		**522.512.844.682,00**		**1.463.100.591.011,00**	
1.03.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**													
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	indeks	77	77	77	12.534.902.499,00	79	12.821.544.927,00	84	12.664.902.499,00	84	38.021.349.925,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah yang terlayani irigasi	Persen	53.27%	53.27%	53.27 %	4.448.814.000,00	57,58 %	10.961.472.919,00	60,63 %	9.617.292.919,00	60,63 %	25.027.579.838,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase penataan ruang yang dilaksanakan	Persen	87,00%	87,00%	87,00 %	200.000.000,00	88%	200.000.000,00	89%	200.000.000,00	89%	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase jasa kontruksi yang telah dilaksanakan	Persen	100,00 %	100,00 %	100,0 0%	150.000.000,00	100,0 0%	150.000.000,00	100,0 0%	150.000.000,00	100,0 0%	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	Persen	71,00%	71,00%	71,00 %	61.369.434.024,00	73,00 %	111.600.886.805,00	75,00 %	112.983.123.415,50	75,00 %	285.953.444.244,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	67,00%	67,00%	67,00 %	10.115.025.990,00	68,00 %	10.115.025.990,00	69,00 %	10.115.025.990,00	69,00 %	30.345.077.970,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							88.818.176.513,00		**145.848.930.641,00**		**145.730.344.823,50**		**380.397.451.977,50**	
1.04.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**													
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)	Persen	62	62	62	6.335.922.000,00	64	6.615.851.610,00	67	6.395.930.800,00	67	19.347.704.410,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak	Persen	32	32	32	11.603.506.452,00	35	11.908.299.117,00	38	11.713.365.652,00	38	35.225.171.221,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan akses masyarakat terhadap drainase permukiman	Persen	32	32	32	8.100.000.000,00	35	5.993.550.154,00	38	5.993.550.154,00	38	20.087.100.308,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase bangunan gedung pemerintah yang dibangun dikembangkan dan memiliki SLF	Persen	23,69	23,69	23,69	70.000.000,00	36,69	70.000.000,00	45,7	70.000.000,00	45,7	210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan dan lingkungannya	Persen	20	20	20	30.000.000,00	22	30.000.000,00	24	30.000.000,00	24	90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	7.184.200.270,00	100	7.343.710.470,00	100	7.351.210.470,00	100	21.879.121.210,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yg terehabilitasi	Persen	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik	Persen	64.20	64.20	64.20	45.181.262.500,00	64.45	45.181.262.500,00	64.70	45.181.262.500,00	64.70	135.543.787.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan kawasan permukiman kumuh yang tertata dengan baik	Persen	54.20	54.20	64.20	1.800.000.000,00	64.45	3.906.449.846,00	64.70	3.906.449.846,00	64.70	9.612.899.692,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU	Persen	64.20	64.20	64.20	10.000.000,00	64.45	10.000.000,00	64.70	10.000.000,00	64.70	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							80.464.891.222,00		**81.209.123.697,00**		**80.801.769.422,00**		**242.475.784.341,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.05.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	12.563.933.166,00	100	12.616.433.167,00	100	12.672.433.167,00	100	37.852.799.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum	Persen	100,00 %	100%	100%	2.525.060.250,00	100,0 0%	2.025.060.250,00	100,0 0%	1.979.060.250,00	100,0 0%	6.529.180.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	Persen	100,00 %	100%	100%	30.000.000,00	100,0 0%	30.000.000,00	100,0 0%	30.000.000,00	100,0 0%	90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	Persen	100,00 %	100,0%	100,0 %	175.000.000,00	100,0 0%	175.000.000,00	100,0 0%	175.000.000,00	100,0 0%	525.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	86	90	90	1.844.055.731,00	92	1.907.555.731,00	94	1.868.555.731,00	94	5.620.167.193,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana yang tertangani	Persen	80,00%	80,0%	80,0 %	100.000.000,00	80,00 %	125.000.000,00	80,00 %	125.000.000,00	80,00 %	350.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
		Persentase pengurangan resiko bencana	Persen	80,00%	80,0%	80,0 %	150.000.000,00	80,00 %	100.000.000,00	80,00 %	150.000.000,00	80,00 %	400.000.000,00	
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen	80,00%	80,0%	80,0 %	100.000.000,00	80,00 %	125.000.000,00	80,00 %	125.000.000,00	80,00 %	350.000.000,00	
							17.488.049.147,00		**17.104.049.148,00**		**17.125.049.148,00**		**51.717.147.443,00**	
													-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.06.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**													
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	5.697.623.826,00	100	5.789.099.346,00	100	5.957.599.346,00	100	17.444.322.518,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	11,46%	13,00%	13,00 %	375.000.000,00	14,00 %	375.000.000,00	15,00 %	445.000.000,00	15,00 %	1.195.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	90,33%	100,00 %	100,00%	1.200.000.000,00	100,00%	1.250.000.000,00	100,00%	1.600.000.000,00	100,00%	4.050.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Persen	99,97%	100,00 %	100,00%	722.814.000,00	100,00%	822.814.000,00	100,00%	972.814.000,00	100,00%	2.518.442.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	85,00%	100,00 %	100,00%	550.000.000,00	100,00%	550.000.000,00	100,00%	550.000.000,00	100,00%	1.650.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	128.000.000,00	100,00%	128.000.000,00	100,00%	128.000.000,00	100,00%	384.000.000,00	DINAS SOSIAL
							8.673.437.826,00		**8.914.913.346,00**		**9.653.413.346,00**		**27.241.764.518,00**	
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2.07.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**													

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencaker yang ditempatkan/bekerja	Persen	3.7 %	3.7 %	3.7%	85.000.000,00	3.8%	85.000.000,00	3.9%	85.000.000,00	3.9 %	255.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	Persen	3.7 %	3.7 %	45,16 %	91.000.000,00	45,16 %	96.000.000,00	45,16 %	96.000.000,00	3.5 %	283.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB,LKS bipaartit, Struktur berkala upah dan terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	65 %	65 %	75,17 %	360.000.000,00	75.17 %	360.000.000,00	75.17 %	360.000.000,00	75.17 %	1.080.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
							536.000.000,00		**541.000.000,00**		**541.000.000,00**		**1.618.000.000,00**	
2.08.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**													
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Tingkat Capaian Pelaksanaan PUG	Persentase	71,00%	71,00%	72,00 %	50.000.000,00	73,00 %	50.000.000,00	74,00 %	50.000.000,00	74,00 %	150.000.000,00	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase perlindungan perempuan yang terlayani	Persentase	50,22%	50,22%	50,22 %	15.000.000,00	50,70 %	15.000.000,00	51,93 %	15.000.000,00	51,93 %	45.000.000,00	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase Keluarga yang di bina	Persentase	2,00%	2.5%	2.5%	20.000.000,00	2.5%	20.000.000,00	2.5%	20.000.000,00	7.5%	60.000.000,00	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase Lembaga Pelaksana Pembangunan yang Responsif Anak	Persentase	40,00%	50,00%	50,00 %	50.000.000,00	55,00 %	50.000.000,00	60,00 %	50.000.000,00	60,00 %	150.000.000,00	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase perlindungan anak yang terlayani	Persentase	92,00%	92,00%	93,00 %	10.000.000,00	94,00 %	10.000.000,00	95,00 %	10.000.000,00	95,00 %	30.000.000,00	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							145.000.000,00		**145.000.000,00**		**145.000.000,00**		**435.000.000,00**	
2.09.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**													
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	4.469.920.980,00	100	4.580.920.980,00	100	4.686.920.980,00	100	13.737.762.940,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa Yang Memiliki Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemakmuran Pangan Yang Terkelola Dengan Baik	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	609.000.000,00	100,00%	609.000.000,00	100,00%	609.000.000,00	100,00%	1.827.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Gapoktan Yang Berfungsi Dengan Baik Diversifikasi Dan Ketahanan Pangannya	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	976.337.500	100,00%	995.481.687,00	100,00%	999.646.600,00	100,00%	2.971.465.787,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani Menuju Tahan Pangan	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	16.000.000,00	100,00%	16.000.000,00	100,00%	16.000.000,00	100,00%	48.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sekolah Dasar Yang Terjamin Keamanan Pangannya	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	12.500.000,00	100,00%	12.500.000,00	100,00%	12.500.000,00	100,00%	37.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
							6.083.758.480,00		**6.213.902.667,00**		**6.324.067.580,00**		**18.621.728.727,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
													-	
2.11.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**													
2.11.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100,00 %	100,00 %	100,00%	14.879.636.289,00	100,00%	15.048.136.289,00	100,00%	15.111.636.289,00	100,00%	45.039.408.867,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	220.000.000,00	100,00%	120.000.000,00	100,00%	120.000.000,00	100,00%	460.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Unit Lingkungan Hidup yang terkendali pencemarannya	Persen	13,00%	13,00%	13,00 %	223.000.000,00	13,00 %	223.000.000,00	13,00 %	223.000.000,00	13,00 %	669.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola sesuai ketentuan	Persen	10,00%	10,00%	10,00 %	1.600.000.000,00	10,00 %	2.300.000.000,00	10,00 %	2.300.000.000,00	10,00 %	6.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Unit Penyimpanan sementara Limbah B3 yang terkendali	Persen	88,00%	89,00%	89,00 %	10.000.000,00	92,00 %	10.000.000,00	95,00 %	10.000.000,00	95,00 %	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang terkendali lingkungannya	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	114.000.000,00	100,00%	114.000.000,00	100,00%	114.000.000,00	100,00%	342.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang di selesaikan	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Persampahan yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Persen	29,22%	29,22%	34,20 %	5.822.257.500,00	34,40 %	5.413.757.500,00	35,00 %	5.648.757.500,00	35,00 %	16.884.772.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							22.888.893.789,00		**23.248.893.789,00**		**23.547.393.789,00**		**69.685.181.367,00**	
2.12.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**													
2.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	75	76	76	5.743.676.712,00	77	5.803.116.712,00	78	5.894.116.712,00	78	17.440.910.136,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP El	Persentase	94,00%	99,50%	99,50 %	822.695.735,00	99,60 %	852.695.735,00	99,70 %	822.695.735,00	99,70 %	2.498.087.205,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase kepemilikan KIA	Persentase	42,00%	51,00%	51,00 %		52,00 %		53,00 %		53,00 %		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	Persentase	91,07%	91,07%	98,40 %	141.162.651,00	98,80 %	161.162.651,00	99,20 %	156.162.651,00	99,20 %	458.487.953,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
		Persentase penerbitan akte perkawinan	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase penerbitan akte perceraian	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%		100,00%		100,00%		1001,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase penerbitan akte kematian	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	99.152.500,00	100,00%	99.152.500,00	100,00%	109.152.500,00	100,00%	307.457.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	13.490.000,00	100,00%	13.490.000,00	100,00%	13.490.000,00	100,00%	40.470.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							6.820.177.598,00		**6.929.617.598,00**		**6.995.617.598,00**		**20.745.412.794,00**	
2.13.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**													
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	5.602.992.769,00	100	5.695.492.769,00	100	5.822.042.769,00	100	17.120.528.307,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa	Persentase	NA	0,40%	0,37 %	1.900.000,00	0,37 %	1.900.000,00	0,37 %	2.000.000,00	1,11 %	5.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kawasan Pedesaan Hasil Kerjasama Antar Desa yang dibina	Kawasan	0 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	26.000.000,00	1 kawasan	26.000.000,00	1 kawasan	24.000.000,00	3 kawasan	76.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina dan aktif dalam pengelolaan lembaga pemerintahannya	Persentase	NA	18,68%	18,68 %	84.845.900,00	19,41 %	98.537.900,00	20,14 %	90.487.900,00	58,23 %	273.871.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pembeerdayaan yang dibina dan aktif	Persentase	NA	17,00%	17,00 %	189.741.800,00	22,00 %	544.061.800,00	25,00 %	193.461.800,00	64,00 %	927.265.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
							5.905.480.469,00		**6.365.992.469,00**		**6.131.992.469,00**		**18.403.465.407,00**	
2.14.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													
2.14.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	87,5	87,5	90	6.340.447.225,00	90,25	6.481.949.925,00	90,5	6.545.449.925,00	90,5	19.367.847.075,00	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pengendalian Kuantitas Penduduk pada Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	Persentase	2,00%	2,00%	2,17 %	1.351.200.000,00	2,16 %	1.351.200.000,00	2,15 %	1.351.200.000,00	2,15 %	4.053.600.000,00	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase capaian peserta kb aktif	Persentase	64,00%	64,00%	65,00 %	5.453.311.000,00	65,30 %	5.484.995.030,00	65,50 %	5.436.712.400,00	65,50 %	16.375.018.430,00	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase Anggota Keluarga Tribina, UPPKS dan PIK R yang Aktif	Persentase	65,00%	70,00%	70,00 %	4.531.114.000,00	75,00 %	4.580.895.595,00	80,00 %	4.630.926.000,00	80,00 %	13.742.935.595,00	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							17.676.072.225,00		**17.899.040.550,00**		**17.964.288.325,00**		**53.539.401.100,00**	
													-	
2.15.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**													
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	82	82	82.25	12.742.303.103,00	82.5	13.328.205.954,00	82.75	13.383.205.954,00	82.75	39.453.715.011,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ & Keselamatan	Persentase	50,00%	50,00%	50,00 %	47.686.350,00	75,00 %	37.686.350,00	85,00 %	47.686.350,00	85,00 %	133.059.050,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Capaian Operasional dan ketertiban LLAJ	Persentase	60,00%	60,00%	60,00 %	2.845.750.500,00	80,00 %	2.855.550.500,00	95,00 %	2.865.550.500,00	95,00 %	8.566.851.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase pemanfaatan Perlengkapan Jalan	Persentase	60,00%	60,00%	60,00 %	17.357.911.460,00	75,00 %	17.357.911.460,00	95,00 %	17.452.911.460,00	95,00 %	52.168.734.380,00	DINAS PERHUBUNGAN
							32.993.651.413,00		**33.579.354.264,00**		**33.749.354.264,00**		**100.322.359.941,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.16.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**													
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	83	85	85	6.610.350.402,00	87	6.685.350.402,00	90	6.692.850.402,00	90	19.988.551.206,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indeks	100,00 %	100,00 %	100,00%	1.480.814.000,00	100,00%	1.430.814.000,00	100,00%	1.530.814.000,00	100,00%	4.442.442.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	35,00%	15,00%	18,00 %	250.000.000,00	20,00 %	200.000.000,00	22,00 %	300.000.000,00	22,00 %	750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	35,00%	15,00%	18,00 %	1.800.000.000,00	20,00 %	1.800.000.000,00	22,00 %	1.800.000.000,00	22,00 %	5.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							10.141.164.402,00		**10.116.164.402,00**		**10.323.664.402,00**		**30.580.993.206,00**	
2.17.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**													
2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	5.946.700.540,00	100	6.006.700.540,00	100	6.066.700.539,00	100	18.020.101.619,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2.17.02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase kualitas manajemen pengelolaan koperasi	Persentase	14,00%	14,00%	14,00 %	45.000.000,00	14,00 %	45.000.000,00	14,00 %	45.000.000,00	42,00 %	135.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.17.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase jumlah kualitas usaha koperasi	Persentase	55,00%	55,00%	55,00 %	25.000.000,00	55,00 %	25.000.000,00	55,00 %	25.000.000,00	55,00 %	75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase kualitas manajemen pengelolaan koperasi	Persentase	40,00%	40,00%	40,00 %	20.000.000,00	40,00 %	20.000.000,00	40,00 %	20.000.000,00	40,00 %	60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah kualitas usaha koperasi	Persentase	94,00%	94,00%	94,00 %	427.285.000,00	94,00 %	429.346.425,00	94,00 %	431.418.100,00	94,00 %	1.288.049.525,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2.17.06.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi yang berkualitas	Persentase	69,00%	69,00%	69,00 %	20.000.000,00	69,00 %	20.000.000,00	69,00 %	20.000.000,00	69,00 %	60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberdayakan	Persentase	35,00%	35,00%	35,00 %	90.000.000,00	35,00 %	90.000.000,00	35,00 %	90.000.000,00	35,00 %	270.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang dikembangkan	Persentase	5,00%	5,00%	5,00 %	20.000.000,00	5,00 %	20.000.000,00	5,00 %	20.000.000,00	5,00 %	60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
							6.593.985.540,00		**6.656.046.965,00**		**6.718.118.639,00**		**19.968.151.144,00**	
													-	
2.18.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**													
2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	4.992.257.079,00	100	5.120.444.330,00	100	5.181.944.330,00	100	15.294.645.739,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi PMA, PMDN	Persentase	4,41%	4.41%	5,00 %	6.000.000,00	5.5%	6.000.000,00	6,00 %	8.000.000,00	6,00 %	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Daerah	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	52.000.000,00	100,00%	77.000.000,00	100,00%	102.000.000,00	100,00%	231.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	211.700.000,00	100,00%	231.700.000,00	100,00%	211.700.000,00	100,00%	655.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Penanaman Modal yang Dibina	Persentase	100,00 %	100,00 %	100%	347.518.000,00	100%	349.255.590,00	100%	351.001.800,00	100%	1.047.775.390,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Data Penanaman Modal yang terupdate	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	3.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							5.612.475.079,00		**5.789.399.920,00**		**5.859.646.130,00**		**17.261.521.129,00**	
2.19.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**													
2.19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	nilai	76,77	77	77	4.735.157.716,00	78	4.812.801.116,00	79	4.914.814.416,00	79	14.462.773.248,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	8,00%	8,00%	9,00 %	128.156.700,00	10,00 %	142.400.000,00	11,00 %	160.000.000,00	11,00 %	430.556.700,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet muda yang berprestasi	Persentase	33,00%	33,00%	25,00 %	4.507.500.000,00	25,00 %	4.521.613.300,00	25,00 %	4.633.000.000,00	25,00 %	13.662.113.300,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase atlit muda olah raga rekreasi yg berprestasi	Persentase	NA	NA	4,00 %	15.000.000,00	4,00 %	15.000.000,00	4,00 %	15.000.000,00	4,00 %	45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Persentase	7,0%	7,3%	7,6%	100.000.000,00	8,1%	100.000.000,00	8,4%	100.000.000,00	8,4%	300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
							9.485.814.416,00		**9.591.814.416,00**		**9.822.814.416,00**		**28.900.443.248,00**	
													-	
2.20.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**													
2.20.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	30,00%	30,00%	22,00 %	15.300.000,00	50,00 %	15.300.000,00	75,00 %	15.300.000,00	75,00 %	45.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							15.300.000,00		**15.300.000,00**		**15.300.000,00**		**45.900.000,00**	
							-						-	
2.21.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**													
2.21.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase	35,00%	22,00%	22,00 %	40.390.000,00	44,00 %	40.390.000,00	88,00 %	40.390.000,00	88,00 %	121.170.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
							40.390.000,00		**40.390.000,00**		**40.390.000,00**		**121.170.000,00**	
2.22.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**													
2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek budaya yang berkembang	Persentase	30,00%	30,00%	30,00 %	230.000.000,00	60,00 %	230.000.000,00	100,00%	230.000.000,00	100,00%	690.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase cagar budaya yang dilestarikan/terkelola dengan baik	Persentase	1,59%	1,59%	2,00 %	700.000.000,00	2,25 %	703.500.000,00	2,40 %	707.017.500,00	2,40 %	2.110.517.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							930.000.000,00		**933.500.000,00**		**937.017.500,00**		**2.800.517.500,00**	
2.23.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**													
2.23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	78,42 Indeks	89 Indeks	89 Indeks	5.009.628.101,00	91 Indeks	5.082.628.101,00	93 Indeks	5.158.628.101,00	93 Indeks	15.250.884.303,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase	9,96%	9,96%	20,00 %	85.290.150,00	25,00 %	118.290.150,00	30,00 %	137.290.150,00	30,00 %	340.870.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase perpustakaan yang dibina	Persentase	85,66%	85,66%	90,00 %	23.468.200,00	93,00 %	33.468.200,00	95,00 %	33.468.200,00	95,00 %	90.404.600,00	
2.23.02.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase Koleksi Nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Persentase	0,00%	5,00%	5,00 %	5.000.000,00	5,00 %	5.000.000,00	5,00 %	5.000.000,00	5,00 %	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							5.123.386.451,00		**5.239.386.451,00**		**5.334.386.451,00**		**15.697.159.353,00**	
2.24.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**													

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.24.2.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan kearsipan	Persentase	79,12%	70,00%	70,00 %	36.030.100,00	75,00 %	36.030.100,00	80,00 %	57.030.100,00	80,00 %	129.090.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							36.030.100,00		**36.030.100,00**		**57.030.100,00**		**129.090.300,00**	
													-	
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3.25.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**													
3.25.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	5.376.629.445,00	100	5.545.129.445,00	100	5.608.629.445,00	100	16.530.388.335,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persentase	3,20%	3,20%	3,20 %	30.000.000,00	3,30 %	30.000.000,00	3,40 %	30.000.000,00	3,40 %	90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persentase	37,46%	37,46%	37,46 %	865.522.000,00	37,46 %	893.750.235,00	37,46 %	921.994.600,00	37,46 %	2.681.266.835,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah konsumsi ikan per kapita per tahun	Kg/ Kapita/ Tahun	50,53	50,53	50,63	70.000.000,00	50,73	70.000.000,00	50,83	70.000.000,00	50,83	210.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							6.342.151.445,00		**6.538.879.680,00**		**6.630.624.045,00**		**19.511.655.170,00**	
3.26.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**													
3.26.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase	100	100	100	4.290.687.810,00	100	4.506.687.750,00	100	4.622.687.750,00	100	13.420.063.310,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan destinasi wisata yang dikembangkan	persentase	4,00%	4,00%	5,66 %	450.000.000,00	7,54 %	250.000.000,00	9,42 %	250.000.000,00	9,42 %	950.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase jenis media promosi yang digunakan	persentase	50,00%	50,00%	50,00 %	150.000.000,00	50,00 %	150.000.000,00	50,00 %	150.000.000,00	50,00 %	450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase objek wisata yang berkembang atau aktif	persentase	39,28%	39,28%	39,28 %	127.000.000,00	39,28 %	127.000.000,00	39,28 %	127.000.000,00	39,28 %	381.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							5.017.687.810,00		**5.033.687.750,00**		**5.149.687.750,00**		**15.201.063.310,00**	
													-	
3.27.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**													
3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	13.059.538.412,00	100	13.189.538.413,00	100	13.249.538.413,00	100	39.498.615.238,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi	Persentase	17%	17%	17%	2.604.864.700	19%	2.654.864.700	20%	2.604.864.700	20%	7.864.594.100,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase kebutuhan prasarana pertanian yang terpenuhi	Persentase	24%	24%	24%	9.991.291.900,00	25%	10.191.291.900,00	26%	10.191.291.900,00	26%	30.373.875.700,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase kebutuhan pengendalian dan penanganan bencana terpenuhi tepat waktu	Persentase	100%	100%	100,00%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	225.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kebutuhan penyuluhan pertanian yang terpenuhi	Persentase	50%	50%	50%	1.114.283.000,00	50%	1.142.051.410,00	50%	1.169.958.600,00	50%	3.426.293.010,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	8.028.128.739,00	100	8.112.645.739,00	100	8.137.645.739,00	100	24.278.420.217,00	DINAS PETERNAKAN
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase penyediaan prasarana pertanian yang terpenuhi	Persentase	100%	100%	100%	120.000.000,00	100%	2.136.600.000,00	100%	2.734.100.000,00	100%	4.990.700.000,00	DINAS PETERNAKAN
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi	Persentase	100%	100%	100%	5.631.000.000,00	100%	5.620.000.000,00	100%	5.626.000.000,00	100%	16.877.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan kesehatan hewan	Persentase	100%	100%	100%	175.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	206.500.000,00	100%	591.500.000,00	DINAS PETERNAKAN
3.27.05.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Rekomendasi yang dikeluarkan	Persentase	100%	100%	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok yang diberikan penyuluhan	Persentase	100%	100%	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	120.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
							40.849.106.751,00		**43.381.992.162,00**		**44.029.899.352,00**		**128.260.998.265,00**	
3.30.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**													

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	33.054.108.444,00	100	33.216.008.444,00	100	33.218.508.444,00	100	99.488.625.332,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase terpenuhinya Pelayanan pasar	Persentase	82,00%	100%	100%	1.029.946.250,00	100%	829.946.250,00	100%	829.946.250,00	100%	2.689.838.750,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase	100%	100%	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	180.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor yang dilaksanakann	Persentase	100%	100%	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen	Persentase	100%	100%	100%	51.537.996,00	100%	51.537.996,00	100%	51.537.996,00	100%	154.613.988,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan	Persentase	100%	100%	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
							34.225.592.690,00		**34.187.492.690,00**		**34.189.992.690,00**		**102.603.078.070,00**	
3.31.	**[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**													
3.31.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	Indeks	100	100	6.433.832.316,00	100	6.569.412.999,00	100	6.608.332.316,00	100	19.611.577.631,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mandiri	Persentase	20,00%	20,00%	20,00 %	19.812.335.000,00	20,00 %	19.982.915.992,00	20,00 %	20.103.134.100,00	20,00 %	59.898.385.092,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase penerbitan izin usaha industri	Persentase	20,00%	20,00%	20,00 %	10.000.000,00	20,00 %	10.000.000,00	20,00 %	10.000.000,00	20,00 %	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang berlegalitas	Persentase	20,00%	20,00%	20,00 %	55.000.000,00	20,00 %	55.000.000,00	20,00 %	55.000.000,00	20,00 %	165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
							26.311.167.316,00		**26.617.328.991,00**		**26.776.466.416,00**		**79.704.962.723,00**	
4.	**UNSUR PENDUKUNG**													
4.01.	**[URUSAN] SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	80	80	100	31.357.471.398,00	100	31.899.742.460,00	100	31.936.242.460,00	100	95.193.456.318,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi	Persentase	100	100	100	200.876.000,00	100	255.876.000,00	100	258.376.000,00	100	715.128.000,00	
		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi	Persentase	100	100	100	222.506.000,00	100	277.506.000,00	100	280.006.000,00	100	780.018.000,00	
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	Persentase	100	100	100	6.847.604.000,00	100	6.902.604.000,00	100	6.905.104.000,00	100	20.655.312.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan, dan bantuan hukum yang diselesaikan	Persentase	100	100	100	159.113.000,00	100	214.113.000,00	100	216.613.000,00	100	589.839.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
		Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase	100	100	100	342.974.000,00	100	397.974.000,00	100	400.474.000,00	100	1.141.422.000,00	
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ	Indeks	77	77	100	1.107.096.000,00	100	1.162.096.000,00	100	1.164.596.000,00	100	3.433.788.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun	Persentase	80	80	80	83.453.000,00	80	138.453.000,00	80	140.953.000,00	80	362.859.000,00	
		Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	144.088.000,00	100	199.088.000,00	100	201.588.000,00	100	544.764.000,00	
							40.465.181.398,00		**41.447.452.460,00**		**41.503.952.460,00**		**123.416.586.318,00**	
							-		-				-	
4.02.	**[URUSAN] SEKRETARIAT DPRD**													
4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	41.995.735.240,00	100	41.995.735.240,00	100	41.995.735.240,00	100	125.987.205.720,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase pembahasan penganggaran yang dibahas DPRD	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	5.491.181.550,00	100,00%	5.741.181.550,00	100,00%	5.741.181.550,00	100,00%	16.973.544.650,00	SEKRETARIAT DPRD
		Prosentase Produk Hukum yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	12.401.858.002,00	100,00%	12.563.561.502,00	100,00%	12.627.061.502,00	100,00%	37.592.481.006,00	SEKRETARIAT DPRD
							59.888.774.792,00		**60.300.478.292,00**		**60.363.978.292,00**		**180.553.231.376,00**	
5.	**UNSUR PENUNJANG**													
5.01.	**[URUSAN] PERENCANAAN**													

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	85,44	86	86	7.040.662.401,00	87	7.338.338.801,00	88	7.475.612.401,00	88	21.854.613.603,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator kinerja program PD dengan capaian minimal 80%	Persentase	84,54%	86,00%	86,00 %	40.000.000,00	88,00 %	40.000.000,00	90,00 %	40.000.000,00	90,00 %	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase konsistensi Penganggaran dengan Perencanaan	Persentase	99,55%	100,00 %	100,00%	1.464.000.000,00	100,00%	1.464.000.000,00	100,00%	1.464.000.000,00	100,00%	4.392.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang Berkualitas Baik	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	141.500.000,00	100,00%	148.000.000,00	100,00%	141.500.000,00	100,00%	431.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang Berkualitas Baik	Persentase	97,06%	100,00 %	100,00%	193.000.000,00	100,00%	199.000.000,00	100,00%	193.000.000,00	100,00%	585.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Berkualitas Baik	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	101.000.000,00	100,00%	106.000.000,00	100,00%	105.000.000,00	100,00%	312.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							8.980.162.401,00		**9.295.338.801,00**		**9.419.112.401,00**		**27.694.613.603,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
5.02.	**[URUSAN] KEUANGAN**													
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	80	80	82	37.573.641.069,00	83	37.901.171.114,00	85	38.009.868.514,00	85	113.484.680.697,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	417.791.137.207,00	100,00%	416.954.648.825,00	100,00%	414.137.562.903,50	100,00%	1.254.854.589.323,50	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP			100,00 %	100,00%	1.964.000.000,00	100,00%	2.001.620.194,00	100,00%	2.005.620.194,00	100,00%		
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	940.120.194,00	100,00%	1.471.069.955,00	100,00%	1.476.169.955,00	100,00%	3.887.360.104,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.2.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	78	78	78,5	8.749.986.953,00	79	8.791.497.753,00	79,5	8.851.497.753,00	79,5	26.392.982.459,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.2.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak dan retribusi I terhadap PAD	Persentase	6,40%	6,40%	7,00 %	195.000.000,00	6,60 %	195.000.000,00	6,30 %	195.000.000,00	6,30 %	585.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Kontribusi pajak dan retribusi II terhadap PAD		13,50%	13,50%	12,60 %	145.000.000,00	11,50 %	145.000.000,00	10,50 %	145.000.000,00	10,50 %	435.000.000,00	
		Persentase kesesuaian Realisasi dan Target PAD		100,00 %	100,00 %	100,00%	260.000.000,00	100,00%	130.000.000,00	100,00%	130.000.000,00	100,00%	520.000.000,00	
							467.618.885.423,00		**467.590.007.841,00**		**464.950.719.319,50**		**1.400.159.612.583,50**	
5.03.	**[URUSAN] KEPEGAWAIAN**													
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	85	85	85	7.492.672.201,00	86	7.527.972.201,00	87	7.644.722.201,00	87	22.665.366.603,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Updating Data Kepegawaian	Persentase	90,00%	90,00%	91,00 %	305.000.000,00	93,00 %	305.000.000,00	95,00 %	305.000.000,00	95,00 %	915.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase	95,00%	95,00%	95,00 %	245.000.000,00	96,00 %	245.000.000,00	97,00 %	245.000.000,00	97,00 %	735.000.000,00	
		Persentase ASN yang memiliki Predikat Kinerja Baik	Persentase	64,00%	64,00%	64,00 %	70.000.000,00	66,00 %	70.000.000,00	68,00 %	70.000.000,00	68,00 %	210.000.000,00	
		Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP	Persentase	10,00%	10,00%	15,00 %	725.000.000,00	20,00 %	725.000.000,00	25,00 %	725.000.000,00	25,00 %	2.175.000.000,00	
							8.837.672.201,00		**8.872.972.201,00**		**8.989.722.201,00**		**26.700.366.603,00**	
5.04.	**[URUSAN] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**													
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase	10,00%		15,00 %	1.495.000.000,00	20,00 %	1.525.000.000,00	25,00 %	1.615.000.000,00	33,00 %	4.635.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
							1.495.000.000,00		**1.525.000.000,00**		**1.615.000.000,00**		**4.635.000.000,00**	
							-		-				-	
5.05.	**[URUSAN] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**													
5.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	82	82	82,5	3.564.249.221,00	83	3.675.249.221,00	83,5	3.791.249.221,00	83,5	11.030.747.663,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang termanfaatkan dalam pembangunan	Pesentase	0,00%	0,00%	30,00 %	100.860.000,00	30,00 %	102.526.666,00	30,00 %	102.526.666,00	80,00 %	305.913.332,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
		Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang termanfaatkan dalam pembangunan	Persentase	0,00%	0,00%	30,00 %	50.860.000,00	30,00 %	52.526.666,00	30,00 %	52.526.666,00	30,00 %	155.913.332,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Persentase inovasi dan teknologi yang termanfaatkan dalam pembangunan	Persentase	0,00%	0,00%	84,00 %	50.860.000,00	85,00 %	52.526.668,00	86,00 %	52.526.668,00	86,00 %	155.913.336,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							3.766.829.221,00		**3.882.829.221,00**		**3.998.829.221,00**		**11.648.487.663,00**	
													-	
6.	**UNSUR PENGAWAS**													
6.01.	**[URUSAN] INSPEKTORAT DAERAH**													
6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	83,16	83,16	86	11.239.808.044,00	88	10.146.808.044,00	90	10.181.808.044,00	90	31.568.424.132,00	INSPEKTORAT
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi dari hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	93.65%	100,00 %	100,00%	387.919.500,00	100,00%	387.919.500,00	100,00%	387.919.500,00	100,00%	1.163.758.500,00	INSPEKTORAT
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B	Persen	61,54%	63,46%	63,46 %	75.383.000,00	65,38 %	155.383.000,00	67,31 %	180.383.000,00	67,31 %	411.149.000,00	INSPEKTORAT
							11.703.110.544,00		**10.690.110.544,00**		**10.750.110.544,00**		**33.143.331.632,00**	
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN LABANG**													

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	95	2.472.009.098,00	98	2.497.509.098,00	100	2.556.009.098,00	95	7.525.527.294,00	KECAMATAN LABANG
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	3.500.000,00	95,00 %	3.500.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	KECAMATAN LABANG
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	12.500.000,00	100,00%	36.500.000,00	KECAMATAN LABANG
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	KECAMATAN LABANG
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	3.500.000,00	95,00 %	3.500.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	KECAMATAN LABANG
							2.494.509.098,00		**2.520.009.098,00**		**2.580.509.098,00**		**7.595.027.294,00**	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN MODUNG**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	72,92	72,92	74,23	2.797.113.487,00	75,69	2.815.113.487,00	76,94	2.859.613.487,00	76,94	8.471.840.461,00	KECAMATAN MODUNG
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	7.000.000,00	95,00 %	9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%	26.000.000,00	KECAMATAN MODUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	23.900.000,00	95,00 %	28.500.000,00	100,00%	38.500.000,00	100,00%	90.900.000,00	KECAMATAN MODUNG
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	6.000.000,00	95,00 %	6.400.000,00	100,00%	10.400.000,00	100,00%	22.800.000,00	KECAMATAN MODUNG
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	22.750.000,00	95,00 %	22.750.000,00	100,00%	24.750.000,00	100,00%	70.250.000,00	KECAMATAN MODUNG
							2.856.763.487,00		**2.882.263.487,00**		**2.942.763.487,00**		**8.681.790.461,00**	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN KOKOP**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	96	96,5	100	2.484.587.532,00	100	2.300.087.532,00	100	2.360.587.532,00	100	7.145.262.596,00	KECAMATAN KOKOP
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	4.852.900,00	100,00%	4.852.900,00	100,00%	4.852.900,00	100,00%	14.558.700,00	KECAMATAN KOKOP
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	13.106.700,00	100,00%	13.106.700,00	100,00%	13.106.700,00	100,00%	39.320.100,00	KECAMATAN KOKOP
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	4.923.100,00	100,00%	4.923.100,00	100,00%	4.923.100,00	100,00%	14.769.300,00	KECAMATAN KOKOP

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00 %	100,00 %	100,0 0%	3.345.800,00	100,0 0%	3.345.800,00	100,0 0%	3.345.800,00	100,0 0%	10.037.400,00	KECAMATAN KOKOP
							2.510.816.032,00		**2.326.316.032,00**		**2.386.816.032,00**		**7.223.948.096,00**	
													-	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN KONANG**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	94	96	2.581.199.192,00	98	2.607.199.192,00	100	2.667.199.192,00	100	7.855.597.576,00	KECAMATAN KONANG
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	100,00 %	100,0 0%	4.000.000,00	100,0 0%	4.000.000,00	100,0 0%	4.000.000,00	100,0 0%	12.000.000,00	KECAMATAN KONANG
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	85,00%	100,00 %	100,0 0%	13.500.000,00	100,0 0%	13.500.000,00	100,0 0%	14.000.000,00	100,0 0%	41.000.000,00	KECAMATAN KONANG
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	85,00%	100,00 %	100,0 0%	3.500.000,00	100,0 0%	4.000.000,00	100,0 0%	4.000.000,00	100,0 0%	11.500.000,00	KECAMATAN KONANG
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85,00%	100,00 %	100,0 0%	10.000.000,00	100,0 0%	9.000.000,00	100,0 0%	9.000.000,00	100,0 0%	28.000.000,00	KECAMATAN KONANG
							2.612.199.192,00		**2.637.699.192,00**		**2.698.199.192,00**		**7.948.097.576,00**	
													-	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN GEGER**													

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	90	2.123.509.989,00	95	2.140.443.540,00	100	2.193.943.540,00	100	6.457.897.069,00	KECAMATAN GEGER
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	KECAMATAN GEGER
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	22.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	27.000.000,00	100,00%	74.000.000,00	KECAMATAN GEGER
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	7.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	29.000.000,00	KECAMATAN GEGER
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	15.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	100,00%	21.000.000,00	100,00%	54.000.000,00	KECAMATAN GEGER
							2.172.509.989,00		**2.198.443.540,00**		**2.258.943.540,00**		**6.629.897.069,00**	
													-	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN KWANYAR**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	90	2.426.711.363,00	95	2.457.011.364,00	100	2.517.511.364,00	100	7.401.234.091,00	KECAMATAN KWANYAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	85,00%	90 %	3.000.000,00	95%	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	9.000.000,00	KECAMATAN KWANYAR
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	90,00%	90 %	12.263.150,00	95%	12.263.150,00	100%	12.263.150,00	100%	36.789.450,00	KECAMATAN KWANYAR
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	90,00%	90 %	2.000.000,00	95%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	6.000.000,00	KECAMATAN KWANYAR
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85,00%	85,00%	90 %	4.000.000,00	95,00 %	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	KECAMATAN KWANYAR
							2.447.974.513,00		**2.478.274.514,00**		**2.538.774.514,00**		**7.465.023.541,00**	
									-				-	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN SOCAH**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	98	100	100	3.102.837.230,00	100	3.128.337.230,00	100	3.188.837.230,00	100	9.420.011.690,00	KECAMATAN SOCAH
7.01.02.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	90,00%	90,00%	90,00 %	4.500.000,00	95,00 %	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	13.500.000,00	KECAMATAN SOCAH
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	90,00%	90,00 %	13.500.000,00	95,00 %	13.500.000,00	100,00%	13.500.000,00	100,00%	40.500.000,00	KECAMATAN SOCAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	13.500.000,00	KECAMATAN SOCAH
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	21.000.000,00	KECAMATAN SOCAH
							3.132.337.230,00		**3.157.837.230,00**		**3.218.337.230,00**		**9.508.511.690,00**	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN GALIS**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	96,85	96,85	98	3.156.377.958,00	99	3.029.897.959,00	100	3.090.397.959,00	100	9.276.673.876,00	KECAMATAN GALIS
7.01.02.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	4.510.000,00	95,00 %	4.510.000,00	100,00%	4.510.000,00	100,00%	13.530.000,00	KECAMATAN GALIS
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	18.890.000,00	100,00%	19.250.000,00	100,00%	19.250.000,00	100,00%	57.390.000,00	KECAMATAN GALIS
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	KECAMATAN GALIS
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85,00%	85,00%	90,00 %	5.250.000,00	95,00 %	5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%	15.750.000,00	KECAMATAN GALIS
							3.187.527.958,00		**3.061.407.959,00**		**3.121.907.959,00**		**9.370.843.876,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN TANJUNG BUMI**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	95	100	100	2.727.802.486,00	100	2.550.952.606,00	100	2.610.932.756,00	100	7.889.687.848,00	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	2.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	90,00 %	9.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	17.000.000,00	100,00%	47.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	2.500.000,00	100,00%	3.849.880,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	8.849.880,00	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	2.798.620,00	100,00%	2.798.620,00	100,00%	2.668.350,00	100,00%	8.265.590,00	KECAMATAN TANJUNG BUMI
							2.750.601.106,00		**2.576.101.106,00**		**2.636.601.106,00**		**7.963.303.318,00**	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN BLEGA**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	96,71	97	98	3.115.623.124,00	99	3.138.123.124,00	100	3.196.123.124,00	100	9.449.869.372,00	KECAMATAN BLEGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	15.500.000,00	KECAMATAN BLEGA
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	13.000.000,00	100,00%	14.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	42.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	4.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	13.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	12.000.000,00	100,00%	13.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
							3.149.623.124,00		**3.175.123.124,00**		**3.235.623.124,00**		**9.560.369.372,00**	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN TANAH MERAH**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	95	2.329.723.260,00	100	2.355.223.260,00	100	2.415.723.260,00	100	7.100.669.780,00	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	75.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
							2.375.723.260,00		**2.401.223.260,00**		**2.461.723.260,00**		**7.238.669.780,00**	
													-	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN TRAGAH**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	74,07	75	76,23	2.626.682.420,00	76,68	2.527.182.420,00	76,96	2.587.682.420,00	76,96	7.741.547.260,00	KECAMATAN TRAGAH
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	3.500.000,00	95,00 %	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	10.500.000,00	KECAMATAN TRAGAH
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	15.500.000,00	100,00%	15.500.000,00	100,00%	15.500.000,00	100,00%	46.500.000,00	KECAMATAN TRAGAH
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	KECAMATAN TRAGAH
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	24.000.000,00	KECAMATAN TRAGAH
							2.658.682.420,00		**2.559.182.420,00**		**2.619.682.420,00**		**7.837.547.260,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN KLAMPIS**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	85	85	85	2.383.223.650,00	90	2.402.090.150,00	95	2.462.590.150,00	95	7.247.903.950,00	KECAMATAN KLAMPIS
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85,00%	100,00 %	100,00%	4.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	14.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	16.000.000,00	100,00%	16.000.000,00	100,00%	16.000.000,00	100,00%	48.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	3.366.500,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	13.366.500,00	KECAMATAN KLAMPIS
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90,00%	100,00 %	100,00%	6.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	26.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
							2.412.590.150,00		**2.438.090.150,00**		**2.498.590.150,00**		**7.349.270.450,00**	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN SEPULU**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	90	2.653.184.689,00	93	2.678.684.689,00	96	2.739.184.689,00	96	8.071.054.067,00	KECAMATAN SEPULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	90,00%	90,00%	100,00%	12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	36.000.000,00	KECAMATAN SEPULU
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	90,00%	100,00%	23.000.000,00	100,00%	23.000.000,00	100,00%	23.000.000,00	100,00%	69.000.000,00	KECAMATAN SEPULU
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	90,00%	100,00%	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	100,00%	54.000.000,00	KECAMATAN SEPULU
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90,00%	90,00%	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	KECAMATAN SEPULU
							2.716.184.689,00		**2.741.684.689,00**		**2.802.184.689,00**		**8.260.054.067,00**	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN AROSBAYA**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	2.466.040.351,00	100	2.372.228.302,00	100	2.431.377.302,00	100	7.269.645.955,00	KECAMATAN AROSBAYA
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	5.000.000,00	100,00%	14.955.200,00	100,00%	16.306.200,00	100,00%	36.261.400,00	KECAMATAN AROSBAYA
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	12.376.951,00	100,00%	19.783.800,00	100,00%	19.783.800,00	100,00%	51.944.551,00	KECAMATAN AROSBAYA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	5.103.900,00	100,00%	5.103.900,00	100,00%	5.103.900,00	100,00%	15.311.700,00	KECAMATAN AROSBAYA
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	4.986.601,00	100,00%	4.986.601,00	100,00%	4.986.601,00	100,00%	14.959.803,00	KECAMATAN AROSBAYA
							2.493.507.803,00		**2.417.057.803,00**		**2.477.557.803,00**		**7.388.123.409,00**	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN BANGKALAN**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	11.148.690.454,00	100	11.267.870.904,00	100	11.313.370.904,00	100	33.729.932.262,00	KECAMATAN BANGKALAN
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	85%	100%	100%	22.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	66.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90%	100%	100%	2.861.122.051,00	100%	2.861.122.051,00	100%	2.861.622.051,00	100%	8.583.866.153,00	KECAMATAN BANGKALAN
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	80%	100%	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	57.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90 %	100%	100%	47.000.000,00	100%	47.000.000,00	100%	48.000.000,00	100%	142.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
							14.096.812.505,00		**14.215.992.955,00**		**14.265.992.955,00**		**42.578.798.415,00**	
													-	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN KAMAL**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	100	100	100	3.489.436.904,00	100	3.517.136.904,00	100	3.577.636.904,00	Indeks	10.584.210.712,00	KECAMATAN KAMAL
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	3.600.000,00	KECAMATAN KAMAL
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	90,00%	100,00%	13.900.000,00	100,00%	13.900.000,00	100,00%	13.900.000,00	100,00%	41.700.000,00	KECAMATAN KAMAL
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	90,00%	100,00%	5.200.000,00	100,00%	5.200.000,00	100,00%	5.200.000,00	100,00%	15.600.000,00	KECAMATAN KAMAL
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90,00%	90,00%	100,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	13.950.000,00	KECAMATAN KAMAL
							3.514.386.904,00		**3.542.086.904,00**		**3.602.586.904,00**		**10.659.060.712,00**	
													-	
7.01.	**[URUSAN] KEWILAYAHAN : KECAMATAN BURNEH**													
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	90	90	95	4.727.009.981,00	100	4.532.009.981,00	100	4.634.009.981,00	100	13.893.029.943,00	KECAMATAN BURNEH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	Persen	90,00%	90,00%	90,00 %	5.000.000,00	95,00 %	6.000.000,00	100,0 0%	6.000.000,00	100,0 0%	17.000.000,00	KECAMATAN BURNEH
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	90,00%	90,00%	90,00 %	316.280.000,00	95,00 %	257.780.000,00	100,0 0%	220.280.000,00	100,0 0%	794.340.000,00	KECAMATAN BURNEH
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	90,00%	90,00%	90,00 %	20.000.000,00	95,00 %	22.000.000,00	100,0 0%	20.000.000,00	100,0 0%	62.000.000,00	KECAMATAN BURNEH
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	90,00%	90,00%	90,00 %	30.000.000,00	95,00 %	32.000.000,00	100,0 0%	30.000.000,00	100,0 0%	92.000.000,00	KECAMATAN BURNEH
							5.098.289.981,00		**4.849.789.981,00**		**4.910.289.981,00**		**14.858.369.943,00**	
													-	
8.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8.01.	**[URUSAN] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**													
8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	75	75	80	5.054.181.863,00	85	6.220.673.781,00	90	6.336.673.781,00	90	17.611.529.425,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kebijakan yang ditindak lanjuti dalam kegiatan penguatan ideologi dan karakter kebangsaan	Persentase	0,07%	0,07%	0,07 %	45.293.150,00	0,08 %	34.000.000,00	0,09 %	34.000.000,00	0,09 %	113.293.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase	100,00 %	100,00 %	100,00%	101.330.018.000,00	100,00%	3.531.000.000,00	100,00%	3.531.000.000,00	100,00%	108.392.018.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang diberdayakan	Persentase	57,40%	57,40%	57,40 %	41.500.000,00	71,84 %	30.500.000,00	86,21 %	30.500.000,00	86,21 %	102.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindak lanjuti	Persentase	0,07%	0,07%	0,07 %	163.766.850,00	0,08 %	140.766.850,00	0,08 %	140.766.850,00	0,08 %	445.300.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial	Persentase	63,00%	63,00%	63,00 %	408.000.000,00	46,00 %	408.000.000,00	52,00 %	408.000.000,00	52,00 %	1.224.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							107.042.759.863,00		**10.364.940.631,00**		**10.480.940.631,00**		**127.888.641.125,00**	
							2.367.673.286.719,00		**2.395.593.088.673,00**		**2.452.130.628.069,00**		**7.215.397.003.461,00**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memperhatikan indikasi rencana program prioritas berikut pendanaannya sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan berjalan lebih terarah dan terukur serta mempunyai dasar hukum yang kuat maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah ini.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangkalan diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja dari tujuan, sasaran serta program yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini merupakan pengejawantahan dari upaya pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati.

Secara garis besar indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Hal ini ditunjukkan dalam pencapaian indikator tahunan dan juga pencapaian indikator yang diinginkan pada akhir periode RPJMD ini.

Indikator tersebut terdiri dari dua jenis yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

8.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang merupakan akumulasi hasil capaian program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. IKU Pemerintah Kabupaten Bangkalan terdiri dari 12 indikator kinerja antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu ukuran yang menjelaskan capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup antara lain: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, dan Standar hidup layak.
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.
3. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) yaitu ukuran tingkat kesalehan masyarakat yang diukur dari rata-rata dimensi kesalehan sosial antara lain tingkat kepedulian sosial, relasi sosial, etika, kepedulian lingkungan, kepatuhan pada negara, habituasi, kesalehan ritual, dan pengetahuan.
4. Tingkat kemiskinan, yaitu ukuran tingkat kemiskinan yang diukur dari presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
5. Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu ukuran yang menunjukkan tingkat pembangunan Desa yang didapatkan dari rata-rata nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
6. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
7. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku.
8. Gini Rasio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini

ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

9. Rata-Rata Layanan Infrastruktur yaitu persentase infrastruktur dasar ke-pu-an dalam kondisi baik/terlayani dan persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang.
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.
11. Indeks Resiko Bencana yaitu suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia.
12. Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Target			
							P-RPJMD 2018-2024	RPD 2024-2026		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	63,79	64,11	64,36	65,05	65,7	65,8 - 66,2	66,1 - 66,7	66,5 - 67,2
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,93	86,88	86,95	87,35	87,15	87,16 - 88,15	88,16 - 88,55	88,56 - 88,95
3	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	63,8	69,35	69,69	80,47	70,4	82,00- 84,99	85,00 - 86,99	87,00 - 87,99
4	Tingkat kemiskinan	Persen (%)	18,90%	20,56%	21,57%	19,44%	17,59%	17,94 - 17,60%	17,59 - 16,74%	16,73 - 15,24%
5	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6421	0,6545	0,6621	0,6879	NA	0,7104 - 0,7254	0,7179 - 0,7329	0,7254 - 0,7404
6	Tingkat pengangguran Terbuka	Indeks	5,84%	8,77%	8,07%	8,05%	6,70%	6,50 % - 5,90%	5,85% - 5,70%	5,65% - 5,60
7	Pertumbuhan ekonomi	Persen (%)	1,03%	-5,59%	-2,07%	-1,12%	4,63%	2,25% - 3,95%	3,1% - 4,8%	3,95% - 5,65%
8	Gini Rasio	Indeks	0,31	0,322	0,303	0,306	0,29	0,29 - 0,28	0,28 - 0,27	0,27 - 0,26
9	Rata-Rata Layanan Infrastruktur	Persen (%)	54,21%	54,28%	58,53%	59,18%	61,20%	62,42% - 63,43%	63,50% - 64,75%	64,80% - 65,75%
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	56,58	58,29	55,36	56,84	55,44	56,90 - 56,92	56,93 - 56,95	56,96 - 57,00
11	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,5	118,71	121	102	101,9 - 100	99,9 - 98,00	97,9 - 96,00	95,9 - 94,00
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54,38	55,28	56,51	53,74	55,85	57,01 - 58,00	58,30 - 59,00	59,20 - 61,00

8.2. Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahanDaerah

Perumusan indikator kinerja daerah (IKD) secara teknis dapat dilakukan dengan mengambil rumusan indikator tingkat *outcome* yang ditetapkan dan atau yang merupakan indikator tingkat sasaran/ *impact*. Pencapaian IKD yang telah ditetapkan merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

Selanjutnya, analisis terhadap capaian indikator kinerja daerah tersebut dapat juga digunakan sebagai data dan informasi dalam mengidentifikasi masalah dan isu strategis, melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan yang telah dibuat serta membuat tindakan korektif terhadap kendala yang dihadapi, serta menetapkan alternatif kebijakankedepan.

IKD terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari tiga aspek yaitu:

1. Aspek kesejahteraan masyarakat. Pencapaian indikator aspek ini dapat dilihat dari indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial.
2. Aspek pelayanan umum. Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek pelayanan umum tergambar dari pencapaian indikator urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar dan urusan pilihan;
3. Aspek daya saing. Aspek ini merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah yang mengharuskan daerah memperhatikan potensi, keunggulan dan kekhasan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1.1	Pertumbuhan ekonomi	1,03%	-5,59%	-2,07%	-1,12%	4,63%	2,25% - 3,95%	3,1% - 4,8%	3,95% - 5,65%	
1.2	Tingkat Inflasi	2,04%	2,37%	2,57%	6,32%	5,50 - 4,00%	4,50 - 3,00%	3,50 - 2,00%	2,50 - 1,85%	
1.3	PDRB perkapita ADHK (Ribu Rupiah)	18.786	16.573	23.100	24.998	NA	27.000 - 28.999	29.000 - 30.999	31.000 - 32.999	
1.4	PDRB ADHB (Dengan Migas/Juta Rupiah)	24.664,21	23.290,01	24.756,71	27.164,20	NA	29.000 - 30.999	31.000 - 32.999	33.000 - 34.999	
1.5	PDRB ADHK (Dengan Migas/Juta Rupiah)	18.550,80	17.514,62	17.152,78	16.959,91	NA	19.000 - 20.999	21.000 - 22.999	23.000 - 24.999	
1.6	Gini Rasio	0,31	0,322	0,303	0,306	0,29	0,29 - 0,28	0,28 - 0,27	0,27 - 0,26	
1.7	Tingkat kemiskinan	18,90%	20,56%	21,57%	19,44%	17,59%	17,94 - 17,60%	17,59 - 16,74%	16,73 - 15,24%	
1.8	Indeks Pembangungan Manusia	63,79	64,11	64,36	65,05	65,7	65,8 - 66,2	66,1 - 66,7	66,5 - 67,2	
1.9	Tingkat pengangguran Terbuka	5,84%	8,77%	8,07%	8,05%	6,70%	6,50 % - 5,90%	5,85% - 5,70%	5,65% - 5,60	
1.10	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80,75	83,92	80,95	82,78	84,32	84,45	84,55	84,65	Sekretariat Daerah (Koordinator)
1.11	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.12	Indeks Pendidikan	0,51	0,52	0,52	0,54*	0,54	0,55	0,56	0,57	Dinas Pendidikan
1.13	Indeks Kesalehan Sosial	63,8	69,35	69,69	80,47	70,4	82,00- 84,99	85,00 - 86,99	87,00 - 87,99	Badan Penelitian dan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Pengembangan Daerah
1.14	Prevalensi Stunting	NA	NA	NA	26,40%	18,00%	14,00%	12,00%	11,00%	Dinas Kesehatan
2	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	54,38	55,28	56,51	53,74	55,85	57,01 - 58,00	58,30 - 59,00	59,20 - 61,00	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur
2.2	Rata-rata kualitas infrastruktur	54,21%	54,28%	58,53%	59,18%	61,20%	62,42% - 63,43%	63,50% - 64,75%	64,80% - 65,75%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.3	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	729.813	791.935	800.000	875.000	950.000	970.000	990.000	1.000.000	
2.4	Angka Kriminalitas	3,6	4,6	3,53	3,43	3,33	3,2	3,1	2,9	
2.5	Ratio Ketergantungan	52.28	52,21	52,01	51,8	51,2	51,0	50,8	50,7	
3	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
3.1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
3.1.1	**Pendidikan**									
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	5,66	5,95	5,96	5,97	5,97 Tahun	6,01 Tahun	6,02 Tahun	6,03 Tahun	Dinas Pendidikan
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,59	11,60	11,73	11,91	12,10 Tahun	12,54 Tahun	12,98 Tahun	13,42 Tahun	Dinas Pendidikan
3.1.2	**Kesehatan**									
	Angka Harapan Hidup	71,34 tahun	70,18 tahun	70,22 tahun	70,54 tahun	71,89 tahun	71,00 tahun	71,33 tahun	71,50 tahun	Dinas Kesehatan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Akreditasi Rumah sakit mengacu Standarisasi Nasional RS (SNARS)	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD
3.1.3	**Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**									
	Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik	62,26%	61,42%	62,80%	63,35%	63,75%	64,00%	64.25%	64,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	89,5%	90%	90,5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	32,37%	35,73%	36,04%	36,18%	39,84%	39,84%	41,49%	43,34%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat atau Perda yang terselesaikan	NA	NA	NA	2.17%	NA	2.22%	2.27%	2.32%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Indeks Resiko Bencana	129,50	118,71	121,00	102,00	101,9 - 100	99,9 - 98,00	97,9 - 96,00	95,9 - 94,00	Badan Penanggulangan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Bencana Daerah
	Indeks Ketahanan Daerah	0,40	0,51	0,56	0,58**	NA	0,59 - 0,60	0,61- 0,62	0,63 - 0,64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.1.6	**Sosial**									
	Persentase PPKS yang ditangani	NA	NA	1,26%	6,22%	4,75%	6,22%	7,69%	9,16%	Dinas Sosial
	Jumlah Penduduk Miskin	186.110	204.000	215.560	196.011	188.150	181.141	176.450	171.408	Dinas Sosial
	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	NA	NA	NA	NA	14,00%	14,00%	19,00%	24,00%	Dinas Sosial
3.2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
3.2.1	**Tenaga Kerja**									
	Persentase Penurunan Jumlah Pengangguran	-2,96%	-39,02%	2,48%	2,98%	3,48%	3,98%	4,48%	4,98%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,93	86,88	86,95	87,35	87,15	87,16 - 88,15	88,16 - 88,55	88,56 - 88,95	Dinas KBPPPA
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,71	58,54	60,03	62,75	65,8	65	68	70	Dinas KBPPPA
3.2.3	**Pangan**									

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Ketahanan Pangan	71,12	74,21	74,04	70,59	74,25	75	79	83	Dinas Ketahanan Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,52	89,71	92,04	77,96	79,5	80	82	83	Dinas Ketahanan Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	76,1	70,3	73,4	79,2	84,2	79,4	80,1	81,2	Dinas Ketahanan Pangan
3.2.4	**Lingkungan Hidup**									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,58	58,29	55,36	56,84	55,44	56,90 - 56,92	56,93 - 56,95	56,96 - 57,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	46	46	46	50	50,32	50,42	50,52	50,62	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	77	77,58	77,62	77,57	72,7	72,8	72,9	73	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeka Kualitas Tutupan Lahan	30,2	30,2	30,26	30,22	32,33	32,43	32,53	32,63	Dinas Lingkungan Hidup
3.2.5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	68,00%	63,30%	60,10%	88,60%	90,00%	91,50%	92,00%	92,50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.2.6	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
	Indeks Desa Membangun (IDG)	0,6421	0,6545	0,6621	0,6879	NA	0,7104 - 0,7254	0,7179 - 0,7329	0,7254 - 0,7404	Dinas Pemberdayaan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Masyarakat Desa
	Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	5,13	6,96	9,89	20,15	21,98	24,18	26,37	29,3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.2.7	**Pengendalian Penduduk dan KB**									
	Laju pertumbuhan penduduk	0,91	1,54	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	Dinas KBPPPA
	Total Fertility Rate (TFR)	2,18*	2,16*	2,14	2,12	2,24	2,23	2,22	2,21	Dinas KBPPPA
3.2.8	**Perhubungan**									
	Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	68,00%	60,00%	77,00%	78,00%	80,00%	83.43%	86.53%	88,07%	Dinas Perhubungan
3.2.9	**Komunikasi dan Informatika**									
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,3	2,6	1,62	1,89	2,00 - 2,20	2,20 - 2,35	2,35 - 2,55	2,55 - 2,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.2.10	**Koperasi dan Usaha Mikro**									
	Pertumbuhan omset Usaha Mikro dan Koperasi	1,43	0,02	-24,67	4.63	0,07	0,1	0,03	0,16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.2.11	**Penanaman Modal**									
	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	318%	-74,64%	17,18%	391,99%	4,41%	5,00%	5,50%	6,00%	Dinas Penanaman Modal dan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nilai Investasi daerah PMDN, PMA	Rp 1,294,152,727,502	Rp 328,239,262,846	Rp. 384.628.310.040,-	Rp 1.892.318.464.434,00	Rp 331.654.000.000,00	Rp 356.693.877.000,00	Rp 383.695.603.500,00	Rp 412.853.469.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.2.12	**Kepemudaan dan Olahraga**									
	Indeks Pembangunan Pemuda	NA	NA	NA	NA	NA	44,64	47,65	50,60	Dinas Pemuda dan Olahraga
3.2.13	**Kebudayaan**									
	Persentase seni/benda cagar budaya yang dilestarikan	19%	21,56%	24,88%	54,30%	54,30%	60,58%	70,86%	71,64%	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.2.13	**Perpustakaan**									
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	6,03	5,8	6,4	6,1	6,8	7	7,4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.2.14	**Kearsipan**									
	Kualitas Pengelolaan Arsip	0%	0%	25%	30%	40%	50%	55%	60%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.2.15	**Statistik**									

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	NA	NA	NA	65,38%	NA	70%	75%	80%	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.3	**URUSAN PILIHAN**									
3.2.16	**Persandian**									
	Indeks keamanan informasi pemerintah daerah	NA	NA	25	31	35	22%	44%	88%	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.3.1.	**Pariwisata**									
	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	3,85	-88,33	-16,18	1267,08	13,88	14,92	15,35	16,68	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.3.2.	**Pertanian (arti luas)**									
	Pertumbuhan ekonomi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,86	1,41	-2,05	NA	NA	1,9	2,4	2,75	
	Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	NA	NA	NA	0,40	NA	0,40	0,52	0,6	Dinas Pertanian TPHP
	Peningkatan Produktifitas Sektor Peternakan (Besar, Kecil, dan Unggas)	NA	1,51	1,22	0,93	NA	1,00%	1,02%	1,03%	Dinas Peternakan
3.3.3	**Perdagangan**									
	Pertumbuhan ekonomi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,7	-7,93	8,01	NA		8,1	8,25	8,5	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	1,78	-13,74	12,31	1,00	1,02	1,03	1,04	1,06	Dinas Perdagangan
3.3.4.	**Perindustrian**									
	Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	3,64	-9,69	2,66	9,86	NA	1,65	1,8	2,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.3.5	**Kelautan dan Perikanan**									
	Peningkatan Produktifitas Sektor Perikanan	4,7	5,83	NA	5,21	5,94	5,10	5,11	5,12	Dinas Perikanan
3.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
3.4.6	**Sekretariat DPRD**									
	Indeks kepuasan masyarakat (terhadap layanan Sekretariat DPRD)	NA	NA	NA	92,12	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
3.4.7	**Sekretariat Daerah**									
	Nilai SAKIP	(B) 61,25	(B) 61,96	(B) 61,18	(B) 63,01	(BB) 70.23	(BB) 70.23	(BB) 71.23	(BB) 72.25	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
	Status Kinerja LPPD;	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)*	Sangat Tinggi (ST)*	Sangat Tinggi (ST)*	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sekretariat Daerah (Bag. Adpum & Otoda)
3.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
3.5.1	**Perencanaan Pembangunan**									
	Indeks Kualitas Perencanaan	NA	NA	NA	83,36%	NA	85,00%	87,00%	89,00%	Badan Perencanaan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Pembangunan Daerah
3.5.2	**Keuangan**									
	Pertumbuhan PAD	11,2%	10,9%	11,9%	12,7%	13,3%	14,4%	15,5%	16,7%	Badan Pendapatan Daerah
	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	262.258.214.631,49	233.177.792.497,49	271.656.642.591,09	281.878.736.612,80	290.908.083.254	318.692.927.219	347.737.421.600	382.350.106.169	Badan Pendapatan Daerah
3.5.3	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**									
	Indeks Profesionalitas ASN	54,52	51,03	52,85	55,03	60	62	64	66	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur
3.5.4	**Penelitian dan Pengembangan**									
	Indeks Inovasi Daerah	NA	NA	57,46	52,68	53,00	54,00	55,00	56,00	Badan Penelitian dan Pengembangan
3.6	**UNSUR PENGAWAS**									
	Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
3.6.1	**Pengawasan**									
3.7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	Indeks kepuasan masyarakat (terhadap layanan kecamatan)	N.A.	81,9	86,15	88,77	90,5	91,68	91,85	92,00	18 Kecamatan
3.8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**									
3.8.1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Tahun				Target				Perangkat Daerah
						P-RPJMD 2018-2023	RPD 2024-2026			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rata-rata Persentase Pencegahan dan Penanganan Konflik SARA/politik/bela Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

* Data diolah, data publish belum tersedia

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah periode keempat dari RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 Kabupaten Bangkalan. Penyusunan dokumen didasarkan pada regulasi yang mengharuskan daerah dengan masa jabatan Bupati berakhir pada tahun 2023 untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan hingga Pilkada serentak diselenggarakan tahun 2024. Adapun pada penyusunannya tidak terlepas dari dokumen RPJPD Daerah, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional, hasil evaluasi kinerja pembangunaan daerah, isu pembangunan pada tingkat nasional dan tingkat daerah, serta dokumen perencanaan lainnya meliputi RTRW dan KLHS Kabupaten Bangkalan, RPJPD Provinsi, serta RTRW Provinsi. Telaah terhadap dokumen lainnya dilakukan agar proses perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bangkalan sesuai dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah diatasnya, baik perencanaan tingkat Provinsi dan Nasional serta perencanaan daerah sekitarnya.

Prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan selain diselaraskan dengan prioritas pembangunan diatasnya, juga di dasarkan atas pemetaan permasalahan di daerah dan isu strategis pembangunan yang ada baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus selalu berusaha untuk konsisten dan memberikan perhatian sepenuhnya agar tujuan dan sasaran yang sudah menjadi program unggulan tersebut dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomis demi kepentingan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 selanjutnya dapat menjadi dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah dan akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai perdoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bangkalan, 31 Maret 2023

PJ. BUPATI BANGKALAN

Drs. MOHNI, MM